MAJALAH BERITA MINGGUAN

NOMOR 25/TAHUN II/6 MEI 1995

MEMBELA BINTANG, LBH DIDEMO

SINAR

PENYERBUAN KE KBRI BELANDA

INVESTIGASI DI MARKAS RMS

PAK NAS BICARA SOAL KURSI ABRI DI DPR

50 TAHUN INDONESIA MERDEKA

ISSN 0854-428X

Rp 4.250,00

Christian Dior

Heure Sublime®

.Steel and 18K solid gold
.Curved sapphire glass
.30 metres water-resistant
.ETA quartz movement
.Swiss made

Showroom & Service Centre: P.T. HERINDO INTERBUANA WATCH, Jln. Hayam Wuruk No. 3H, Jakarta 10120 Indonesia Tel: 3455309 Fax: 3802010.
INTERNATIONAL ARLOJI, Tunjungan Plaza, Lantai Dasar No. UG-56 Surabaya Tel: 510295

SINAR

BERITA MINGGUAN PEMBANGUNAN

Penerbit:
PT Cahaya Rumpunpermata

SIUPP:
Nomor: 291/SK/MENPEN/SIUPP/C.1/1993
Tanggal 15 April 1993

ISSN:
0854-428X

Pj. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Sjam Alamsjah

Wakil Pemimpin Umum:
Wikrama I. Abidin

Pemimpin Perusahaan:
Setiawan Winoto

Wakil Pemimpin Perusahaan:
I. Hadi Tjahjono

Redaktur Pelaksana:
Suwachman

Wakil Redpel/Koordinator Peliputan:
Adyan Soeseno

Redaktur:
Agung Mattauch, Arif Budiman, Budi Winarno, Firmus Madhu Dhengi, Gunawan Harmoko, Herul Fathony, Khairil Muksim, Mochamad Nuryadi, Nazir Amin, Suhardiyoto, Sulaeman Sakib, Yohanes Sumadya Widada

Peliputan:
Agung Puspito, Asep Sambodja, Diyan Srikandini, Djahar Muzakir, Hendy Susanto, Irvan Sjafari, Leny Amril, M. Iskandar Zulkarnain, Titin Rosmasari, Totok Suryanto, Victoria G.V. Sidjabat, Yudi Faisal, Ahmady Meuraxa (Medan), Heroe Poerwadi (Yogyakarta), Moh. Kaiyis (Surabaya), Adang Gumilar (Bandung), Hasbullah Thabrani (San Francisco), Irwan Djamaluddin (Kyoto)

Redaksi Bahasa:
Erwin Yusbar Salim (Kepala), Nuradji, Syarif Oppusunggu

Foto:
Krus Haryanto, Ch. Erwin Hadi

Desain Visual:
Gesigoran (Kepala), Heri Tripurwanto, Iwan Sulwan

Produksi:
Slamet Ryadhi Pr. (Kepala), Kosasih, Muchtar, Soemadi

Sekretaris Redaksi:
Adriani

Dokumentasi dan Perpustakaan:
Siti Najah, Yul Nely Anri

Periset Foto:
Rudi Irwanto

Iklan:
Joy Maukar (Kepala), Neneng S. Rahma

Promosi dan Sirkulasi:
Pratiknyo (Koordinator)
E. Waroby, Indra Tata, Iis Bahar

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Aswin Jusar (Nonaktif)

Redaksi dan Tata Usaha:
Jln. Batu Ceper No. 57A
Jakarta 10120

Telepon:
375067 (Hunting)

Fax:
3809502

Bank:
BNI 1946, Cabang Jakarta Pusat
Rekening No: 300167.001

Giro Pos:
Reg. Giro No. A.13643

Percetakan:
PT DIAN RAKYAT
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Mempersiapkan Logo Baru

PEMBACA setia *SINAR* tentu sudah akrab dengan logo majalah berita yang sebentar lagi berusia dua tahun ini. Logo itu -- dirancang oleh Tatang Ramadhan Bouqi, pakar desain visual lulusan ITB -- memang tampak gagah. Bahkan, hurufnya pun sengaja dipilih jenis yang *trendy* di awal '90-an: tipe huruf miring. Sebab, sebagai majalah baru, logo *SINAR* mesti gampang diingat dan enak dilihat.

Pembaca, dinamika pasar dan selera pembaca ternyata berubah pesat. Apa yang dulu dianggap pas untuk *SINAR*, belum tentu cocok sekarang dan di masa mendatang. Apalagi kini, tiras kami sudah jauh lebih besar ketimbang yang diproyeksikan. Alhamdulillah, tiras yang semula ditargetkan lima tahun dapat lebih cepat dijangkau.

YUL ADRIANSYAH

TUJUH PILIHAN : Agar lebih dekat dengan pembaca.

Itu artinya, pembaca kami kian banyak dan beragam. Tuntutan selera dan kualitasnya pun dengan sendirinya berubah. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya perubahan selera dan kualitas yang diinginkan pembaca, bagi kami juga tidak mudah.

Namun, dari hasil pengamatan lapangan dan diskusi bersama beberapa agen besar, serta pakar periklanan, kami menyimpulkan bahwa logo yang diinginkan kira-kira begini: enak dilihat dan khas.

Maka, tugas merancang logo baru pun kami bebankan kepada Tim Desain Visual *SINAR*. Logo *SINAR* sekarang, kata **Gesigoran**, Kepala Desain Visual, "Tak perlu lagi *ganteng dewe*, mengalahkan semua elemen visual di kulit muka."

Dibantu oleh **Iwan Sulwan** dan **Heri Tripurwanto**, staf Desain Visual, Gesi menyajikan tujuh pilihan logo, yang menurut lulusan Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI) ASRI, Yogyakarta, ini tidak lagi mau hebat sendiri. Mudah-mudahan dengan logo baru nanti, *SINAR* kian dekat memenuhi selera dan kebutuhan pembacanya. ■

KRUS HARYANTO
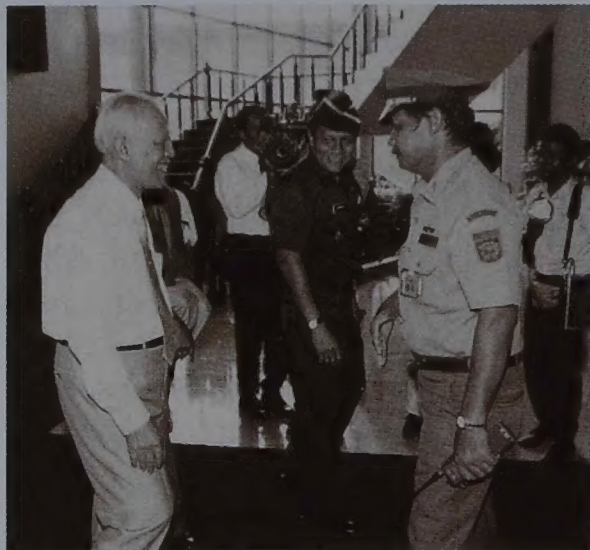
10 Rencana pengurangan jumlah anggota ABRI di DPR kembali ramai diperbincangkan. Akankan proses demokratisasi lebih terwujud? Apa pendapat dari Sesepuh ABRI Jenderal (Purn.) AH Nasution? **LAPUT**

YUL ADRIANSYAH

31 Bintang sinetron *Si Doel Anak Sekolahan*, Maudy "Zaenab" Koesnadi dan Cornelia "Sarah" Agatha kini sibuk menerima tawaran main sinetron. Siapa yang bakal dipilih sebagai pacar Si Doel? **SKETSA**

YUL ADRIANSYAH

23 Gara-gara membela Sri Bintang, YLBHI didemo oleh beberapa kelompok massa. Lembaga itu dianggap dekat dengan LSM di luar negeri, sehingga nasionalismenya diragukan. Benarkah tuduhan itu? **HUKUM**

IPPHOS

19 Ribuan orang anggota RMS di Den Haag mengamuk seusai memperingati ulang tahun ke-45 kelompok mereka. Mereka juga menyerbu dan melakukan perusakan di belakang Kantor KBRI. Mengapa mereka masih dendam terhadap Pemerintah Indonesia? Adakah hubungannya dengan demo di Dresden? Simak investigasi *SINAR* langsung dari Markas RMS di Den Haag, dan wawancara dengan Presiden RMS, F.L.J. Tutuhatunewa. **LAPSUS**

Kulit muka: Tim Desain *SINAR*
Foto: ERWIN HADI

Tanggapan Ramalan Suksesi Ala Permadi

Agus Miftach, selaku pengamat politik, pernah menulis sebuah kolom berjudul "Ramalan Suksesi Ala Permadi" dalam *SINAR* No. 20/Tahun II/2 April 1995. Dalam tulisannya itu ada kalimat, *Raja Pandita Jayabaya bersalah dari zaman kebesaran Raja Sailendra di era Mataram lama.*

Saya menafsirkan, Raja Jayabaya berasal atau keturunan dari Wangsa Sailendra dan hidup di era Mataram lama (kuna). Sedangkan nama raja-raja Mataram kuna menurut Prasasti Mantyasih -- yakni prasasti yang memuat daftar raja-raja Mataram kuna -- seingat saya secara hierarki tidak pernah ada seorang raja bernama Jayabaya.

Adapun Raja Jayabaya (Sri Maharaja Sri Warmmeswara Madhusudanawataranindita Suhrtsingha Parakrama Digjayottunggadewanada Jayabhayalanchana) -- berdasarkan prasasti yang pernah dikeluarkan Raja Jayabaya sendiri, yakni Prasasti Hantang (1057 C), Prasasti Talan (1058 C), dan Prasasti dari Desa Jepun (1066 C) -- merupakan nama raja dari kerajaan Pangjalu di Daha, ibu kota Kediri sekarang.

Memang, secara tidak langsung, raja-raja tersebut berasal dari satu pohon mengingat adanya perpindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa TImur. Tapi secara hierarki, Raja Jayabaya, menurut saya, tidak dapat dikatakan sebagai raja pinandita dari Kerajaan Mataram kuna.

Lilik S.
Tuwowo I/21
Surabaya 60134

Menanggapi Polisi Bergaya Preman

Menanggapi Surat Pembaca, *SINAR* edisi 21/Tahun II/ 8 Maret 1995, berjudul "Oknum Polisi Bergaya Preman", saya sangat prihatin dan menyayangkan kejadian itu jika faktanya memang demikian. Apalagi, terjadi pada saat pemberantasan preman sedang giat dilaksanakan di seluruh tanah air, yang didukung segenap lapisan masyarakat.

Namun, melalui surat ini, saya merasa perlu memberikan keterangan tentang apa yang saya lihat dan dengar, tanpa kepentingan apa pun, dari Pak Polisi dan pengecer, ihwal kejadian itu.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Seorang polisi berpangkat sersan satu berinisial "S" tiba dengan motor dinas. Setelah mengobrol sebentar dengan pengecer koran, "S" mengambil dua eksemplar koran *Jakarta Post* dari tumpukan koran bekas yang sudah kedaluarsa, dan menurut pengecer akan dijual kiloan.

Sang pengecer kemudian meminta bayaran dengan cara bergurau kepada "S" karena kelihatannya mereka adalah sahabat lama. Pak Polisi tadi menyatakan akan membawa koran yang diambilnya terlebih dahulu ke kantornya yang berjarak kurang lebih 100 meter. "S" pun berjanji akan kembali setelah menunjukkan koran itu kepada komandannya, dan sekaligus membayar koran yang dibawanya.

Jadi, tidak benar apabila Pak Polisi itu berniat untuk tidak membayar. Selain itu, koran yang diambilnya adalah koran bekas, bukan koran baru. Menurut saya, Pak Polisi itu adalah bekas penjaja koran, sehingga dia tahu dan dapat merasakan jika hal seperti itu terjadi pada dirinya.

Lasrius
(Alamat ada di Redaksi)

Imbauan untuk Membantu Chechnya

Menteri Luar Negeri Chechnya, Chamseddin Loussif, adalah salah seorang pembicara yang mendapat sambutan hangat pada Konferensi Rakyat Arab dan Islam di Khartoum, Sudan, 30 Maret-2 April 1995. Dengan bahasa Arab yang fasih, Menlu Chamseddin menguraikan perjuangan rakyatnya melawan agresi Rusia demi mempertahankan tanah air dan agama Islam.

Suatu ketika ada seorang pemimpin Islam bertanya kepada Presiden Chechnya, Dzokhar Dudayev, ihwal keberanian mereka melawan raksasa dunia, Rusia. Presiden Chechnya menjawab dengan mengutip firman Allah, Surat 105, Surat Al Fiil (Gajah) tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin Abrahah, yang ingin meruntuhkan kabah di Mekkah. Pasukan bergajah itu diazab oleh Allah dengan cara Allah mengirimkan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa. Hadirin terharu mendengar pidato Menlu Chechnya itu.

Konferensi tersebut dihadiri oleh 80 negara dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Atas usul Indonesia, konferensi akan mengirimkan utusan ke Chechnya dan ke Moskow. Ke Chechnya untuk melihat dari dekat keadaan umat Islam Chechnya, sedangkan ke Moskow untuk menyampaikan pesan agar Rusia segera menghentikan pembantaian umat Islam di Chechnya.

Dalam pembicaraan khusus dengan saya, Menlu Chamseddin menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada negara-negara Islam yang membantu Chechnya. Yang membantu justru adalah negara-negara non-Islam. Rupanya negara-negara Islam takut kepada Rusia, kata Menlu Chechnya. Menurutnya, Chechnya tidak akan pernah menyerah kepada Rusia dan akan berjuang terus sampai agresor Rusia terusir dari bumi Chechnya. Menlu Chamseddin sangat mengharapkan bantuan keuangan dari negara-negara Islam, termasuk Indonesia, yang akan dipergunakan membeli senjata dan keperluan kemanusiaan.

Kalau ada para dermawan Indonesia dan negara-negara lain yang dengan ikhlas bersedia membantu para pejuang Chechnya, maka Komite Solidaritas Islam akan menyalurkannya dan insya Allah akan sampai kepada para pejuang Chechnya tersebut.

Lukman Harun
Ketua Komite Solidaritas Islam
Jln. Sukabumi 11
Jakarta 10310

Tanggapan Soal *Republika*

Sehubungan dengan adanya protes terhadap pemberitaan *SINAR* (15-22 April 1995) oleh K.H. Cholil Ridwan, H. Husein Umar, K.H. Abd. Rasjid A.S., H. Ahmad Sumargono, S.E., izinkanlah saya sebagai koordinator Pemberantasan Aliran Sesat Ingkar Sunah Indonesia yang beberapa waktu lalu berhasil mengupayakan pelarangan aliran tersebut oleh Jaksa Agung memberikan tanggapan seperlunya.

Sebagai peserta aktif dalam dialog dengan para penanggung jawab harian *Republika*, saya ikut berbicara menyesalkan harian tersebut sebagai milik umat dalam penerbitan 31 Maret 1995 menurunkan sejumlah tanggapan sepanjang dua halaman penuh memuji-muji pemikiran sekuler almarhum Ahmad Wahib. Alangkah ironisnya pemikiran sekuler Ahmad diiringi caci maki kepada Allah, Alquran, rasul, dan Islam oleh Ihsan Ali Fauzi disebut sebagai "Khitah" peletak dasar landasan pembaruan Islam di tanah air.

Sepengetahuan saya, seluruh pembicaraan dalam dialog tersebut mengesankan bahwa *Republika* adalah milik mereka yang perlu dipelihara dan dipertahankan bahkan terus dikembangkan sebagai milik umat. Sebagai milik umat, adalah menjadi hak umat menganjurkan kepada penanggung jawab harian tersebut membersihkan virus-virus yang sangat berbahaya, tidak saja merusak citra *Republika* di mata umat, tetapi juga justru menjadikan *Republika* terompet segelintir kaum sekuler yang berlindung di balik pembaruan pemikiran Islam.

Mengingat *Republika* dibaca oleh ratusan ribu umat, menurut saya, adalah sangat terpuji jika *SINAR* merasa terpanggil menurunkan liputannya tentang dialog, justru demi menyelamatkan sekitar 160 juta umat Islam sesuai fatwa almarhum Ahmad Wahib oleh para penerusnya, di antaranya Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, Djohan Effendi, dan Ismed Natsir, termasuk penerbit LP3ES.

Berbicara mengenai *of the record*, memang benar diucapkan oleh K.H. Cholil Ridwan. Tetapi pengertian *of the record* diberlakukan hanya untuk pernyataan yang ditujukan kepada penanggung jawab *Republika*. Menurut saya, sesuai dengan kode etik jurnalistik, majalah *SINAR* sedikit pun tidak menyinggung adanya pernyataan yang dinyatakan sebagai *of the record*, kecuali liputan jalannya dialog yang memang terasa keras.

Semoga dengan tanggapan ini, sebagai milik umat, *Republika* tetap dan terus jaya. Sebaliknya, terhadap mereka yang bertanggung jawab terpicunya keberangan umat harus secara sportif mengundurkan diri sebagai konsekuensi logis dari berkalikalinya penanggung jawab *Republika* meminta maaf atas terjadinya kejadian tersebut.

M. Amin Djamaluddin
Jakarta Pusat

Meluruskan Soal Bakolak

Dalam rubrik Kolom *SINAR*, 8 April 1995, halaman 58, alinea terakhir, terdapat kalimat tentang penanggulangan narkotik, yang mengesankan seakan-akan Bakolak Inpres (Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden) 6/1971 -- badan yang bertugas, antara lain, mengoordinasi penanganan masalah narkotik -- dengan sengaja meredam kasus-kasus narkotik.

Kesan tersebut perlu dikoreksi karena tidak ada maksud saya (sebagai narasumber untuk Kolom tersebut) untuk menyalahkan Bakolak. Yang hendak saya katakan adalah bahwa kita telah kehilangan momentum ketika kasus tewasnya Aldi di rumah Ria Irawan beberapa waktu yang lalu, yang diindikasikan mengandung unsur penyalahgunaan narkotik (Ecstasy) dan tiba-tiba kita dikejutkan lagi dengan kasus tewasnya Nike Ardilla yang diduga juga mengandung unsur Ecstasy yang diikuti dengan pemberitaan besar-besaran di media massa.

Maksudnya, mumpung masih kecil dan terbatas, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat dan tidak didramatisasi di media massa. Dalam hubungan ini, saya mohon maaf kepada Bakolak. Kekeliruan telah terjadi karena artikel dalam kolom tersebut merupakan ringkasan dari wawancara antara wartawan *SINAR* dengan saya (jadi bukan tulisan asli).

Nampaknya wawancara itu terlalu panjang untuk disajikan seutuhnya sehingga ada bagian-bagian yang terlewati dan akhirnya menimbulkan kesan yang keliru. Kepada *SINAR*, saya pun mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang jelas saya sampaikan dalam wawancara tersebut.

Sarlito W. Sarwono
Kompleks UI No. 6
Ciputat 15419

CATATAN REDAKSI: *Kami juga mohon maaf apabila tulisan tersebut telah memberikan kesan yang keliru tentang tugas dan peran Bakolak, di mana setelah kami mendapat petunjuk dari Bakolak bahwa usaha pemerintah dalam Koordinasi Bakolak Inpres No. 6 Tahun 1971 sejak tahun 1971, Presiden sendiri telah menaruh perhatian hingga mengeluarkan instruksi agar secara serius komprehensif dan holistik tanpa mendramatisasi masalah tidak untuk tujuan lain dan popularitas murahan.*

Karena itu, muncul Komando Opsi Kamtibmas secara terpadu sejak Operasi Gurita I dan Operasi Cobra dan penegakkan hukum lain (BC, Kejagung, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya), hingga menghasilkan situasi sekarang, yaitu jumlah penyalah guna narkotik hanya 0,062% dari jumlah penduduk dan dapat menekan laju pertambahan korban dengan melaksanakan operasi pada lokasi yang diperkirakan tempat penjualan narkotik dan psikotropika -- sebagaimana kejadian lain sejak manusia ada secara historis selalu ada, antara lain, kasus-kasus yang membawa maut yang masih dapat dihitung dengan jari dibandingkan dengan waktu sebelum adanya Inpres No. 6 Tahun 1971.

Butuh Data "Penawar" Ginjal

Setelah membaca surat pembaca dalam *SINAR*, No. 23/Tahun II/22 April 1995, mengenai seorang ibu yang bersedia merelakan salah satu ginjalnya kepada yang memerlukan, dengan ini kami sampaikan bahwa keluarga kami sedang memer-

lukan ginjal untuk pencangkokan. Kami berterima kasih jika mendapat informasi dari ibu tersebut antara lain menyangkut umur, pekerjaan, syarat-syarat lain yang diminta si ibu, dan alamat ibu sendiri.

Atas kesediaan redaksi memberikan informasi perihal ibu tersebut, ataupun menghubungkan kami dengan ibu itu, kami kira itu sangat membantu -- bila sesuai untuk menanggulangi penyakit ginjal keluarga kami. Semoga kita diberkati oleh-Nya.

H.M.T L. Tobing
(Alamat ada di Redaksi)

CATATAN REDAKSI: *Surat Anda segera kami teruskan kepada ibu yang bersangkutan.*

Lagi, "Tawaran" sebuah Ginjal

Saya berumur 37 tahun, mempunyai seorang istri dan 5 orang anak, dan yang tertua sedang menempuh pendidikan di sebuah SMA. Mungkin pembaca bisa membayangkan bagaimana saya bisa menghidupi mereka tanpa bekerja.

Meski begitu, di sini saya hanya membutuhkan bantuan modal sebesar Rp 10 juta (sepuluh juta rupiah). Dalam surat ini saya tidak bisa menceritakan jenis usaha yang akan saya lakukan. Saya akan ceritakan jenis usaha itu hanya kepada pembaca yang mau membantu saya. Sebagai ucapan terima kasih kepada yang mau membantu, saya ikhlaskan sebuah ginjal saya.

Nama dan alamat di Redaksi

Tanggapan Maruli Simorangkir

Dalam rubrik Dialog dan Hukum, *SINAR* No. 23/Tahun II/22 April 1995, mengenai "pertikaian" antara Ruhut Sitompul dan Amir Syamsuddin, nama saya disebut-sebut sebagai advokat yang pernah "dikerjai" Amir dalam kasus Bapindo. Sayang, isi berita menyangkut saya itu telah kehilangan esensinya sehingga seolah-olah yang saya permasalahkan hanyalah tentang direbutnya klien saya. Tak heran jika Amir pun membantah ihwal perebutan klien karena kepada saya telah ditawarkan untuk bersama-sama membela Subekti Ismaun, tetapi saya menolaknya. Karena itu, saya perlu memberikan tanggapan agar esensi permasalahan tersebut diketahui masyarakat.

Sekitar Juni 1994, sepulang dari luar negeri, saya membaca di media, Amir mendampingi Subekti di pengadilan ketika memberikan kesaksian. Karena itu, saya hubungi Amir, untuk menanyakan apakah ia telah ditunjuk Subekti membela perkaranya, sambil memberitahukan, saya telah memperoleh kuasa dari Subekti, dan belum pernah dicabut.

Amir mengatakan akan mengembalikan kuasa yang diperolehnya kepada Subek-

CERMIN

FUSAD T. ABIDIN
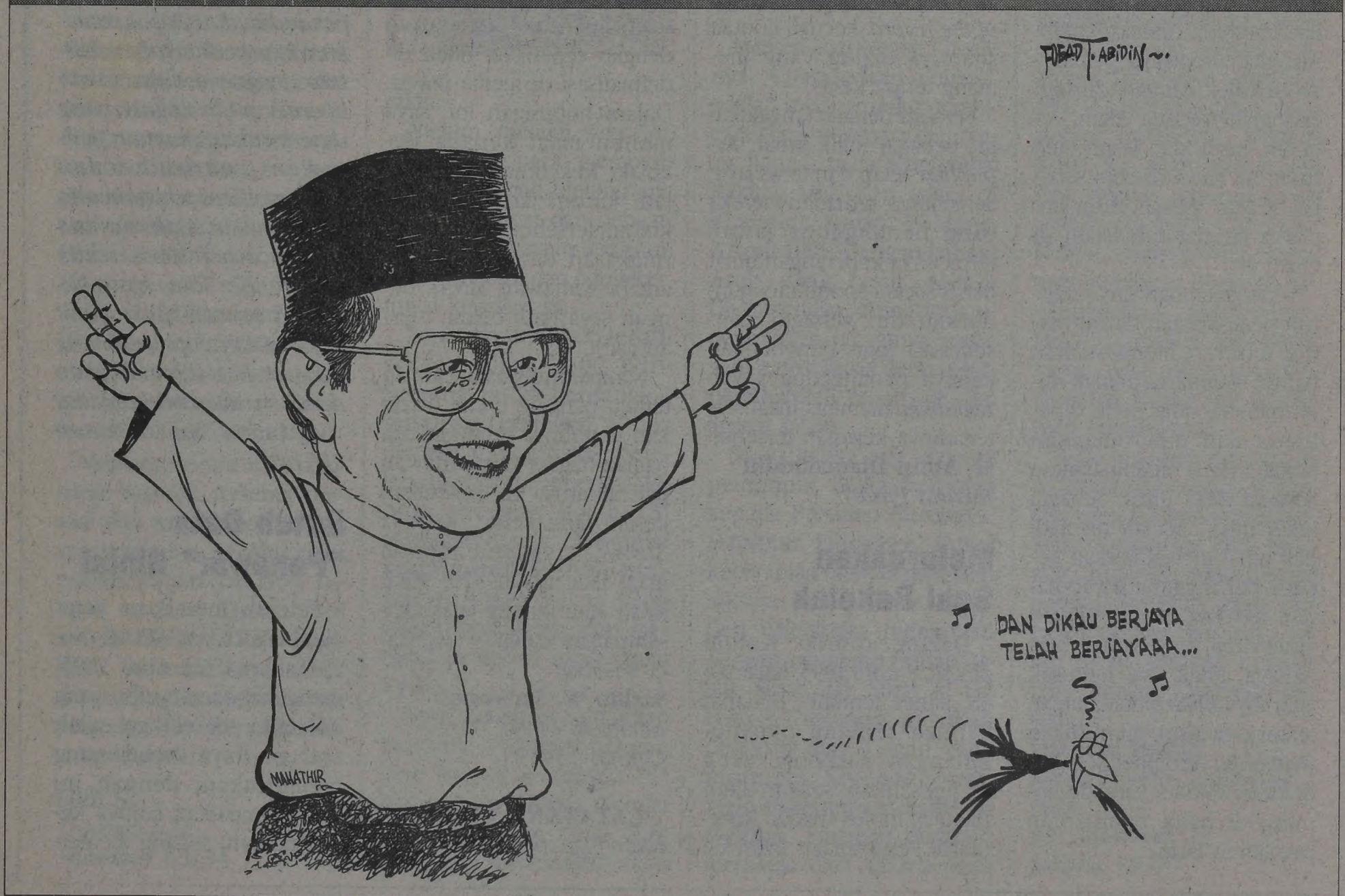
ti, katanya karena Subekti "berbohong" kepadanya, dan karena Amir "tidak tahu" Subekti pernah memberikan kuasa kepada saya. Saya melarangnya berbuat demikian, dan bahkan menganjurkannya tetap menangani kasus Subekti, karena saya pun sudah tidak berminat bertindak menjadi kuasa klien yang plin-plan seperti itu, dan juga karena kesibukan saya dalam perkara-perkara lain. Sehingga, berpindahnya Subekti kepada Amir, agar untuk sementara menghentikan dulu pelayanan hukum kepada Subekti satu dan lain untuk menyadarkan klien tentang etika berpengacara. Dan yang juga tak kalah penting adalah rasa kesetiakawanan korps advokat, sebagaimana diamanatkan Mukadimah Anggara Dasar dan Kode Etik Ikadin, karena bukankah Amir harus merasa tercubit kalau saya, rekannya tercubit.

Di luar dugaan, Amir menolak imbauan saya untuk menghentikan sementara pelayanan hukum kepada Subekti dengan alasan-alasan yang penalarannya sulit saya terima, tetapi menawarkan kepada saya untuk bersama-sama mendampingi Subekti. Tawaran Amir itu dengan tegas saya tolak, dan secara tegas pula saya menyesalkan sikap Amir yang saya anggap tidak mempunyai rasa kesetiakawanan terhadap sesama advokat.

Akhirnya, keluarga Subekti Ismaun telah menemui saya untuk minta maaf atas kesalahannya. Dan itu sudah cukup bagi saya, sehingga permintaan maaf itu saya terima. Sedangkan uang honorarium yang ingin diberikan kepada saya telah saya tolak karena itu bukan tujuan saya.

Maruli Simorangkir, S.H.
Jln. Lombok 44
Jakarta 10350

Penasihat Konglomerat

Menurut saya, menjadi penasihat konglomerat dan praktisi bisnis bagi Dr. Sjahrir adalah sah-sah saja, dan tidak mengganggu independensi cendekiawan, malah sangat bermanfaat baginya dalam mencari hubungan ekonomi mikro dan makro dalam analisisnya bagi dunia usaha.

Tugas seorang cendekiawan pada akhirnya menyejahterakan manusia. Hal ini yang dilakukan Sjahrir dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap bangsa dan negaranya. Menjadi praktisi bisnis, dan penasihat konglomerat adalah dalam rangka menambah wawasan dan ilmunya, selain menguasai ilmu teoretis, dan menguasai praktik (dipelajari dan diamalkan) sehingga pengalaman yang didapat selama menjadi praktisi menjadi bahan renungan, hingga menemukan teori baru yang dapat dikembangkan untuk kepentingan orang banyak.

Drs. Erman Anom
Humas Universitas
Indonusa Esa Unggul
Jakarta

Daftar Tokoh Kaliber Dunia

Saya mempunyai daftar manusia super dan pengaruh mereka cukup kuat, yang tersusun secara kronologis dan berjumlah seratus orang. Selain itu, kehebatan mereka telah teruji dan pemikiran mereka sampai sekarang masih dipakai.

Jika ingin memiliki daftar nama mereka, Anda diharapkan mengirimkan uang sebesar Rp 2.000,00 sebagai biaya pengganti untuk fotokopi dan ongkos kirim.

Hamidi
Jln. Padat Karya 005/02
Singkawang 79115
Kalbar

Surat Terbuka buat Menaker

Yang bertanda tangan di bawah ini, H. Aunollah Abdul Karim, umur 53 tahun, pemilik paspor No. D. 649045, adalah salah seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai sopir di Dammam, Arab Saudi -- yang dikirim oleh PT Roda Antar Nusa, Jln. Mekarsari Raya No. 5, Cimanggis, Bogor. Saya tiba di Dammam pada 21 November 1993 dengan akhir kontrak 21 November 1995. Tahun ini, insya Allah, kami telah diizinkan untuk berhaji, sesuai dengan perjanjian kerja individu TKI Pasal 2 Nomor 12, yang berbunyi, "Pihak pertama wajib menghajikan pihak kedua satu kali selama masa perjanjian kerja ini dilaksanakan".

Yang menjadi ganjalan di hati kami, biaya berhaji melalui muasasah pelayanan haji dari Dammam sangat mahal, yaitu 1.800 riyal. Itu berarti sekitar 3 bulan gaji sopir atau 3 bulan gaji pas bagi tenaga kerja wanita (TKW), dan besarnya biaya berhaji itu dibebankan kepada kami. Padahal, banyak juga kafil (majikan) lain yang menanggung semua biayanya.

Menurut pengertian kafil dan *manpower service corp.* PO Box 4220, telefon 8349275 Dammam, kata "wajib menghajikan" yang terdapat dalam perjanjian itu sekadar memberi izin, bukan menanggung biaya haji. Sedangkan menurut kami, kafillah yang menanggung biaya haji itu.

Karena itu, kami mohon peraturan itu lebih dipertegas dan diperjelas lagi -- kafil atau TKI-kah yang membayar ongkos haji? Kejelasan itu perlu agar kami, para TKI, tidak selalu tertipu oleh propaganda para perseroan terbatas pengirim tenaga kerja dengan janji-janji muluk.

H. Aunollah Abdul Karim
PO Box 1256
Dammam 31431 KSA

Karikatur Iran, Memakai Sorban?

Kami ingin menanggapi karikatur *SINAR* No. 22/Tahun II/15 April 1995, halaman 29. Kami kabarkan bahwa karikatur tentang empat orang Iran, yang tersangka melakukan penipuan itu, telah menimbulkan kesan, dua orang di antaranya adalah ulama karena bersorban. Rasanya perlu diingatkan bahwa di Iran, maupun kebanyakan dunia Islam lainnya termasuk Indonesia, yang memakai sorban semacam itu hanya ulama, dan dianggap sebagai pakaian kehormatan islami.

Perlu disebutkan, dalam kenyataannya tidak ada di antara tersangka itu yang memakai sorban. Kami sangat menghargai apabila Anda suka memuat surat kami ini, sebagai koreksi.

Muhammad Hasyim
Gang Pucung No. 63 RT 04/02, Condet Balekambang
Jakarta Timur 13530

CATATAN REDAKSI: *Apa yang Anda maksudkan sebagai karikatur itu sebenarnya hanya ilustrasi untuk sebuah rubrik, sebagai pengganti foto. Tapi, bagaimanapun, terima kasih atas koreksi Anda.*

ERWIN HADI

PERAN SOSPOL ABRI: *Sudah dipikirkan sejak lama.*

MENGURANGI JUMLAH, MENDONGKRAK MUTU

Dalam ABRI tidak ada puas dan tidak puas. Dan konflik antara ABRI dengan Golkar tak mungkin terjadi.

Peran formal ABRI dalam politik makin ramai diperbincangkan. Bolanya bergulir setelah Mensesneg Moerdiono, Mendagri Yogie S. Memet, dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung melakukan kunjungan konsultatif ke Ketua DPR/MPR Wahono, Senin (24/4). "Konsultasi dilakukan untuk membahas rencana pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengurangan jumlah anggota ABRI di DPR," ungkap Moerdiono kepada wartawan. Pemerintah mengusulkan perlunya pengurangan jumlah anggota ABRI yang diangkat di DPR, dari 100 orang menjadi 75 orang.

Langkah pemerintah itu, menurut Moerdiono, sudah lama dipikirkan. "Orang banyak mengira ini perkembangan baru. Presiden sudah lama berpikir soal itu. Tolong Anda baca pidato presiden pada tanggal 15 Agustus 1992," kata Pak Moer. Dalam pidato kenegaraan itu, Pak Harto antara lain menguraikan keanggotaan ABRI di DPR mesti disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Malah, pada 21 Februari silam, seperti disebut Ketua LIPI, Soefjan Tsauri, pihaknya diperintahkan meneliti sistem pemilu dan peran sosial-politik (sospol) ABRI. Tujuannya, menghasilkan pilihan kebijakan kepada pemerintah mengenai sistem pemilu, termasuk di dalamnya secara khusus peran sospol ABRI.

Lalu, dari mana angka 25 diperoleh sebagai jumlah anggota DPR dari ABRI yang harus dikurangi? Menurut Jenderal Feisal Tanjung, 75 kursi bagi F-ABRI itu sudah cukup, sesuai kebutuhan, mengingat masyarakat sudah menghayati Pancasila secara mantap. "Dalam ABRI tidak ada puas dan tidak puas. Kalau konstitusi menyatakan begitu, ya, kita turut," tutur Pak Moer ketika ditanya wartawan ihwal ada-tidaknya ketidakpuasan di jajaran ABRI soal pengurangan itu.

Sementara itu, Ketua F-ABRI DPR-RI, Laksamana Madya Abu Hartono, mengatakan bahwa angka pengurangan itu ada hitung-hitungan teknisnya. Menurut

Abu, jumlah itu sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Saat situasi tenang dan stabil, jumlahnya bisa lebih kecil karena ABRI menonjolkan peran tut wuri handayani. "Kalau situasinya genting, ya harus *ing ngarsa sung tulada*. Sebab kalau tut wuri, bisa kena bedil," katanya kepada sebuah media Ibu Kota (26/4).

Laksamana Abu menceritakan bagaimana proses itu bermula di bulan Juni 1960, di mana ada 35 anggota DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) ditunjuk dari F-ABRI (sekitar 12%). Sampai hasil Pemilu 1971, berdasar UU No. 16 Tahun 1969, dari 460 anggota DPR, 100 orang di antaranya diangkat -- terdiri atas 75 ABRI dan selebihnya non-ABRI. Kemudian, pada tahun 1987, berdasar UU No. 2 Tahun 1985, disebutkan bahwa jumlah anggota DPR menjadi 500 dan 100 orang di antaranya (dari ABRI) diangkat. "Ya, mesti bertahap. Kami mundur menjadi 75 orang itu sudah cukup memadai," kata Abu.

Memadai atau tidak, bagi Ketua DPP PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Ismail Hasan Metareum, merupakan persoalan dilematis. "Soal pilihan harus ada konsensus. Kalau kami yang bilang, tentu mereka tidak mau. Susah. Mereka bilang, sedang kami tidak sepakat, itu juga susah," tutur Buya -- nama panggilan Ismail Hasan.

Menurut penasihat F-PDI, Sabam Sirait, usulan pengurangan sebanyak 25 anggota F-ABRI di DPR tidak harus diterima begitu saja. "Karena semua kekuatan sosial-politik sudah mengakui satu-satunya asas, maka jumlah kursi ABRI di DPR cukup 50," kata pemuka "Partai Banteng" itu.

Sebanyak 50 kursi bagi F-ABRI di DPR juga dianggap memadai oleh pengamat politik dari UGM, Riswanda Imawan. Menurut Riswanda, jumlah anggota ABRI yang terwakili dalam fraksinya masih jauh lebih dominan dibanding wakil dari segenap rakyat, yang jumlahnya jauh lebih banyak. "Karena itu, masih logis bila anggota ABRI ditetapkan hanya diwakili 50 orang saja. Kalaupun tidak secara langsung, itu dapat dilakukan bertahap," katanya kepada pers di Yogyakarta, Selasa (25/4).

Sedangkan di mata Sri Bintang Pamungkas, anggota F-PP yang kini menunggu proses *recalling*, persoalannya bukan pada sekadar besar kecilnya pengurangan jumlah anggota ABRI. Adik kandung tokoh Golkar, Sri-Edi Swasono, itu beranggapan seharusnya pihak militer diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Menurut Laksamana Abu, jika ada pertanyaan ihwal jumlah anggota ABRI yang diangkat itu nol saja, itu menunggu ketetapan MPR. Kalau, misalnya, MPR tahun 1998 menghasilkan keputusan sekarang tidak perlu ada yang diangkat, ya tidak apa-apa. ABRI akan mengatakan "iya". Satu hal lagi, kata KSAD Jenderal Hartono, kalau penempatan anggota ABRI di DPR dianggap tidak perlu lagi berjumlah seratus, dengan rela akan diserahkan kepada orsospol yang ada. "Perlu diketahui, ABRI bersikap *legawa*, yaitu kalau kami sudah menganggap perlu, silakan saja," katanya.

Yang pasti, sejarah mencatat bahwa anggota ABRI tak pernah minta diangkat. Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution, Ketua MPRS (1966-1972), mengungkapkan, Panitia Persiapan Pemilu tahun 1959 yang diketuai Moh. Yamin mulai mendorong-dorong agar anggota ABRI ikut di DPR. Berkali-kali dalam rapat, Pak Nas yang menjadi salah satu anggota panitia itu menekankan bahwa anggota ABRI tidak ingin diangkat. "Jika ingin duduk di DPR, anggota ABRI harus ikut pemilu dan dinonaktifkan dari dinas militer," kata "Bapak TNI-AD" itu.

Ternyata ketika itu, parpol-parpol peserta pemilu meminta agar ABRI diangkat saja, dengan alasan untuk mengamankan pemilu. Mensesneg Moerdiono mengingatkan, sejarah politik yang menunjukkan pengangkatan anggota ABRI di DPR itu berlatar belakang pemikiran untuk mengamankan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Nasution, ada kekhawatiran, jika ABRI ikut pemilu, nanti bisa macam-macam atau terjadi rekayasa. Nah, yang kemudian terjadi, posisi anggota F-ABRI di DPR tidak melalui jalur pemilu, tetapi diangkat. Itulah yang terus berlanjut hingga kini.

Jenderal Nasution pun sekali lagi mengingatkan, pengangkatan langsung itu sama sekali di luar konsep dwifungsi ABRI yang dulu digagaskannya. "Bagaimanapun anggota ABRI yang ke DPR itu harus melalui pemilu," katanya.

Lain halnya pandangan Jenderal (Purn.) Rudini. Bila ABRI sampai ikut memilih, katanya, akan menimbulkan kerawanan. "Mental ABRI akan terpecah-pecah. Ada yang senang parpol A, B, Golkar, tidak karu-karuan," kata mantan menteri dalam negeri itu. Lalu, Jenderal Rudini menceritakan pengalamannya ketika menjadi komandan peleton yang membawahi 40 orang pada tahun 1955. Repotnya, kata Rudini, anak buahnya itu terkotak-kotak: 21 berhaluan komunis, 10 Islam, dan lainnya sosialis.

Buntutnya, bila timbul masalah di lapangan dan yang bikin gara-gara, misalnya, komunis, ke-21 orang jelas tidak mau memberantas. "Buktinya, pada tahun 1965, PKI berhasil mengadu domba ABRI. Kita harus menghindari hal itu, jangan terulang lagi. Janganlah membuat kesalahan yang sama," kata Direktur Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI) itu.
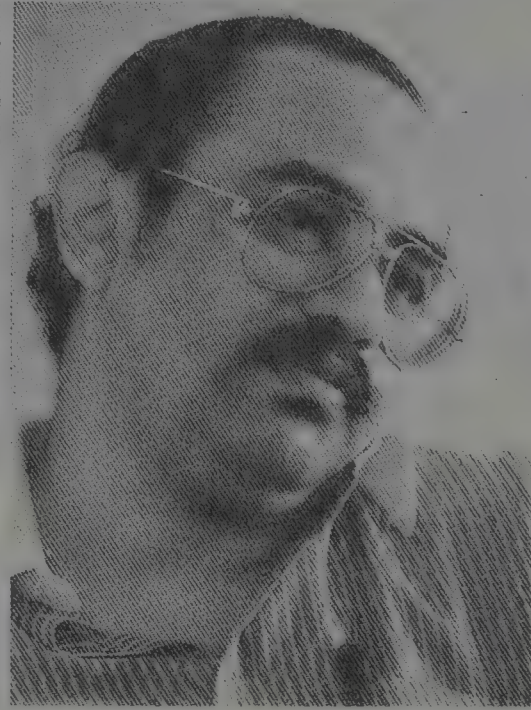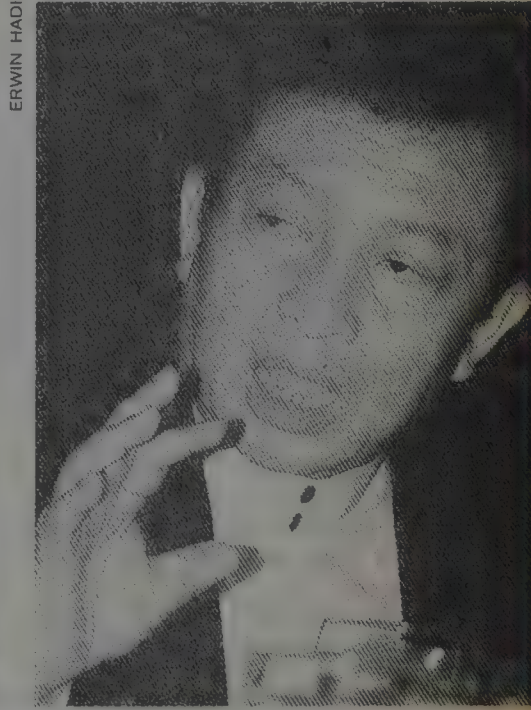
YUL ADRIANSYAH

Salim Said

ERWIN HADI

Moerdiono

Sejumlah pengamat berkeyakinan, berkurangnya *seat* ABRI di DPR tidak

akan mempengaruhi peran sospol ABRI. "Sebab, itu bukan persoalan individu, tapi lembaganya tetap memiliki peran yang sama, tidak berkait dengan fungsi," kata Sekjen DPP PPP, Tosari Wijaya.

Penilaian yang sama dikemukakan Rudini bahwa fungsi itu tak tergantung dari jatah kursi di parlemen ataupun lembaga politik lain. "Perubahan juga tak akan mengurangi *bargaining position* ABRI dalam politik bila mereka yang duduk di DPR memang bermutu," paparnya. Pandangan Rudini dibenarkan Menko Polkam, Jenderal (Purn.) Soesilo Soedarman. "Kami memang menerapkan *quality approach*. Jadi, meski hanya satu orang, kalau memang berkualitas tinggi, ya enggak masalah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Yayasan LBH Indonesia, Mulyana W. Kusumah mengatakan, seyogianya pengurangan itu menjadi pendorong untuk mengembangkan redefinisi dalam kerangka reaktualisasi dwifungsi ABRI. Menurut Mulyana, dalam sejarah perkembangan politik dua dasawarsa terakhir, sekitar 40 negara yang mengalami transisi menuju demokratisasi, peranan militer dapat tetap menonjol dengan atau tanpa kaitan dengan pelaksanaan fungsi di lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Boleh jadi karena itu Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid, beranggapan, usulan pengurangan anggota ABRI di DPR itu bermakna simbolis, tidak substansial ke arah peningkatan demokratisasi. Kalau menyentuh substansinya, katanya, perdebatan di dalam DPR itu terbuka. Ada aturan-aturan, ada akses bagi masyarakat untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Karena itu, ia berkeyakinan bahwa peran politik ABRI tetap saja seperti sekarang, tidak terpengaruh oleh adanya pengurangan. "Peranan ABRI itu lebih banyak di eksekutif, bukan di legislatif. Yang di legislatif itu hanya sekadar simbol," ujar Gus Dur.

Yang jelas, PPP, Golkar, dan PDI sudah mengemukakan siap bertarung memperebutkan 25 kursi yang diduduki eks F-ABRI itu. Ketua PPP Buya Ismail menegaskan, langkah pengurangan itu berarti memberi kesempatan bagi orsospol untuk menambah wakilnya di DPR. "Tapi, PPP tak berkonsentrasi di 25 itu saja. Yang diperebutkan sekarang menjadi 425 kursi, itu yang menjadi perhatian PPP," katanya seusai membuka Muswil PPP Yogyakarta. Sedangkan Ketua PDI, Soetardjo Soerjogoeritno, berpendapat, yang terpenting adalah kenetralan ABRI yang berada di semua golongan, serta memperjuangkan Sapta Marga.

DOK. SINAR

DWIFUNGSI: *Pelaksanaannya tergantung perkembangan.*

Menurut Bung Harmoko, Ketua Umum DPP Golkar, pihaknya mendukung langkah itu dan siap membahasnya sebelum memasuki Pemilu 1997. Menteri Penerangan yang dalam kapasitasnya selaku pemimpin partai terbesar itu saat ini rajin mengadakan temu kader, mendukung langkah pemerintah. Karena ABRI, menurutnya, ternyata mampu meningkatkan arti nilai-nilai demokrasi, sekaligus menunjukkan bahwa ABRI ternyata mampu berpikir ke depan. "Golkar mampu bersaing dengan dua parpol lainnya untuk memperebutkan kursi eks F-ABRI itu. Insya Allah, yang 25 itu akan ke Golkar," ujarnya ketika mengadakan acara temu muka dengan kader Golkar se-Kabupaten Bangka, Sumatra Selatan, Ahad pagi (23/4).

Satu hal, hampir berbarengan dengan rencana pengurangan anggota F-ABRI itu, juga merebak isu adanya kesenjangan antara ABRI dengan Pak Harto dan adanya konflik antara Golkar dengan ABRI. Namun, Salim Said yang membawakan makalah bertema "Peranan Angkatan Bersenjata" dalam simposiun *Dimensi Politik dan Ekonomi* di Boston, Amerika Serikat, Sabtu (23/4), menilai keliru anggapan telah terjadi kesenjangan tersebut.

Menurut Salim, sejak dilakukannya reorganisasi dalam tubuh ABRI pada 1969, kekuasaan ABRI praktis berada dalam kontrol Presiden Soeharto. "Ini tetap berlangsung, bahkan sampai Pak Harto pensiun. Karena dalam falsafah keprajuritan ABRI, meskipun seseorang pensiun dari keanggotaan ABRI, ke-TNI-annya tetap," katanya.

Selain itu, secara konstitusional, presiden adalah juga Panglima Tertinggi ABRI. Lalu, dengan kedudukan Pak Harto sebagai ketua Dewan Pembina Golkar -- dengan kekuasaan yang sangat besar, misalnya bisa membatalkan kepengurusan DPP Golkar -- menurut Salim, tak mungkin terjadi konflik antara ABRI dengan Golkar. Apalagi, luas diketahui, bahwa ABRI-lah yang membidani kelahiran Golkar.

Jenderal Hartono juga menegaskan, *gap* antara ABRI dengan presiden adalah mustahil karena secara struktural presiden adalah panglima tertinggi ABRI. Sampai saat ini, ABRI tidak melihat adanya *gap*. *Gap* itu tidak ada, dan tidak boleh ada. Menurut mantan Gubernur Lemhanas itu, prajurit ABRI memiliki loyalitas tegak lurus. "Loyalitas tersebut vertikal kepada atasannya, dari prajurit terbawah sampai tertinggi," katanya.

Nazir Amin/Asep Sambodja, M. Iskandar Zulkarnain, Titin Rosmasari, Totok Suryanto, Heroe Poerwadi (Yogyakarta)

DOK. SINAR

HAK PILIH: Anggota ABRI dalam Pemilu 1955.

Dari *Brandweer* Sampai Dwifungsi

Peran sosial-politik ABRI sudah menyatu dalam dirinya sejak kelahirannya selama masa revolusi.

Konsep dwifungsi tidak terpisahkan dari peran TNI/ABRI. Selain sebagai kekuatan pertahanan keamanan, TNI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial-politik. Meski mengalami pasang surut dalam sejarahnya, kedua peran ini sudah dijalankan sejak ABRI lahir selama masa revolusi fisik menegakkan negara Indonesia merdeka.

Harold Crouch menulis dalam bukunya yang terkenal, *The Army and Politics in Indonesia*, bahwa setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, tentara secara resmi menerima prinsip supremasi sipil. Meski begitu, para perwira sekali-sekali berusaha, kendati sering gagal, untuk tampil di tengah arena politik.

Makin terkuaknya kelemahan dari sistem parlementer membuat para perwira bosan kalau harus setiap kali menanggung kewajiban menyelamatkan negara. Jadi, peran sebagai "*brandweer*" (pemadam kebakaran, meminjam istilah Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung, *Red.*) sebenarnya sudah ditentang pada masa itu.

Hal ini berkaitan dengan serangkaian krisis yang menyebabkan ketegangan antara pemimpin sipil dan militer pada waktu itu. Salah satu contoh ketegangan yang cukup menonjol adalah demonstrasi rakyat, dengan dukungan tentara, menuntut pembubaran parlemen pada 17 Oktober 1952. "Tentara saat itu tidak mengancam Sukarno, tapi meminta DPR dibubarkan karena dianggap memihak satu golongan," kata pengamat politik Aswab Mahasin.

Keruntuhan sistem parlementer pada 1957 yang diikuti oleh keadaan darurat perang meningkatkan peran TNI di bidang politik, birokrasi, dan ekonomi. Pada kurun tersebut, keterlibatan militer dalam politik secara resmi memperoleh penegasan ketika Presiden Sukarno membentuk Dewan Nasional dengan memasukkan golongan fungsional dan perwira ABRI.

Sejak itu, peran militer, terutama TNI AD, dalam pentas politik meningkat pesat. Peran itu dikuatkan dalam konsep dwifungsi yang dirumuskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 1958. Konsep "Jalan Tengah" yang dikenal saat itu menegaskan bahwa ABRI tidak akan mendominasi pemerintahan, tapi juga tidak pasif dalam persoalan politik.

Peran ABRI berlanjut di Front Nasional yang dibentuk segera setelah Dekrit Presiden 1959 menyerukan kembali ke UUD 1945. Tentara kemudian membentuk ormas termasuk Sekber Golkar sebagai kekuatan sospol baru. Saat itu juga terjadi semacam konsensus nasional dalam panitia persiapan pemilu yang diwakili oleh para pemimpin partai.

Hampir semua partai saat itu menghendaki agar anggota ABRI di legislatif diangkat, tanpa ikut pemilu. Padahal, "ABRI sejak semula tidak pernah meminta untuk diangkat," ujar Nasution pekan lalu. Sesepuh Angkatan Darat itu sebenarnya tidak setuju usulan itu, malah berpendapat bahwa semua anggota DPR harus dipilih melalui pemilu. Mantan Panglima Kopkamtib/Wakil Panglima ABRI Jenderal (Purn.) Soemitro mendukung sikap Pak Nas. "Itu positif. Berarti pengakuan bahwa rakyat berkuasa," katanya kepada *SINAR*.

Sejak zaman Demokrasi Terpimpin hingga kini, menurut Aswab Mahasin, salah satu keberhasilan pimpinan ABRI adalah konsolidasi di tubuh tentara. "Pada masa itu dikenal *warlordism*, banyak laskar, mereka sering bersikap merdeka dari pusat dan kadang-kadang *mbalelo*," tuturnya.

Dalam Seminar Angkatan Darat I April 1965, TNI AD menyusun doktrin yang menegaskan bahwa ABRI memiliki dwifungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sosial-politik. Sebagai kekuatan sospol, perannya mencakup bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Pada masa Orde Baru, keterlibatan militer dalam politik kian kuat. Masa itu dikenal upaya restrukturisasi partai dan pemilihan sistem pemilu pada awal 1967 yang berpusat pada pembentukan panitia khusus tiga RUU yaitu RUU Pemilu, RUU Susunan dan Kedudukan MPR dan DPR, serta RUU tentang Partai Politik, Ormas, dan Golkar. Setelah melewati proses yang alot, akhirnya UU Pemilu disahkan pada 1969.

penduduk. Komposisi anggota ABRI di DPR juga bertambah dari 75 orang (16%) menjadi 100 orang (20%). Jumlah ini bertahan hingga Pemilu 1992.

Adanya rencana pemerintah untuk mengurangi kembali jumlah anggota ABRI di DPR dari 100 menjadi 75 orang otomatis memperkecil komposisinya menjadi 15%, atau turun satu persen. Kendati begitu, rencana tersebut tidak akan mengurangi kualitas peran sospol ABRI. "Fungsi sospol ABRI tidak tergantung pada jatah kursi ABRI di parlemen atau lembaga politik lain," ujar mantan KSAD Rudini. Sementara, menurut Aswab Mahasin, rencana tersebut adalah perkembangan wajar dalam peran ABRI menurut dwifungsinya. "Ini langkah maju," katanya.

30 TAHUN INDONESIA MERDEKA

ASPIRASI RAKYAT: Pasukan ABRI berpawai di Jakarta pada 1966.

Menurut ketentuan baru tersebut, dan berlaku sejak Pemilu 1971, sepertiga dari anggota MPR akan diangkat baik dari ABRI maupun non-ABRI. Sementara DPR terdiri dari 460 anggota, terdiri dari 360 orang dipilih dan 100 diangkat. Dari anggota DPR yang diangkat, 75 dari ABRI. Ketentuan ini berlaku juga pada Pemilu 1977 dan 1982.

Perubahan dalam hal jumlah dan komposisi keanggotaan DPR hasil Pemilu 1987. Jumlah total anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dan MPR 1.000 orang. Perubahan ini didasarkan pada penambahan jumlah penduduk. Satu suara dianggap mewakili 400.000

Selain itu, lepas dari perubahan jumlah anggota ABRI, satu hal yang sudah pasti, peran sospolnya tidak berubah. "Peran ABRI adalah stabilisator, selain menangkap aspirasi rakyat," kata Kepala Staf Sospol ABRI, Letjen Moch. Ma'ruf. Dan, bagi ABRI, semua kekuatan sospol adalah kawan. Meski, seperti diungkapkan oleh Asisten Sospol ABRI, Mayjen Syarwan Hamid, ada kawan yang "lebih dekat", ada pula yang "lebih jauh." Tapi jauh-dekatnya jarak dengan kekuatan sospol sangat tergantung pada perkembangan, karena pada dasarnya ABRI berdiri di atas semua golongan.

Dengan demikian, jelas bahwa keterlibatan TNI dalam pentas politik Indonesia adalah karena tuntutan sejarah. Hal ini jauh berbeda dengan pandangan sejumlah pakar politik yang meneliti kasus-kasus di Afrika dan Amerika Latin. Ulf Sundhausen dalam bukunya *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967* menyimpulkan, tampilnya ABRI di pentas politik tanah air bukan karena dorongan ambisi ataupun kepentingan kelompok, melainkan akibat kegagalan politisi sipil.

Dan peran ABRI sendiri, sebagai kekuatan sospol, di samping hankam, sudah baku dengan dwifungsinya. Adanya rencana pengurangan anggota ABRI di DPR menunjukkan dinamika dari pelaksanaan peran tersebut sesuai dengan keadaan yang berlaku.

Selain rencana itu sendiri, bagi Soemitro, siapa pencetus usul pengurangan anggota ABRI di DPR merupakan soal penting. "Kalau datangnya dari ABRI sendiri, itu suatu indikator yang sangat positif," ujarnya. Menurut dia, kalau benar ABRI sendiri yang mengusulkan, itu bisa disebut *graceful disengagement* (pelepasan secara terhormat) sedikit demi sedikit. "Senang saya kalau begini. Artinya ABRI makin dewasa," kata Soemitro.

Namun, bila prakarsa itu berasal dari kepala negara selaku mandataris, menurut Soemitro, tentu harus ada konsep yang utuh. "Saya tidak tahu bagaimana konsepnya karena belum ada transparansi." Siapa sebenarnya pemrakarsa rencana pengurangan jumlah anggota ABRI di DPR sebenarnya bisa ditebak. Soal ini sudah ditegaskan oleh Presiden Soeharto ketika kepala negara menginstruksikan Ketua LIPI Soefjan Tsauri untuk meneliti sistem pemilu yang lebih sesuai akhir Februari lalu.

Malah, secara implisit Presiden melontarkan soal ini ketika menyampaikan pidato nasional pada 15 Agustus 1992. Saat itu disebutkan bahwa keanggotaan ABRI di DPR mesti disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Sesuai dengan analisis Soemitro, tentu ada konsep yang utuh menyangkut penyesuaian peran ABRI tersebut. Masalahnya, belum ada pengumuman resmi mengenai hal itu.

Suhardiyoto/Asep Samboja, M. Iskandar Zulkarnain, Titin Rosmasari, Totok Suryanto

Semua Anggota DPR Harus Dipilih

Meski usianya sudah lanjut dan kesehatan yang terus merongrong, Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution tetap mengikuti perkembangan politik di tanah air. Tekadnya yang tak pernah surut adalah pemurnian pelaksanaan UUD 1945. Hal itu tercermin ketika mantan KSAB dan Ketua MPRS itu berbicara kepada wartawan di kediamannya pekan lalu. Berikut petikannya.

Bagaimana latar belakang keberadaan anggota ABRI dalam lembaga legislatif?

Sekitar tahun 1958, ABRI menyatakan akan melaksanakan dwifungsi. Gagasan ini berdasarkan pada ketentuan konstitusi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Sedangkan MPR sendiri menurut UUD terdiri atas DPR hasil pemilu (golongan A), jadi bukan hasil pengangkatan, plus utusan daerah (B), dan wakil golongan (C). Nah, yang terakhir ini yang tidak pernah diselesaikan sampai hari ini. Ketetapan MPRS No. 11 mengatakan, anggota DPR semuanya dipilih. Kalau dibaca UUD 1945 kan jelas, MPR itu pemegang kedaulatan tertinggi atas DPR hasil pemilihan, lalu utusan daerah yang mestinya DPRD, dan utusan golongan yang belum diatur.

Mengapa akhirnya ada pengangkatan anggota DPR dari ABRI?

Sesudah kembali ke UUD 1945 yakni tahun 1959, ada persiapan untuk mengadakan pemilihan umum. Pimpinan panitianya terdiri dari tiga orang, yakni Muhammad Yamin, Idham Chalid, dan saya. Dalam rapat-rapat, biasanya saya sendiri yang memimpin, pendirian ABRI adalah kalau anggota ABRI masuk DPR harus melalui pemilihan umum. Dan kedudukan buat ABRI adalah sebagai utusan dari golongan. Tapi, kemudian timbul perkembangan yang agak lain dari dugaan saya. Justru parpol-parpol, termasuk Saudara D.N. Aidit, meminta supaya anggota ABRI mesti diangkat demi pengamanan pemilu. Titik tolaknya pada waktu itu, kalau ABRI ikut pemilu, bisa "macam-macam," rekayasa suara.

Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anggota ABRI di kedua lembaga legislatif?
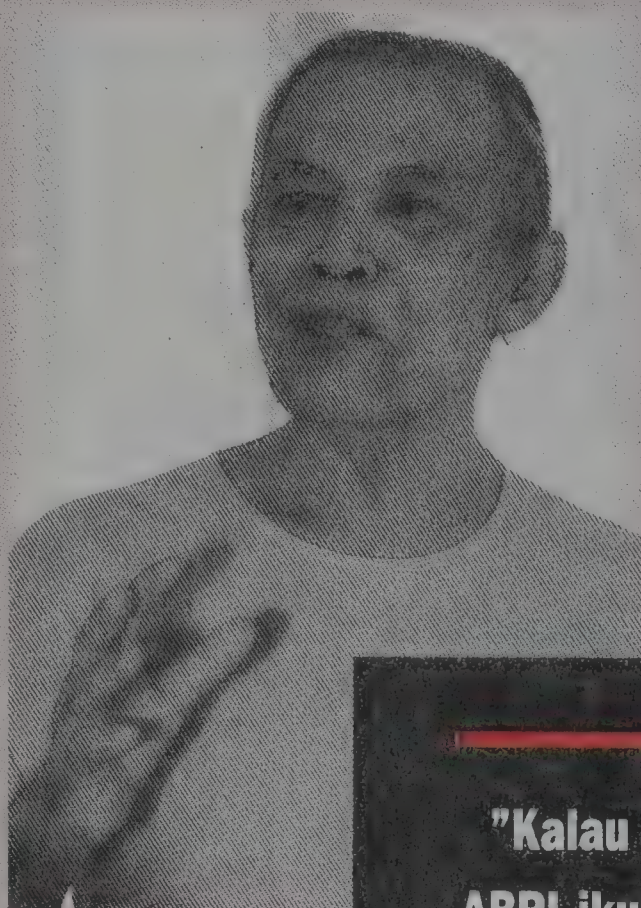
Pendapat saya, tetap konsekuen pada UUD 1945. Saya dulu, ketika memimpin Angkatan Darat, sebagai KSAD pidato di Magelang, tetap konsekuen melaksanakan UUD 1945. Pidato saya itu tanggal 11 November dan tanpa teks. Saya memang tidak pernah pakai teks. Pada masa Orde Baru, oleh Presiden Soeharto memang ABRI diangkat, di DPR ada 100 orang atau 75 orang nantinya. Kalau tidak salah, kira-kira ada 300 yang ada di MPR, itu di luar konsep dwifungsi. Sudah menjadi kebiasaan orang melihat ABRI itu diangkat.

YUL ADRIANSYAH

Abdul Haris Nasution

Bagaimana soal jumlah anggota MPR waktu itu?

Kami waktu itu belum bicara mengenai jumlah. Karena itu tergantung susunan utusan golongan. Kami belum menentukan berapa banyak utusan golongan itu. Tapi, ide yang banyak berlaku adalah DPR terpilih ditambah dengan utusan golongan dan utusan daerah. Menurut Prof. Ismail Sunny dari UI, dengan tambahan itu, tidak mungkin menjadi dua kali lipat seperti sekarang. Sekarang kan jadi dua kali lipat. Jadi, memang kami belum bicara berapa orang dan konsep itu memang belum pernah dimunculkan. Bahkan, sampai sekarang juga masih terbengkalai. Nah, inilah kelonggaran-kelonggaran di masa Orde Baru. Kita lihat akhirnya MPR itu sepertiga ditempati oleh teman-teman baju hijau itu.

> "Kalau ABRI ikut pemilu, bisa 'macam-macam'."

Apakah dulu pernah ada gagasan tentang pembatasan sampai kapan anggota DPR dipertahankan dari ABRI, begitu?

Tidak ada batasan. Sebab, itu kan baru gagasan/pemikiran. Waktu saya menjadi wakil ketua, saya ajukan ada *ancer-ancer*. Cuma dulu, kalau ada pengangkatan-pengangkatan dari seluruh anggota MPR, jangan lebih dari 10%. Itu *ancer-ancer* dari teman-teman. Lha, kalau tanya Aidit, barangkali jangan lebih dari 10%, yang lain mungkin beda juga. Tapi, itu baru *ancer-ancer*, bukan suatu keputusan. ■

ABRI di DPR Bukan untuk Mendikte

Direktur Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI), Jenderal (Purn.) Rudini, berpendapat gagasan pengurangan jumlah anggota ABRI di DPR merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi tuntutan demokratisasi.

Meski begitu, mantan KSAD ini juga mengingatkan agar keberadaan ABRI di DPR jangan disalahtafsirkan. Mereka sudah berkorban melepaskan haknya untuk tidak memilih dan dipilih dalam pemilu. "Pengganti pengorbanannya, ABRI dikasih tempat dan jatah," ujar Rudini. Berikut percakapan Rudini dengan Asep Samboja.

Apa yang paling prinsip dengan adanya tawaran pemerintah menurunkan jumlah anggota ABRI di DPR?

Harus dihargai. Tidaklah benar pengurangan itu dimaksudkan untuk mengurangi anggapan kurang demokratisnya proses keputusan di DPR. Sekalipun jumlah ABRI di DPR berkurang, tak masalah.

Keberadaan ABRI di DPR bukan untuk mendikte DPR. Tapi, karena sejarahnya, TNI ABRI diterima masyarakat sebagai bagian dari masyarakat. Di samping itu, ABRI telah melepaskan haknya, berkorban agar dia bisa *im-partial*, tidak memihak mana pun dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan keamanan.

Kenapa tidak disamakan saja hak ABRI dengan rakyat biasa?

Kalau ABRI sampai ikut memilih, itu ada kerawanannya juga, misalnya nanti ABRI terpecah-pecah. Ada yang senang parpol A, parpol B, Golkar, tidak karu-karuan. Seperti pengalaman pada 1955. Kala itu, saya komandan peleton memimpin 40 orang: 21 orang memilih komunis, 10 orang memilih Islam, lainnya sosialis. Pada 1965, PKI berhasil mengadu domba ABRI, antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Karena itu, kita harus menghindari agar hal itu tidak terulang lagi.

"Perjuangan secara demokratis mesti lewat DPR."

DOK. SINAR

Rudini

Jadi, seperti kata Pak Nas, kalau mereka mau dipilih, mereka harus menanggalkan ke-ABRI-annya...

Saya pikir, pola pikir pada waktu itu adalah ABRI yang mau berpolitik praktis harus menanggalkan dulu ke-ABRI-annya. Dengan begitu, gagasan waktu itu, maksudnya, ABRI boleh berpolitik praktis. Lalu, wadahnya, ya, parpol dan Golkar.

Selama ini, ada kesan ABRI berafiliasi pada Golkar...

Saya selalu mengajak semua orang, kalau mau menilai suatu kasus atau masalah agar berpikir tiga dimensi: masa lalu, sekarang, dan masa datang. Dari dimensi masa lalu, kenapa ABRI berafiliasi pada Golkar, kenapa? Karena, dalam Sapta Marga, ABRI berpedoman pada tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945. Nah, perjuangan secara demokratis mesti lewat DPR. Karena itu, muncul gagasan TNI untuk membentuk Golongan Karya. Jadi sangat logis, begitu ABRI duduk di DPR, ABRI jadi mitra Golkar.

Latar belakang munculnya gagasan mengurangi anggota ABRI di DPR?

Pemerintah melihat bahwa dalam pembangunan 25 tahun itu ternyata peningkatan kesadaran politik rakyat sudah tampak. Jadi, tuntutannya lebih besar. Kedua, masalah Pancasila dan UUD 1945 dinilai sudah cukup mantap.

Apakah gagasan ini ada benang merahnya dengan kemauan Presiden untuk meneliti sistem pemilu?

Penelitian itu berarti, saya kira ada kemauan politik untuk menyempurnakan pemilu, untuk lebih menjawab keinginan rakyat. Karena, sampai sekarang kan masih ada tuntutan jurdil (jujur adil). Menurut saya, jurdil itu bisa ditampung di peraturan pelaksanaan dari sistem yang sekarang.

Adanya penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memilih dan membandingkan sendiri. Jadi, pemerintah lebih terbuka untuk perubahan. Namun, sistem pemilu tidak ada kaitannya dengan gagasan pengurangan anggota ABRI di DPR. ■

Positif, Politisi ABRI

Jenderal (Purn.) Soemitro, mantan Panglima Kopkamtib, selalu punya ide-ide segar menyangkut peran dan fungsi ABRI. Terakhir, Soemitro malah mengusulkan agar presiden mendatang dari sipil. Lalu, soal jatah ABRI di DPR/MPR, ia mengaku amat senang kalau jumlahnya dikurangi. Alasan Soemitro, bukan jumlah yang menentukan, tapi pikiran. Saat ditanyai M. Iskandar Zulkarnain, ia malah mengungkapkan gagasan, sebaiknya presiden mendatang adalah anggota ABRI yang pernah duduk di DPR. Berikut petikan wawancara itu.

Apa kaitan pengurangan anggota F-ABRI dengan pemilu mendatang?

Kalau menanyakan kaitannya dengan pemilu, saya sukar menjawab. Sepanjang ingatan saya, karena ABRI tidak ikut memilih tapi memang dapat jatah, sebaiknya enggak usah ditanyakan.

Apakah ini indikasi kondisi yang lebih demokratis?

Kalau itu, saya rasa agak *confuse*, mempermasalahkan dua hal yang berbeda. Kehadiran anggota ABRI di DPR maupun MPR, saya lihat, sangat positif bagi individu atau perseorangan ABRI yang menjadi politisi. Saya lihat, anggota ABRI di DPR berubah. Ada *mental switch*, dari citra keprajuritan yang keras menjadi lebih rileks. Bahkan ada fenomena yang sangat positif. Banyak perwira tinggi ABRI dalam komisi-komisi dipimpin oleh sipil yang muda. Jadi, saya lihat, ada perubahan yang menguntungkan bagi citra ABRI maupun perseorangan ABRI yang direncanakan untuk jadi politisi. Sehingga idealnya, kalau menginginkan menteri dari ABRI, presiden dari ABRI pada masa mendatang, seyogianya mereka yang pernah jadi anggota DPR. Sehingga citra kekuatan, kekuasaan, atau kekerasan, sudah keluar dari pribadinya. Jadi, malah positif.

"Bukan jumlah yang jadi masalah, tapi kualitas."

Apa sebaiknya anggota F-ABRI melalui pemilihan bukan penunjukan?

Kalau latar belakang untuk jadi anggota harus dipilih, itu positif. Akhirnya ada pengakuan bahwa rakyatlah yang berkuasa. Mereka akan mengerti, mana anggota ABRI yang benar-benar baik untuk jadi anggota dewan. Tentunya mereka yang dipilih itu yang peka dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Hanya pertanyaan saya, datang dari mana pemikiran semacam itu. Apakah dari pemerintah, kepala negara selaku mandataris, atau dari ABRI. Kalau datangnya dari ABRI, itu suatu indikator yang sangat positif. Ini bisa diartikan rencana *graceful disengagement* keterlibatan ABRI dalam sosial politik. Jadi, pelepasan secara terhormat sedikit demi sedikit. Senang saya kalau begini. Artinya, ABRI semakin dewasa.

Kalau datangnya dari pemerintah?

Ya, tentunya harus ada konsep yang utuh. Saya enggak tahu bagaimana konsepnya karena belum ada transparansinya. Tadinya saya melihat, saat ketua Golkar dipegang orang sipil. Ada satu indikator, menurut saya, mengurangi peran ABRI dalam masalah sospol saat itu. Tetapi lalu tertutup oleh fakta bahwa banyak ketua DPD Golkar dijabat oleh ABRI. Padahal saya tahu, mungkin tujuan mereka untuk memotong ambisi politisi yang menggunakan basis massa Golkar agar tak terjadi lagi adu kekuatan yang berdampak ke stabilitas politik.
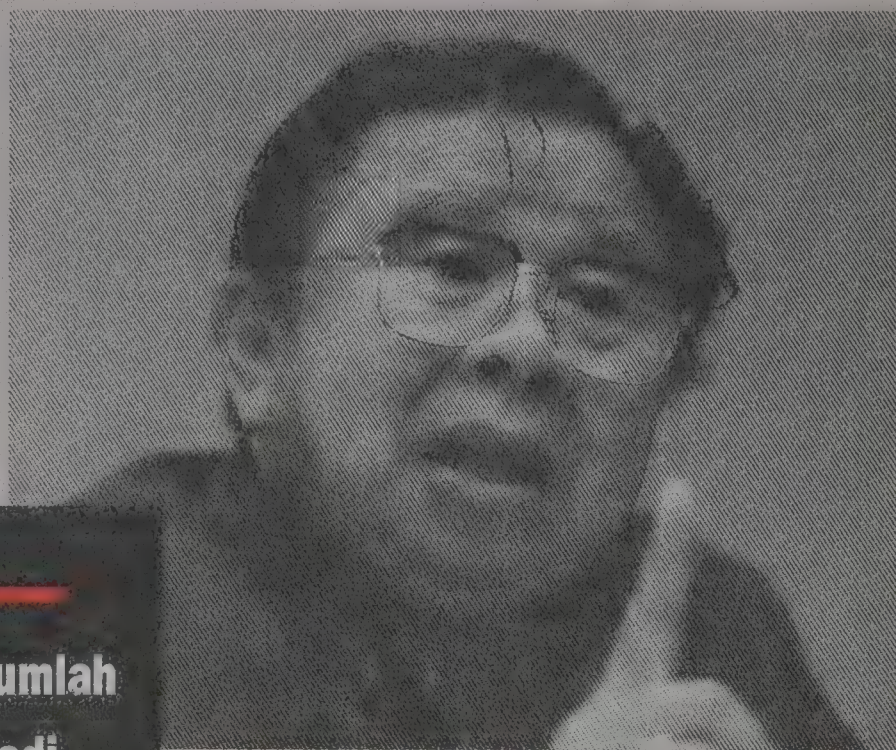
DOK. SINAR

Soemitro

Apakah ini dapat diartikan pemulihan kembali kekuatan sipil?

Indikator kedua analisis saya bahwa Golkar ingin mandiri sebagai orpol. Jadi, bebas dari ketergantungan ABRI maupun birokrasi, karena politik memang harus bebas dari kekuatan dan kekuasaan.

Kenapa F-ABRI masih ada sedangkan dalam UUD tidak disebutkan?

Ini kembali pada motivasi, mengapa anggota ABRI tetap duduk dalam DPR. Karena saat itu sudah timbul pemikiran, ABRI itu sumpah prajuritnya adalah melindungi UUD 1945 dan melestarikan Pancasila. Hanya ABRI tidak boleh menginterpretasikan sendiri, harus melalui konsensus nasional. Ini tugas ABRI sepanjang masa. Dalam keadaan normal, bukan jumlah yang jadi masalah, tapi kualitas. ■

ABRI Menerima dengan Lapang Dada

Rencana pemerintah mengajukan UU pengurangan jumlah anggota ABRI di DPR memberi warna politis yang lebih demokratis. Gagasan ini dengan lapang dada diterima ABRI. Mengapa? Berikut ini pendapat Ketua F-ABRI di DPR, Laksamana Madya Abu Hartono, yang dikemukakannya kepada Totok Suryanto dan Yudi Faisal.

Bagaimana dengan rencana pemerintah mengajukan RUU pengurangan jumlah anggota ABRI di DPR?

Sesuai dengan pandangan ABRI yang disampaikan oleh Kepala Staf Sospol, bahwa semua ini terserah kepada rakyat, kami kembalikan kepada rakyat. Apa keinginan rakyat.

Sebagaimana diketahui, keberadaan ABRI di DPR adalah implementasi dari sistem kenegaraan kita yang bersifat kekeluargaan dan paham integralistik. ABRI sebagai salah satu golongan diikutsertakan di dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Ini ditegaskan dalam amanat presiden di DPR Agustus 1992 lalu, bahwa peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Mengapa tidak dihilangkan saja?

ABRI tidak bisa dipisahkan. Sejak kelahiran negara ini, ABRI ikut melahirkan, ikut mempertahankan, dan ikut mengisi dalam segala tatanan kehidupan. Dan ini jadi komitmen ABRI terhadap bangsa dan negara. Janji ini telah teruji oleh sejarah sejak 1945, 1950, 1960, sampai dengan berbagai peristiwa.

"Keberadaan ABRI di DPR hanya bersifat sementara."

Berapa yang pasti pengurangan jumlah anggota ABRI?

Jumlahnya bisa berubah-rubah sesuai dengan keadaan. Kalau kita tengok sejarah, Fraksi ABRI semula ada di DPR-GR tahun 1970. Jumlahnya hanya 35 orang, lalu meningkat 36 orang, dan menjadi 39, 43, 75, dan terakhir 100 orang. Bila sekarang jumlahnya surut kembali menjadi 75 orang, dan itu kehendak rakyat -- dalam upaya mencerminkan kehidupan demokrasi kita yang searah dengan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik (Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 1992).

Sikap ABRI atas pengurangan tersebut?

Pengurangan ini kami lihat dari sisi positif menciptakan suasana politik yang lebih demokratis. ABRI menerima dengan lapang dada. Kalau memang stabilitas kita sudah demikian baik, misalnya, pengamalan Pancasila sudah punya rambu-rambu lewat referendum berdasarkan Ketetapan MPR 1978 dan 1983. Juga sekarang Pancasila satu-satunya asas yang dipakai oleh semua kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan. Dinamikanya kini bahwa keberadaan ABRI di DPR hanya bersifat sementara. Mengenai jumlah bisa disesuaikan, tentu berdasar amanat presiden tahun 1992.

KRIS HARYANTO

Abu Hartono

Apa dasar hukum RUU pengurangan ABRI di DPR?

Perubahan jumlah anggota ABRI di DPR menjadi 75 orang itu tertera pada penyempurnaan UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR/DPR/DPRD. Dan secara konstitusional perubahan sekarang masih dilindungi oleh hasil Ketetapan MPR No. 3 Tahun 1983 tentang pemilu. Pasal 6 menyebutkan, anggota DPR terdiri dari anggota yang dipilih, berasal dari OPP dan yang diangkat dari anggota ABRI. Selama masih ada yang diangkat secara konstitusional, ketetapan MPR masih melindungi.

Apakah pengurangan ini sebagi indikator kematangan demokrasi?

Begini. Indikator dari proses demokrasi itu pada hakikatnya, kalau kita bicara demokrasi secara umum, rumusannya adalah semua proses dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau kita mengambil dinamika sebagai barometer kemajuan demokrasi, maka bagaimana prosesnya dari rakyat, tentu melalui proses perwakilan. Bagaimana wakil-wakilnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. ■

RUSUH: Ribuan pemuda RMS mengamuk, sementara polisi Belanda berjaga-jaga (kiri).

HAJAT TAHUNAN "NEGARA ENTAH"

Ulang tahun RMS dirayakan anak muda dengan demo dan perusakan. Bisakah dianggap sepele?

Warga Belanda yang berdiam sepanjang Maliveld sampai pusat Kota Den Haag, Selasa 25 April lalu, menyangka ada perampokan. Sebagian lagi mengira ada pesta jalanan anak-anak muda. Sebagian yang lain memang tahu, hari itu ada demo oleh kelompok yang selama ini menamakan diri "warga" Republik Maluku Selatan (RMS).

Ternyata, aksi sekitar 3.000 warga berkulit mendekati hitam itu mencerminkan tiga "tujuan" tadi sekaligus. Mereka merampok, berpesta jalanan, juga berdemo. Sebuah pompa bensin dirampok, sejumlah gedung dan mobil ditimpuki batu, barikade polisi dilawan hingga beberapa di antaranya terluka. Sementara teriakan-teriakan yang menyatakan kebaradaan RMS juga kedengaran. Tampak betul bahwa aksi itu tidak terkonsep, asal-asalan.

Maklum, para pelaku demo itu umumnya anak-anak muda, lebih jelas lagi usia 20 sampai 30 tahun. Kawula muda Maluku yang tergabung dalam *Vrije Zuidmolukse Jongeren* (Pemuda Maluku Selatan Merdeka) itu rata-rata masuk generasi ketiga keturunan sekitar 4.000 orang Maluku yang menyeberang ke Belanda tahun 1952. Jadi, apa yang diketahui anak-anak itu tentang perjuangan RMS tampaknya samar-samar.

Karena itu, ulah anak-anak muda RMS di belakang KBRI di Den Haag itu lebih mirip aksi tawuran ketimbang sebuah demo yang sebenarnya bermisi "berat", yaitu menyatakan keberadaan sebuah republik. "Mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka," kata Perwira Bantuan Umum pada Atase Pertahanan KBRI, Amarullah.

Demo itu sendiri memang rutin digelar tiap tahun. Pastinya terjadi setiap 25 April sebagai "hari kemerdekaan" RMS. Asal diingat, RMS diproklamasikan pada 25 April 1950 oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Karena hanya ingin menyatakan eksistensi, demo itu tidak mengeluarkan tuntutan apa pun. KBRI juga tidak mengeluarkan pernyataan apa pun tentang aksi itu.

Agaknya, ketika RMS kian tidak populer dan agenda rutin kehabisan isu, aksi demo menjadi *ngawur*. Buntutnya, ya, aksi kekerasan itu. Padahal, sesuai dengan kebijkan RMS, aksi kekerasan sebenarnya dihindari. Menurut "Presiden" RMS, F.L.J. Tutuhatunewa, perjuangan "republiknya" kini menempuh jalur pertukaran pendapat dan mempertemukan pendapat. "Tuntutannya tetap, yaitu kemerdekaan seratus persen bagi warga Maluku Selatan," kata Tutuhatunewa.

Selama ini, RMS memang identik dengan aksi kekerasan. Ini tidak lain karena dalam sejarah tuntutannya, RMS kerap menggunakan cara teror, pembajakan, dan perusakan fasilitas umum. Aksi tidak simpatik itu mulai digelar tahun 1966 sejak proklamator RMS, Soumokil, dihukum mati oleh pemerintah RI. Empat tahun kemudian, rumah Duta Besar RI, Taswin Natadiningrat, diserbu gerombolan RMS di Wassenaar. Seorang polisi tewas. Tahun 1974, kantor Garuda di Amsterdam dibakar. Tahun itu juga terjadi perkelahian antara RMS pendukung RI dengan RMS "murni". Sindikasi teror RMS juga pernah dituduh merencanakan menculik Ratu

Yuliana pada tahun 1975. Di ujung tahun 1975, RMS membikin kekacauan dengan menyandera 75 penumpang kereta api di Beilen, Belanda Utara. Masinis dan dua penumpangnya ditembak mati.

Sejumlah aksi kekerasan itu justru kian mengurangi simpati orang Belanda terhadap RMS. Karena itu, RMS akhirnya memilih jalur antikekerasan. Kerja sama dengan sejumlah LSM dibangun. Perkawanan paling mesra terjadi dengan Amnesty International untuk konteks hak-hak asasi manusia, Pax Christie (agama), dan Rood Kruise (kepalangmerahan). Sejauh ini, ihwal pengakuan, RMS hanya diakui oleh UNPO (*Unrepresented Nations and Peoples Organization*), sebuah LSM yang cukup menghiraukan bangsa-bangsa yang "tidak terwakili" seperti RMS, Tibet, dan belakangan Timor Timur. Negara berdaulat, dalam catatan resmi, tidak ada yang mengakui RMS.

Kini, di bawah komando Tutuhatunewa, Otto Matulessy (Perdana Menteri), Nyonya Fride Sahuwat (hubungan internasional, semacam menteri luar negeri), John Wahilette (Menteri Dalam Negeri), Fritz Mocal (Menteri Penerangan), dan Manusama yang mantan "presiden", jalur diplomasi tampaknya dipergiat. Contoh paling aktual adalah pengiriman "delegasi" RMS untuk sejumlah demonstrasi menentang RI di Jerman ketika Presiden Soeharto berkunjung ke sana awal April. RMS mengirim empat wakilnya.

Dari sejarahnya, jalur politik sebenarnya cukup asing bagi RMS. Sekitar 4.000 warga Maluku yang dibawa ke Belanda pada tahun 1952 umumnya bekas prajurit KNIL. "Mereka tidak tahu politik," kata Duta Besar Keliling yang juga mantan Duta Besar RI untuk Belanda, Alamsjah Ratu Perwiranegara. Tokoh RMS yang melek politik, kata Alamsjah, hanya Manusama, "Presiden" RMS tahun 1970-an.

Karena itu, menurut Alamsjah, angan-angan mereka menyeberang ke Belanda sangat sederhana. "Mereka hanya ingin hidup di tangsi (barak) dan mendapat gaji dari pemerintah Belanda," ujar Alamsjah.

DOK. SINAR

PENUMPASAN RMS: (Dari kiri) Jonli, Slamet Riyadi, M. Jusuf, Kawilarang dan Leo Lopulisa.

Tradisi politik yang tidak mereka miliki -- sementara perjuangan "bangsa-bangsa" semacam RMS hanya ampuh melalui jalur politik -- menyebabkan perkumpulan asal Maluku itu bak jalan di tempat. Bahkan, di sana-sini tampak kemundurannya.

Menurut Max A.N. Gitx, Sekretaris I Bidang Politik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, dari sekitar 60.000 keturunan Maluku yang ada di Belanda, 90% sudah berintegrasi dengan rakyat "Negeri Kincir Angin" itu. "Hanya 10% saja yang membikin onar," katanya.

Keterangan Gitx ini mempertegas bahwa persoalan RMS adalah persoalan pemerintah Belanda. Karena itu, ulah mutakhir RMS di Den Haag diyakininya tidak akan mengganggu hubungan Indonesia-Belanda. Bahkan oleh pemerintah Belanda, ulah RMS itu sudah dianggap barang biasa. "Pemerintah Belanda tidak pernah mempertimbangkan apa yang mereka tuntut. Sama sekali tidak penting dan saya malah heran kenapa di Indonesia menjadi ramai," kata Gitx.

Sikap Pemerintah Belanda memang sudah jelas: tak lagi mengacuhkan RMS. Tetapi, sejumlah warga Belanda ternyata masih bersimpati dan ikhlas membantu perjuangan RMS.

Selain sokongan NGO, Alamsjah ternyata memiliki catatan tersendiri tentang "jaringan" RMS. Menurut Alamsjah, bekas tuan-tuan kebun yang dulu memiliki harta di Indonesia termasuk orang yang sakit hati kepada Indonesia. "Masyarakat seperti itulah yang tidak senang kepada Indonesia," ujar Alamsjah.

Alamsjah juga mengingatkan, RMS sulit hilang karena di Kerajaan Belanda secara kebetulan muncul kelompok yang anti-Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM), Aceh Merdeka, dan Fretilin masih banyak bercokol di Belanda. Didukung jaringan NGO dan sistem politik Belanda yang longgar terhadap demonstrasi, RMS sulit dihilangkan. "Demokrasi dan kebebasan di Belanda berlebihan." Demikian penilaian Alamsjah.

Melihat peta persoalan seperti itu, secara resmi ulah RMS memang tidak mengganggu hubungan Indonesia-Belanda. "Tapi cukup mengganjal. Ini terasa," kata Alamsjah. Dia mencontohkan, wakil pemerintah Indonesia di Belanda relatif merasa tidak aman terhadap kemungkinan ditingkahi warga RMS itu.

Alamsjah benar. Para pendemo yang pekan lalu beraksi memang siap menyerbu KBRI. Untung polisi cukup sigap menghadang dan menghalau mereka. Untuk upaya itu, memang 10 anggota polisi menjadi korban amukan. Malah sampai akhir pekan lalu, dua polisi yang luka parah masih mendekam di rumah sakit.

Budi Winarno/Arif Budiman, Suwachman (Den Haag), Victoria Sidjabat (Jakarta)

Prinsip Kami Tak Berubah

DEMONSTRASI pada 25 April di kompleks KBRI Den Haag tak bisa dilepaskan dari peran para pemimpin kelompok yang menyebut dirinya Republik Maluku Selatan (RMS). Meski kini tidak lagi mendapat simpati dari pemerintah Nederland, kelompok ini mengklaim simpatisannya makin bertambah, terutama dari generasi muda. Berikut wawancara Suwachman dan Arif Budiman dengan "Presiden" RMS, F.L.J. Tutuhatunewa, dokter yang buka praktik di Rotterdam, pada Kamis sore pekan lalu.

Apa tujuan demonstrasi di KBRI Den Haag?

Pada 25 April itu RMS genap 45 tahun. Tiap tahun kami memperingati lahirnya RMS dengan demonstrasi.

Apa yang dituntut?

Tidak ada tuntutan khusus. Namun, itu tak berarti perjuangan kami berhenti. Tujuan utama kami masih sama dengan tujuan di saat pembentukan RMS.

Artinya, sebuah republik merdeka?

Prinsip kami tak pernah berubah dari dahulu. Hanya, kini kami menghindari bentrokan fisik. Kami melakukannya melalui ceramah, diskusi, dan gerakan demokratisasi.

Tapi, demonstrasi di KBRI sangat brutal?

Itu karena polisi mencoba menghalangi. Padahal, mereka orang-orang muda yang umumnya emosional.

"Itu karena polisi mencoba menghalangi."

Berapa jumlah mereka? Ada kaitannya dengan demonstrasi di Dresden?

Sekitar tiga ribu. Tidak ada kaitan. Di Dresden kami ikut solider menentang pelanggaran HAM dan hanya mengirim empat orang utusan. Tapi bahwa kemudian jumlahnya banyak, karena banyak pula yang solider dengan perjuangan kami.

Berapa pendukung RMS sekarang?

Seluruhnya sekitar 50.000 orang, tersebar di Nederland, Belgia, dan Amerika Serikat. Di Nederland saja sekitar 4.000. Mereka adalah generasi penerus.

Organisasinya sendiri?

Masih utuh. Selain saya, ada Otto Matulessy yang mengoordinasi para menteri. Lalu Ny. Frieda Sahuwat yang berurusan dengan berbagai NGO. Ada John Wahulettie yang punya urusan ke dalam, dan Fritz Mocal yang berurusan dengan penerangan dan pers. Pak Manusama sendiri sekarang menjadi penasihat utama.

Selain HAM, apa lagi yang menjadi persoalan bagi Anda?

Kedekatan pemerintah RI dengan Jerman dan Jepang, terutama di bidang investasi. Kejahatan Jerman dan Jepang di zaman perang tidak bisa dilupakan umat manusia. Kami menganggap hal itu bisa timbul kembali.

Anda punya hubungan dengan NGO (LSM) di Belanda, apa saja?

Ya, dengan semua LSM yang menentang pelanggaran HAM. Namun, yang ikatan solidaritasnya menonjol adalah dengan UNPO (*Unrepresented Nations and Peoples Organization*). LSM lain, misalnya dengan Amnesty International, Pax Christie, dan Rood Kruise (Palang Merah).

ARIF BUDIMAN
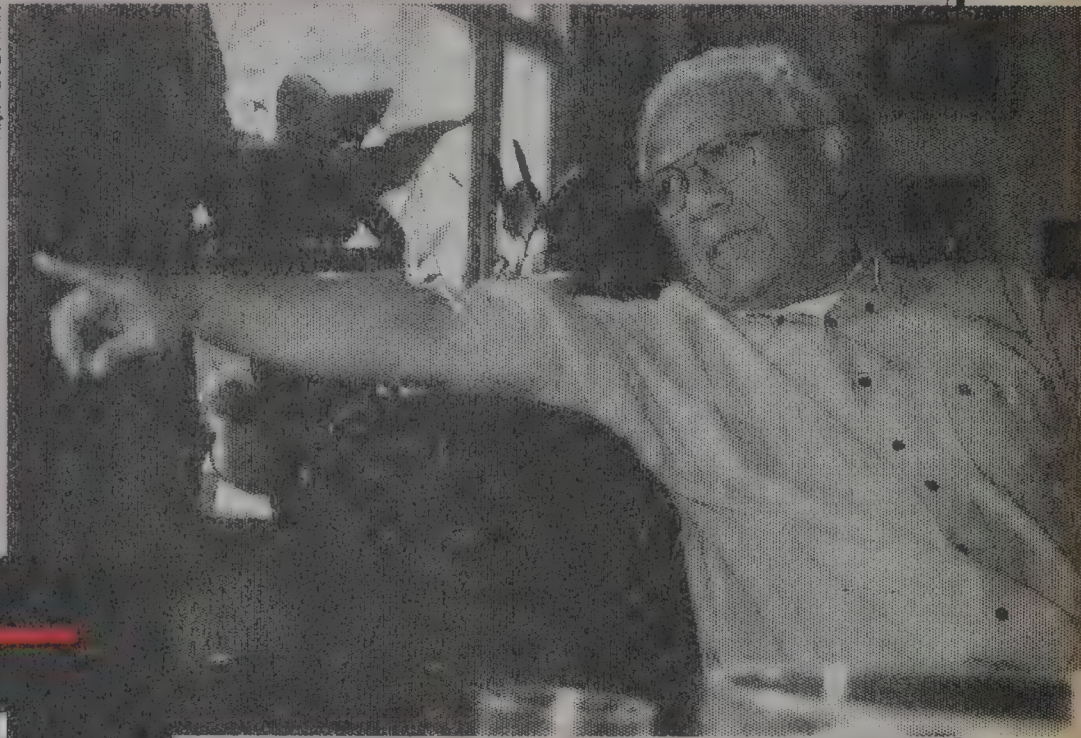
F.L.J. Tutuhatunewa

Dengan gerakan-gerakan separatis lain?

Tidak ada. Kami bertemu mereka dalam demo di Dresden karena solidaritas saja. Orang-orang Timor Timur itu datang dari Portugal, orang-orang Aceh Merdeka datang dari Swedia, sedang orang-orang OPM dari Den Haag.

Penilaian Anda terhadap generasi muda?

Generasi muda sekarang lebih terbuka, lebih bisa mengerti dan mereka lebih dinamis. Yang memprihatinkan, sebagian generasi muda kini terjerat obat-obatan terlarang. Saya benar-benar prihatin. Bagaimana mungkin orang kecanduan obat bisa meneruskan perjuangan.

Ada keinginan pemimpin atau orang-orang RMS untuk ke Indonesia?

Ya, tentu saja, menengok keluarga, misalnya. Tetapi bagaimana mungkin. Seperti kami, sebagai warga negara Nederland, kami tidak akan memperoleh visa dari KBRI. Padahal, warga negara Belanda yang bule bisa memperoleh visa. ■

Mereka Hanya Sedikit Sekali

DALAM rangka memperingati 50 tahun organisasi yang menaunginya, pemuda-pemudi RMS melakukan unjuk rasa. Diikuti oleh sekitar 3.000 orang, demo kali ini dinilai cukup besar. Menurut Menteri luar Negeri Ali Alatas, bukan pertama kali itu saja mereka berunjuk rasa. Boleh dibilang, mereka melakukannya hampir setiap tahun. Karena itu, menurut Menlu, peristiwa itu tidak perlu dibesar-besarkan. Berikut penuturan Menlu Ali Alatas seputar demo itu kepada Totok Suryanto.

Komentar Anda terhadap demo RMS di KBRI Den Haag?

Soal demonstrasi itu sebenarnya memang diada-adakan, dan ini soal yang biasa terjadi di Belanda, yang selalu dilakukan setiap tahun oleh RMS. Jadi, kita jangan memberitakannya seolah-olah itu adalah *"something new"*. Setiap tahun, mereka pergi ke Maliveld. Dari Maliveld, mereka melewati KBRI kita, meski agak jauh. Selanjutnya mereka pergi ke tempat lain, lantas bubar. Tiap tahun, ya, begitu.

Kok, sampai diberitakan cukup ramai?

Ya, barangkali kebetulan di situ ada wartawan. Dan wartawan itu, barangkali, memang baru pertama kali melihatnya. Lantas dibikin beritanya, lalu seolah-olah dunia mulai dengan beritanya.

Soal pengrusakan yang dilakukan?

Lho, itu sering mereka lakukan. Malahan dulu lebih gawat lagi. Mereka sampai merusak kereta api. Justru sekarang ini jauh lebih berkurang. Nah, yang saya mau katakan sebenarnya, janganlah kita selalu melihat hal-hal itu di luar proporsi. Memang, terjadi demonstrasi, itu iya. Tapi bahwa demonstrasi itu sendiri terjadi tiap tahun, juga iya. Memang betul. Tapi janganlah membesar-besarkan masalah yang sebenarnya tidak besar.

"Kita jangan bikin penting sesuatu yang tidak penting."

Tidakkah berdampak terhadap Indonesia?

Saya katakan, secara politis, hal itu tidak menimbulkan dampak apa pun.

Adakah kaitannya dengan demo di Jerman?

Endak ada. Artinya, demonstrasi itu dilakukan bertalian dengan, saya kira, ya yang mereka anggap RMS.

Motivasi mereka berdemo?

Dari dulu sampai sekarang kan mereka itu menganggap bahwa dulu mereka telah memproklamasikan apa yang disebut dengan Republik Maluku Selatan atau RMS. Lha, lalu mereka kan gagal. Kemudian, sisa-sisanya mencoba mendirikan sesuatu yang gagal dan mengungsi ke Belanda. Nah, mereka yang baru-baru ini melakukan demonstrasi.

Bagaimana tanggapan dunia internasional terhadap aksi-aksi RMS?

Ya, hampir tidak ada, hampir tidak ada. Bisa kita lihat itu.

Kalau begitu, motivasi mereka apa?

Ya, hanya ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Padahal, dunia sudah tidak mengenal itu.

Bagaimana upaya penyelesaiannya dengan pemerintah Belanda?

Hal ini sebenarnya sudah lama kami tangani, tapi inti penyelesaiannya adalah bukan repatriasi. Inti persoalan yang sudah kita sepakati, antara pemerintah Indonesia dan Belanda, adalah bagaimana Belanda mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Belanda. Selanjutnya, melihat hal itu sebagai masalah yang menjadi tanggung jawab Belanda. Namun ada satu aspek kecil, yaitu ada orang-orang tertentu di antara mereka, biasanya yang sudah lanjut usia, mau pulang atau repatriasi. Ini bisa kita lihat kasus demi kasus.

ADANG GUMILAR

Ali Alatas

Kabarnya, warga Belanda asal Maluku itu hanya sedikit saja yang RMS dan sisanya memang ingin kembali ke RI?

Ya, memang banyak yang ingin kembali ke sini. Tapi apa yang disebut *hardliners* (kelompok garis keras) itu sudah semakin berkurang. Karena apa? Karena generasi pertama yang mengungsi ke Belanda itu sudah uzur dan berkurang. Jadi yang tinggal sebenarnya, ya, anak-anaknya yang tidak tahu banyak mengenai apa yang disebut RMS itu.

Apa mungkin mereka nanti akan diterima?

Sebagian sudah menunjukkan kesadaran, sebagian sudah pulang dan menetap kembali di Indonesia. Bukan saja anak-anaknya, tapi juga mereka yang sudah lanjut usia. Kami bantulah, mana yang bisa kami bantu.

Ada syarat agar bisa kembali?

Oh, tidak dong. Mereka biasanya sudah sadar. Misalnya, yang tua itu ingin kembali ke kampung halamannya sebelum meninggal. Atau juga yang muda karena sadar tidak ada gunanya lagi menjadi RMS. ■

MENDEMO LBH PASCABINTANG

Nasionalisme pengurus LBH yang mengambil sikap sejalan dengan Sri Bintang Pamungkas dipertanyakan. Ada apa?

Gelombang kasus Sri Bintang Pamungkas akhirnya ikut menelan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Gara-gara gigih membela Bintang, LBH di bawah yayasan itu didemo besar-besaran. Selebaran gelap dengan nada-nada menghujat pun membanjir menyusul kasus demo terhadap Bintang.

Selebaran-selebaran itu umumnya berisi keraguan terhadap nasionalisme LBH. Pada 25 dan 26 April, sekitar 150 pemuda yang menamakan diri Forum Komunikasi Pemuda Jakarta (FKPJ), Ikatan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Irian Jaya (IPMPI), serta Forum Komunikasi Generasi Muda Jakarta (FKGMJ), secara bergantian mengadakan aksi ke kantor lembaga itu.

Bergerak dari halaman Bioskop Metropole, rombongan berjalan kaki sejauh kurang lebih 200 meter ke kantor YLBHI di Jalan Diponegoro. Sambil menyanyikan lagu kebangsaan, mereka menggelar poster-poster bertulisan, "Jangan jual nama baik bangsa di luar negeri", "Kami rela mati demi nasionalisme", "Jangan coba-coba memecah belah bangsa sendiri, nyawa kami taruhannya".

Harianto Badjuri, Ketua FKGMJ, menyampaikan lima butir tuntutan kelompoknya. Salah satunya, meminta agar LSM yang ada di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan lembaganya. "YLBHI juga agar tidak merugikan bangsa dan negara dalam membela Sri Bintang," kata Harianto.

Forum ini juga mengutuk tindakan Sri Bintang yang dituding mengatasnamakan bangsa Indonesia dan menjelek-jelekkan Indonesia di luar negeri. "Kami ini kan bangsa Indonesia. Toh kami tidak pernah merasa terwakili lewat Sri Bintang," katanya.

YUL ADRIANSYAH
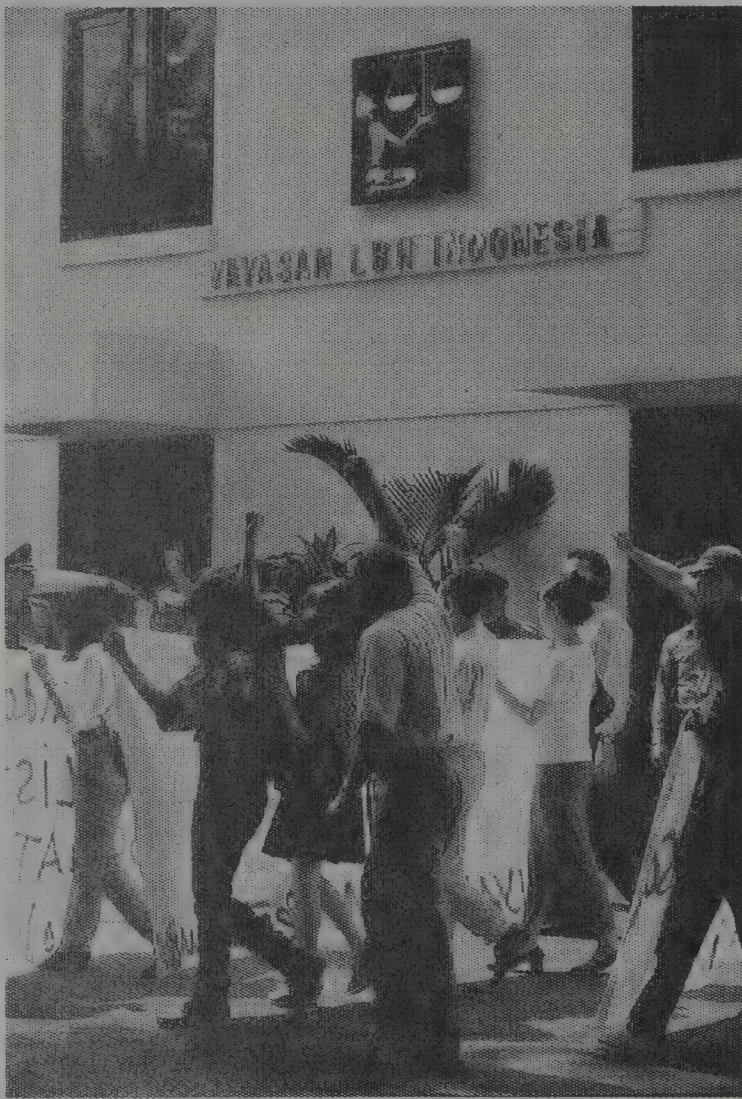
DEMO DI LBH: Buntut kasus Bintang.

Hendardi, Direktur Komunikasi YLBHI, yang menerima rombongan itu dengan tegas mengucapkan tanda setuju dengan aspirasi mereka. Selain itu, Hendardi juga meminta agar massa tidak terkecoh dengan pengertian bangsa, pemerintah, dan negara. "Kami akan berupaya seadil-adilnya dalam membela Bintang, tanpa menghilangkan nasionalisme yang ada," katanya.

Mengapa timbul kecurigaan terhadap YLBHI? Masalah ini kembali mengungkit cerita lama: YLBHI itu punya kaitan erat dengan LSM di luar negeri. Inilah yang menyebabkan massa ragu terhadap nasionalisme YLBHI dalam membela Bintang.

Pihak YLBHI pun memaklumi keraguan itu. Hendardi mengakui, 80% dana YLBHI merupakan bantuan dari lembaga asing, seperti NOVIB (Belanda), USAID (Amerika Serikat), dan LSM Swedia. Selebihnya adalah sumbangan dari simpatisan yang ada di Indonesia.

Dalam tiga tahun, menurut Hendardi, dana operasional YLBHI untuk seluruh LBH di Indonesia mencapai Rp 2,5 miliar. Biaya ini termasuk gaji 200 orang pengacara dan pegawai yang ada. "Tetapi bukan berarti kami tidak punya rasa nasionalisme. Kepentingan bangsa tetap kami utamakan," kata aktivis ini.

Kaitan bantuan itu, kata Hendardi, sesuai dengan iklim global yang semakin jelas. Terutama soal hak asasi manusia yang menjadi obyek perhatian dunia Internasional. Jadi, menurut Hendardi, bantuan itu hanya sekadar rasa solidaritas masyarakat dunia terhadap Indonesia. "Toh, negara kita juga menerima bantuan dari luar negeri," katanya.

Berbeda dengan sikap pemuda yang melakukan aksi itu, Bismar Siregar malah sangat menyayangkan aksi demo terhadap Sri Bintang dan YLBHI itu sampai terjadi. "Sangat tidak bijaksana melakukan demonstrasi terhadap YLBHI dan Bintang dalam kondisi saat ini," kata Hakim Agung itu seraya mengutip ayat Alquran, "Janganlah karena kebencian terhadap satu golongan, engkau menyimpang dari sikap adil."

Bahkan, anggota Komnas HAM ini yakin, YLBHI pasti bijak dalam membela Bintang. "Saya percaya dengan kearifan LBH walaupun mereka mendapat bantuan dari luar," katanya. Sebaliknya, Bismar agak curiga, jangan-jangan kelompok yang melakukan aksi itu cuma kelompok pahlawan kesiangan. Lho?

Ahmady Meuraxa

ERWIN HADI

PRESEDEN KETATANEGARAAN: Bintang dijemput petugas.

TATA NEGARA

Preseden untuk Sebuah Konvensi

Izin pemanggilan Sri Bintang oleh Menteri Moerdiono bisa menjadi konvensi ketatanegaraan. Bertentangan dengan UU?

Bagaimana keabsahan surat panggilan pemeriksaan Dr. Sri Bintang Pamungkas yang diteken Menteri Sekretaris Negara Moerdiono? Persoalan ini mencuat mengingat status Bintang sebagai anggota DPR. Undang-undang menyebutkan, pemanggilan anggota DPR dilakukan atas perintah presiden. Karena itu, begitu keluar tanda tangan Moerdiono, Bintang (50 tahun) langsung mempertanyakan keabsahannya. "Surat pemanggilan itu tidak sah," katanya.

Pada hari pertama, pemanggilan Bintang bahkan tanpa dilengkapi surat perintah sama sekali. "Polisi enggak mau menunjukkan surat panggilan buat saya," ujar Bintang. Sekalipun demikian, Bintang mau juga memenuhi panggilan tersebut. Pada hari kedua, baru polisi memperlihatkan surat panggilan, tapi yang meneken adalah Menteri Moerdiono.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Terhadap Anggota/Pimpinan MPRS/DPRS disebutkan, tindakan polisi tadi harus dilakukan atas persetujuan presiden. Karena Bintang dari kalangan sipil, pelaksanaannya dilakukan atas perintah jaksa agung.

Aturan main dalam pasal tadi berlaku karena Bintang dianggap tidak tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Andai Bintang tertangkap tangan, menurut Pasal 3 UU itu, polisi bisa langsung bertindak tanpa izin presiden.

Masalahnya sekarang, kalimat "dilakukan atas persetujuan presiden" bisa melahirkan berbagai penafsiran. Apakah persetujuan presiden yang dimaksud adalah persetujuan tertulis? Apakah persetujuan tadi harus diteken langsung oleh presiden? Ini yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, undang-undang yang hanya terdiri dari tujuh pasal itu juga tidak disertai peraturan pelaksanaan.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Sri Soemantri, menilai bahwa izin pemanggilan tetap harus ditandatangani presiden, bukan oleh seorang menteri (menteri sekretaris negara, *Red.*). Berarti, izin pemanggilan harus tertulis dan diteken langsung oleh presiden. "Saya juga enggak mengerti, kenapa kok jadi begitu?" kata Soemantri.

Menurut Soemantri, peristiwa yang jarang terjadi seperti ini bisa jadi akan menjadi konvensi ketatanegaraan. Ada kalanya, konvensi tadi menguntungkan, seperti adanya konvensi pidato presiden menjelang 17 Agustus atau penjelasan presiden mengenai RAPBN di awal tahun. Tapi, ada juga konvensi yang malah menimbulkan persoalan hukum, seperti surat Presiden Nomor 2826 kepada DPR yang isinya menafsirkan Pasal 11 UUD 45 mengenai perjanjian internasional. "Seharusnya, bukan wewenang presiden menguji undang-undang, melainkan wewenang DPR," kata Soemantri.

Satu hal lain, kata Soemantri, kalau prosedur pemanggilan tadi akan dikonvensikan, itu sama artinya dengan menggeser kedudukan lembaga legislatif yang tidak pada tempatnya.

Sebaliknya, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara FHUI, Dr. Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa izin pemanggilan yang diteken Moerdiono tetap sah. Pemberian izin dari presiden sebagai kepala negara kepada menteri sekretaris negara bukan pendelegasian wewenang, seperti presiden kepada gubernur. Menteri sekretaris negara menyampaikan surat pemberitahuan bahwa presiden sudah setuju atau mengizinkan tentang pemanggilan Bintang. "Jadi, lebih bersifat administratif," kata Yusril.

Karena tidak disebutkan secara eksplisit, kata Yusril, izin lisan presiden pun tidak menyalahi aturan. Begitu juga soal tidak adanya tanda tangan presiden seperti yang dipertanyakan Bintang. Karena memang tidak ada keharusan presiden meneken langsung surat izin tersebut. "Itu penafsiran saya," ucap Yusril.

Ketua Komisi III DPR, S. Suhardi, menilai, secara eksplisit sebenarnya undang-undang sudah jelas. "Namun, kalau dalam kenyataannya kemudian lain, itu terserah para ahli hukum," katanya. Begitu juga bila ingin menjadikannya sebagai konvensi ketatanegaraan. "Hukum kan selalu berkembang," ucap Suhardi.

Agung Mattauch/M. Iskandar Zulkarnain

WAWANCARA

"Tafsirkan Sendiri Keterangan Saya"

Kasus tanah Hanoch Hebe Ohee di Irian Jaya barangkali dapat menjadi batu sandungan buat Ketua Mahkamah Agung, R. Soerjono. Hampir semua praktisi hukum bahkan beberapa kolega Soerjono menganggap surat petunjuk sang ketua untuk kasus itu merupakan penyimpangan hukum dan tidak sah. Berikut penjelasan Soerjono menjawab pertanyaan Noor Fatachi.

Apa Anda merasa surat petunjuk itu tidak berlebihan?

Mahkamah Agung kan punya wewenang mengawasi jalannya peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berhak melakukan teguran, peringatan, dan petunjuk.

Apa dasar hukumnya?

Dasar hukumnya Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang menyebutkan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan di Indonesia. Selanjutnya dinyatakan, dalam pengawasan, Mahkamah Agung dapat memberi teguran, peringatan, dan petunjuk kepada pengadilan negeri.

Bagaimana surat petunjuk Anda akhirnya membuat segalanya tidak pasti?

Begini, dalam perkara perdata, kan orang bisa mengajukan gugatan perdata kapan saja. Tidak dibatasi waktu seperti dalam peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam TUN dibatasi 90 hari terhitung sejak penetapan yang akan digugat itu diterima atau diumumkan. Jadi, dalam kasus perdata itu, bila dia merasa punya hak dan hak itu dilanggar orang lain, dia bisa mengajukan gugatan lagi, kapan saja.

Lama lagi, dong...

Makanya, kalau bisa damai, damaikan saja deh. Itu lebih baik. Lebih baik damai daripada berperkara.

NOOR FATACHI

Soerjono

Menteri Kehakiman berpendapat, ketua pengadilan negeri di Irian Jaya itu tetap bisa melaksanakan eksekusi. Pendapat Anda?

Menurut UU, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan memecahkan perkara-perkara pidana dan perdata, termasuk perkara di lingkungan peradilan agama dan tata usaha negara. Eksekusi dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Jadi, eksekusi bisa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri?

Memangnya Mahkamah Agung yang menjadi eksekutornya? Bukan, toh? Menurut hukum acara perdata, sebagai eksekutornya ketua pengadilan negeri yang bersangkutan sebagai pemimpinnya dan dilaksanakan oleh panitera dan juru sita.

Bagaimana sebenarnya isi putusan peninjauan kembali itu?

Dalam putusan peninjauan kembali ditetapkan, enam tergugat dihukum membayar Rp 18,6 miliar kepada penggugat dengan bagian masing-masing seperenamnya. Tapi, ingat, instansi-instansi tersebut hanya mewakili instansinya dan bukan merupakan badan hukum.

Daerah tingkat I, daerah tingkat II, atau negara RI merupakan badan hukum publik dan enggak bisa bertindak. Yang mewakili tindakan hukum dalam daerah tingkat I, menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1974, adalah gubernur. Dalam prinsip perwakilan, yang diwakili dan yang mewakili berbeda. Yang mewakili bertindak untuk dan atas nama yang diwakili. Yang diwakili yang bertanggung jawab. Jadi, yang bertanggung jawab tetap yang diwakili.

Dalam hal ini, kalau gubernur mewakili daerah tingkat I, dia hanya sekadar mewakili. Dan yang bertanggung jawab tetap daerah tingkat I. Tangung jawab, hak, dan kewajiban terpisah dengan yang mewakili. Dan dalam kasus di Irian Jaya, yang menjadi pihak tergugat bukan hanya gubernur, ada enam instansi lain.

Bukankah pejabat itu mewakili badan hukumnya?

Kan menurut UU, gubernur dan lainnya itu dengan sendirinya berwenang mewakili. Lho, tapi mereka tidak bisa diharuskan membayar.

Ke dalam maupun ke luar pengadilan, daerah tingkat I itu diwakili gubernur. Jadi, menurut UU, gubernur-lah yang mewakili daerah tingkat I. Itu sekadar perwakilan. Tapi, tanggung jawab yang mewakili dan yang diwakili itu berbeda.

Jadi, menurut Anda, yang harus digugat itu Pemda Tingkat I Irian Jaya, dinas pertanian, atau...

Tafsirkan sendiri keterangan saya. ■

HAK HUNIAN

Terpuruk di Sepucuk Surat

Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dikalahkan oleh sepucuk surat wali kota. Pelecehan hukum?

"O, *o..., ya, o..., ya, bongkar,*" kata Penyanyi Iwan Fals. Tapi, kalau sekelompok orang membongkar Mess PT Pelni di Jalan Pembangunan III, Jakarta Barat, itu bukan lantaran syair lagu tersebut. Pembongkaran ini murni atas perintah Wali Kota Jakarta Barat. Padahal, sebelumnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan penetapan penangguhan pembongkaran karena persidangan masih berjalan.

Awalnya memang dari kemelut Mess Pelni seluas satu hektare yang dihuni sekitar 68 kepala keluarga. Penduduk sudah mendiami lokasi eks *Logeergebouw* KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschapij) sejak 1957. Dasar hukumnya, izin penunjukan dari Penguasa Perang Daerah (Peperda). Penduduk setempat dianggap negara sudah berjasa mengambil alih aset milik Belanda tersebut.

Sekalipun pada 1960, dalam rangka nasionalisasi, bangunan/rumah di atas lokasi diserahkan kepada negara, izin penghunian tetap berlaku. Selanjutnya, negara menyerahkan keberadaan tanah kepada Pelni.

Belakangan, Pelni ingin mengosongkan lokasi mess. Menurut rencana, lokasi tadi akan dijadikan areal perparkiran. Sedangkan penduduk menganggap lahan akan dipakai buat pusat pertokoan.

Yang jelas, untuk melaksanakan pengosongan tersebut, dibentuklah tim tersendiri. Tim inilah yang bertugas, antara lain, membayar ganti rugi kepada penghuni yang akan pindah.

Namun, tampaknya, tidak semua penduduk mau pindah. Persoalan makin kacau karena penduduk yang sudah memperoleh ganti rugi ada yang tidak mau pindah juga. Ini membuat pihak Pelni panas. Apalagi penduduk mulai "ngoceh" kepada banyak pihak, antara lain kepada Menko Polkam.

Pengacara Pelni dari Law Ladies Associates menyebutkan, penduduk menghuni lokasi tanah Pelni berdasarkan izin penghunian dari Pelni. Izin penghunian sebenarnya bagi pegawai Pelni yang aktif, tapi kenyataannya banyak pensiunan juga masih tinggal di lokasi tersebut.

ISTIMEWA

EKSEKUSI MESS PELNI: Tidak ada yang kuasa mengeremnya.

Sedangkan surat izin dari Peperda kepada penduduk sebelumnya dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum lagi: gugur demi hukum bersamaan dengan penghapusan Peperda dan sejak nasionalisai KPM.

Di samping itu, masalah penghunian dan pengosongan Mess Pelni adalah wewenang Pelni sendiri. Sedangkan pembongkaran bangunan tanpa IMB adalah wewenang Wali Kota. Selama ini, penduduk mencampuradukkan kedua wewenang tersebut. Pelni juga menolak istilah "kolusi" seperti yang dituduhkan penduduk, ketika mereka meminta bantuan Wali Kota.

Pihak Pelni juga menolak anggapan tidak mau bermusyawarah. Sebab, menurut Pelni, suatu hari pihaknya pernah mengundang wakil penduduk, tapi yang diundang ternyata malah tidak datang. Usaha musyawarah itu pula yang ditunjukkan Pelni dalam hal ganti rugi. Sebagian penduduk, 42 KK dari 69 KK, akhirnya bersedia menerima ganti rugi yang ditawarkan.

Namun, perkara itu toh jalan terus, khususnya dari penduduk yang memang tidak mau menerima ganti rugi.

Pimpinan Pelni kemudian mengontak pihak Wali Kota agar membantu usaha pengosongan. Pihak Wali Kota lalu beraksi. Kepada penduduk yang "membangkang" tadi dimintakan segera mengambil uang ganti rugi yang sudah disiapkan. Penduduk juga dianggap sudah melanggar ketentuan karena tanpa izin merombak bangunan yang mereka huni. Bila tidak diambil juga, uang ganti rugi akan dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan bagi yang tidak membongkar bangunan tambahan tadi, aparat Wali Kota akan membongkarnya dengan paksa. Demikian terangkum dalam Surat Wali Kota, 12 Oktober 1994. Surat ini membuat penduduk "gerah".

Karena merasa terancam oleh surat tersebut, penduduk menggugat dua pihak yang menerbitkan surat -- Wali Kota dan pemimpin Pelni -- ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tuntutan mereka sebenarnya sederhana: meminta eksekusi pengosongan dilakukan setelah vonis pengadilan.

Di luar dugaan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Benyamin Mangku Dilaga, mengabulkan tuntutan penduduk. Hanya saja, kemenangan penduduk agaknya tidak lama karena eksekusi toh tetap dilaksanakan pada 20 April lalu. Penetapan Ketua PTUN agaknya tidak kuasa mengerem perintah eksekusi wali kota.

Agung Mattauch/M. Iskandar Zulkarnain

ERWIN HADI

OPERASI WALET: Konsumsi anak orang kaya.

KOREKSI PASAR DI OBAT TELER

Pasar Ecstasy untuk kalangan eksekutif banyak yang belum terjamah petugas. Para pecandunya kembali ke obat lama.

Perburuan obat-obat terlarang tak akan berhenti. Tim Walet dari Polda Metro Jaya gigih melakukan operasi. Di pihak lain, para pedagang besar, makelar, agen, pengecer, dan bahkan pengasongnya dapat berkelit.

Namun, salah seorang pengasong yang berinisial Gusuk tertangkap di sebuah diskotek di Jalan Sudirman, Jakarta. Dan itu bisa dibilang karena keteledorannya sendiri. Dia menjual Ecstasy kepada seorang polisi yang sedang menyamar. Dari tangannya disita 21 butir pil berwarna *pink* itu beserta uang sebanyak Rp 600.000. Gusuk akhirnya ditahan dan diinterogasi oleh polisi untuk mengetahui dari siapa dia memperoleh barang dagangannya.

Tampaknya, malam itu, Gusuk membawa 25 butir dan baru terjual 3 sampai 4 butir. Ini terlihat dari uang yang dibawanya, karena per butir Gusuk menjual pilnya Rp 140.000.

Ecstasy memang bisa dibilang atribut orang kaya atau anak orang kaya pecandu obat. Gusuk sendiri menurut KTP-nya beralamat di Kramatjati, Jakarta Timur. Tetapi, kepada petugas, dia mengaku tinggal di rumahnya yang ada di kawasan Cipete. Namun, menurut lacakan *SINAR*, pemuda yang berstatus mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Selandia Baru itu tidak tinggal di daerah tersebut, melainkan menempati rumahnya di kawasan Tanjung Barat.

Sejak operasi Tim Walet makin galak, harga berbagai jenis Ecstasy yang laris di pasaran merambat naik. Di diskotek kelas menengah dan atas, harga sebutir *Inex*, demikian nama populer untuk obat jenis ini, yang semula Rp 175.000 per butir, kini sudah mencapai Rp 190.000 hingga Rp 200.000.

Operasi Tim Walet sebenarnya bukan khusus menjaring pedagang obat terlarang. Operasi itu lebih merupakan *multitarget operations* yang mencakup berbagai masalah yang dijumpai di lapangan, dari preman, judi, alkohol, obat, sampai soal KTP.

Sayangnya, karena petugas terlampau sering bergentayangan di lapangan, kini banyak "apoteker" -- demikian sebutan untuk pengasong atau penjaja Ecstasy -- bersembunyi dan menyimpan dagangannya. Bagi "apoteker" yang lincah, dia akan mencari pasar atau lahan baru yang belum disentuh pihak keamanan. Misalnya, tempat-tempat pertemuan khusus milik satu lembaga atau perusahaan, atau malah di kantor-kantor. Terutama di tempat-tempat yang banyak dikunjungi para eksekutif muda.

Lingkungan serupa itu, misalnya di sebuah tempat mangkal sejumlah eksekutif asing (ekspatriat) di kawasan Gambir, menjadi pasar yang cukup ramai. Bahkan, sebuah rumah makan eksklusif di kawasan Kota, Jakarta, tempat para eksekutif atau kalangan selebritis bisa menikmati suasana nostalgia, menjadi tempat transaksi yang tak kalah ramainya.

Mengapa tempat-tempat serupa itu tidak dijadikan sasaran operasi? Kepada *SINAR* seorang petugas menjelaskan, untuk masuk ke kawasan seperti itu diperlukan dana cukup besar. "Yang bisa masuk ke situ hanya perwira-perwira. Dan, untuk sampai ke sasaran, kami membutuhkan waktu cukup lama," katanya.

Yang menarik dicatat, perkembangan pasar obat terlarang ini mengalami siklus. Melihat harga Ecstasy dari jenis *pink* gendut, duyung, lumba-lumba melambung karena peredarannya untuk sementara ini menjadi agak langka, pasar "obat tradisional" pun belakangan muncul lagi. "Mau tidak mau, kami sekarang kembali ke asal," kata seorang kunsumen Ecstasy kepada *SINAR*.

Yang dimaksud kembali ke asal, konsumen Ecstasy itu kembali menenggak obat-obat lama, seperti Rohipnol, Nipam, BK, Mogadon, dan sebagainya. "Kami akhirnya kembali ke yang dulu, yang harganya murah. Rohipnol cuma sekitar Rp 30.000 dan Nipam Rp 20.000," katanya.

Berbeda dengan di Bali. Di sana yang gandrung dikonsumsi adalah heroin. Sementara, menurut seorang konsumennya, "Hero di sini sulit. Habis mahal, sih. Kalau mau pun, kami harus menyediakan uang di atas Rp 300-an ribu."

Bagaimana dengan *gelek*? "*Gue* enggak begitu suka *gelek*. Harganya memang lebih murah lagi, sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per amplop," ujar konsumen heroin tadi.

Yohanes S. Widada/Titin Rosmasari

SEKS BEBAS

Menjaring Pelacur Dini

Banyak pelajar terjebak ke dalam pelacuran. Sisi lain dari konsumsi alkohol dan obat terlarang?

Tiga wanita dan lima pria berusia remaja ditangkap polisi dalam keadaan bugil dan teler. Ini barangkali peristiwa yang paling menyedihkan bagi para orangtua di Desa Sidowayah, Klaten, Jawa Tengah.

Mereka dipergoki petugas ketika sedang melakukan pesta seks sehabis menenggak minuman keras pada Selasa tengah malam, 18 April lalu. Tim Kurung dari Polres Klaten secara kebetulan malam itu melakukan patroli keliling. Tim itu antara lain memasuki wilayah yang agak terpencil di sebuah gedung SD. Di tempat yang gelap dan sepi itu petugas curiga begitu mendengar suara anak-anak muda yang sedang cekikikan. Lalu, "Mereka ditangkap ketika sedang berbuat mesum di teras SD yang cukup gelap," tutur petugas.

Penangkapan kedelapan remaja berusia 15 hingga 18 tahun dan masih belajar di bangku SLTA ini jelas merupakan klimaks dari kabar sebelumnya di wilayah ini. Peristiwa itu terjadi dua pekan setelah dokter Muchtadi dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah melansir hasil penelitiannya. Hasil penelitian itu antara lain menyebutkan, 6% pelajar SLTA di provinsi ini pernah melakukan hubungan seks. Jika saat ini Jawa Tengah memiliki 630.283 orang siswa SLTA, berarti jumlah yang sudah melakukan hubungan seks sekitar 37.000 orang.

Yang menarik untuk dicatat dari hasil penelitian ini adalah, 60% dari mereka mengaku melakukan hubungan seks bebas di rumah sendiri. Sedangkan 40% sisanya mengaku melakukan perbuatan itu di penginapan atau hotel.

Memang belum diperoleh hasil yang lebih rinci, apakah para pelajar yang pernah melakukan hubungan seks itu juga terkait dengan pelacuran. Soalnya, Muchtadi tidak mengungkap dengan siapa para pelajar itu melakukan hubungan seks. Jika para pelajar itu melakukan hubungan seks dengan sesama pelajar, baik dalam hubungan pacar maupun bukan, bisa diperkirakan pelajar yang sudah melakukan hubungan seks itu jumlahnya mencapai dua kali lipat. Atau, lebih dari 70.000 orang.

ERWIN HADI

PELAJAR MASA KINI: Gampang menjadi pelacur.

Di lain pihak, menurut data yang dimiliki Muchtadi, dari seluruh wanita tunasusila di Jawa Tengah, ada 15% yang berstatus belum pernah kawin.

Tentu saja ini merupakan berita buruk bagi daerah ini. Sebab, belum lama berselang juga terjadi tragedi yang menimpa para remaja. Belasan anak muda tewas secara konyol karena menenggak obat yang disebut sebagai pil koplo.

Praktik hubungan seks antara sesama pelajar, bahkan antara seorang siswa dan pelacur atau antara siswi dan para hidung belang, tampaknya sudah menjadi kecenderungan umum di berbagai wilayah.

Motifnya, ada yang untuk tujuan komersial, ada juga yang karena hubungan pacar atau suka sama suka.

Apa yang terjadi di Sukabumi barubaru ini juga mencerminkan kecenderungan umum para remaja masa kini. Mereka, selain terlibat dalam kasus pelacuran, juga menjadi konsumen obat-obat terlarang.

Pekan silam, ada tujuh orang siswi SLTA dikeluarkan dari sekolahnya karena terbukti terlibat bisnis seks.

Ketujuh siswi itu sebut saja Tuti, Santi, Mira, Lusi, Eka, Mini, dan Suri. Sebagian dari mereka masih duduk di kelas III dan kelas II. Sedangkan dua pelajar lainnya, masing-masing disebut saja Ari dan Sara, dikeluarkan dari sekolahnya karena mengedarkan obat terlarang.

Yang terjadi di Sukabumi ini memang bukan yang pertama. Beberapa waktu sebelumnya juga pernah terungkap, dua orang siswi SLTA terlibat kasus prostitusi.

Menurut petugas, mereka yang melacur umumnya memangkal di tempat-tempat strategis, seperti di kawasan toserba dan rumah-rumah makan yang ada di pusat kota. Menurut para petugas yang berhasil menangkapnya, di antara para pelajar itu bahkan ada yang beroperasi di saat jam sekolah dan masih mengenakan seragam sekolah.

Remaja Sukabumi banyak yang terpengaruh kehidupan remaja Jakarta. Dan remaja Ibu Kota memang sudah sekian langkah lebih maju: ada yang bukan hanya menjadi pelacur dini, tapi sudah menjadi germo. Mona (15 tahun) dan Upay (21 tahun), misalnya, yang kini meringkuk di penjara karena "menjual" teman-temannya, termasuk seorang murid SD berusia 12 tahun.

Yohanes S. Widada

PENYELUNDUPAN

Barang Haram di Kota Mulia

Kemudahan impor di bawah US$ 5.000 diduga rawan penyelundupan. Perlu Inpres perbaikan?

Tak ada yang mengira, KM Kota Mulia dengan kode pelayaran Voy 83 ternyata membawa barang-barang haram. Sedikitnya ada 16 peti kemas berukuran 14 *feet* yang diduga kuat berisi barang selundupan. Dan terbukti, dari pembongkaran sembilan peti kemas yang dimulai sejak Kamis 13 April lalu, petugas Bea Cukai menemukan tiga BMW tanpa roda belakang. "Kami akan memburu terus, siapa sebenarnya yang bermain dengan barang haram ini," kata Kepala Polda Jawa Timur, Mayjen Roesmanhadi.

Cuma entah dari mana, petugas Bea Cukai sebelumnya sudah mencium akan adanya penyelundupan barang. Itulah sebabnya, setiap peti kemas yang mencurigakan langsung dicek kebenarannya. "Pihak intel Bea Cukai sudah mencium dan mengindentifikasi nomor-nomor dengan transit di Singapura. Dengan demikian, KM Kota Mulia sudah menjadi sasaran," kata seorang sumber di Kantor Bea Cukai.

Kendati hingga kini barang tersebut belum ketahuan pemiliknya, menurut Koesnadi Danoediningrat, Kepala Kanwil VII Bea Cukai Jawa Timur, pihaknya tidak akan sulit melacaknya. "Walaupun pemiliknya belum diketahui, kami dengan mudah mengetahui arah tujuannya, yaitu tiga importir, satu di Jakarta dan dua lainnya di Surabaya," kata Koesnadi.

Bahkan setelah melakukan koordinasi, Kejaksaan Tinggi juga akan segera memanggil tiga perusahaan yang diduga sebagai sasarannya. Ketiga perusahaan itu, PT Tri Tunggal Jaya Sakti, PT Jaya Yohan Langgeng, dan sebuah perusahaan di Jalan Minangkabau, Jakarta. "Cuma, apakah ketiganya itu merupakan importir asli atau bukan, ini masih perlu pemeriksaan. Sebab, bisa saja perusahaan itu cuma dicatut," kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, B.H. Pasaribu, kepada pers.

Pasaribu bisa saja benar. Sebab, menurut sumber *SINAR*, peti-peti kemas itu menggunakan status FCL (Full Container Load) atau CY (Container Yard). Dengan demikian, nama pemiliknya tercantum secara individual. Dan, ini bisa dilihat di peti kemas yang berisi sebuah Nissan Fair Lady Sport. Di situ nama pemiliknya jelas: PT Sapta Pusaka Graha Nusantara. Hanya saja, pihak perusahaan yang beralamat di Jalan Slamet, Surabaya, ini sangat sulit dikonfirmasi. "Jangan tanya soal itu. Kalau benar perusahaan ini yang harus bertanggung jawab, jawabannya tentu sudah ada di pihak yang berwajib," kata salah seorang staf di perusahaan tersebut yang enggan disebut namanya.

Sebenarnya, untuk membekuk pemilik peti kemas itu memang tidak begitu sulit. Misalnya dengan membiarkan pemiliknya menjemput ke tempat kejadian peristiwa (TKP). Sayangnya, kasus ini keburu terbuka. "Kalau sudah begini, mana ada yang mau menjadi tuannya? Kalaupun ketahuan, dia segera memasang jurus-jurus untuk bisa berkelit dari tuduhan itu," kata salah seorang petugas yang turut membongkar barang selundupan ini.

Waras Sutanto, Kepala Seksi di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, yang juga ketua penyidik penyelesaian perkara penyelundupan, juga berpendapat serupa. Menurut dia, untuk membongkar siapa pemilik peti kemas barang selundupan tidak sulit. Sebab, sang pemilik bakal mengajukan pemberitahuan impor untuk dipakai (PIUD). "Lagi pula, untuk ketujuh peti kemas yang belum dibuka itu ada laporan pemeriksaan surveyor (LPS)," kata Waras.

REPRO: JAWA POS

MOBIL DALAM KONTAINER: Jelas pengimpornya.

Lantas, kapan mereka mengajukan PIUD? "Ya, kita tunggu saja," tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Bea Cukai tetap akan memberlakukan deadline 30 hari bagi pemilik barang-barang impor untuk mengambil barang mereka. "Ini aturan bagi seluruh barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia," ujar pejabat Bea Cukai, H.A. Parinding, saat menyaksikan pembongkaran lanjutan.

Dalam pembongkaran lanjutan, yang dilakukan Kamis, 20 April lalu, ditemu-

kan tiga peti kemas lainnya berisi 144.000 botol bir merek Bintang, yang diimpor dari Malaysia oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia. Sebenarnya, ketiga peti kemas tersebut tidak bermasalah. Cuma, karena datangnya satu paket, pihak Bea Cukai merasa patut memeriksanya.

Pemeriksaan serupa dilakukan terhadap barang milik PT Satria Tangguh Perkasa. "Ya, ini konsekuensinya. Karena satu kapal (dengan peti kemas berisi sedan selundupan, *Red.*), barang kami ikut diperiksa," kata M. Anwar, dari PT Satria Tangguh Perkasa.

Modus penyelundupan ini termasuk rapi. Sebab, dari cara kemasannya saja sudah sulit dideteksi: di bagian depan peti kemas diisi dengan perabot rumah tangga, seperti mesin cuci, kipas angin, dll. "Melihat cara kerja mereka, importir tersebut sudah pernah melakukan kegiatan serupa," kata seorang petugas Bea Cukai.

Selain modus, ada kerawanan dalam penerapan Inpres Nomor 4 tahun 1985. Bentuknya, penyelundupan. Menurut Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), H. Amiruddin Saud, penyelundupan bisa timbul bila importir menyalahgunakan kemudahan impor di bawah US$ 5.000. "Di sini yang rawan. Sebab, barang di bawah US$ 5.000 tidak terkena pemeriksaan surveyor dan tanpa laporan pemeriksaan surveyor (LPS)," kata H. Amiruddin kepada wartawan di Jakarta.

Untuk menghindari penyelundupan dengan memanfaatkan kebijakan itu, GINSI mengusulkan agar aturan yang diberlakukan bagi semua barang impor sama, tak perlu memandang nilainya. Selain itu, aturan juga harus berlaku bagi importir terdaftar bukan perorangan. "Kalau importir terdaftar ada indikasi seperti itu, mudah dilacak," katanya. Cuma, menurut dia, pembenahan itu diperlukan Inpres baru sebagai penyempurnaan. Nah, jika tidak, siapa pun bisa kongkalikong di pelabuhan.

Moh. Kaiyis (Surabaya)

PENODONGAN

Mundur Karena Pisau

Oknum anggota DPRD mengancam seorang wartawan karena tak puas soal pemberitaan.

Benarlah, wartawan adalah profesi yang kerap bersinggungan dengan bahaya. Afit Iskandar, 45 tahun, wartawan harian *Gala*, Bandung, bisa bercerita banyak tentang itu. Wartawan yang bertugas di Tangerang itu sempat ditodong pisau oleh Drs. H. Fauzi, Wakil Ketua DPRD Tangerang, karena tak puas soal pemberitaan.

Pada 21 Maret silam, Afit Iskandar menulis berita "Setelah Dua Kali Diundur, Empat Sekwilda Dialihtugaskan Ke Wilayah Lain". Isi berita pada pokoknya bercerita tentang adanya permainan dalam penerbitan SK mutasi itu. Salah satu sumbernya adalah Fauzi, yang di antaranya berkomentar, "...SK Mutasi yang diterima tak ubahnya SK 'Sangkuriang'... siapa yang berani membayar lebih tinggi, maka itulah yang memenangkan SK...." Berita itu membuat panas Wali Kota Madya Tangerang, Djakaria Machmud, yang segera melayangkan surat protes, dan dimuat *Gala*, 15 April 1994.

GESIGORAN

Rupanya Fauzi ingin memperbaiki situasi. Lewat Chairul Djamal, Ketua PWI Tangerang, ia mengundang Afit Iskandar. Diaturlah pertemuan, di ruang kerja Fauzi di DPRD Tangerang, Kamis pagi (30 maret yang lalu). Pertemuan itu juga dihadiri Chairul Djamal, Harsono Raharjo (Bendahara PWI Tangerang), dan Baryoen (Asisten Administrasi Kodya Tangerang). Ketika itulah Afit mengaku dipaksa menandatangani surat permintaan maaf, sekaligus membantah berita yang dipersoalkan itu bersumber dari Fauzi. "Kalau surat ini tidak ditandatangani, bisa terjadi banjir darah di ruangan ini," ancam Fauzi, sambil mengeluarkan pisau dari laci meja.

Persoalan lalu berkembang. Fauzi mendapat hujatan dari mana-mana. "Tindakan oknum wakil rakyat di ruang terhormat itu tidak patut, dan merendahkan martabat lembaga yang diwakilinya," kritik Suko Waluyo, anggota DPR-RI, seperti ditulis *Pikiran Rakyat*. Menurut Suko, kalau tak suka pada sebuah pemberitaan sebaiknya menggunakan hak jawab, sesuai kode etik jurnalistik. Ketua Golkar Tangerang, Heroe Soetrisno, sudah meminta keterangan Fauzi, yang dinilai mencoreng lembaga terhormat itu. Buntutnya, seperti ditulis *Media Indonesia*, Fauzi yang menyesali perbuatannya, mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya.

Nazir Amin

YUL ADRIANSYAH

Zaenab-Sarah Kebanjiran Order

Maudy "Zaenab" Kusnaedy dan Cornelia "Sarah" Agatha mendapat berkah gara-gara menjadi bintang di *Si Doel Anak Sekolahan*. Pasalnya, tawaran berjibun mendatangi mereka. Tidak sebatas di sinetron, iklan, dan model, tetapi juga sebagai penerima tamu dan petugas protokoler.

Dalam acara Malam Penghargaan Peniti Emas Rumah Sakit Kanker Dharmais di Golden Ballroom, Hilton, Sabtu lalu, misalnya, keduanya tampil bersama. "Saya sampai enggak sempat ikut ujian bahasa Perancis," ujar Maudy yang memang berkuliah di Program D3 Sastra Perancis FSUI itu.

Ihwal bahasa Perancis-nya itu, di mata Maudy yang lahir pada 8 April 1975, kian mantap dan sangat mendukung profesinya. "Dalam acara None Jakarta 1993, saya mempresentasikan budaya Betawi dalam bahasa Perancis," kata si bungsu dari tiga bersaudara ini.

Meski disibukkan oleh bermacam tawaran, Maudy dan Cornelia yang malam itu sama-sama bergaun hitam mengaku masih akan tampil dalam *Si Doel* bagian ke-3. "Saya lebih mengutamakan *Si Doel* dulu," kata Maudy, yang juga disetujui Cornelia. Pada bagian ini, porsi terbanyak dipegang oleh Cornelia.

Lalu, ketika ditanyakan ihwal siapa yang bakal mendapatkan si Doel yang "tukang insinyur" itu -- Zaenab atau Sarah -- Cornelia yang mahir berbahasa Belanda dan sedang menimba ilmu di IKJ itu berujar, "Itu rahasia lha yau.... Nonton saja kelanjutannya." VAN

Idris Rekaman di China

"Konser Pamitan" yang digelar Idris Sardi beberapa waktu lalu sempat berbuntut polemik bahkan sindiran. Idris disebut-sebut frustrasi karena musik dengan gesekan biola tak kunjung menjadi idola. Padahal sebenarnya, suami artis cantik Marini itu ingin berbuat lebih dari sekadar konser di dalam negeri, alias lebih menginternasional. Tidak semata-mata cari duit. "Jadi, saya sama sekali tak mengenal frustrasi," katanya.

Idris membuktikan omongannya itu dengan membuat rekaman album musik solo di Shanghai, China, yang sedang dalam tarap penyelesaian. Berisi 14 lagu berirama populer, seperti "Crazy"-nya Julio Iglesias dan "Hotel California"-nya Eagles, album yang belum berjudul itu sudah siap dijual ke mancanegara akhir Mei 1995. "Memang, Mas Idris belum menemukan judulnya," ucap Marini, sang istri.

Sebelum dijual di pasaran, Idris dan Marini tengah mempersiapkan konser di negara jiran, Malaysia. Menurut Idris, pergelaran simfoni kali ini merupakan kegiatan rutin. Dan biasanya, Yang Dipertuan Agung Malaysia hadir dalam acara itu. "Konser di panggung apa pun dan di mana pun dipersembahkan buat kejayaan merah putih. Bukan buat pribadi saya," kata Idris. TOK

KRUS HARYANTO

YUL ADRIANSYAH
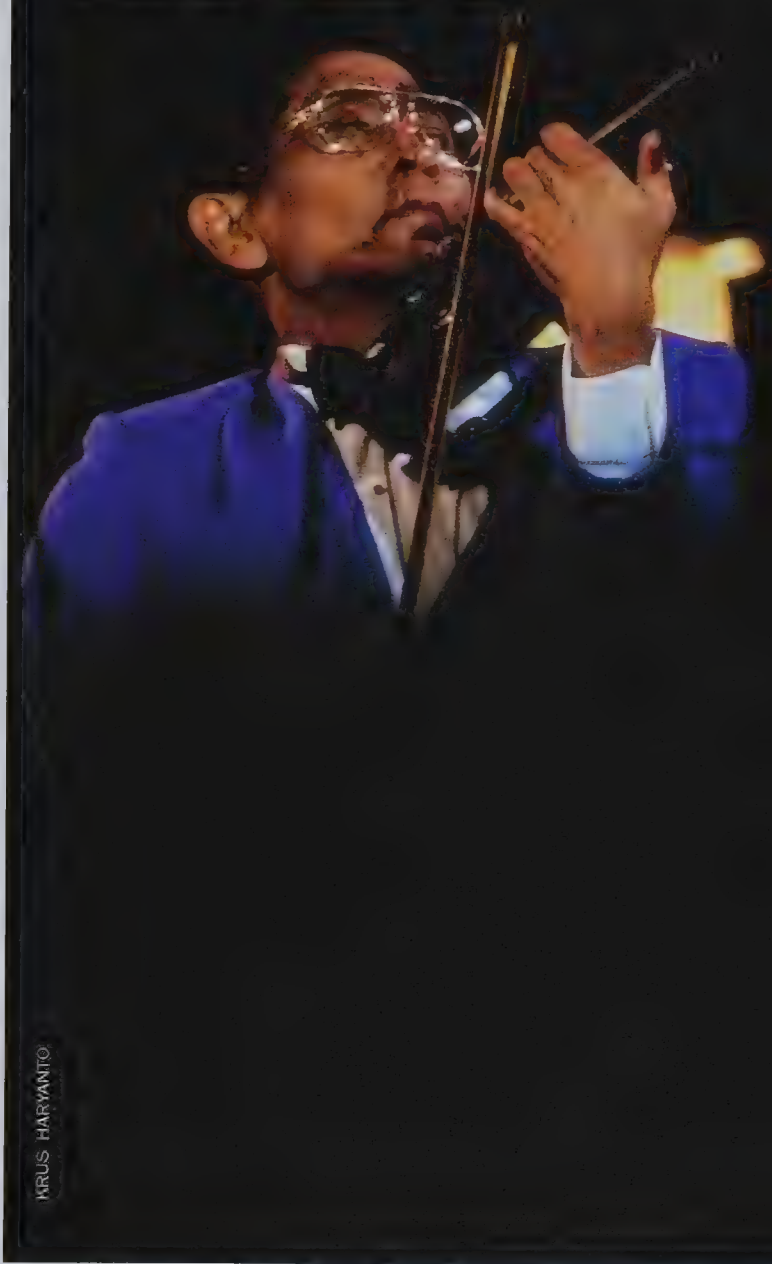
ABG yang Sukses

Lusy Rachmawati, Widi Mulia, dan Ria Finola Ifanisari yang tergabung dalam AB Three adalah anak baru gede (ABG) yang menepis persepsi negatif mengenai ulah ABG. Meski ABG, mereka bisa menunjukkan prestasi di tingkat internasional dalam Golden Stage International Festival di Rumania beberapa waktu lalu.

"Memang, ABG itu masih suka ikut-ikutan yang lagi *nge-trend*," ujar Ria. Contohnya, gaya hidup lesbi, merokok, pacaran di depan umum, dan main obat. "Mereka meniru film-film Barat di televisi."

Ria sendiri mengaku bahwa ia suka *ngeceng*, jalan-jalan, dan menonton bersama teman-temannya. Tempat *mejeng* yang paling disukainya adalah di Pondok Indah Mall. "Di Pondok Indah itu asyiknya bisa cuci mata kalau ada cowok keren, bisa *nyari-nyari* baju, dan nonton. Di situ lengkap," kata pelajar SMA PGRI 6 Jakarta itu.

Sedangkan Widi punya cara sendiri dalam mengisi masa-masa ABG. "Saya juga masih ABG. Saya iri dengan anak-anak yang lain. Saya kehilangan masa senang-senang," kata Widi. Penyanyi yang telah meraih 54 trofi ini mengaku harus mengatur waktu buat sekolah, menyanyi, dan keluarga. "Jadi, enggak ada waktu *ngeceng*. Kalaupun ada waktu, lebih baik saya pakai istirahat," ujarnya.

Akan halnya Lusy, ia melihat kecenderungan ABG yang nyeleneh karena mereka masih labil dan mudah dipengaruhi. Lusy sendiri merasa heran dengan adanya anggapan bahwa kebiasaan buruk para pelajar malah dianggap hebat.

"Siapa yang enggak suka ke diskotek? Dalam remang-remang dan musik yang keras, hal-hal buruk bisa terjadi. Tapi, semuanya berpulang pada diri kita sendiri dan pada didikan orangtua di rumah," kata mahasiswi Program D3 Sastra Perancis FSUI itu. SEP

YUL ADRIANSYAH

Aning yang Berseriosa

Lain ayah, lain anak. Kalimat tersebut agaknya tepat ditujukan kepada penyanyi seriosa Aning Katamsi yang memukau hadirin dalam Malam Perhargaan Peniti Emas Rumah Sakit Kanker Dharmais, Sabtu lalu di Hotel Hilton. "Saya sudah lama menyanyi seriosa sejak SMA," tutur anak ketiga Amoroso Katamsi, pemeran Pak Harto dalam film *Pengkhianatan G-30-S/PKI.*

Penyanyi seriosa yang juga penggemar musik klasik ini memang bukan pendatang baru di dunia seriosa. Ia sudah kerap tampil di TVRI.

Suara merdu yang dimilikinya, menurut Aning, adalah warisan ibunya. Keluarganya pun turut mendorong Aning menjadi penyanyi seriosa. Aning yang merupakan alumni Jurusan Fisika Universitas Indonesia itu enggan menjelaskan ihwal ketertarikannya kepada jenis seni suara yang mendayu tinggi itu. "Jangan dihubung-hubungkan antara fisika dengan menyanyi," kata gadis kelahiran 3 Juni 1969 itu.

Meski begitu, Aning mengaku bahwa menyanyi seriosa baginya bukan sekadar kegemaran, tetapi sudah menjadi profesi. "Saat ini saya belum menggunakan keahlian saya sebagai lulusan fisika," kata Aning. VAN

Gladys-Bobby Bermitra

Setelah sukses mendatangkan Phil Collins ke Indonesia, lewat Adissaglobal Entertainment (AgE)-nya, Gladys Suwandi menjalin kerja sama seni dan budaya dengan penyanyi *rock and roll*, Bobby Curtola, dari North American Picture (NAP) Kanada. Kerja sama tersebut diteken Gladys dan Erwin Parengkuan (mewakili AgE) dan Bobby (NAP) akhir April lalu di News Cafe.

Kerja sama yang disepakati itu meliputi penyelenggaraan pertunjukan, pendirian rumah produksi, satelit dan jaringan radio, penjualan dan distribusi kaset istimewa lagu Bobby Curtola, video, film, film anak-anak, *compact disc* istimewa lagu Bobby, periklanan, dan investasi membangun kelab malam dengan logo Bobby Curtola.

Pada tahap awal, digarap rekaman duet Bobby dan Gladys. Lagunya, antara lain, "Corina-Corina" dan "Pretty Little Girl". Album tersebut nantinya akan diedarkan di Asia dan Eropa, termasuk Kanada dan Indonesia.

Selain menjadi idola remaja dan pemegang Gold Record di Kanada, Bobby pun adalah pencipta dan penyanyi *jingle* Coca-Cola -- yang menjadi rekaman hits "Things Go Better with Coca-Cola". Di Kanada sendiri, Bobby masih dianggap sebagai "Raja *Rock and Roll*". TIN

ERWIN HADI

Yang Ketiga buat Sly

Ingin tahu kabar paling akhir ihwal Sylvester Stallone? Pria *macho* yang "berrapor jelek" di mata wanita itu kali ini memang betul-betul beruntung. Bagaimana tidak? Begitu usai meneken kontrak senilai US$ 17,5 juta untuk film terbarunya, *Daylight*, Sly pun kini tengah "meneken kontrak lainnya" yaitu bertunangan dengan si jelita Angie Everhart. Keduanya segera naik ke pelaminan dalam waktu dekat ini.

Sly (48 tahun) sudah mengumumkan pertunangannya dengan Angie (25 tahun) meski mereka baru "berkenalan" selama delapan minggu. "Begitu besar cinta kami hingga kami umumkan pertunangan ini," kata aktor laga yang membintangi *Rambo* dan *Rocky* itu.

Kabarnya, Sly terpikat kepada Angie gara-gara tak sengaja memandang foto supermodel baju renang dan bikini itu di sebuah majalah. Dasar *play boy* gaek, Sly langsung saja merancang pertemuan dengan Angie di acara pesta di Night Club Dan Aykroyd, Los Angeles. Benih cinta mereka mulai tampak saat acara puncak pengumuman piala Oscar Maret lalu. Dengan mesranya, waktu itu, Sly dan Angie saling berangkulan dan sesekali bertukar pandang. Meski Angie dikabarkan pernah bercinta kilat dengan Kevin Costner, Sly tampaknya tak peduli.

TIME

NEW IDEA

Bahkan sang ibu Sly, Jacky, telah merestui hubungan anaknya dengan Angie dan siap menerima Angie sebagai menantunya. "Kali ini Sly enggak salah pilih. Dia cantik sih," kata Jacky mengomentari Angie.

Sebelumnya, Sly pernah menikah dengan ratu kecantikan Denmark, Brigitte Nielsen, dan Janice Dickinson, tetapi gagal. Akankah dengan Angie kandas untuk yang ketiga kalinya? NFT

YUL ADRIANSYAH
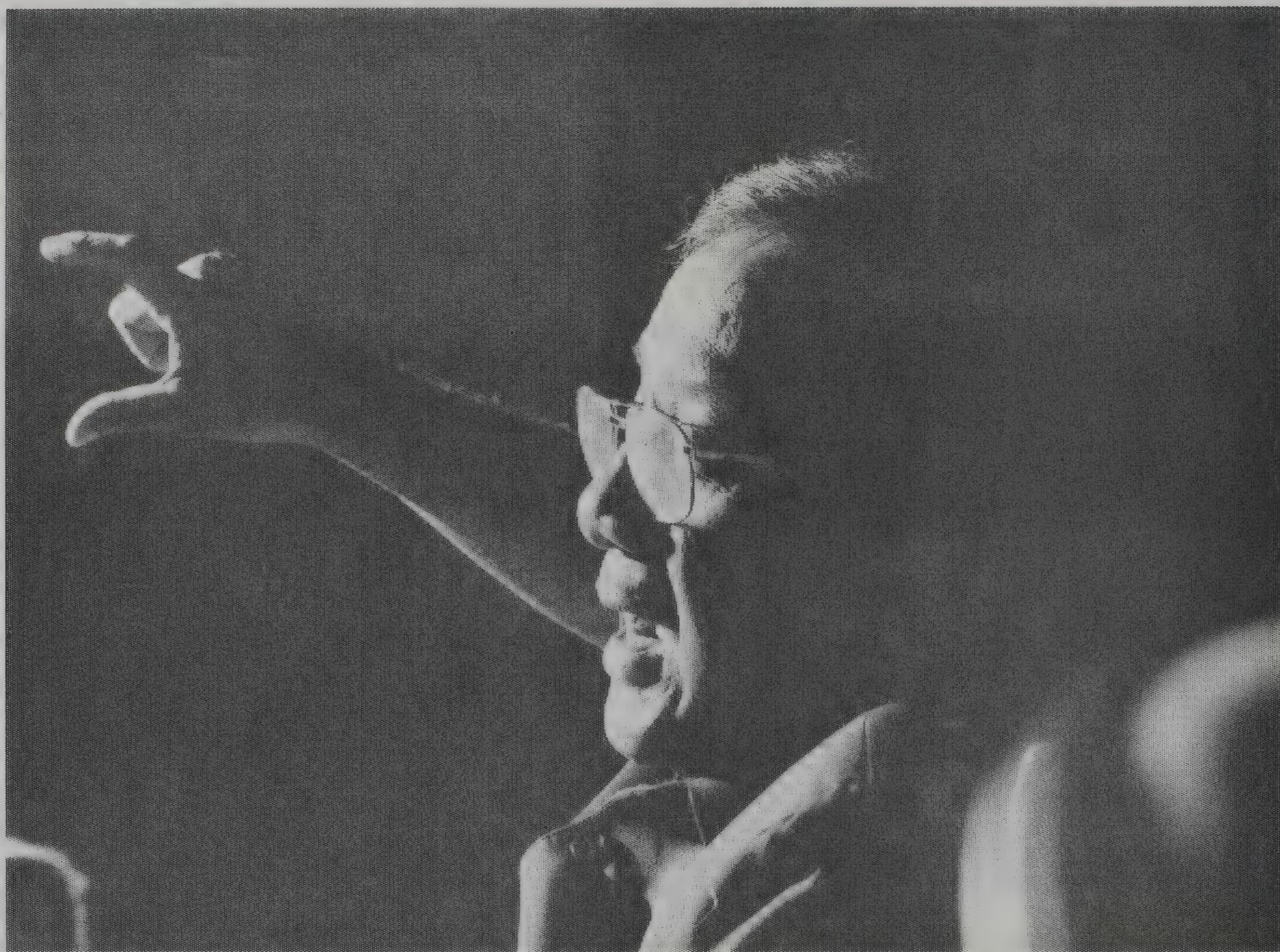
Akbar Tandjung:
"Developer Nakal Akan Ditindak"

Permintaan lahan dan bangunan terus bertambah, sementara luas lahan yang tersedia tak berubah. Tak heran bila, tanpa kenaikan HPS (harga patokan setempat) semen pun, harga tanah dan bangunan terus membubung. Apalagi, ketika HPS semen naik sampai 40% lebih, kenaikan biaya konstruksi dan harga bahan-bahan bangunan yang terbuat dari semen juga tak bisa dibendung. Walhasil, harga jual rumah, tak terkecuali rumah sederhana, juga ikut naik. Masyarakat berpenghasilan pas-pasan -- sekitar Rp 120.000 sampai Rp 200.000 -- yang tadinya sudah bermimpi ingin membeli rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) tentu kian pesimistis untuk mewujudkan impian mereka. Mungkinkah mereka akan kebagian sepetak RS atau RSS di antara 500.000 unit rumah sederhana yang akan dibangun pemerintah? Berikut petikan wawancara antara Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tandjung dengan Wikrama I Abidin, Djahar Muzakir, dan Yul Adriansyah tentang implikasi kenaikan HPS semen terhadap harga jual dan pembangunan RS dan RSS.

Sejauh mana implikasi penurunan HPS semen terhadap pembangunan perumahan di masa mendatang?

Selain untuk bahan konstruksi, semen juga dipakai untuk membuat bahan-bahan bangunan, misalnya batako, asbes. Sehingga penga-

ruh harga semen itu juga ada dalam pembangunan perumahan. Namun, Keputusan Menpera Nomor 4 tanggal 11 April yang lalu menaikkan harga jual RSS yang berdasarkan Keputusan Menpera pada 17 Januari 1994, yaitu mengenai harga jual RSS. Misalnya harga tipe 21, dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 5 juta, ada kenaikan 11,11%, itu tidak lain disebabkan oleh beberapa pertimbangan.

Apa saja pertimbangan utamanya?

Antara lain, kenaikan harga semen dan bahan-bahan bangunan, juga kenaikan pedoman harga jual per meter persegi rumah negara. Terutama yang mempunyai kaitan dengan harga RSS, harga rumah dinas tipe C, yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya. Setiap tahun, Dirjen Cipta Karya mengeluarkan pedoman harga jual maksimum yang diputuskan berdasarkan pengamatan di setiap provinsi, bahkan di setiap kota.

Sebagai contoh, kalau pedoman 1993/1994 untuk Daerah Istimewa Aceh, rumah dinas tipe C itu harga satuan per meter perseginya adalah Rp 300.000 per m², tahun 1994/1995 menjadi Rp 372.000 per m². Dengan demikian, ada kenaikan sekitar 15% lebih. Patokan kita, harga RS maksimum 75% harga rumah dinas tipe C atau Rp 280.000 per m². Harga RSS patokannya 50% harga RS, yakni Rp 140.000 per m².

RS dan RSS dimaksudkan untuk golongan masyarakat yang mana?

Yang berpendapatan Rp 120.000 sampai Rp 200.000 per bulan. Masyarakat golongan ini kenyataannya mempunyai kenaikan kemampuan daya beli dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Namun, kami juga harus memperhitungkan margin keuntungan yang wajar bagi para developer, yakni 5%-10%. Jadi, kalau dia membangun 500 rumah setahun, bisa untung Rp 200 juta.

(Akbar Tandjung dilahirkan di Sibolga, Sumatra Utara, 14 Agustus 1945. Namun, dia tumbuh dan besar di Jakarta. Dia menikah dengan R.A. Krisnina Maharani, mantan aktivis KNPI di Solo. Pernikahan Akbar dengan sarjana komunikasi massa lulusan FISIP Universitas Indonesia ini dikaruniai tiga orang putri: Fitri Krisnawati, Karmia Krissanti, dan Triyana Krisandini.)

Apakah kenaikan HPS dan harga rumah tidak mengurangi target pembangunan RS dan RSS?

Pada Repelita VI ini pemerintah akan membangun 500.000 rumah. Kalau dilihat tanggapan Real Estate Indonesia (REI), Perum Perumnas, dan Koperasi, jumlahnya bisa menjadi 600.000 rumah. REI menyanggupi membangun 300.000, Perum Perumnas 250.000, Koperasi menyanggupi 60.000 rumah. Total 610.000 rumah.

> "Kami juga memperhitungkan margin keuntungan yang wajar bagi para developer, antara 5%-10%. Kalau dia membangun 500 rumah setahun, bisa untung Rp 200 juta."

Dengan penurunan HPS semen sebesar 10%, apakah harga RS dan RSS juga akan ikut turun?

KRUS HARYANTO

Karena HPS sudah turun, mestinya harga jual RS dan RSS juga turun. Kan, begitu. Nah, pendapat seperti ini secara logika, ya, bisa diterima, kan? Karena HPS semen itu mempunyai peranan di bidang pembangunan perumahan. Kalau HPS semen turun, ya, harga perumahan juga turun.

Untuk membangun satu unit rumah, berapa kira-kira kebutuhan semennya?

Sekitar 5%. Kalau dilihat dari segi *cost*, ya. Jadi, kalau misalnya tadi harga Rp 4,5 juta, 5%-

nya Rp 225.000. Kalau harga semen itu Rp 7.000, (yang dibutuhkan untuk membangun RSS) sekitar 40 sak semenlah. Tapi, ini untuk konstruksi, ya? Belum untuk komponen-komponen batako dan lain-lain. Jadi sekitar 50-60 sak.

Sejauh mana usaha menggalang kerja sama dengan swasta karena margin keuntungan membangun RS dan RSS relatif kecil...

Developer besar itu kan pada umumnya membangun rumah menengah ke atas. Inilah yang perlu kita pikirkan, bagaimana developer besar itu jangan hanya semata-mata mengejar keuntungan dengan membangun rumah-rumah menengah ke atas dan tidak memperhatikan rumah-rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Nah, di situlah kami berlakukan konsep berimbang 1:3:6 -- satu rumah mewah, 3 sedang, 6 RS dan RSS.

Kami sedang menyiapkan ketentuan lebih rinci mengenai keharusan-keharusan yang perlu dilakukan oleh developer besar untuk membangun RS dan RSS, antara lain, setiap developer swasta itu diharuskan untuk membangun RS dan RSS. Bila dia membangun suatu lingkungan permukiman dalam satu kawasan yang luas, berskala besar, patokan kita 200 hektare ke atas, dia diharuskan membangun RS dan RSS dalam satu lokasi, menjadi satu kesatuan, sehingga di situ bisa dilihat ada rumah tipe 1, tipe 3, tipe 36, atau RS dan RSS. Tapi, kalau tidak memungkinkan secara tata ruang dan kemudian lokasinya kecil, dan harga tanahnya mahal, dimungkinkan membangunnya di lokasi lain.

Bagaimana mekanisme kontrolnya?

Melalui mekanisme perizinan. Kalau satu developer ingin membangun satu lingkungan perumahan besar, dia memerlukan beberapa perizinan untuk mendapatkan lahan, izin prinsip dari Bupati, dan perizinan izin lokasi yang dikeluarkan BPN Daerah Tingkat II. Setelah dapat izin prinsip dan izin lokasi, dia membutuhkan izin *site-plan* sebelum membangun. Izin hak pakai. Kemudian, di dalam *site-plan* itu, dia memerlukan izin lagi untuk membangun. Nah, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan ketentuan 1:3:6 itu, mekanisme perizinan ini yang mau kami pakai.

(Nama Akbar sudah dikenal akrab di kalangan mahasiswa dan pemuda sejak awal berdirinya Orde Baru. Selain aktif dalam organisasi intrauniversitas di Universitas Indonesia, Akbar juga tampil sebagai tokoh muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang cemerlang. Dia ikut ambil bagian dalam aksi-aksi mahasiswa dalam menumbangkan Orde Lama. Pada 1966, Akbar sudah dipercaya oleh rekan-rekannya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UI.)

Lalu apa tindakan pemerintah kalau ternyata mereka nakal?

Tergantung kesungguhan melaksanakannya. Misalnya begini. Pada waktu izin *site-plan*, dia harus bisa menggambarkan lokasi berdasarkan konsep 1:3:6. Pemerintah pun memberi izin. Juga ketika meminta IMB. Di lapangan dicek, dibangun atau tidak. Kalau ternyata dia tidak membangun, di sinilah pemerintah bisa mengambil tindakan. Tindakan apa yang bisa dilakukan pemerintah? Antara lain, ya, mereka bisa disetop.

Kenapa bisa begitu?

Konsep 1:3:6 itu kan bermula dari SKB tiga menteri pada November 1992, yaitu antara

menteri dalam negeri, menteri pekerjaan umum, dan menteri perumahan rakyat. Kemudian, saya menjadi menteri tahun 1993. Tetapi, memang belum ada petunjuk pelaksanaannya (juklak). Karena, ya, itu tadi, ini kan SKB. Juklak juga..., siapa yang (berhak) membuat juklak ini? Juga tidak dijelaskan di situ. Akibatnya tidak ada juklak-juklaknya.

Kemudian, dengan adanya BP4N (Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional), pada waktu rapat BP4N pertama, saya mengusulkan perlu ditetapkan juklak lebih rinci dari SKB itu, juklaknya dikeluarkan oleh menteri perumahan rakyat selaku ketua badan. Konsep inilah yang sudah kami siapkan. Namun, sebelum saya tanda tangani sebagai ketua badan, konsep ini perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan anggota lainnya.

Kapan kira-kira itu selesai?

Kalau saya mempunyai target bulan Mei harus selesai. Nah, kalau ini telah disepakati, pemerintah daerah diharapkan betul-betul mampu mengawasi dan mengendalikan. Sebagai menteri perumahan rakyat, dalam kunjungan-kunjungan kerja, akan saya cek, betul enggak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, saya akan beri tahu pemerintah daerahnya, "Eh, dia enggak melaksanakan, *you* ambil tindakan. Kalau bisa, izin-izin yang lain jangan diberikan dahulu." Jadi itulah, mekanisme yang akan kami pakai.

Kalau ternyata developer nakal, membangun RS dan RSS di lokasi lain karena alasan mempertahankan citra perumahan berkelas bagaimana?

Itu masih lumayan, sejauh lokasinya tidak besar. Kalau dia mau membangun RS dan RSS di tempat lain, enggak apa-apa. Sebab, memang kami harus bisa juga memahami, kalau dibangun di tempat dia, karena lokasinya tidak besar, selain dari *image*, dia juga kan tidak mungkin mendapatkan margin keuntungan karena tanahnya sudah mahal. Kalau tanahnya besar, kami hitung kalau sudah 200 hektare ke atas, walaupun mungkin dia membeli tanahnya sudah agak mahal, dia masih bisa membangun RS dan RSS dengan sistem subsidi silang.

Kenapa kami mengharuskan dia membangun dalam satu lokasi? Kalaupun harga tanah sudah mahal, kalau skalanya besar, secara ekonomis masih bisa. Dan kedua, jangan menimbulkan kesan semua lingkungan permukiman itu eksklusif. Sebab, masyarakat menengah ke atas yang tinggal di situ sebetulnya memerlukan sopir, pembantu rumah tangga, dan lain-lain, sehingga ada kebutuhan, sekaligus kesetiakawananlah.

(Meskipun jenjang karier kegiatan organisasinya dimulai dari dunia intrauniversitas, perjalanan Akbar di organisasi ekstrauniversitas ternyata lebih panjang. Jabatan terakhirnya di dunia intra, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI tahun 1969. Lalu, namanya terus meroket di luar kampus. Pada 1969-1970, dia menjabat sebagai ketua umum HMI Cabang Jakarta. Kemudian, kurun 1971-1974, Akbar menjadi ketua umum Pengurus Besar HMI.)

"Karena HPS sudah turun, mestinya harga jual RS dan RSS juga turun. Pendapat seperti ini bisa diterima, karena HPS semen mempunyai peranan di bidang pembangunan perumahan."

YUL ADRIANSYAH

YUL ADRIANSYAH

KRUS HARYANTO

Dalam juklak nanti, apakah disinggung soal sanksi?

Memang tidak disinggung soal sanksi itu. Saya mengatakan kepada staf saya, ahli hukum, cobalah dipikirkan kemungkinan sanksi. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1992, tentang perumahan dan permukiman, disebutkan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang apabila tidak dilaksanakan akan terkena sanksi. Tapi, tidak termasuk ketentuan ini karena tidak disebut secara eksplisit di dalam UU.

Anda agaknya tidak dilibatkan dalam proses kenaikan HPS, padahal Anda sangat berkepentingan...

Permintaan HPS dinaikkan sebetulnya sudah lama. Sebab, dengan HPS yang lama, industri semen tidak atraktif bagi para investor baru. Dan, kedua, kenyataannya harga semen memang sudah naik. Sudah jauh di atas HPS. Karena kenyataan-kenyataan itulah, pemerintah menaikkan HPS semen. Yang berwenang menaikkan adalah menteri perdagangan. Paling minimal, dia harus berkoordinasi dengan menteri perindustrian. Kalau mau koordinasi yang lebih luas lagi, dengan menteri pekerjaan umum dan menteri perumahan rakyat.

Tapi, kesan yang muncul, Anda seperti terseret...

Saya memang menyesuaikan harga jual rumah. Dengan adanya kenaikan HPS, harga jual rumah dinaikkan karena kenaikan harga semen mempengaruhi harga jual rumah walaupun itu bukan satu-satunya. Karena itu, untuk menjamin *supply* rumah, saya umumkanlah kenaikan itu yang tidak banyak berbeda dengan kenaikan HPS semen. Sehingga bisa juga ditafsirkan bahwa kenaikan HPS semen itulah yang mendorong kenaikan harga jual rumah, walaupun sebetulnya bukan hanya itu. Karena kami sudah menghitungnya kira-kira satu setengah bulan lalu, dengan harga semennya dihitung berdasarkan kenyataan pasar.

"Developer besar umumnya membangun rumah menengah ke atas. Yang perlu dipikirkan, bagaimana agar mereka jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan rumah-rumah untuk yang berpendapatan rendah."

Juga tidak terkejar oleh kenaikan pendapatan kebanyakan masyarakat atau UMR, kan?

Kenaikan pendapatan masyarakat dengan kenaikan harga rumah mungkin tidak sebanding, ya. Mungkin kenaikan harga rumahnya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kenaikan pendapatan masyarakat. Kalau kemarin kita lihat kenaikan harga RSS yang sekarang ini -- katakanlah -- setelah saya koreksi menjadi 8,89%, tingkat kenaikan pendapatan masyarakat, ya, mungkin 5%.

Tapi, kabarnya, daya beli masyarakat meningkat. Ini bagaimana?

Mungkin kemampuan daya beli naik sekitar 5%, tapi kenaikan barang naik 10%, misalnya. Jadi, tidak sebanding. Tapi, kalau kita lihat dari segi *range* pendapatan, masuk perhitungannya. Karena pendapatannya antara Rp 120.000 dan Rp 200.000. Kalau Rp 120.000, sepertiganya Rp 40.000. Jika harga yang lama Rp 4,5 juta, dicicil 20 tahun, setiap bulan Rp 35.000. Jadi, masih masuk dalam perhitungan. Begitu dengan harga baru, Rp 4,9 juta, cicilannya menjadi Rp 38.000 per bulan -- juga masih masuk dalam perhitungan.

(Sejak masih menjadi aktivis di UI, begitu juga di HMI, Akbar dikenal sebagai anak muda yang ulet, tegas, dan teliti. Dia termasuk orang yang tak suka menunda-nunda pekerjaan. Be-

gitu pula dalam sikap politiknya: sebagai kader dan tokoh Golkar, dia tak pernah terkesan bersikap neko-neko *dalam memperjuangan aspirasi politik Golkar. Kesan itu kian kuat ketika dia harus menjadi juru bicara F-KP di DPR pada waktu DPR melakukan interpelasi soal Dewan Mahasiswa, 1988. Meskipun dia mantan aktivis mahasiswa, waktu itu Akbar tetap konsisten di pihak Golkar.)*

Dahulu pemerintah pernah mencanangkan gagasan pembentukan bank tanah. Bagaimana sebenarnya itu?

Memang salah satu yang perlu dikerjakan dalam rangka perumahan ini, terutama bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, adalah bagaimana kami mampu menyediakan lahan yang harganya murah sehingga bisa dipergunakan untuk membangun rumah-rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah tersebut. Antara lain RS dan RSS. Nah, karena itu, perlu dipikirkan suatu konsep dalam pengendalian harga tanah.

Sekarang ini, terus terang, kami belum bisa menemukan suatu konsep pengendalian harga tanah. Ada yang mengajukan, misalnya dalam menetapkan tata ruang. Setelah ditetapkan tata ruang di mana untuk perumahan dan permukiman, di situ juga dipisahkan: ini untuk rumah mewah, ini untuk rumah menengah, ini untuk RS dan RSS. Tetapi, konsep ini baru satu gagasan.

Kemudian, yang sudah menjadi keputusan pemerintah dalam rangka pengendalian tanah itu mengenai kawasan siap bangun sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1992. Di situ dikemukakan bahwa setiap pembangunan perumahan berskala besar dilakukan melalui kawasan siap bangun, satu kawasan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, yang di dalamnya terdiri dari lingkungan-lingkungan siap bangun, baik satu maupun lebih lingkungan siap bangun dan telah dibangun pula jaringan-jaringan primer dan sekunder di dalamnya.

Contohnya?

Sebagai contoh, ada satu lahan, katakanlah 500 hektare sebagai kawasan siap bangun, yang terbagi dalam beberapa lingkungan siap bangun. Lingkungan siap bangun itu, misalnya ada 50 hektare, ada 20 hektare, ada 40 hektare, ada 30 hektare; total seluruhnya 500 hektare. Di situ sudah dibangun jaringan primer dan sekunder. Jaringan utama, jalan utama, kemudian jalan-jalan cabangnya. Kawasan siap bangun ini dikelola oleh pemerintah, oleh BUMN. Tapi, selain itu, lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri dimungkinkan dikerjakan oleh swasta. Nah, di dalam kawasan tadi, kalau seandainya ini bisa dilaksanakan, bisa diarahkan mana yang dipergunakan untuk rumah-rumah mewah, mana rumah menengah, serta mana yang untuk RS dan RSS.

"Kalau Developer besar mau membangun RS dan RSS di tempat lain, enggak apa-apa. Karena kami memahami, membangun di lokasi kecil, selain *image*, juga kan tidak mungkin mendapatkan margin keuntungan."

KRUS HARYANTO

(Setelah menjadi ketua umum KNPI, 1974-1981, karier politik Akbar Tandjung berjalan mulus. Kurun 1977-1988, dia menjadi anggota DPR mewakili daerah Jawa Timur. Pada 1983, Akbar diangkat menjadi wakil sekretaris jenderal Golkar; dalam waktu hampir bersamaan, dia menjadi pemimpin redaksi harian Pelita.

Akbar masuk ke jajaran anggota kabinet, kurun 1988-1993, menjadi menteri pemuda dan olah raga, menggantikan seniornya di HMI, Abdul Gafur. Pada 1993, dia dipercaya menduduki jabatan menteri negara perumahan rakyat.)

"Saya mengatakan kepada staf saya yang ahli hukum, coba pikirkan kemungkinan sanksi. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, ada ketentuan-ketentuan apabila tidak dilaksanakan, akan terkena sanksi."

Apa perbedaan antara kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun?

Kawasan siap bangun adalah kawasan perumahan/permukiman berskala besar, di dalamnya terdiri dari lingkungan-lingkungan siap bangun. Seperti tadi saya beri contoh, ada lahan 500 hektare itu adalah kawasan siap bangun. Kawasan siap bangun seluas 500 hektare itu terdiri dari lingkungan siap bangun yang satu 10 hektare, ada 20 hektare, ada 40 hektare, ada 30 hektare, ada 50 hektare, ada 60 hektare, yang di dalamnya sudah ada jaringan primer dan sekunder. Yang mengelola kawasan siap bangun itu adalah BUMN, tetapi lingkungan siap bangunnya itu bisa diserahkan kepada swasta.

Apa kawasan siap bangun itu sekarang sudah ada?

Sekarang, rancangan peraturan pemerintahnya sedang disiapkan. Tetapi, agar pengadaan perumahan bisa lancar, dimungkinkan juga lingkungan siap bangun berdiri sendiri yang bisa dikelola swasta. Namun, hal ini juga antara lain menyangkut kemampuan pemerintah mendanainya karena lahan pada umumnya dimiliki masyarakat. Untuk membebaskan lahan itu, kecuali untuk kepentingan umum, harus sama-sama, sehingga kesulitan yang dihadapi BUMN dan swasta lain. Swasta cepat dalam proses penyelesaian karena mereka mampu dari segi dana, mungkin bisa lebih sedikit. Dia juga mungkin bisa lebih menyesuaikan cara-cara pembebasan tanah itu dengan aturan-aturan yang biasa dalam jual-beli tanah. Kalau pemerintah kan..., aturan-aturannya harus bisa dipertanggungjawabkan ke BPKP.

Dengan alasan kepentingan umum, apakah pemerintah tidak bisa menekan harga?

Kepentingan umum itu ada ketentuannya, kepentingan umum apa. Kalau untuk perumahan, tidak bisa dikategorikan untuk kepentingan umum. Kalau untuk rumah sakit, untuk sarana pendidikan, mungkin bisa. Nah, ini yang perlu dicari pemecahannya. Jadi, sekarang konsepnya sedang disiapkan. Dengan demikian, kecenderungan menguasai lahan sebesar-besarnya itu bisa dihindari.

Rencana peraturan pemerintah tentang penyediaan dana bagi pembangunan perumahan pun sedang disiapkan. Di situ akan diatur, setiap developer yang akan membebaskan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan diberi batas waktu yang ketat untuk pembebasan. Dan kalaupun diperpanjang, juga diberikan batas waktu yang ketat.

Kemudian, terhadap tanah yang telah dibebaskan itu juga diberi batas waktu membangunnya. Dengan demikian, apabila dia sudah membebaskan lahan, developer didorong untuk segera membangun. Sebab, lahan itu diberi izin tidak lain dalam rangka pembangunan perumahan. Sehingga tertutup kemungkinan dia memperlambat pembangunan rumah dengan harapan akan terjadi kenaikan harga tanah. Ini kan yang selama ini terjadi. Akhirnya, dia kemudian mendapatkan margin keuntungan yang besar itu dari tanah. Karena dia menunggu biar harga tanahnya naik saja dulu. Sekarang sebetulnya dikasih batas, tapi bisa diperpanjang.

(Kediaman dan kantor Akbar Tandjung mungkin termasuk salah satu rumah dan kantor menteri yang paling sering dikunjungi warga masyarakat. Urusannya tentu tidak sekadar masalah rumah. Tapi, mulai dari soal sumbangan pembangunan masjid dari berbagai pelosok tanah air, urusan teman atau

kenalannya yang minta diberi rekomendasi, minta bantuan ongkos pulang ke daerah, sampai urusan meminta kehadirannya meresmikan lomba di tingkat RW sekalipun. Hebatnya, sejauh dia bisa, semuanya dilayaninya. Salah seorang koleganya pernah berkomentar tentang hal itu, "Itu sudah menjadi risiko seorang tokoh yang terlalu baik, tidak punya musuh, dan tidak pernah menolak tamu." Itulah sebabnya, untuk menangani soal-soal sosial seperti itu, Akbar selalu mengangkat seorang staf pribadi yang biasanya juga mantan aktivis).

Berapa lama batasnya?

Hanya dibatasi perpanjangannya satu kali. Dalam rencana kami, pembebasan dua tahun, perpanjangannya dua tahun. Kalau terhadap tanah yang sudah dibebaskan, dia sudah harus bisa menyelesaikan pembangunan perumahannya, juga dalam kurun waktu yang kami tetapkan, sehingga tidak ada kecenderungan memperlambat pembangunan perumahan. Hal-

"Sudah lama permintaan HPS semen dinaikkan, karena industri semen tidak atraktif bagi para investor baru menginves di bidang semen dengan HPS yang lama itu."

YUL ADRIANSYAH

hal seperti inilah yang kami lakukan, yang akan diatur dalam rencana peraturan pemerintah yang akan terbit, sebagai pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman.

Kawasan siap bangun itu ideal sekali tampaknya...

Ya, kalau bisa dilaksanakan.

Tapi, problemnya tentu bukan hanya menyangkut masalah pendanaan, kan?

Kalau tadi soal pendanaan dan kemudian soal teknik pembebasan tanah. Sebagai contoh, Perum Perumnas. Sekarang ini, dan nanti kami akan mengarahkan BUMN yang akan berperan sebagai pengelola kawasan serupa itu, akan kami arahkan ke Perum Perumnas. Sebab, pemerintah cenderung tidak akan membentuk BUMN baru. Jadi, lewat BUMN yang sudah ada.

Tapi, dalam praktik selama ini, Perum Perumnas juga kewalahan dalam membebaskan tanah. Misalnya, di kawasan Jabotabek ini. Terus terang sekarang Perum Perumnas belum memiliki suatu lahan yang relatif besar, yang siap untuk dibangun. Bahkan, ada lahan di Cengkareng itu yang sudah 20 tahun barangkali, tapi belum final juga. Sekarang Perum Perumnas sedang mengadakan proses pembebasan di Karawang. Ada di Parung Panjang di daerah Bogor, kemudian ada di Cisoka di daerah Tangerang; juga sedang dicari di daerah Bekasi. Tapi, belum ada yang betul-betul siap sebagai kawasan siap bangun karena prosesnya juga enggak bisa cepat.

Mengingat lahan yang luas sudah cukup sulit, terutama di Jabotabek, apakah kawasan siap bangun akan dibangun sendiri atau mengintegrasikannya dengan perumahan yang sudah ada di sekitarnya?

Kalau kita lihat Jabotabek ini kan sudah banyak dikuasai. Mungkin juga karena mereka juga mendengar akan ada peraturan pemerintah tentang kawasan siap bangun. Sebelum itu keluar, mereka sudah lebih dahulu mencari lahan yang masih ada untuk dibebaskan. Sebab, kalau misalnya mereka sekarang sudah mendapatkan izin, katakanlah 1.000 atau 2.000 hektare, kalau nanti peraturan itu keluar, dengan izin yang sudah ada, rencana mereka bisa diteruskan. Tapi, dengan catatan, sisa tanah yang belum dibebaskan harus dibebaskan dalam waktu dua tahun.

Apa konsep 1:3:6 tetap berlaku dalam kawasan siap bangun?

Ya. Artinya, dia dapat lokasi besar oke, dia membangun tipe 6 juga di situ. Seperti sekarang, Bumi Serpong Damai sudah membangun yang 6, RSS, walaupun dari segi rasio masih terlalu jauh. Dia masih kurang. Masih banyak kurangnya. RSS kan masih belum lama. Dulu 1:3:6, ya, memang RS. Tapi, sekarang kan di dalamnya masuk juga RSS. ■

Pengelolaan Konflik Le

Eki Syachrudin
Eksponen 66 dan Pengamat Politik

STABILITAS suatu orde politik sering dilakukan bukan karena ketiadaan konflik, tapi lebih ditentukan oleh kemahiran "mengendalikan" konflik. Dengan demikian, konflik itu tidak "menyentuh" wilayah kewibawaan sang pemimpin. Sebab, wibawa dan kehormatan sang pemimpin menjadi "pasak" dari bangunan politik yang ada. Walaupun di suatu waktu tertentu kadarnya lebih rendah, bila pengendaliannya tidak memadai, konflik bisa menimbulkan ketidakstabilan politik, terutama bila kemudian "menjurus" ke wilayah kewibawaan sang pemimpin.

Aneka rupa politik dengan keberagaman pergumulan untuk memperebutkan porsi-porsi ekonomi dan kursi-kursi dalam birokrasi eksekutif dan legislatif -- dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan politik, sosial, dan budaya pelbagai faksi dan fraksi -- biasanya berujung pada pemusatan belaka. Dua pemusatan besar ini mampu menyerap habis segala pusaran kekuatan yang lebih kecil, sehingga potensi konflik yang bersimpang-siur dalam panggung politik tersedot dan terkulminasi ke dalam pemusatan itu tadi. Dua pusaran ini membagi habis para pihak yang terlibat dalam "pergumulan ide, posisi, dan *power*" dan menjadikan keduanya saling berhadapan. Kontradiksi-kontradiksi tersier tergeser oleh kontradiksi sekunder dan begitu seterusnya yang sekunder tersedot oleh kontradiksi primer yang berujung pada pemisahan tesis di satu sisi dan antitesis di sisi lainnya.

Pada era Bung Karno pada awal 1960-an terdapat begitu banyak pusaran konflik, seperti tarik-menarik antara Pusat dan Daerah mengenai soal anggaran, konflik ideologis, nasionalisme-Islamisme-komunisme, konflik startegis partai partai PKI-Murba-sosialis, konflik orientasi NU-Masyumi, dan konflik politis Marhaenisme sejati-gadungan. Namun, kesemuanya itu ternyata berujung pada dua pusaran besar kubu tentara di satu pihak dan kubu komunis di pihak lain. Sementara, konflik-konflik lain dikomandoi oleh bintang-bintang peserta, seperti Chaerul Saleh, Adam Malik, Idham Chalid, M. Natsir, Ali Sastroamidjojo, Roeslan Abdulgani. Apalagi bintang-bintang yang menjadi komandan-komandan kubu lebih kecil yang saling berhadapan tampak agak buram karena "terbayangi" oleh cahaya bintang Aidit yang begitu gemerlap berkat dukungan massa dan terang benderangnya bintang Nasution yang begitu kuat akibat keteguhannya membela Pancasila secara murni dan konsekuen.

Bung karno tampak aman-aman saja karena dia belum melibatkan atau belum melayani konflik yang berpusar di kedua kubu tersebut, sambil keduanya tetap mengusahakan dan mengharap berkah dan limpahan karunia kekuasaan Bung Karno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Konflik-konflik yang saling "beradu" itu nyaris tidak melewati atau belum melewati "wilayah" kewibawaan Bung Karno dan justru dihadapkan atau disalurkan atau tersalurkan hanya kepada dua kubu besar yang saling berhadapan itu tadi.

Dalam kegalauan konflik yang sangat intensif itu pun posisi Bung Karno pada mulanya tetap aman dan dia tetap berfungsi sebagai "pasak" stabilitas rumah politik yang ada ketika itu. Posisi sebagai sang pemimpin bukan saja aman tapi akan bertambah kuat ketika dia mulai "memberi" kepada yang lemah. Sebab, yang diberi itu kemudian memberi dukungan dan yang lebih kuat akan kurang "bahayanya" bagi keamanan kepemimpinan si Bung sendiri.

Politik keseimbangan kekuatan atau *the balance power policy* ini, ketika dipegang teguh, ternyata menjadi strategi yang ampuh untuk menjaga keamanan posisi kekuasaannya. Tapi, begitu dia tersentuh atau menempelkan dirinya pada arus konflik yang sedang "nyetrum" itu tadi, hanguslah dia bersama orde kekuasaannya yang secara bersusah payah telah dibangunnya berpuluh-puluh tahun.

Keamanan sang pemimpin tak terganggu sepanjang konflik-konflik itu bisa disalurkan atau tersalur kepada aneka rupa pengelompokan yang berujung pada pusat-pusat pusaran dan bintang-bintang bergemerlapan di panggung politik yang ada. Kalau kita mundur ke masa sebelum demokrasi terpimpin, ketika itu pun konflik-konflik yang ada sungguh banyak; baik konflik ideologi, konflik politik menghadapi penjajah antara yang memilih jalan diplomasi dan yang memilih jalan militer. Malah, kon-

ik Lebih Penting daripada Konfliknya
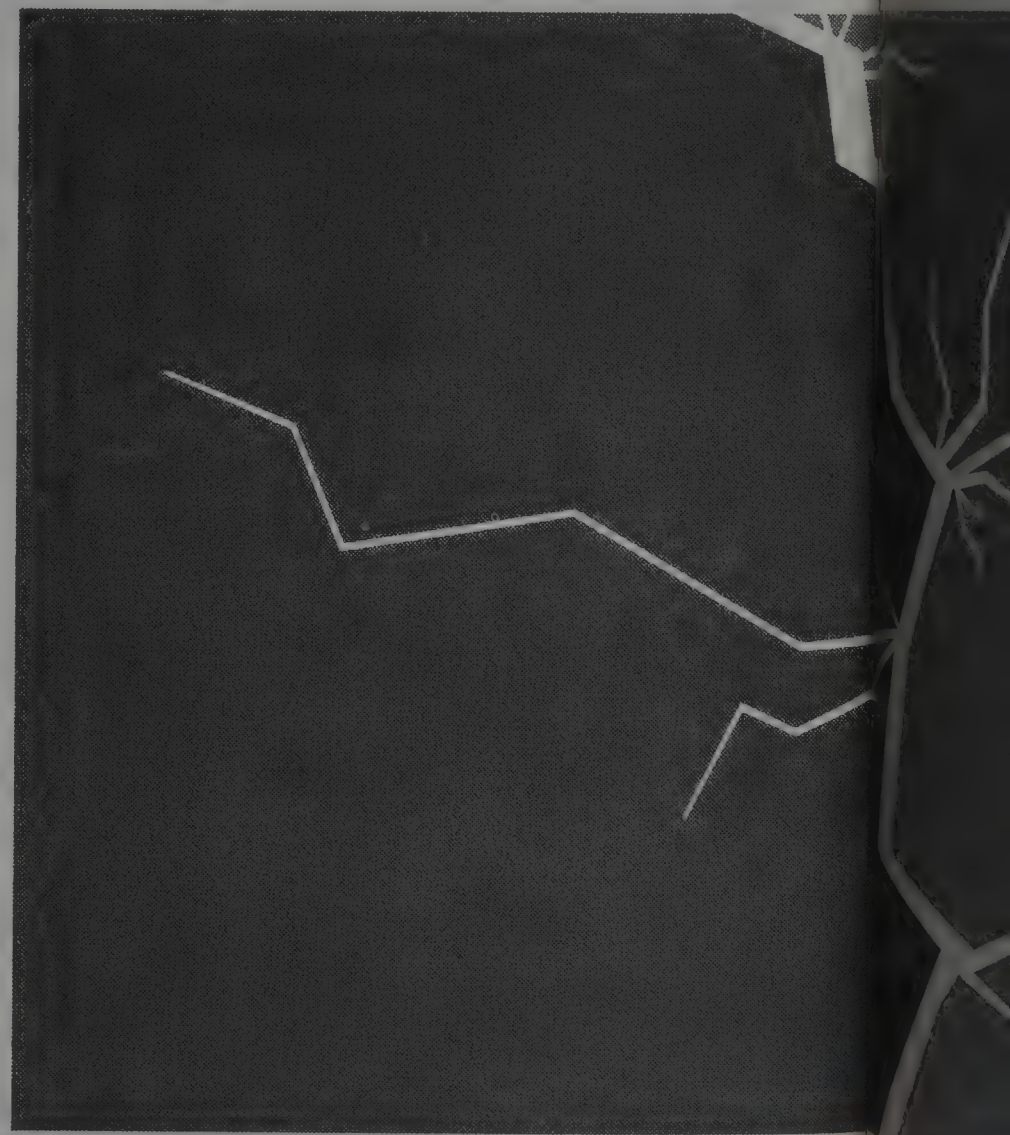
flik birokrasi sipil dan militer: apakah personel yang dulu mengabdi kepada kekuasaan kolonial bisa masuk atau tidak, atau bahkan karena kelebihan pengalaman dan pendidikan mereka, bukan sepatutnya mereka mendapat posisi yang lebih penting baik dalam sruktur pemerintahan ataupun dalam hierarki kemiliteran.

Semua konflik yang berujung pada konflik kekuasaan ketika itu tahap kegawataannya sungguh besar. Sebab, selain elan revolusi yang masih "hangat" menghinggapi setiap pelaku, ia juga menjadi lebih berbahaya karena setiap faksi masih memiliki kekuatan militer atau paramiliter yang digunakan melawan kekuasaan Belanda. Pada waktu itu, kita menyaksikan "penculikan" Perdana Menteri Sjahrir, kup oleh Jenderal Sudarsono yang konon didukung Yamin dkk., dan aneka rupa konflik lainnya yang siap "membakar" rumah ilalang Indonesia. Walaupun begitu, Bung Karno tetap saja menjadi pasak dari kestabilan bangunan politik karena semua yang berseteru tetap meminta berkah dari Bung Karno.

Di era pembangunan sekarang pun, sejak tahun 1970-an, konflik-konflik dalam masyarakat yang begitu kompleks ternyata bisa tersalur lewat jalur-jalur model bipolar dan "dimainkan" sedemikian rupa, seraya mereka yang saling berhadapan dan berlawanan tanpa kecuali "mengharap" bantuan dan uluran tangan Pak Harto. Sehingga dia bukan saja eksis tapi menjadi semakin kuat.

Dalam multikonflik kebijakan ekonomi yang berujung pada "Peristiwa Malari", seperti kita saksikan berpuncak pada figur-figur Ali Moertopo vs Soemitro, begitu juga konflik-konflik yang berseliweran pada era setelah itu, tampaknya tersalur pada puncak-puncak tokoh semacam Benny Moerdani dan Sudharmono, Pak Harto tetap berfungsi sebagai Bapak yang "mendamaikan" pertengkaran di antara sesama anak dan dia menjadi semakin kuat. Kekuasaan bagaikan sebuah segitiga: dia tetap kokoh karena berfungsinya dua kaki yang mampu menyedot habis seluruh dinamika dan potensi konflik yang ada, sekalipun konflik ketika itu cukup berbahaya.

IWAN SULWAN

Sejak tahun 1970-an, udara Indonesia bukanlah tanpa konflik. Kita melihat adanya pelbagai kubu, baik karena alasan-alasan keekonomian, apakah orientasi lebih ke Barat atau ke Jepang, yang mewujud ke dalam pelembagaan Bappenas, CSIS, atau politik dalam orientasi sipil-militer seperti tampak pada *interplay* Opsus-Hankam atau dalam aplikasi perekonomian pribumi atau nonpri. Dalam tema-tema sosial, politik, bahkan ideologi, pun konflik pada waktu itu cukup keras, panas, dan sering juga "meledak", seperti kita lihat pada peristiwa Priok, Lampung, Aceh, kampus, DPR, dan jalanan-jalanan sepanjang kota besar. Namun, karena tersalur dan terkendali, hampir tak satu pun konflik "nyerempet" wilayah kewibawaan "Bapak". Itulah kenyataan dari tahun 1970-an sampai dengan 1992.

Tapi, sejak tahun 1992, saya melihat tema-tema konflik terpaksa "dilayani" sendiri oleh "sang Bapak" karena dua kaki segitiga kekuasaan telah tidak berfungsi lagi. Era perpolitikan kita sejak tahun 1992 ini telah kehilangan kaki-kaki emas semacam Ali-Soemitro ataupun Dhar-Benny.

Seandainya Habibie mempunyai *sparring* yang kuat, mungkin segitiga kekuasaan secara struktural lebih tegak. Tapi, siapa yang bisa "bermain" dengannya? Ginandjar dan Moerdiono sebenarnya potensial, tapi mereka tampaknya "enggan" menjadi *sparring partners* Habibie. Konflik kepentingan tentang posisi kekuasaan pada seluruh lini lembaga kekuasaan serta perebutan anggaran dan proyek serta kredit perbankan, yang menjadi madu pada satu sisi dan racun pada sisi lainnya, tak tertangkal oleh kaki-kaki segitiga kekuasaan. Hanya "Bapak" sendiri yang berdiri di puncak, sehingga apa boleh buat, dia layani sendirian.

Bapak memang sekarang telah menjadi orang kuat bukan saja di ASEAN, melainkan juga pada tingkat dunia, sehingga risiko untuk menang memang masih besar sekali. Tapi, untuk apa risiko yang lain harus dipilih. Bukan soal menang atau kalahnya yang saya pikirkan, tapi "pilihan melayani dan menangani sendiri" konflik itulah yang bisa mengalihkan jalur permainan dari fungsi sebagai "pembagi" dan penyeimbang ke fungsi pemain menyebabkan dua kaki emas dari segitiga kekuasaan menjadi tidak berfungsi. Mengapa konflik-konflik yang berseliweran dalam arena politik tidak dibagi dan disalurkan pada kaki-kaki emas dari segitiga kekuasaan. Apakah kita sudah kehabisan bintang-bintang? ■

HOKKIE

Diasuh
Putri Wong Kam Fu

Periode 1 Mei–8 Mei 1995
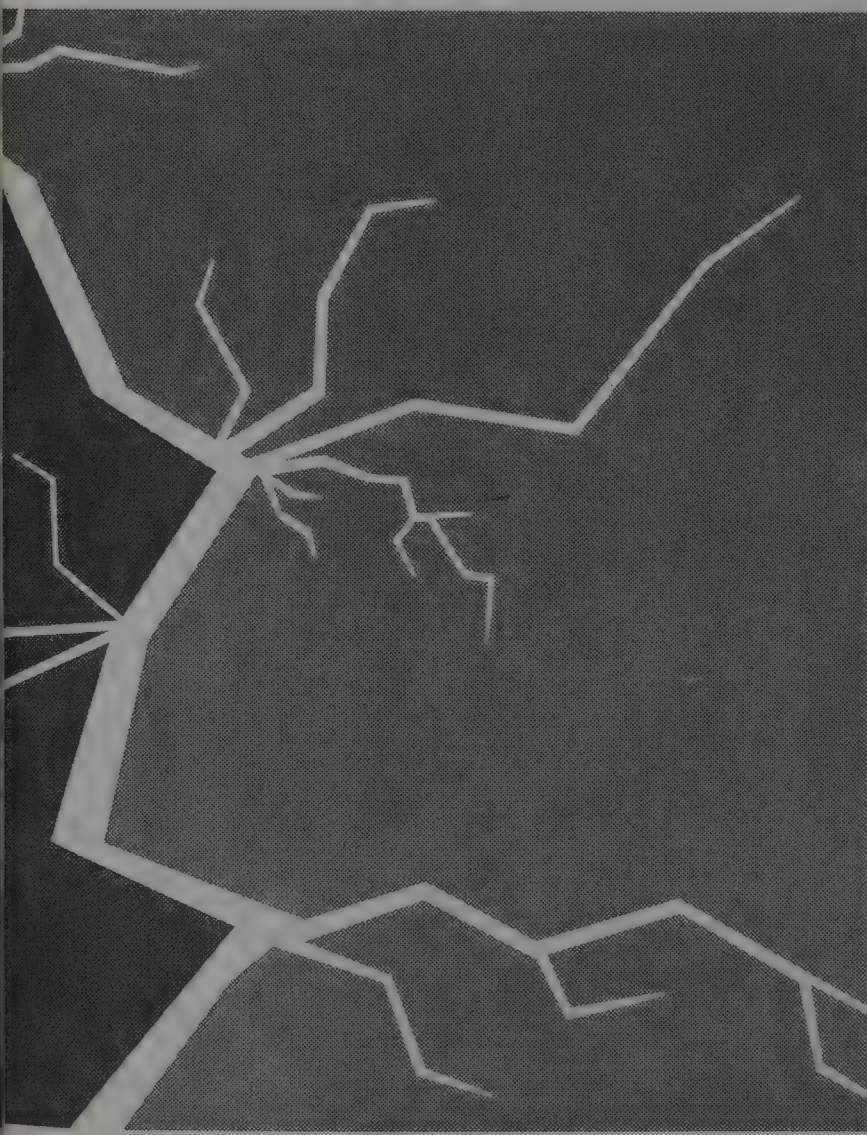
Shio Kelahiran Anda

Shio babi: 30 Januari 1911-17 Februari 1912; 16 Februari 1923-4 Februari 1924; 4 Februari 1935-23 Januari 1936; 22 Januari 1947-9 Februari 1948; 8 Februari 1959-27 Januari 1960; 27 Januari 1971-14 Februari 1972; 13 Februari 1983-1 Februari 1984.

Shio tikus: 18 Februari 1912-5 Februari 1913; 5 Februari 1924-24 Februari 1925; 24 Januari 1936-10 Februari 1937; 10 Februari 1948-28 Januari 1949; 28 Januari 1960-14 Februari 1961; 15 Februari 1972-2 Februari 1973; 2 Februari 1984-19 Februari 1985.

Shio kerbau: 6 Februari 1913-25 Januari 1914; 25 Januari 1925-12 Februari 1926; 11 Februari 1937-30 Januari 1938; 29 Januari 1949-16 Februari 1950; 15 Februari 1961-4 Februari 1962; 3 Februari 1973-22 Januari 1974; 20 Februari 1985-8 Februari 1986.

Shio macan: 26 Februari 1914-13 Februari 1915; 13 Februari 1926-1 Februari 1927; 31 Januari 1938-18 Februari 1939; 17 Februari 1950-5 Februari 1951; 5 Februari 1962-24 Januari 1963; 23 Januari 1974-10 Februari 1975; 9 Februari 1986-28 Januari 1987.

Shio kelinci: 14 Februari 1915-3 Februari 1916; 2 Februari 1927-22 Januari 1928; 19 Februari 1939-7 Februari 1940; 6 Februari 1951-26 Januari 1952; 25 Januari 1963-12 Februari 1964; 11 Februari 1975-30 Januari 1976; 29 Januari 1987-16 Februari 1988.

Shio naga: 4 Februari 1916-22 Januari 1917; 23 Januari 1928-9 Februari 1929; 8 Februari 1940-26 Januari 1941; 27 Januari 1952-13 Februari 1953; 13 Februari 1964-1 Februari 1965; 30 Januari 1976-17 Februari 1977; 17 Februari 1988-5 Februari 1989.

Shio ular: 23 Januari 1917-10 Februari 1918; 10 Februari 1929-29 Januari 1930; 28 Januari 1941-14 Februari 1942; 14 Februari 1953-2 Februari 1954; 2 Februari 1965-20 Januari 1966; 18 Februari 1977-6 Februari 1978; 6 Februari 1989-26 Januari 1990.

Shio kuda: 11 Februari 1918-31 Januari 1919; 30 Januari 1930-16 Februari 1931; 15 Februari 1942-4 Februari 1943; 3 Februari 1954-23 Januari 1955; 20 Januari 1966-8 Februari 1967; 7 Februari 1978-31 Januari 1979; 27 Januari 1990-14 Februari 1991.

Shio kambing: 1 Februari 1919-19 Februari 1920; 17 Februari 1931-5 Februari 1932; 5 Februari 1943-24 Januari 1944; 24 Januari 1955-11 Februari 1956; 9 Februari 1967-29 Januari 1968; 1 Februari 1979-15 Februari 1980; 17 Februari 1991-3 Februari 1992.

Shio kera: 20 Februari 1920-7 Februari 1921; 6 Februari 1932-26 Januari 1933; 25 Januari 1944-12 Februari 1945; 12 Februari 1956-30 Januari 1957; 30 Januari 1968-17 Januari 1969; 16 Februari 1980-4 Februari 1981; 4 Februari 1992-22 Januari 1993.

Shio ayam: 8 Februari 1921-27 Januari 1922; 26 Januari 1933-13 Februari 1934; 13 Februari 1945-1 Februari 1946; 31 Januari 1957-17 Februari 1958; 18 Januari 1969-5 Februari 1970; 5 Februari 1981-24 Januari 1982; 23 Januari 1993-9 Februari 1994.

Shio anjing: 10 Februari 1910-29 Januari 1911; 28 Januari 1922-15 Februari 1923; 14 Februari 1934-3 Februari 1935; 2 Februari 1946-21 Januari 1947; 18 Februari 1958-7 Februari 1959; 6 Februari 1970-26 Januari 1971; 25 Januari 1982-12 Februari 1983; 10 Februuari 1994-30 Januari 1995.

SHIO TI (babi): Bintang Terang menyelimuti Anda. Sekalipun begitu, hendaknya Anda tetap bijaksana. Jangan bimbang melaksanakan cita-cita. Perjalanan jauh menguntungkan.
Kejayaan : Utara, Timur
Bisnis : baik
Hari baik : Minggu
Asmara : harmonis

SHIO CI (tikus): Situasi saat ini masih belum menguntungkan. Semua yang sudah diatur tidak perlu Anda ributkan. Waspadai musuh dalam selimut. Karena itu, jangan buru-buru cari untung.
Kejayaan : Barat, Utara
Bisnis : kurang
Hari baik : Senin
Asmara : rindu

SHIO GU (kerbau): Cita-cita tercapai karena Bintang Penolong sedang berada di pihak Anda. Kabar baik datang secara tak terduga. *Hokkie* meningkat, peluang muncul dari mana-mana.
Kejayaan : Selatan, Barat
Bisnis : baik
Hari baik : Rabu
Asmara : bersinar

SHIO HOUW (macan): Hubungan dengan pihak tertentu harus dijaga dengan tenggang rasa. Relasi lama jauh lebih baik daripada yang baru. Hindari kericuhan demi menjaga *hokkie* Anda.
Kejayaan : Timur, Selatan
Bisnis : baik
Hari baik : Kamis
Asmara : kocak

SHIO TOW (kelinci): Minggu ini Anda seperti berada di persimpangan jalan yang serba menguntungkan. Renungkan demi efisiensi kerja Anda. Hati-hati jangan salah memilih jalan.
Kejayaan : Barat, Utara
Bisnis : baik
Hari baik : Jumat
Asmara : berbunga-bunga

SHIO LIONG (naga): Suasana berubah di luar perkiraan. Sebaiknya diterima dengan lapang dada ketimbang beremosi tinggi. Meski tidak cemerlang, bintang masih menyinari Anda.
Kejayaan : Barat, Utara
Bisnis : baik
Hari baik : Jumat
Asmara : sayang

SHIO COA (ular): Keuangan tertolong. Meski rencana terhambat, semua bisa diatasi. Waspadai angin timur yang membawa penyakit, sedangkan angin barat membawa harapan.
Kejayaan : Barat, Utara
Bisnis : baik
Hari baik : Jumat
Asmara : bimbang

SHIO BEH (kuda): Semangat tinggi dan ketenangan akan membuahkan hasil. Jangan sepelekan kawan karib. Pandai membawa diri, bersikap luwes dan mengalah bisa membawa hasil lebih baik.
Kejayaan : Utara, Timur
Bisnis : baik
Hari baik : Minggu
Asmara : dingin

SHIO YO (kambing): Situasi tidak mendukung Anda. Jangan terlalu berambisi. Lebih baik menunggu dan melihat dulu. Awan hitam mengganggu, tapi jangan berkecil hati. Bersabarlah.
Kejayaan : Selatan, Barat
Bisnis : kurang
Hari baik : Senin
Asmara : sunyi

SHIO KAUW (kera): *Hokkie* meningkat, tetapi masalah keuangan selalu muncul. Urusan bertambah lancar. Kabar gembira datang dari dalam membawa semangat bagi Anda. Tetap bijaksanalah.
Kejayaan : Timur, Selatan
Bisnis : baik
Hari baik : Senin
Asmara : gembira

SHIO KEE (ayam): Keinginan Anda akan tercapai, tawaran baru menggiurkan. Sebelum disetujui, tidak ada salahnya tawaran itu diperiksa dahulu. Jangan berspekulasi dalam bidang keuangan.
Kejayaan : Timur, Selatan
Bisnis : baik
Hari baik : Minggu
Asmara : ceria

SHIO KAO (anjing): Keserakahan akan membawa malapetaka. Kini adalah saat baik untuk berganti haluan. Pilihlah dengan cermat, jangan asal tabrak. Salah-salah bisa mencemarkan nama baik.
Kejayaan : Barat, Utara
Bisnis : baik
Hari baik : Kamis
Asmara : indah

PEMBALASAN "ANAK-ANAK IBLIS"

REUTER

Sekte-sekte yang menahbiskan diri sebagai agama baru ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain penuh dengan ajaran-ajaran yang menggoda, kelompok ini juga didukung massa yang militan. Tragedi gas beracun di jalur kereta api Tokyo, yang diduga dilakukan sekte Aum Shinri Kyo, menjadi contohnya. Begitupun ledakan bom yang menghancurkan Gedung Federal di Oklahoma, Amerika Serikat (AS), oleh pengikut sekte Branch Davidian. David Koresh, pimpinan Branch Davidian yang dua tahun silam tewas dalam tragedi Waco, Texas, dan Shoko Asahara dari Aum Shinri Kyo yang masih diburu, membuktikan betapa sekte yang mengultuskan sang pemimpin tidak pernah pudar. Berikut ulasan tentang sekte-sekte radikal yang pernah mengguncang dunia, yang dirangkum dari berbagai sumber.

TIME

TIMOTHY MC VEIGH: Sisa tragedi Waco, 1993.

Berbagai hujatan terlontar ke arah seorang pemuda yang digiring petugas FBI Amerika, Sabtu, 22 April lalu. Puluhan wartawan dan kamera menyoroti dirinya. "Pajang saja dia di sini agar kami bisa melihat wajahnya," ujar Theresa Collin, penduduk Perry, Oklahoma. Ribuan mata, kebanyakan wanita dan anak-anak, mengarah kepada tokoh itu saat dibawa keluar dari pengadilan wilayah Noble di Perry. Namun, Timothy Mc Veigh, 27 tahun, tokoh kontraversial itu, tetap tenang. Teriakan "Iblis..! Sadis..! Tidak manusiawi!" ditanggapinya dengan diam. Meski veteran Perang Teluk ini tahu -- jika saja terbukti bersalah, ia bisa dihukum mati -- namun Timothy seakan tidak mempedulikannya. Batinnya seakan berkata, utang darah dua tahun lalu, terbalas sudah.

Korban akibat ulah Timothy memang mencengangkan. 87 orang dinyatakan tewas dalam reruntuhan Gedung Alfred Murrah, di Oklahoma, AS, Rabu dua pekan lalu. 17 di antaranya anak-anak. Sejauh ini dilaporkan lebih 400 lainnya cedera dan hampir 200 belum diketahui nasibnya.

Yang mengejutkan bukan itu saja. Sasaran Timothy yang dituduh sebagai pelaku ledakan bom mobil di gedung berlantai sembilan itu, membuat mata warga Amerika terbelalak. Betapa tidak, digedung itu berkantor badan-badan yang mewakili pemerintah federal, seperti FBI, Biro Pengawasan Alkohol, Senjata dan Tembakau, Jawatan Sosial, Urusan Perumahan, Administrasi Urusan Veteran dan Kantor Urusan Perumahan. Jadi dapat ditebak, kalaupun tindakan Timothy itu sebagai protes, tentunya protes itu ditujukan kepada pemerintah Amerika.

Semula pihak FBI merasa kesulitan menangkap pelaku pemboman itu. Dugaan awal, tindakan itu dilakukan oleh teroris "Islam Fundamentalis" Timur Tengah. Akibatnya, Abdalla Muhammad, warga Amerika keturunan Yordania, sempat ditahan sehari setelah peledakan. Ia ditangkap di London ketika baru keluar dari pesawat yang membawanya dari Chicago dan langsung dikembalikan ke Amerika. Hasil pemeriksaan ternyata menunjukkan semua tuduhan itu tak terbukti sama sekali. Abdalla, 45 tahun, resmi dinyatakan tidak bersalah.

Keterangan dari berbagai saksi pun dikumpulkan. Didapatlah ciri-ciri wajah orang yang siang itu masuk ke dalam ruangan. Gambar keduanya kemudian disebarkan di semua wilayah negara bagian Amerika. Tidak salah lagi, itulah wajah Timothy Mc Veigh dan rekannya David Ineguez.

Ketika sketsa wajah disebar, saat itu Timothy tengah ditahan dalam kasus pelanggaran lalu lintas di Kansas City. Rencana pelepasannya dengan uang jaminan, kemudian ditunda. Tim FBI kemudian menjemput sang tokoh yang disebut-sebut sebagai manusia berwajah iblis. Sedangkan David Ineguez menyerahkan diri kepada kepolisian San Bernardino, Los Angeles. Pupus sudah kecurigaan tehadap Islam Fundamentalis. "Bukti menunjukkan kalau kasus ini murni dalam negeri," kata Jaksa Agung AS, Janet Reno.

Alasan pemboman yang dilakukan Timohty, membuat semua orang tercengang. Ulahnya itu kembali mengingatkan dunia tentang pembantaian terhadap sekte Branch Davidian, pimpinan David Koresh, di Waco, Texas, dua tahun lalu. Hingga kini, kematian 86 pengikut sekte itu masih diperdebatkan. Pihak FBI menyatakan, kalau kematian itu adalah tindakan bunuh diri David Koresh. Namun, tidak sedikit pihak yang mengatakan itu akibat serangan FBI, yang menuduh sekte itu menghimpun senjata dan amunisi gelap.

Agaknya bagi Timothy, tuduhan kedua itulah yang benar. Timothy adalah salah seorang dari sekitar sepuluh ribu pengikut David Koresh

yang sekarang menyebar di seluruh wilayah Amerika. Tidak salah lagi, pemboman Gedung Alfred Murrah itu adalah tindakan balas dendam terhadap FBI. Apalagi, di gedung itu berkantor Biro Federal FBI dan Biro Pengawasan Alkohol, Senjata dan Tembakau. Badan inilah yang menyerang markas David Koresh itu. Tidak salah, kalau Timothy beranggapan, tindakannya itu adalah upaya balas dendam atas kematian sang pemimpin David Koresh dan pengikut-pengikutnya.

AUM SHINRI KYO DAN GAS SARIN

Lain di Amerika, lain pula di Jepang. Namun keduanya memberi gambaran, betapa kekuatan sekte-sekte yang dianggap menghindar dari sentuhan pemerintah ini tidak bisa dibiarkan sebelah mata. Teror gas Sarin di jalur kereta api wilayah Kasumigaseki, Tokyo, (21 Maret lalu) itu memang tidak banyak memakan korban seperti kasus bom di Oklahoma. Sebanyak 12 orang tewas dan ratusan korban menderita serius.

Sekitar 11.000 anggota keamanan langsung dikerahkan untuk membongkar kasus kejahatan dalam bentuk baru itu. Gubernur Tokyo, Shunichi Suzuki malah mengerahkan pasukan bela diri khusus untuk perang kimia. Ratusan ambulans mondar-mandir dari stasiun kereta api dan rumah sakit. Setiap wajah pasti akan ketakutan bila melihat bungkusan di jalanan. Pikiran mereka dihantui oleh sadisnya serangan gas sarin yang kekejamannya 500 kali lebih mematikan dibandingkan dengan *siankali*, gas syaraf yang digunakan Nazi pada 1938. Dan memang, awal kericuhan itu dari sebuah bungkusan plastik yang diletakkan pada kereta yang tengah melaju. Tokyo -- yang terkenal dengan keamanannya -- kali itu bagaikan dalam keadaan perang.

Penggerebekan pun dilakukan ke berbagai perkumpulan dan pusat-pusat kegiatan agama yang berbau politik. Pengalaman di Tokyo menunjukkan, organisasi seperti inilah yang potensial menciptakan konflik massa. Kegiatan ini ada di Tokyo, Provinsi Yamanashi dan di kaki Gunung Fuji, Provinsi Shizuoka.

Pengejaran itu, oleh media di Jepang, digiring ke perkumpulan Aum Shinri Kyo yang didirikan 1987 di sebuah wilayah tersembunyi di Tokyo. Tidak sia-sia. Ketika penggerebekan dilakukan, polisi menemukan timbunan bahan kimia sodium florida dan asetonitril, bahan dasar pembentuk sarin. Timbunan itu dapat menghasilkan 50 ton sarin, yang bisa "menghentikan" hidup 100 juta jiwa. Bukan hanya itu, sekte ini pun diketahui memiliki baksil Botulinus, racun maut yang digunakan Jerman pada Perang Dunia II. Satu gramnya saja, senjata biologis ini mampu membunuh 17 juta jiwa. Dapat dibayangkan, ruang lingkup ancaman sekte ini.

Puluhan pengikut sekte yang didirikan dan dipimpin oleh Shoko Asahara, 40 tahun, ini ditangkap. Sedangkan Shoko Asahara yang lahir dengan nama Chizuo Matsumoto, hingga sekarang, raib entah ke mana. Di duga, ia kini bersembunyi di Moskow di salah satu cabang sektenya.

Sungguh mengejutkan, bukan hanya kalangan anak muda saja yang tertarik mengikuti ajaran Asahara itu, bahkan kalangan ilmuwan dan ahli politik Jepang, juga banyak bergabung. Salah seorang di antaranya Hideo Murai, ahli sains dan teknologi. Wakil Asahara ini tewas ditikam Yuko Jo, 29 tahun, pemuda yang mengaku kehilangan seorang saudaranya dalam tragedi gas di kereta itu. "Tangkaplah saya, saya sudah puas sekarang," kata pemuda keturunan Korea ini sambil menyerahkan diri kepada petugas.

Hideo Murai sempat diangkut ke RS. Puluhan pengikut sekte ini berlomba-lomba menyumbangkan darahnya bagi Murai. Namun nyawa ahli kimia ini tetap tidak tertolong. Ia tewas di depan rekan-rekannya pengikut Aum Shinri Kyo. Namun kematiannya itu memberi gambaran, semangat "harakiri" juga dimiliki

NURI

SHINJUKU GYOEN GARDEN: Sepi akibat teror Aum.

sekte ini.

Baik tragedi David Koresh dan pemboman Gedung Alfred Murah oleh pengikutnya, maupun manuver sekte Aum Shinri Kyo, memang tidak sama. Namun, dari kedua peristiwa ini jelas memberi gambaran, sekte-sekte bukan hanya menumbuhkan kepercayaan pada sebuah aliran baru semata. Tetapi sekte sudah mengarah ke bentuk koloni yang melahirkan komunitas terpisah dari umum. David Koresh dengan tuduhan menyimpan senjata dan amunisi, serta Shoko Asahara, yang dituduh menimbun senjata kimia adalah fenomena baru perkembangan sebuah aliran yang mengalami krisis kepercayaan. Bukan hanya krisis kepercayaan agama saja, tetapi juga kepada pemerintah. Akibatnya, usaha merebut kekuasaan pun dirancang dengan senjata.

Yang lebih mengherankan, di mana rahasia kekuatan ajaran David Koresh dan Shoko Asahara ini. Mengapa pengikutnya rela mati demi sekte dan pimpinannya. Ini tentu mengingatkan kita kembali pada peristiwa bunuh diri massal 913 pengikut sekte Gereja Kuil Rakyat pimpinan Jim Jones, di hutan negeri tropis Guyana, Amerika Selatan, 1978 lalu.

KULTUS KEAGAMAAN: PROMOSI KEMATIAN DAN HARI KIAMAT

NEWSWEEK
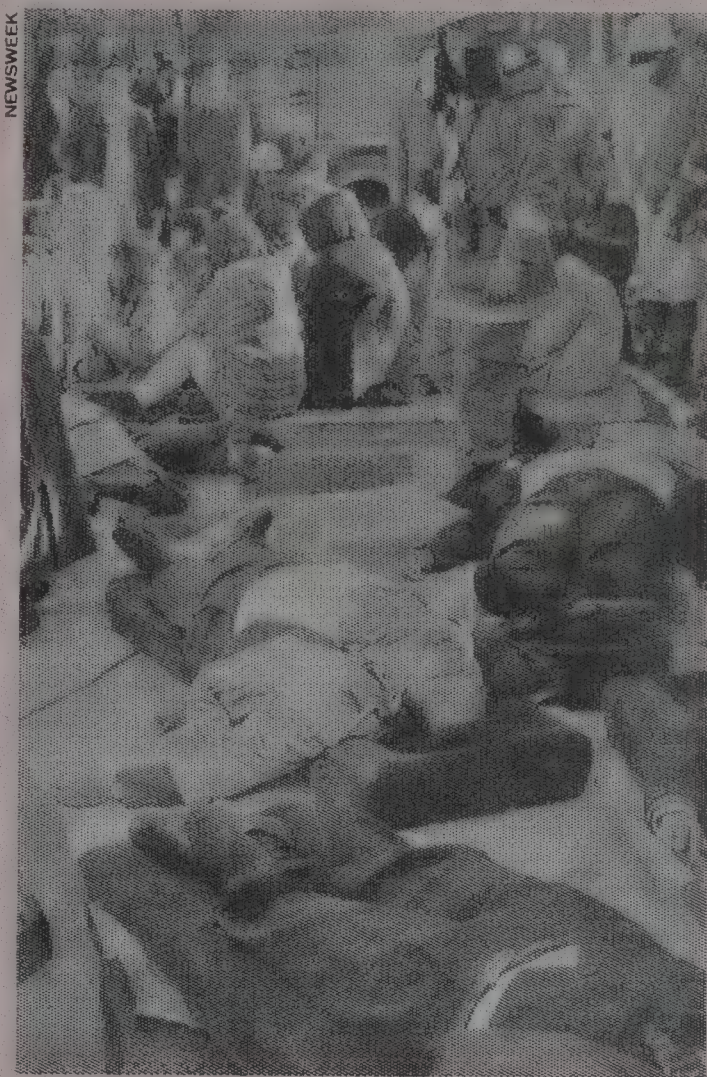
AUM SHINRI KYO: Awalnya gas sarin.

Yang mendasar dari kekuatan militan pengikut Shoko Asahara dan David Koresh ini adalah pribadi kedua pimpinannya. "Shoko adalah pribadi manusia tanpa cerca," demikian pujian Fumihiro Joyu, 32 tahun, pakar soal roket Jepang yang menjadi pengikut sekte itu dua tahun lalu. Pujian terhadap David tidak kalah indahnya. "Ia adalah tipe manusia suci, sedangkan pemerintah Amerika adalah setan," demikian doktrin yang tertanam dalam diri pengikut ajaran Kristen menyimpang itu. Karena puji-pujian itulah, semua pengikut sekte ini sangat menggantungkan hidup mereka dari pemimpinnya.

Kendati ajarannya berbeda, tetapi "jualan" kedua sekte itu sama. Sama-sama menjual kematian dan hari kiamat, dengan menarik garis tegas antara pengikutnya dan masyarakat. Bedanya, Shoko Asahara menjual isu perang nuklir ditambah kelihaiannya dalam meramal, sedangkan David Koresh, tentang kutukan Tuhan. Namun, hasil kedua ajaran ini sama. Pengikutnya rela berkorban apa saja demi sang pemimpin dan sektenya.

Menurut pengikut Koresh yang selamat dari tragedi Waco, sang pemimpin banyak memberikan ajaran yang bersumber dari kitab Wahyu, kitab akhir dari Perjanjian Baru. Kitab ini banyak mengisahkan tentang hari kiamat dan golongan orang yang akan selamat. Orang yang selamat itu adalah orang yang melakukan kesaksian Yesus Kristus.

Kitab Wahyu itu sebenarnya masih dalam misteri hingga sekarang. "Bukan hanya isi, kata-katanya juga mengandung misteri," kata Santo Jerominus, yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Dalam kitab itu disebutkan, kiamat sudah dekat. Seorang keturunan Daud telah dipilih Tuhan untuk meluruskan jalan manusia yang tersesat. To-

Bocah yang Baik dan Ibu yang Jahat

Richie Rich *melahirkan keluarga tenteram,* Mother's Boys *memunculkan ibu yang memuakkan.*

Secara hampir bersamaan, dua film bertema keluarga menembus Jakarta. *Richie Rich* dengan bintang cilik penuh pesona Macaulay Culkin, sementara *Mother's Boy* menghadirkan artis kawakan Jamie Lee Curtis. Tetapi jangan kaget bila Anda usai menonton keduanya, simpati yang muncul akan bertolak belakang. Di *Richie*, keluarga digambarkan begitu harmonis -- padahal mereka kaya raya -- sementara si ibu dalam *Mother's* tampak begitu judes dan gampang sekali menelantarkan anak-anak dan suami.

Bintang cilik, Culkin, tetap cemerlang dan pasti disukai anak-anak (setelah dihujat berkat permainan "jahatnya" dalam *Good Son*). Dunia Culkin, tampaknya, tidak bisa lepas dari dunia anak-anak yang melihat aktor tidak bisa dipisahkan dari pemeranannya di layar lebar. Ketika sukses -- dan memancing empati karena menjadi hero -- dalam *Home Alone*, Culkin melambung tanpa syarat. Ia segera dipuja anak-anak dan para produser. Harganya melangit, konon sampai Rp 30 miliar untuk satu judul.

Sayang, popularitas Culkin sempat terganggu akibat peran jahatnya dalam *Good Son*. Karena itu, kehadirannya dalam *Richie Rich* tampaknya didorong semangat cuci nama. Dan ia berhasil.

Dalam film terbungsunya itu, Culkin memang tampil lengkap, baik dari segi kualitas akting maupun muatan moral tokoh yang dilakoninya. Dikisahkan, Culkin (Richie Rich) anak tunggal pasangan mahakaya, Richard dan Regina Rich. Kekayaan *holding* perusahaan yang tergabung dalam bendera Rich Industry itu ditaksir US$ 70 miliar. Secara genetika ekonomi, Richie tentu berhak atas kekayaan sebesar itu. Kaya betul.

Richie Rich

Pemain	:	Macaulay Culkin, Christine Abersole, Edward Hermann
Sutradara	:	Donald Patrie
Produksi	:	Silver Picture

DOK. SINAR

MACAULAY CULKIN: mendongkrak simpati.

Keluarga Rich sangat harmonis. Richie tidak pernah putus kontak dengan ayahnya. Dengan jaringan *dadlink*, Richie bisa berkomunikasi dengan ayahnya melalui komputer yang memenuhi kamar mewahnya. Intrik muncul manakala salah seorang direktur, Van Dough, hendak mengambil alih perusahaan itu dengan cara melenyapkan Richard dan Regina yang tengah terbang ke Inggris memenuhi undangan Ratu Elizabeth. Usahanya hampir berhasil. Bom di pesawat meledak, tapi pasangan itu tidak mati karena jatuh di laut.
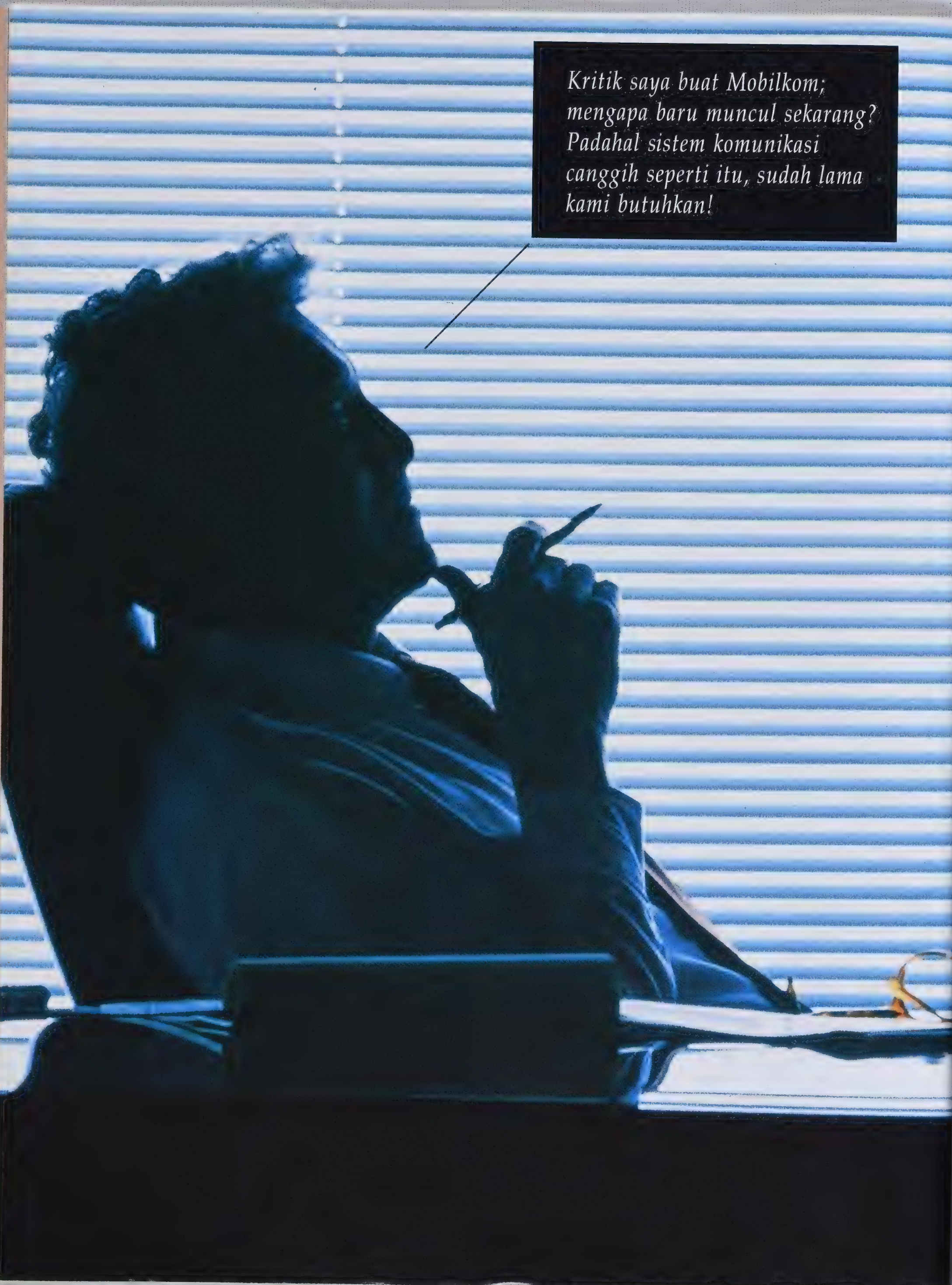
Kemudian, ide-ide Van Dough yang disampaikan melalui rapat juga dimentahkan Richie yang pembawaannya mirip direktur *beneran*. Tampak benar Culkin dipaksakan dewasa dan arif demi menghapus citra buruknya yang tergurat melalui *Good Son*. Tetapi, itu tidak mengapa. Anak-anak toh tidak melihat perilaku buruk dari kawan sebayanya.

Perilaku sangat buruk justru diperlihatkan seorang ibu dalam *Mother's Boys*. Dan inilah film Hollywood yang paling berani mengangkat sisi kontroversial seorang ibu. Tanpa alasan yang jelas, Jude Mandigan (Jamie Lee Curtis), meninggalkan keluarganya. Katanya, ia ingin bertualang. Alasan yang mengada-ada dan memperlihatkan betul bahwa sutradara, Yves Simoneau, ingin menggambarkan tokoh ini sehitam-hitamnya.

Meranalah Robert Madigan (sang suami, yang diperankan Peter Gallagher), dan tiga anaknya, Kes, Michael, dan Ben. Suami yang sabar dan nyaris mengusung sifat malaikat bisa menyelamatkan anak-anaknya. Apalagi, Callie Harland (Joane Whalley-Kilmer), guru sekolah yang mengajari Kes, Michael, dan Ben, hadir dalam keluarga Robert. Sang ayah akhirnya malah jatuh cinta kepada Callie.

Kekeruhan muncul manakala Jude ingin kembali "masuk" ke rumahnya. Ia ingin menguasai anak-anaknya. Semua usaha mentok, cara jahat pun muncul. Kes, si sulung, dipengaruhi habis-habisan hingga akhirnya tersihir kegilaan si ibu. Tetapi, segalanya teratasi. Hitam putih penokohan sudah teramat jelas menggambarkan apa maunya film ini.

Budi Winarno

Mother's Boys

Pemain	:	Jamie Lee Curtis, Peter Gallagher
Sutradara	:	Yves Simoneau
Produksi	:	Miramax Film

Kritik saya buat Mobilkom; mengapa baru muncul sekarang? Padahal sistem komunikasi canggih seperti itu, sudah lama kami butuhkan!

Penyiam Berkemampuan Tinggi

Menyajikan gambar dan foto seindah warna aslinya. HP pelopor dunia penyiaman?

Kemajuan teknologi kembali mengangkat nama Hewlet-Packard ke permukaan, dengan diluncurkannya produk penyiam (*scanner*) dengan resolusi 600-dpi (*dots per inch*) untuk berwarna maupun turunannya (*greyscale*). Adapun derajat ketelitian warnanya mencapai 30-*bit*, sehingga mampu menghasilkan gambar atau foto yang lebih baik dan terang sesuai warna aslinya.

Kehadiran peyiam berwarna ini jelas sangat menguntungkan bagi para pemakainya seperti untuk memperbesar foto-foto berwarna, logo-logo perusahaan atau bidang periklanan yang butuh model dari beberapa penyiaman. Secara pribadi, penyiam ini dapat digunakan untuk memproduksi ulang foto-foto atau gambar berwarna.

Kemajuan di bidang penyiaman ini sebenarnya sudah lama diketahui, namun mutu hasil cetak yang rendah mengakibatkan Hewlet-Packard berusaha keras untuk menampilkan temuannya yang paling mutakhir. Rendahnya hasil cetak ini tak lain karena penyiaman dilakukan dengan resolusi yang kurang dari 300-dpi. Rendahnya resolusi yang dipakai ini akan mengakibatkan penyiaman yang dilakukan hasilnya kurang sempurna. Di sinilah penyiam HP ScanJet 3C diperkenalkan dan dibutuhkan.

Di Indonesia, HP terkenal sebagai rajanya pencetak laser *(printer laser)* dan *inkjet.* Dengan resolusi optis (*optical resolution*) dan didukung keakuratan warna hingga 30-*bit,* maka penyiam HP ScanJet 3C ini berada paling depan dibandingkan pendahulunya HP ScanJet IIcx 400-dpi, 24-*bit colour* dan 8-*bit* turunannya.

Dengan keakuratan warna hingga 30-*bit,* membuat penyiam HP ScanJet 3C mampu menghasilkan detail bayangan yang lebih jelas dan gambar hitam putih serta turunannya lebih bagus. Penyiam HP ScanJet 3C mampu memproduksi 1.024 perbedaan warna hingga 256 tingkat.

Keunggulan lain dari penyiam HP ScanJet 3C versi kompatibel AT dan MicroChannel adalah tersedianya fasilitas perangkat lunak (*software*) penyuntingan citra (*image editing*) Corel PhotoPaint 5.

Sebagian besar *features-features* menarik dapat digunakan dalam menyunting maupun membuat efek-efek khusus pada citra yang telah disiam. PhotoPaint 5 juga dapat menampilkan dan mencetak sketsa gambar-gambar yang disiam, serta menghilangkan bagian-bagian citra dari dokumen yang telah disimpan sebelumnya.

Selain itu, ada bonus perangkat lunak lain yang dipaket dengan penyiam HP ScanJet 3C, yaitu perangkat lunak penyiam DeskScan, yang teknologinya didukung teknologi pewarnaan dari HP ColorSmart. HP ColorSmart ini membuat penggandaan lebih optimal secara otomatis serta lebih mudah pencetakannya pada pencetak berwarna.

Keunggulan lainnya, penyiam HP ScanJet 3C dilengkapi satu perangkat PC yang dapat digunakan sebagai mesin faksimile. Dengan menghidupkan *mouse,* teks dan gambar yang disiam dapat langsung dikirim ke sebuah kartu PC-faksimile melalui PC AT IBM kompatibel, MicroChannel, atau komputer Macintosh.

Untuk menyiam dokumen ukuran 8,5 x 14 inci sebanyak 50 lembar, dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan *document feeder,* tanpa banyak menyita waktu. Tambahan perangkat optional *transparency adapter* menjadikan penyiam HP ScanJet 3C ini dapat melakukan penyiaman *slide,* film atau media trasparan lainnya, sekaligus mendukung penyiaman untuk *slide* ukuran 35 mm hingga 8,5 x 11,7 inci.

Siapa saja dapat menggunakan penyiam HP ScanJet 3C ini. Kepraktisan dan kemudahan menggunakan alat penyiam inilah yang menjadikan HP ScanJet 3C menjadi lebih unggul dari produk-produk sejenis.

Nurhanafiansyah

PENYIAM HP SCANJET 3C: Mencetak lebih indah dan sesuai warna aslinya.

koh inilah yang akan membawa manusia ke jalan kebenaran.

Tokoh pilihan Tuhan itu, telah menjelma dalam diri David Koresh. "Jika Alkitab benar, akulah kristus itu," kata David Koresh, seperti yang dikutip *Newsweek.*

Keanehan Koresh itu bukan hanya dalam lingkungan sektenya saja. Dalam dua suratnya yang ditujukan ke FBI, David dengan berani menegaskan bahwa ia adalah sang Kristus penyelamat. "Aku telah tiba dan menawarkan kepadamu materai suci. Maka, janganlah kalian menampik undanganku ini. Sadarlah, siapa yang engkau lawan. Hukum adalah milikku... kebenaran adalah milikku... akulah Tuhan kalian. Aku adalah hidup matimu... Engkau pikir engkau punya kekuatan untuk menghentikanku..?" demikian isi tulisan yang dikirim 10 April 1993.

Dalam surat berikutnya yang dikirim dua hari kemudian, Koresh kembali mengirim pesan bahwa ia adalah pencipta surga dan dunia. "Engkau punya keselamatan untuk mempelajari keselamatanku. Jangan menempatkan dirimu untuk melawanku... karena engkau tidak ada apa-apanya dibanding aku..."

Terlahir dengan nama Vernon Howell, pria yang dibesarkan tanpa bapak ini memang menunjukkan bakat yang hebat dalam bidang agama. Ia pengkaji Alkitab yang tekun. Perhatiannya kepada agama jauh melebihi perhatian terhadap pelajaran sekolah. Usai menyelesaikan sekolah menengah, Vernon menemukan kegiatan yang menyenangkan hatinya: menyebarkan ajaran sekte Branch Davidian, sempalan dari Gereja Advent Hari Ketujuh, yang didirikan Victor Houteff 1929. Sebelumnya, Vernon adalah aktivis di gereja Advent.

Ketertarikannya pada sekte ini, menurut pengakuan Vernon, karena agama inilah yang mengajarinya bagaimana menyelamatkan diri dari siksaan kiamat. Sekte Branch Davidian memang sangat banyak mengupas tentang hari kiamat yang menakutkan itu.

Keaktifannya pada sekte itu membuat kareirnya cepat melonjak. Dari asisten, lima tahun kemudian, 1984, Vernon diangkat menjadi pimpinan. Saat itulah Vernon mengganti namanya menjadi David Koresh, Yesus putra Tuhan.

Mulailah kegilaan Koresh muncul. Ia, misalnya, tidak saja memasang foto Yesus di gereja, namun juga memasang foto gitaris *rock,* Ted Nugent, dan kelompok band heavy metal, Megadeth. Begitu keranjingannya terhadap musik *rock,* Koresh juga merubah jenis musik gereja menjadi musik *rock.*

Gereja juga kadang kala diubah menjadi arena bioskop. Ia berulang kali memutar kaset video kegemarannya tentang perang Vietnam, antara lain Platoon, Fall Of Saigon, dan Full Metal Jacket.

Sampai akhirnya muncullah tuduhan FBI bahwa pesanggrahan Koresh menyimpan senjata dan bahan peledak serta barang-barang terlarang lainnya. Menurut pihak FBI, sumber itu diperolah dari pengakuan salah seorang pengikutnya.

Selama 51 hari markas sekte yang terletak di atas 72 ha tanah di Kota Wako, Texas, ini dikepung pasukan FBI. Namun, tidak satu pun yang bersedia menyerahkan diri. Sampai akhirnya terjadilah musibah itu. Markas sekte Branch Davidian meledak dan menghanguskan 86 orang di dalamnya.

NEWSWEEK

PENGGEREBEKAN AUM SHINRI KYO: Ingin menguasai dunia.

Pihak FBI membantah kalau peledakan itu adalah akibat serangan mereka. Ledakan itu, kata Mc Quellan, tim FBI dalam penyerangan itu, adalah tindakan bunuh diri oleh David Koresh sendiri. "Minyak dan bahan peledak di dalam gedung itu meledak dan menghangus-

TIME
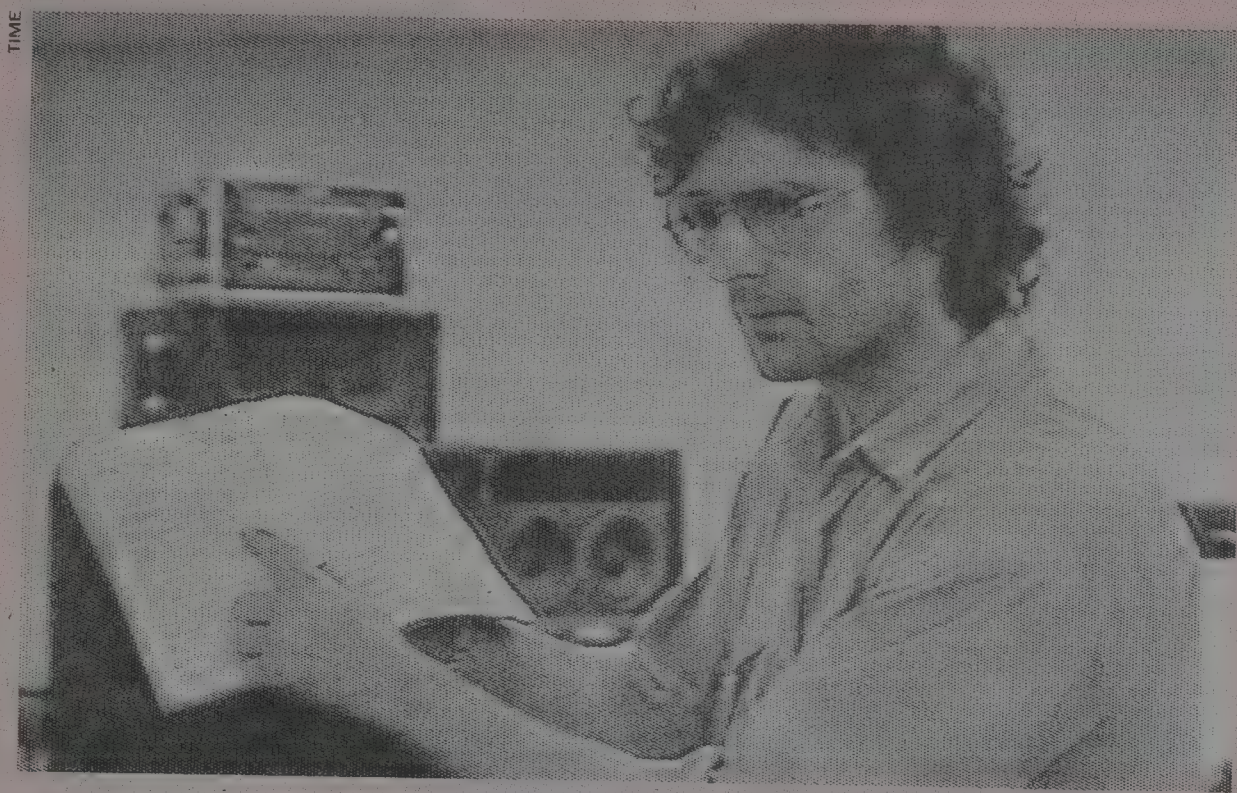
DAVID KORESH: Sayalah kebenaran.

kan mereka semua," katanya.

Meskipun David Koresh telah tiada, dan markas Branch Davidian pun telah diberangus, bukan berarti pengikut sang "tuhan" telah habis. Siapa yang menyangka, persoalan yang terjadi dua tahun lalu itu dibicarakan lagi. Ternyata, dendam telah lahir dari pengikut-pengikut David Koresh, yang kabarnya sudah menyebar sampai ke Australia dan Eropa. Adalah Timothy Mc Veigh yang mengundang kembali persoalan itu. Ledakan bom di Oklahoma, dua pekan lalu telah menjawab, Koresh boleh mati, tetapi pengikutnya, tidak. Dan korban pun berjatuhan, 87 orang tewas. Tidak berbeda jauh dengan jumlah kematian pada markas Koresh di Waco itu.

MILITANSI BARU: DARI KRISIS AGAMA DAN PEMERINTAHAN

KETERGANTUNGAN kepada pemimpin bukan hanya ada pada era David Koresh dan Shoko Asahara saja. Tahun 1960-an, di Amerika sudah berkembang sekte keagamaan yang bersifat kultus individu, yang oleh pengikutnya dianggap lebih sesuai di zaman modern ini.

Mirip seperti kasus Waco, jumlah korban yang lebih besar pernah terjadi di Amerika Selatan, di hutan tropis, Guyana, 18 November 1978. Pimpinan sekte Gereja Kuil Rakyat pimpinan Jim Jones bersama 913 pengikutnya, 276 di antaranya anak-anak, memilih mati dari pada menyerah ke tangan pemerintah

Baik Branch Davidian milik David Koresh, juga sekte Aum Shinri Kyo milik Shoko Asahara, memenuhi ciri-ciri seperti Kuil Rakyat ini, yaitu pengultusan pimpinannya. Tokoh karismatik muncul dengan tuntuan kesetiaan pengikutnya. Yang membedakan, gerakan sekte modern tidak lagi bersifat rahasia.

Kuil Rakyat yang dipimpin Jones merupakan sempalan dari Protestan yang digabung dengan eksperimen sosialisme. Jones, yang pada 1978 berusia 46 tahun, adalah seorang kulit hitam yang gagah dan murah senyum. Ia memproklamasikan diri sebagai nabi Tuhan dan "Bapa", serta mengaku pernah menghidupkan kembali orang yang mati. Jones amat pintar menjual isu bagaimana memperjuangkan persamaan hak. Itulah sebabnya, golongan orang yang tertarik dengan sekte ini adalah kelompok kulit putih kelas menengah-atas yang idealistik, dan kulit hitam terpelajar. Dalam pelukan Jones, pengikutnya adalah "warga yang tidak dikehendaki di Amerika".

Perhatian Jones terhadap pengikutnya memang luar biasa. Ia bahkan mencium hangat seorang wanita kulit hitam yang kesusahan karena lima dari tujuh anaknya dipenjarakan. Keakraban itu tidak hanya ditunjukkan Jones, tetapi seluruh pengikutnya. Bila ada pengikut baru, semua akan memperlakukannya bagaikan tamu agung. Itulah salah satu yang membetahkan pengikutnya.

Jones pernah mengklaim pengikutnya sekitar 20.000 orang. Malah ada yang menyebut 50.000. Dana operasinya terutama dari kantung janda-janda kaya. Jones juga membina hubungan baik dengan beberapa politikus terkemuka di Amerika, terutama dari partai Demokrat.

Tahun 1973, Jones bersama 100 pengikutnya pindah ke Guyana untuk bisnis pertanian.

PENCARIAN BUDDHISME SHOKO ASAHARA

Di mata pengikutnya, Shoko Asahara bukanlah tokoh karismatik yang terlahir karena bakat. Banjirnya jumlah pengikut Asahara -- dikabarkan mencapai 30.000 di Jepang dan Rusia -- disebabkan karena kepintarannya mengolah kata dan ide. Tahun 1987, saat didirikannya sekte ini, kaum muda Jepang memang memasuki era baru, di mana mereka tertarik mengaitkan hal gaib dalam kondisi politis. Dan Asahara memang ahlinya dalam bidang ini.

Kekuatan doktrinnya adalah ancaman akibat senjata nuklir dan hari kiamat. "Kita harus menyelamatkan dunia dari tangan-tangan jahil itu," katanya dalam suatu ceramah. Caranya, sektenya Aum Shinry Kyo harus diperluas dan dilengkapi dengan senjata. Ajarannya diramu dari terjemahan Tibetan Buddhisme dan ramalam-ramalan politik yang menggoda. Asahara mengaku, ia memiliki Buddhi-Chitta, kemurnian Buddha. "Masihkah kalian sangsi kepada saya," katanya.

REUTER
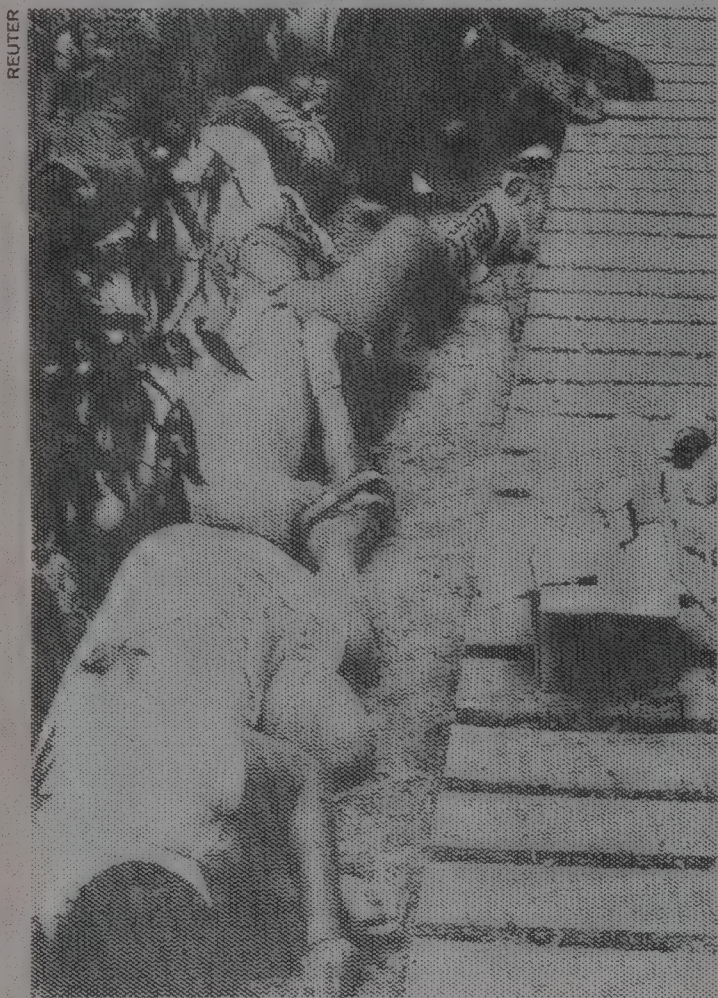
GEREJA KUIL RAKYAT: Bunuh diri massal.

Di atas tanah 400 ha, Jones mendirikan 20 asrama besar, 150 pondok dan sekolah, serta fasilitas umum. Mereka pun menanam sayur dan buah-buahan. Lokasi yang semula tandus itu, oleh tangan Jones disulap menjadi "Taman Firdaus".

Namun, di sinilah perubahan perilaku Jones mulai muncul. Ia mulai bersikap otoriter. Hukum adalah Jones. Mulailah banyak yang menghindari Jones. Malah ada yang melapor ke polisi dan wartawan.

November 1978, anggota perleman California tiba di Guyana bersama rombongan wartawan untuk mengecek pengaduan terhadap Jones. Namun, rombongan itu kembali pulang hanya membawa nama. Mereka dibunuh oleh Jones dan pengikutnya.

Akibatnya, sekte Gereja Kuil Rakyat dinyatakan terlarang. Wilayah mereka dikepung. Jones diminta menyerahkan diri. Tetapi tidak gampang. Saat kritis itu, Jones kembali tampil dengan figur karismatiknya. Ia pun menyuruh anggotanya meminum cairan asam gas beracun yang mematikan. "Itu adalah cara terbaik dari pada menyerahkan diri," tuturnya.

Bak terhipnotis, sebagian dari 913 pengikutnya bergelimpangan setelah mengisap cairan itu. Kalau ada yang menolak, Jones mengancamnya. Akhirnya, lengkaplah, termasuk Jones, punahlah sudah sekte Gereka Kuil Rakyat itu. Mereka memilih bunuh diri daripada menyerah ke tangan CIA.

Gereka Kuil Rakyat, Branch Davidian, dan Aum Shinri Kyo memang berbeda. Tetapi mereka punya semangat yang sama. Kultus individu yang tak luntur. Banyak yang sependapat, sekte itu akan membawa dampak yang kurang baik terhadap negara. Tetapi, masihkah cara kekerasan dipertahankan untuk menghalau mereka? ■

Sekte Aum Shinri Kyo didirikan Asahara setelah melewati meditasi berat di pegunungan Himalaya. Ia meramu dengan ketat, antara Yoga, Tantric-Buddhis, Tao dan Hindu kuno. Pusat kebaktiannya ia fokuskan kepada Dewa Shiwa -- simbol pemburu dan penghancur -- dalam Buddha.

Ramalan politik dan ekonomi Asahara memang sangat menggoda dan kontroversial. Malah, dalam upayanya meraih kekuasaan, ia sudah mencoba turut dalam Pemilu 1990 di Jepang. Namun gagal karena kurang mendapat dukungan. Mulailah ia mengacaukan pengikutnya dengan ramalan-ramalan unik itu.

Puncak kejayaannya tahun 1993. Saat itu sekte Aum Shinri Kyo sudah punya majalah mingguan, penerbitan dan beberapa lingkungan usaha. Pengikutnya pun semakin banyak. Impiannya, ingin menduniakan sekte yang dipimpinnya itu.

Asahara yang lahir dengan nama Chizuo Masumoto berkeyakinan, hanya dengan penyebaran ajarannyalah maka perkembangan senjata nuklir dapat dihentikan. "Dunia akan hancur akibat nuklir tahun 1997-2003. Itulah akhir segalanya. Karena itu, tugas kita untuk menghalau ini," itu salah satu doktrin Asahara yang amat dipercaya pengikutnya. Rencana Asahara, bila nanti tekadnya ini berhasil, ia akan mendirikan markas di Himalaya, tempat asal Buddha dan Yoga.

Tokoh bertubuh tambun dan brewok ini amat gigih meyakinkan bahwa sekte Aum Shinri Kyo adalah cara untuk mencapai kebenaran dan kedamaian. "Kita semua dalam keadaan terancam bahaya. Hanya Yoga yang dapat membebaskan kita dari siksaan ini," katanya.

Sebelum masuk ke dalam sekte ini, Asahara terlebih dahulu membasuh kesadaran si calon. Kepatuhan mutlak menjadi syarat utama. Ada tiga tahap cukup lama yang harus diikuti. Setelah tahap penyadaran, calon tadi akan diberikan rahasia meditasi dan cara mengendalikan napas. Caranya, minum air sebanyak banyaknya dan kemudian dimuntahkan.

Ujian tarakhir adalah upaya pemasukan tenaga kosmis ke dalam tubuh. Jika saja tahap ini sudah dilalui, maka jadilah anggota tadi menjadi pengikut Asahara sejati. Mulailah terlibat dalam petulangan ramalan politik, nuklir dan kiamat. Anggota hanya tahu, sekte Aum Shinri Kyo adalah yang benar. Salah satu yang membuat pengikutnya sangat membutuhkan Asahara adalah ketakutan mereka terhadap ramalan bencana Asahara. "Ramalan itu, seakan sudah terjadi di mata pengikutnya. Mereka akibatnya sangat bergantung kepada Asahara," kata Kim Asokira, mahasiswa Jepang yang sempat tertarik dengan ajaran ini.

Penimbunan bahan-bahan kimia di markas sekte ini adalah salah satu upaya Asahara merebut kekuasaan. Ia sangat yakin, hanya dengan kekuatan dan kekuasaanlah, semua rencana itu dapat dilaksanakan. Namun, meskipun kepolisian Jepang telah menggerebek markas sekte Buddha sempalan ini, tetap saja belum ditemukan benang merah, antara serangan gas beracun di gerbong dengan sekte Aum. Semua pengikut yang tertangkap membantah tuduhan itu. Sayang, Asahara sampai saat ini belum tertangkap. Namun, sama seperti David Koresh, dikejauhan fisiknya, fanatisme pengikutnya tetap saja kukuh. Upaya memproklamasikan makna dan kekuatan sekte Aum yang tidak menyimpang, masih terus dilakukan hingga sekarang.

NEWSWEEK

SHOKO ASAHARA: Agama untuk nuklir.

Begitu tingginya keyakinan orang terhadap Shoko Asahara dan sekte Aum, bukan tidak mungkin teror lain akan muncul sebagai upaya balas dendam. Mengapa tidak? Sebulan setelah dicari, malah terjadi lagi serangan gas beracun di stasiun Keihin Tohoku, Yokohama. Meskipun tidak ada jatuh korban, tetapi setidaknya ini menjadi isyarat, tidak mudah untuk menghabiskan Asahara dan pengikutnya. David Koresh lewat tangan Timothy Mc Veigh tentu bisa memberi contoh. Fanatisme sekte ternyata tidak mudah enyah. Lantas, teror apa lagi yang akan terjadi di Jepang dan Amerika?

Ahmady Meuraxa

DOK. SINAR

CUKUP KAYA VARIETAS BAMBU: belum dibudidayakan.

Menyongsong Kongres Bambu

Dengan dalih menjaga kepentingan lingkungan, bambu akan dijadikan produk komoditas.

Mungkin ada sesuatu yang janggal jika futurolog John Naisbit yang terkenal karena konsep Megatrends-nya itu datang ke Indonesia mengurus soal bambu.

John Naisbitt bukan satu-satunya tokoh dunia pecinta bambu. Tetapi kehadirannya akan menjadi barometer bahwa Kongres Bambu Internasional IV yang akan diselenggarakan di desa Ubud, Bali, pada 19-22 Juni mendatang, merupakan acara yang dianggap penting.

Kongres yang akan diikuti oleh delegasi 16 negara ini sebenarnya kelanjutan dari kongres sebelumnya. Pertama digelar di Puerto Rico pada 1985, kemudian 1988 di Perancis dan ketiga diadakan di Jepang, pada 1992.

Dan, terakhir di Indoneisa. Sudah selayaknya negeri yang kaya tumbuhan bambu ini menjadi tuan rumah perhelatan ilmiah soal bambu. Kesempatan ini sekaligus akan jadi anjang promosi karena sekalipun di Indonesia kaya akan bambu, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. "Kita propagandakan keanekaragaman bambu Indonesia. Kita punya banyak macam bambu, dibandingkan Malaysia, China, Jepang dan Costarica," kata Dr. Elizabeth Widjaja, Ketua Panitia Pelaksana Kongres kepada *SINAR*.

Sejalan dengan kongres tersebut, kini masyarakat di republik ini tengah menghadapi masalah besar mengenai konservasi lingkungan. Dan tanaman bambu akan menjadi jawaban yang cukup bisa diterima.

Misalnya, sebagai tanaman rehabilitasi lahan, reboisasi daerah marginal, daerah terdegradasi maupun penahan erosi. Di samping itu bambu juga mampu mengurangi kadar pencemaran karbon dioksida dan meningkatkan jumlah oksigen. Bahkan ada yang tak kalah pentingnya adalah mempromosikan bambu sebagai satu jenis komoditas.

Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, sebuah LSM yang akan berperan sebagai penyelenggara kongres, memang sudah lama mencoba mempromosikan bambu Indonesia. Direktur Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Linda Garland, menjelaskan, sekarang ini ada tak kurang 1.500 jenis bambu di dunia. Tetapi yang potensial memiliki nilai tambah ada sekitar 30-an saja. Dan Indonesia sebagai negara kedua yang memiliki potensi bambu setelah China, belum menempatkan bambu di papan atas.

Linda Garland, wanita asal Eropa yang memilih menjadi WNI dan sudah 20 tahun tinggal di Ubud Bali itu sudah lama bergelut dengan bambu. "Saya sudah lama membuat mebel dari bambu dan mengekspor ke berbagai negara Eropa dan Amerika," kata Garland.

Tetapi apa yang dilakukan Garland sempat mengalami kelesuan, karena mebel bambu dinilai kurang tahan terhadap serangan bubuk. Namun melalui berbagai penelitian yang dilakukan, akhirnya tiga tahun silam berhasil ditemukan teknik-teknik pengawetan baru. "Seperti kiat meningkatkan daya tahan bambu, termasuk mencegah hama bubuk," ujarnya.

Menanggapi pendapat Garland, Ketua Dewan Penyantun Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Prof. Dr. Emil Salim, mengemukakan kepada *SINAR*, "Bambu memang perlu dimasyarakatkan." Karena, jelasnya, pertama bambu itu bisa dipakai sebagai bahan bangunan. Kedua, secara historis dikenal bambu runcing sebagai senjata. Dan, selanjutnya banyak rumah rakyat yang menggunakan bambu.

Selain itu, tanaman ini tahan gempa, juga tahan api. Juga di dalam bambu terdapat zat yang bisa dipakai untuk mengobati asma. Bambu juga digunakan sebagai alat musik angklung. Akar bambu seperti akar pohon kelapa. Kuat, tahan angin, bisa tumbuh tak terlalu dalam pada permukaan tanah, tapi tak mudah tumbang. Karena itu tanaman bambu baik buat mencegah erosi. Bambu juga telah menjadi bahan pengganti membuat mebel, tas, dan berbagai jenis barang kerajinan.

YUL ADRIANSYAH

Emil Salim

Di Indonesia memiliki varietas bambu yang cukup tinggi. Dari 40 spesies bambu di dunia, 15 di antaranya terdapat di Indonesia.

Spesies bambu di Indonesia lebih banyak dibanding negara produsen bambu terbesar seperti China. Sudah lama LIPI meneliti tanaman ini, di samping bermanfaat untuk menjaga lingkungan, bambu juga menjadi bahan baku industri, misalnya untuk *plywood* dan *pulp*.

Agung Puspito

Kontroversi Alat Bantu Tubuh

Semakin banyak alat bantu tubuh di cangkokkan kepada banyak orang. Namun demikian, masih menimbulkan polemik pro-kontra. Mengapa?

Jangan kaget bila tak lama lagi manusia-manusia seperti Steve Austin yang kuat dan bisa melihat jarak jauh dalam *The Six Million Dollar Man* atau semacam Jimmie Sommers dalam *Bionic Woman* yang bisa mendengar lebih peka daripada manusia biasa akan benar-benar terwujud. Sejak satu dekade di Melbourne, Profesor Graeme Clarck telah memperkenalkan telinga bionik untuk bayi yang tuli pertama kali di dunia.

Dewasa ini langkah pertama menuju era manusia bionik masih dalam tahap pencangkokan alat bantu dalam tubuh manusia. Tapi pemasangan alat bantu ini pun masih mengundang pro dan kontra, karena memiliki efek samping bagi tubuh. Misalnya, alat *verticulo-peritonial* untuk mengalirkan cairan yang berlebih dari otak ke daerah perut. Atau semacam pin dan piringan dari logam yang menolong menyembuhkan patah tulang. Alat-alat semacam ini seringkali salah pasang dan ketika selesai dipasang kekeliruan itu baru diketahui, sedangkan sang pasien yang bersangkutan sudah kabur dan sulit dicari.

Dewasa ini, pabrik pembuat alat-alat implantasi tubuh dirundung oleh ketakutan adanya produknya yang salah. Oleh karena itu mereka menginginkan sistem penjejakan buat mejaga alat-alat yang telah ditanamkan dalam tubuh. Gagasan ini diusulkan karena adanya kritikan terhadap pasien yang dicangkokkan dengan alat yang salah. Majalah *New Magazine* terbitan Australia, pertengahan April lalu, menyatakan persoalan ini adalah hal yang serius. "Lebih mudah menjejaki pemilik kendaraan yang salah ketimbang menemukan pasien yang menggunakan alat bantu tubuh buatan yang salah," ujar Rolfe Howlett dari bagian Pathologi di Universitas New South Wales. Pakar ini turut menyelenggarakan simposium di Melbourne, pada 1995, mengenai diskusi yang memakai cara global buat memonitor dan mengawasi daftar orang-orang yang menerima implantasi.

Pabrik pembuatan alat bantu tubuh ini menghendaki adanya sebuah sistem yang mengawasi dari sisi legal dan juga memantau penampilan alat-alat ini dalam jangka waktu lama untuk kemudian diperbaiki bilamana mungkin.

Majalah *New Scientist*, akhir-akhir ini, mengungkapkan bahwa tak satu pun negara di dunia yang mempunyai sistem penjejakan yang komplet. Sedangkan, untuk mengawasi sisi hukum, di dunia hanya dua, yakni: Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki hukum yang menjanjikan dapat menjaga daftar pasien yang mendapat operasi pencangkokan alat bantu tubuh tersebut.

Malahan Howlett mengatakan kalaupun sistem penjejakan yang komprehensif dilakukan, tidak menjamin suksesnya penanaman alat-alat bantu ini. Contohnya kasus yang menimpa perusahaan AS yang membuat alat pacu jantung, belum lama ini, yang mempunyai potensi kesalahan yang fatal. Perusahaan yang dikenal sebagai Telectronics Pacing Systems of Denver Colorado memutuskan bahwa dari 42.000 orang yang telah dipasang alat pemacu jantung yang secara regular diperiksa dengan sinar X untuk memantau alat-alat, ternyata banyak dari pasien yang alat bantu tubuhnya raib -- entah ke mana.

Hanya saja, bilamana sebuah alat bantu ada yang salah, ini bisa menjadi persoalan pilihan mati dan hidup. Ini yang membuat eksistensi dari sistem penjejakan dikritik.

Malahan majalah *New Scientist* mengingatkan bahaya buat pasien yang bernasib malang, dicangkokan alat bantu yang salah. Perbedaan budaya dan cara penanganan kesehatan yang berbeda antarnegara seringkali terlalu besar. Pada pertemuan terakhir di Melbourne ada usul semua kesalahan pencakokan alat bantu harus ada daftarnya yang berlaku internasional. Untuk itu perlu standar *software* yang memuat data yang dapat ditukar pakai bebas antara komputer yang berbeda dan antarnegara yang berbeda.

Trevor McPherson dari The Australian Gouvernement's Therapeutic Goods Administration mengusulkan sebuah sistem penjejakan untuk negara "Benua Kanguru" tersebut. Ia mengatakan bahwa alat-alat yang ditanamkan diberikan label yang melekat dan membawa sebuah versi kode dari sejumlah nomor seri. Nomor pada label dapat dibaca melalui komputer rumah sakit dengan alat yang serupa yang digunakan di toko-toko. Ia juga mengusulkan agar rumah sakit dapat diperkuat oleh hukum untuk melengkapi sistem baru ini.

Irvan Sjafari
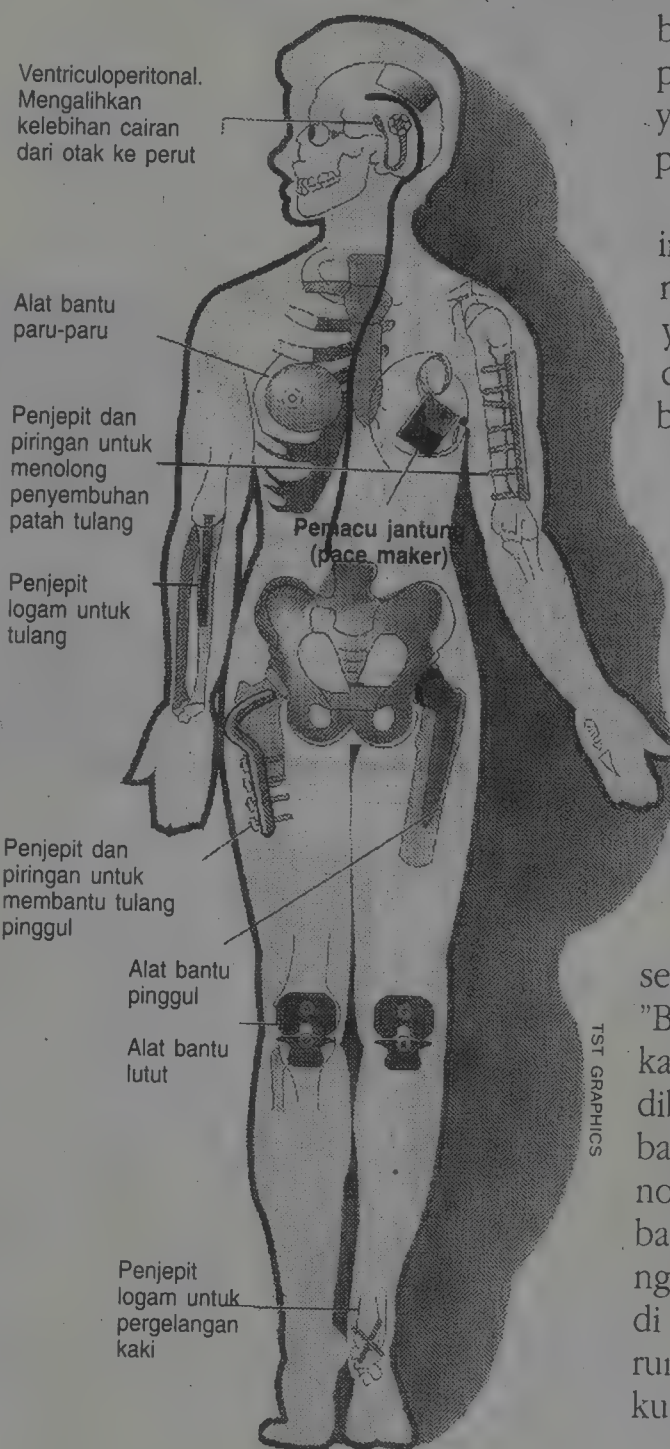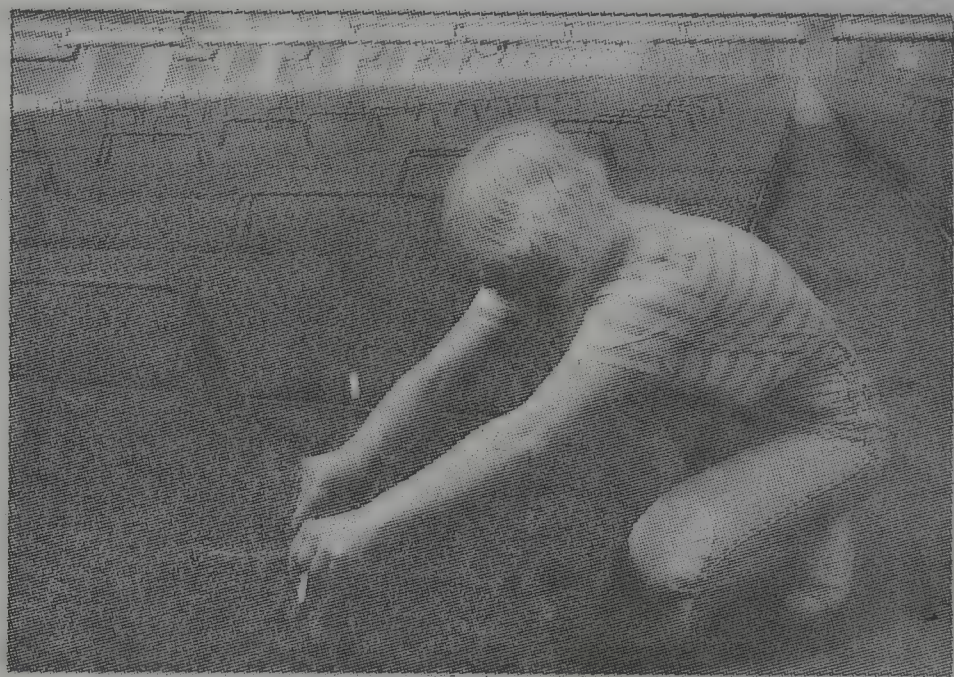
Ventriculoperitonal. Mengalihkan kelebihan cairan dari otak ke perut
Alat bantu paru-paru
Penjepit dan piringan untuk menolong penyembuhan patah tulang
Pemacu jantung (pace maker)
Penjepit logam untuk tulang
Penjepit dan piringan untuk membantu tulang pinggul
Alat bantu pinggul
Alat bantu lutut
Penjepit logam untuk pergelangan kaki
TST GRAPHICS

Kebijakan Setengah Hati

Sejumlah pungutan terhadap murid SD-SMP tetap saja diberlakukan. Bagaimana wajib belajar sembilan tahun?

Seberapa seriuskah pemerintah dengan program wajib belajar sembilan tahun? Pertanyaan itu mencuat setelah kenyataannya tetap saja ada banyak pungutan yang dibebankan kepada murid SD-SMP. "Meski ada program wajib belajar sembilan tahun, tetap saja ada pungutan. Mana ada sekolah yang gratis?" kata Handoko (45 tahun) warga Rungkut, Surabaya. Menurut dia, sejak program wajib belajar sembilan tahun dicanangkan, dan uang SPP dihapuskan, muncul yang namanya uang BP3.

Daftar lebih panjang disebutkan Nyonya Sri Harni dari Jakarta, yang saat ini salah seorang anaknya mengikuti Ebtanas SD tahun ini. Menurut dia, ada saja sumbangan yang dikutip oleh sekolah. Setelah uang BP3, ada yang namanya uang sumbangan sukarela (yang jumlahnya ditetapkan), uang pembangunan. Bahkan, ada sumbangan pra-Ebtanas Rp 10.000, dengan rincian: buat kegiatan kesenian, pendidikan jasmani, keterampilan, serta uang jasa guru 10%.

YUL ADRIANSYAH

USIA WAJIB BELAJAR: Wajar, asal tidak membebani masyarakat.

Keluhan serupa datang dari Darma (44 tahun), penduduk Condongcatur, Yogyakarta. "Kalau melihat jumlah pembayarannya, sebenarnya sama saja dengan SPP. Kalau dulu ada bantuan dari SPP, kini beban itu dipikul orangtua. Jadi, ya, *sami mawon*," kata pemilik percetakan kecil-kecilan itu.

Di mata Handoko, dari sisi kewajiban orangtua membiayai pendidikan anak-anaknya, program wajib belajar praktis tak ada pengaruhnya. Karena itu, dia menilai program tersebut sebagai sebuah kebijakan setengah hati. "Kalau mau disubsidi, ya, disubsidi sekalian, pembayarannya jadi bebas sama sekali. Kalau tidak, subsidinya ditarik saja. Toh, akibatnya sama saja, enggak ada pengaruhnya," katanya.

Akibat kebijakan setengah hati tersebut cukup ramai di Samarinda, Kalimantan Timur. Seperti ditulis *Suara Pembaruan* 21 April lalu, sejumlah SD di daerah itu akhirnya melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan Ebtanas. Ada larangan mengenakan pungutan apa pun kepada orangtua/wali murid untuk penyelenggaraan Ebtanas. "Tidak dibenarkan memungut biaya apa pun kepada orangtua/wali murid untuk penyelenggaraan Ebtanas. Sebab, biayanya sudah ditanggung pemerintah," ujar Hasan Nuntji, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur.

Nyatanya, rata-rata SD di Kalimantan Timur mengenakan pungutan Ebtanas yang besarnya bervariasi dari Rp 12.500 sampai Rp 25.000 per siswa. "Kalau mematuhi aturan tersebut, bagaimana bisa menyelenggarakan Ebtanas bagi murid-murid kami," kata seorang guru SD Negeri 030 Samarinda kepada *Suara Pembaruan.*

Guru yang enggan disebut namanya itu menjelaskan, Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP) SD Negeri sebesar Rp 425 per siswa itu tidak memadai. Bayangkan saja. Bagaimana subsidi sekecil itu bisa membiayai 10 pos kegiatan, mulai persiapan sampai pasca-Ebtanas? Di antara pos-pos yang cukup penting itu adalah ongkos penulisan ijazah, biaya alat tulis kantor, honor pengawas Ebtanas, biaya pelaporan, dan keperluan lain. Meski begitu, guru tersebut mengatakan, sebagian pungutan Ebtanas itu juga digunakan untuk acara perpisahan sampai biaya pembuatan map ijazah agar terkesan eksklusif.

Di lain pihak, Syahrul Abubakar, Kepala Sub Direktorat Pembinaan SD Departemen PdanK, menyatakan bahwa wajib belajar memang ditanggung pemerintah, yaitu SPP. Meski begitu, dia mengingatkan, tanggung jawab pendidikan menurut undang-undang juga ada pada masyarakat. "Kemampuan pemerintah membiayai pendidikan yang baik secara keseluruhan memang terbatas. Sedangkan pendidikan yang baik itu mahal," katanya.

Selain itu, biaya Ebtanas merupakan bagian kecil dari keseluruhan yang ditanggung pemerintah. Nah, biaya yang disediakan pemerintah untuk Ebtanas

memang kecil. Tapi, dari anggaran pendidikan sebenarnya cukup besar. "Murid SD saat ini sekitar 25 juta orang. Biaya yang ditanggung kan bukan untuk Ebtanas saja," katanya.

Yang pasti, menurut Menteri PdanK Wardiman Djojonegoro, pemerintah tetap konsisten dengan penyelenggaraan pendidikan, program wajib belajar sembilan tahun. Masalahnya, pemerintah memang tidak mungkin membiayai semua kegiatan karena anggaran yang ada memang belum mencukupi. "Karena itu, masyarakat diketuk banyak investasi. Kalau tidak begitu, mana mungkin kita menyelenggarakan pendidikan," katanya.

Lebih jauh lagi, menurut Menteri Wardiman, tujuan pemerintah, suatu saat belajar tidak perlu membayar walau sekarang hal tersebut belum bisa diterapkan.

Wardiman menilai, sumbangan-sumbangan untuk pendidikan itu wajar-wajar saja, demi kelancaran Ebtanas, misalnya. Dia berharap masyarakat menyadari, untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, diperlukan partisipasi masyarakat dan tambahan sumbangan yang bersumber dari masyarakat. Cuma pesannya, sumbangan-sumbangan yang ada itu jangan sampai membebani masyarakat.

Menteri Wardiman pun berjanji akan mengecek kasus seperti yang diributkan di Kalimantan Timur itu. Untuk itu, dia merasa perlu melihat laporannya, untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Soalnya, bisa saja ada sumbangan yang tidak sampai ke tujuan. "Semuanya akan kami cek dahulu. Kalau memang melanggar, ya, kami tindak," katanya.

Nazir Amin/Leny Amril, Heroe Poerwadi (Yogyakarta), Moh. Kaiyis (Surabaya)

Menunda Hasrat Anak Tugimin

Pendidikan telah menjadi sebuah komoditas dan laku dijual. Lihatlah bagaimana sekolah-sekolah (yang bagi sebagian besar masyarakat) sangat mahal bermunculan dan ternyata banyak peminatnya. Ambil contoh, Sekolah Menengah Umum (SMU) Al Azhar, Boarding School, Lippo City, Bekasi. Sekolah yang memadukan unsur pendidikan modern dengan penjiwaan unsur agama itu memasang "tarif" sampai Rp 20 juta untuk uang pangkal. Belum lagi SPP sebesar Rp 500.000 ditambah Rp 350.000 uang asrama per bulan.

Contoh yang cukup spektakuler bisa dilihat di TK dan SD Global Jaya milik konglomerat Ciputra. Menurut Edy Siahaan, Ketua Yayasan Pendidikan Jaya, pengelola sekolah yang resmi dibuka Juli 1995 itu, selain membayar uang pangkal Rp 20 juta (berlaku enam tahun), juga ada Rp 625.000 SPP TK dan Rp 750.000 SPP SD.

Di tingkat perguruan tinggi, jumlahnya makin berlipat. Uang masuk ke perguruan tinggi di Jakarta ada yang sampai Rp 30 juta. Belum biaya lainnya.

Pakar pendidikan Arief Rahman mencoba memahami mahalnya biaya pendidikan. Mestinya, kata Arief, dilihat juga fasilitas yang disediakan sekolah-sekolah tersebut. Kalau bayarannya lebih, ya, fasilitas mesti lebih baik. "Pendidikan itu barang komoditas. Hanya niat pengembangan wataknya yang tidak bisa dikomoditaskan," kata Kepala Sekolah SMA Labschool IKIP Jakarta itu.

Menurut Arief, yang perlu dijaga, sekolah-sekolah mahal itu jangan sampai memproduksi anak-anak eksklusif yang tidak memiliki integritas dengan rakyat. "Kalau itu terjadi, sudah bertentangan dengan tujuan konsep pendidikan nasional kita," katanya seraya mengutip Pasal 31 UUD 1945, tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan pengertian seperti itu, Menteri PdanK Wardiman Djojonegoro menilai, maha-tidaknya biaya pendidikan itu relatif sifatnya. Semuanya bergantung pada kualitas dan fasilitas yang ada. "Bila ingin barang bagus, tentu mahal. Bila ingin sekolah bagus, konsekuensinya bayarannya juga mahal," kata tokoh ICMI itu. Persoalannya, bagaimana memenuhi hasrat Tugimin dan sebagian besar orangtua yang hidupnya pas-pasan, untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah bermutu?

NAZIR AMIN

SISWA AL AZHAR: Barang bagus tentu mahal.

Nazir Amin/Diyan Srikandini, Nurhanafiansyah

Ganjalan Kurs Dalam Agenda APEC
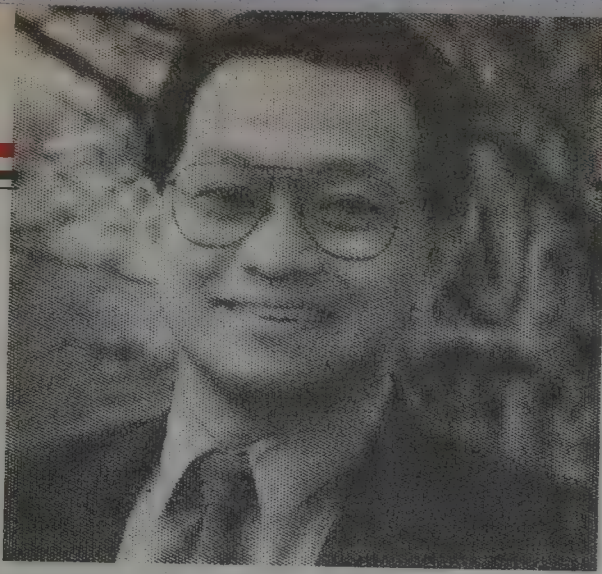
A. Tony Prasentiantono
Dosen FE-UGM, Kepala Divisi Ekonomi Makro, Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Ekonomi UGM.

SETIDAKNYA ada dua isu terpenting yang mengemuka pada pertemuan Menteri Keuangan APEC di Bali, beberapa waktu lalu. Pertama, soal kebijakan tunggal nilai tukar (*single exchange rate policy*) di antara mereka. Kedua, soal fenomena yendaka yang merepotkan neraca pembayaran sebagian negara-negara anggota APEC.

Tentang isu kemungkinan menyatunya kebijakan nilai tukar, sebenarnya sudah bisa ditebak hasil sebelumnya bahwa hal itu pasti sukar dilaksanakan. Kerja sama dalam konteks APEC, sejak semula memang hanya diproyeksikan untuk menangani masalah-masalah perdagangan dan investasi dan tidak menyangkut kebijaksanaan moneter.

Menurut pengalaman selama ini, kerja sama ekonomi regional biasanya memang sulit diarahkan untuk mewujudkan penyatuan kebijakan moneter. Dalam kasus lain, misalnya pada Uni Eropa (*European Union*), gagasan tentang mata uang tunggal (*Single European Currency*) sudah dilontarkan sejak beberapa tahun silam. Rencananya, rezim mata uang tunggal itu bakal digulirkan pada 1992, sejalan dengan skedul pasar Eropa tunggal, *Single European Market*. Namun kenyataannya, gagasan itu hingga kini menjadi berlarut-larut.

Perkembangan terakhir soal mata uang tunggal Uni Eropa itu, pada 8 April 1995 telah diputuskan untuk menunda pelaksanaannya, sampai tahun 2003 mendatang -- karena masih adanya kesulitan untuk mencapai kesepakatan.

Kembali ke soal APEC, kesepakatan mengenai tidak adanya kebijakan tunggal dalam nilai tukar, tetapi memberi perhatian terhadap pengendalian inflasi dan defisit perdagangan (lihat *USA Today*, 17 April 1995) adalah keputusan yang tepat. Implikasi dari perhatian terhadap isu-isu inflasi dan defisit adalah kuatnya relevansi pada isu besar lain yang dibicarakan di Bali, yakni soal yendaka. Fakta sudah membuktikan bahwa apresiasi yen telah banyak merugikan beberapa negara berkembang anggota APEC, seperti Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan China. Di antara negara-negara itu, seperti dikutip *Bussines Week* (3 April yang lalu), yang paling dirugikan adalah Indonesia.

Itikad APEC untuk mengontrol inflasi dan defisit memang sudah ada. Tapi masalahnya, upaya untuk mewujudkannya berpotensi mengundang konflik kepentingan. Isu yendaka misalnya, yang sebenarnya sudah menjadi agenda rutin dalama sistem finansial internasional sejak beberapa tahun terakhir, agaknya tidak akan mudah menemukan solusinya.

IWAN SULWAN

Banyak negara APEC memang menghendaki agar apresiasi yen dapat dihentikan, agar beban pengembalian utang dalam bentuk yen tidak bertambah begitu saja. Mungkin hanya berapa negara saja yang cenderung bersikap *indifferent* (tidak acuh) terhadap fenomena ini, seperti Papua Nugini. Atau negara yang malah "mendukung" yendaka, karena mengekspor barang-barang substitusi produk Jepang, yaitu Korea Selatan. Negara ini dalam dua bulan saja sudah meraih untung US$ 2,5 miliar karena konsumen mengalihkan belanjanya dari produk Jepang ke produk Korea.

Kini, usaha untuk menghentikan yendaka akan banyak ditentukan oleh negara yang paling berkompeten di sini: Amerika Serikat. Selama Menteri Keuangan AS, Robert E. Rubin, (pengganti Lloyd Bentsen yang mengundurkan diri) dan Gubernur Bank Central, Alan Greenspan, masih melihat urgensi kepentingan dagang Amerika, maka jangan berharap bahwa dollar akan menguat dan yen melemah. Bank of Japan boleh saja menurunkan suku bunga diskonto dari 1,75% menjadi 1%, dan bisa saja melakukan operasi pasar. Tapi, apa artinya pembelian dollar sebesar US$ 2 miliar, untuk mempengaruhi keseimbangan kurs yen-dollar? Angka itu masih terlalu kecil. Agar operasi pasar efektif, diperlukan lebih banyak lagi dana, dalam skala besar-besaran, untuk memborong dollar di pasar internasional.

Yendaka sebagai sebuah kecenderungan yang mapan berjangka menengah dan panjang, hanya dapat dibendung dengan kebijakan yang dilakukan secara simultan oleh raksasa ekonomi. Rasanya Jepang tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri, sebagai *single fighter*. Partisipasi Amerika, Jerman, dan mungkin juga Inggris dan Perancis, akan menjadi penentu penting (*key factors*). Jadi, persoalan yendaka adalah isu multilateral dan multiregional, yang memerlukan bantuan penyelesaian dari negara-negara besar di luar APEC. Ini pula yang menjadi agenda berikutnya dari para Menteri Keuangan APEC itu, sepulang dari Bali. ■

RESTORAN

BARBEQUE ALA HAWAII DI HORISON

Setiap Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 22.00, sebuah pesta bagi penggemar *barbeque* akan diadakan di pantai indah Hotel Horison, Jakarta Utara. Dengan nama acara "Barbeque Under the Stars", penggemar *barbeque* akan dibawa ke suasana Hawaii.

Suasana santap malam akan terasa mengasyikan dengan beragam hidangan *barbeque* yang lezat. Apalagi, selain disajikan di tepi pantai dengan alam terbuka, acara tersebut pun diisi dengan musik bernuansa Hawaii -- Hawaiian Band -- dan tarian Hula-hula.

Suasana santap malam demikian sangat cocok untuk pesta ulang tahun, perkawinan, atau bagi pasangan dan keluarga yang senang dengan ketenangan dan kedamaian bernuansa Lautan Teduh nan romantis.

Untuk mendapat keterangan lebih detail, Anda bisa menghubungi Hotel Horison, di Jln. Pantai Indah, TIJA, Jakarta 10002; telefon 640-6000, 640-7000 (pesawat 88080); teleks 42824 HORIZ 1A; atau faksimili 62-21 640-6123, 640-6006.

SEMINAR

IHWAL PEMASARAN DI PAPANDAYAN

Membuat produk berkualitas bukan perkara gampang dibanding mendirikan pabrik. Meskipun demikian, lebih susah lagi adalah memasarkan produk tersebut. Masalah pemasaran terjadi di mana-mana, yang mengakibatkan banyak ahli pemasaran dibutuhkan.

Karena itu, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Parahyangan bekerja sama dengan majalah *Swa* akan menyelenggarakan seminar sehari tentang pemasaran ini.

Dengan topik *International Marketing*, seminar ini akan diisi dengan ceramah dari pembicara utama Menko Indag Ir. Hartarto. Sedangkan bertindak sebagai pembicara tamu adalah Drs. Rudy Lengkong (Ketua BPEN), Drs. Christianto Wibisono (Direktur PDBI), Eko Haryanto (Direktur Operasi Internasional PT Astra International), Dr. Rizal Ramli (Direktur Ekonit), dan Direktur JETRO, Mr. Yoshio Nakamura.

Biaya pengganti untuk makan siang, rehat kopi, makalah, dan sertifikat sebesar Rp 150.000,00 per peserta. Seminar akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Mei 1995, pukul 08.00-18.00, di Grand Ballroom Hotel Papandayan Bandung.

Keterangan lebih lanjut bisa diperoleh di FE Unpar, Jln. Merdeka 30 Bandung; telefon (022) 420-5090 (pesawat 24); faksimili (022) 420-2351, atau Pelayanan Informasi dan Pendaftaran 24 Jam (022) 439-102 dengan Jermia, Anthony, Lucas A.F. atau Felix.

DOK. SINAR

PESTA PANTAI: Pantai indah Hotel Horison.

KURSUS

TEROBOSAN DI BISNIS PROPERTI

Sebuah kursus pendek (selama tiga bulan) akan diselenggarakan di Wisma IWI, Lt. 3, Jln. Pejuangan Jalur Lambat, Tomang Tol, Jakarta 11530. Acara yang dimulai pada 20 Mei 1995 itu akan diisi oleh beberapa pakar di bidangnya, serta dengan beberapa topik pembicaraan.

Johannes Lim, MBA akan membacakan makalahnya yang berjudul "Introduksi tentang Terobosan Manajemen Inovatif dalam Bisnis Properti, Inovasi Pemasaran", Basuki Kurniawan, MBA ("Land Development and Financing, Market and Financial Feasibility Study, Marketable Site Planning"), Johanes Hanifah T., MBA. ("Property Management Systems; Cash Management", Halim Santoso, MBA ("Finance, Accounting and Tax Management Systems"), Ir. Ediman Lukito ("Integrated Computerized Management Systems"), dan "Leadership: Team Building and Achievment Motivation Traning" akan dibawakan oleh Marthinus Milono, MBA.

Biaya termasuk untuk rehat kopi, makalah, dan sertifikat Rp. 700.000,00 per peserta. Pembayaran lebih dari satu orang akan mendapat potongan sebesar Rp 100.000,00.

Keterangan selanjutnya bisa Anda peroleh dengan menghubungi telefon 533-0250 (hunting) atau faksimili 533-0251.

LOKAKARYA

IHWAL PEMASARAN DI MEDAN

Chief Service Officer Mark-Plus Professional Service, Hermawan Kertajaya, akan membagi pengalaman ihwal pemasaran dalam sebuah lokakarya di Medan pada 3-6 Mei 1995. Sebelumnya, pada 21-29 April 1995, Hermawan yang pernah mengikuti Program Pendidikan Eksekutif di Harvard Business School pada 1993 dan di Wharton Business School pada tahun 1995 membagikan ilmunya dalam sebuah lokakarya di Jakarta dan Surabaya. Ada tiga topik dari lokakarya itu, menyangkut *brand, service,* dan *process.*

Peminat lokakarya akan dikenai biaya Rp 850.000,00. Biaya sudah termasuk santap siang, *snack,* dan fotokopi bahan-bahan seminar (berbahasa Inggris), yang akan diberikan seminggu sebelum ceramah. Meski begitu, pembicaraan dalam lokakarya tersebut mempergunakan bahasa Indonesia -- dengan contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

Keterangan selanjutnya bisa didapat dari Vivie, di Duta Merlin E-18 Jln. Gajah Mada 3-5; telefon 385-0037, 344-7907; faksimili 344-7939 atau di BBD Building Lt. 3, Jln. Imam Bonjol No. 16D, Medan; telefon 556-122; faksimili 558-212. ■

PENGANIAYAAN KUPING

Pegawai Kejaksaan Agung yang satu ini benar-benar keterlaluan. Hanya karena kupingnya tercolek oleh seorang penumpang bus, si pegawai -- sebut saja Mamat -- main tempeleng seraya mengumpati korban dengan pasal KUHP. Wah..., wah...

Ini terjadi di Jakarta. Tepatnya, dalam sebuah bus kota jurusan Blok M-Kota. Siang itu kebetulan lalu lintas Jakarta tidak begitu ramai. Udara pun tidak terlalu panas karena langit agak mendung.

Mungkin karena itulah banyak penumpang bus tampak diserang kantuk. Tidak terkecuali Mamat. Kepalanya tampak tersender di sandaran jok. Mulutnya sedikit menganga. Bisa jadi karena konstruksi mulutnya yang memaksa dia menganga. Tapi bisa jadi, ya, karena kantuk tadi. Artinya, saking mengantuknya, mulut si Mamat pun terbuka. Dengkurnya juga terdengar jelas sekali.

Tepat di belakang Mamat, seorang penumpang lain -- sebut saja Dindin -- juga terserang kantuk. Tangannya menopang ke sandaran jok di depannya, tepat di kanan kepala Mamat. Mamat dan Dindin sama-sama pulas.

Tapi, kepulasan Mamat terusik ketika tangan Dindin secara tidak disengaja tiba-tiba menyenggol kuping Mamat. Secara refleks, Mamat terbangun. Dan, *"plak!"*, tangan Mamat mendarat telak di hidung Dindin. Yang dipukul pun terkejut. Belum lagi Dindin menyadari apa yang barusan terjadi, Mamat sudah mengoceh, "Perbuatan Anda melanggar Pasal 351 KUHP. Saya bisa menuntut Anda dengan pasal penganiayaan, tahu! Jangan main-main dengan saya, yang sopan kalau duduk," kata Mamat yang berpakaian dinas Kejaksaan Agung tersebut sambil mendelik.

"Maaf, Pak, saya...," jawab Dindin seraya memegangi hidungnya yang memerah. Belum lagi sempurna kalimatnya, Mamat sudah main potong, "Apa? kamu preman, ya!"

Disekak begitu, Dindin pun terdiam. Tampaknya, keder juga Dindin melihat seragam Mamat. "Jaksa, Mek," pikir Dindin.

Agung Mattauch

MARIANA INGIN PULANG

"Grogol..., Grogol...!" teriak Mariana. Inilah yang membuat Sukri, sang kondektur Metromini, terbengong-bengong. Para penumpang pun terbengong-bengong karena setahu mereka Metromini yang ditumpangi memang bukan jurusan Grogol, Jakarta Barat. "Ini ke Pasar Minggu, Bu," kata Sukri.

Tapi, Mariana tetap *ngotot* dan berteriak. "Enggak, Grogol!" katanya.

"Ini jurusan Tanah Abang-Pasar Minggu," jawab Sukri kembali meyakinkan Mariana. Tapi, lagi-lagi Mariana berteriak, "Grogol..., Grogol..."

Sukri, sopir, dan beberapa penumpang mulai menebak yang tidak-tidak. Mereka menganggap Mariana sedeng alias sakit ingatan.

"Ini Metro Mini nomor 604 kan?" tanya Mariana. Jawaban yang tepat itu membuat tebakan mereka semula buyar seketika. Sebab, Mariana memang bisa menyebut dengan tepat nomor Metromini tersebut. "Benar, Bu, tapi ini ke Pasar Minggu," ucap Sukri mulai tidak sabaran.

Diteriaki begitu, yang diteriaki balas menggertak. "Kok, kamu *ngatur-ngatur*, sih. Saya kan mau Grogol, tapi kenapa kamu bilang Pasar Minggu? Mau macam-macam, ya," kata Mariana sambil memegang sebuah botol Coca-Cola kosong ukuran sedang. Entah dari mana botol tadi, tapi yang jelas, para penumpang jadi *ngeri* dibuatnya. "Jangan-jangan, jangan-jangan...," pikir mereka. Ya, itu, si wanita benar gila.

Mungkin karena takut terkena botol kesasar, para penumpang satu per satu turun dari Metromini. Satu-dua orang masih bertahan, tapi begitu mata Mariana mulai mendelik, mereka pun satu per satu akhirnya turun juga. Sekarang tinggal Mariana, Sukri, dan sopir.

Dengan sedikit nyali, Sukri mencoba mendekati Mariana. "Sebenarnya, Ibu mau ke mana, sih," kata Sukri.

"Wah, budek (tuli) ini orang. Grogol, tolol!" teriak Mariana.

Ini yang membuat Sukri dan sopir akhirnya menyerah. Metro Mini pun diputar ke arah Grogol.

Tapi, Grogol sebelah mana, ini yang tak jelas. Sebab, setiap ditanya, Mariana hanya bilang Grogol.

Sopir akhirnya memutuskan membawa Mariana ke Rumah Sakit Jiwa Grogol. Iseng-iseng saja sebenarnya. Siapa tahu benar. Begitu mobil memasuki halaman rumah sakit, seorang suster langsung memanggil perempuan itu. "Hei..., Mariana...," kata si suster.

Sadarlah sopir dan kondekturnya bahwa Grogol yang disebut-sebut Mariana tak lain adalah Rumah Sakit Jiwa Grogol.

"Terima kasih, Pak. Mariana memang pernah dirawat di sini. Kemarin dokter menyuruh dia pulang karena dianggap sudah sembuh. Ternyata *korslet* lagi," kata suster yang lain.

Nurhanafiansyah

Ketahuilah LSM

LSM tetap diperlukan. Yang penting, pemerintah memberi jalan, sementara LSM memijak rel.

Melihat apresiasi banyak pihak yang masih saja kedodoran, kelahiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia bisa dianggap beruntung sekaligus boleh disebut sial. Beruntung, karena sebagai lembaga alternatif, LSM berkembang dalam situasi yang kurang kondusif. Walhasil, pertumbuhannya (mempertumbuhkannya) perlu energi ekstra -- dan bila perlu dengan cara gerilya. Akibatnya, LSM justru cepat menuju ke kematangannya.

Sementara dari segi sialnya, pertumbuhan LSM tampak gerah akibat di sana-sini muncul tekanan -- tak jarang mengarah ke tekanan politis -- sehingga lembaga itu menjadi tidak berdaya. Memang, di sisi lain, LSM sendiri tidak memunculkan perkembangan seragam. Ada saja yang nakal sehingga -- pemerintah, terutama -- menjadi pantas menghambatnya.

Kalangan LSM sangat paham situasi seperti itu. Malah sedemikian parahnya, kalangan LSM sendiri sadar bahwa kehadiran LSM akhirnya menampakkan dua sisi, mirip *unwanted children* sekaligus seperti juru selamat. LSM kerap dituding sebagai penjual kemiskinan, perajin sosial, dan bahkan ada pula yang menuding LSM sebagai pengkhianat karena memberikan informasi-informasi ke luar negeri. Tetapi jangan salah, yang memuji LSM juga tidak sedikit. LSM berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperjuangkan rakyat kecil, memperkuat rakyat secara sosial dan ekonomi. Terakhir, LSM mempunyai komitmen yang kuat pada penegakan hukum, hak-hak asasi manusia, dan demokrasi (hlm. 11-12).

Buku yang merupakan hasil seminar LSM di Jakarta ini memang mirip penjelasan apa dan siapa LSM sebenarnya. Selain permenungan akan keberadannya, jenis dan anatomi LSM pun tergambar, meski tidak lengkap benar. Maklum, bahan penyusunan buku berasal dari seminar sehingga ketunggalan pembahasan menjadi titik lemah.

Ada refleksi kritis terhadap penilaian orang atas LSM. Ini dilakukan dengan bertukar pemikiran dan pengalaman kolektif di antara sesama LSM. Sehingga melalui proses aksi dan refleksi secara teratur, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan efektivitas aksi ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sementara jenis dan spektrum kegiatan LSM sendiri ternyata cukup beragam -- dari LSM yang bergerak dalam perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum dan demokrasi, advokasi lingkungan hidup, kehutanan, hak-hak kaum perempuan termasuk perlindungan tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, perlindungan konsumen, sampai kepada LSM yang bergerak dalam pembangunan dan pelayanan sosial ekonomi berskala mikro seperti usaha kecil, bank perkreditan rakyat, air bersih, dan sanitasi.
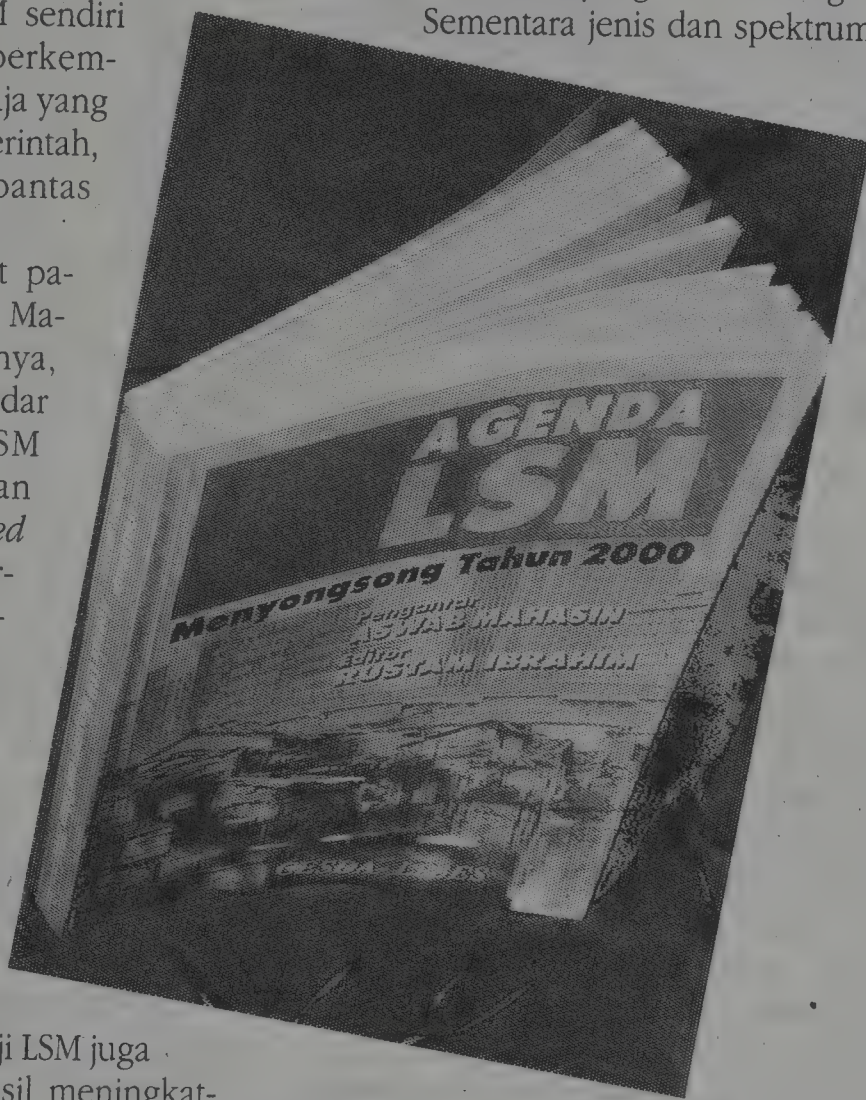
Secara ideal, keberagaman itu sebenarnya merupakan cermin kesadaran LSM atas terbatasnya peran pemerintah mengakomodasi kebutuhan masyarakat. LSM tampil menangani persoalan yang, bisa jadi, luput dari perhatian pemerintah.

Tentu, buku ini tidak terasa lengkap tanpa "pembelaan". Ihwal advokasi LSM yang selalu saja "dicurigai", misalnya, dijelaskan buku ini secara memadai. Advokasi LSM, katanya, bermaksud mengartikulasikan masalah yang dihadapi kelompok masyarakat dampingan, mengorganisasi mereka dalam rangka *people empowerment*, dan menyalurkan masalah itu ke pusat-pusat pengambil keputusan. Ini merupakan konsekuensi usaha serius LSM untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bukan dari segi teknis tetapi lebih pada permasalahan yang berhubungan dengan kebijaksanaan yang berada di luar jangkauan LSM dan masyarakat untuk diubah (hlm. 306-307).

Judul Buku	:	Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000
Editor	:	Rustam Ibrahim
Penerbit	:	CESDA-LP3ES, Jakarta, 1995
Tebal	:	x + 328 halaman

Buku ini tampaknya mengajak pembaca pada pemahaman, betapa binekanya LSM Indonesia. Setelah itu, buku ini mengajak semua pihak untuk lapang dada menerima kehadiran LSM. Malah LSM membuka pintu kerja sama menghadapi tantangan-tantangan besar yang muncul dalam masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat mandiri yang demokratis. Dengan demikian, tak perlu ada pemisahan antara LSM yang bergerak dalam pembangunan sosial ekonomi (LSM developmentalis) dengan LSM yang bergerak di bidang advokasi (LSM strukturalis).

Nurhanafiansyah

WANITA PEMBANGUNAN INDONESIA
W.P.I

50 Th
INDONESIA EMAS

LOMBA FOTO & PAMERAN WANITA dalam PEMBANGUNAN INDONESIA

Dalam rangka Ulang Tahun WPI ke 4 & Menyambut Tahun ***Emas*** 50 Th Indonesia Merdeka, WPI Bekerja sama dengan Majalah Berita Mingguan ***SINAR*** dan ***TPI*** menyelenggarakan Lomba FOTO dengan tema :

WANITA dalam PEMBANGUNAN INDONESIA

KETENTUAN :

1. Peserta warga negara Indonesia
2. Karya foto bisa berwarna atau hitam putih, ukuran minimal 10 R (13 x 18 Cm).
3. Foto karya sendiri (Orisinil) dan belum pernah diikutkan dalam lomba sejenis
4. Tidak diperkenankan menggunakan manipulasi teknis, baik di kamera maupun dalam proses laboratorium
5. Tiap peserta boleh mengirimkan maksimal 10 karya foto, lengkap dengan judul dan alamat jelas, dicantumkan dibelakang foto.
6. Masukkan karya foto Anda dalam amplop tertutup, bubuhi kode **"WANITA dalam PEMBANGUNAN INDONESIA"** di sudut kiri atas amplop, kirimkan ke:

SEKRETARIAT:
DPP WANITA PEMBANGUNAN INDONESIA
Jl. Matraman Masjid IA (Jl. Proklamasi)
Telp. (021) 3147683 - 3904150 Fax. 021- 3101790
Jakarta Pusat

7. Karya foto harus diterima panitia paling lambat 1 Agustus 1995
8. Karya pemenang serta hak penggunaannya, sepenuhnya menjadi milik panitia.
9. Pemenang akan diumumkan Pada Ulang Tahun WPI ke IV di Majalah Berita Mingguan ***SINAR*** *dan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia)*
10. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat, dan tidak diadakan surat menyurat.
11. Karya pemenang dan nominasi akan dipamerkan pada Tgl 9 -11 September 1995 di Kampus Emas Indonusa Universitas Indonusa Esa Unggul Jl. Tol Tomang, Kebun Jeruk Jakarta - Barat

DEWAN JURI:

- Judi Surjoatmodjo
- Krus Haryanto
- Kartono Ryadi

HADIAH:

1. Pemenang I Rp 4.000.000,- + Piala
2. Pemenang II Rp 2.000.000,- + Piala
3. Pemenang III Rp 1.000.000,- + Piala
4. Harapan I Rp 500.000,- + Piala
5. Harapan II Rp 500.000,- + Piala

SELAMAT BERKREASI DAN BERLOMBA

SINAR
MAJALAH BERITA PEMBANGUNAN

TPI

Bungkus-bungkus dari Cak Nun

Pidato kebudayaan Emha yang menggelitik, penuh guyon, dan kontemplatif.

Pidato kebudayaan, entah kenapa, kini semakin populer saja. Sejak digelar di pedepokan seni milik Sutanto di Magelang beberapa waktu lalu, pidato kebudayaan nampaknya akan terus bergulir di berbagai kantung-kantung kebudayaan. Semoga saja "gejala" ini bukan parade pidato yang akhirnya lebih mementingkan acaranya sehingga materinya menjadi terlecehkan.

Pekan lalu, harian *Republika* dan SMA 1 Yogyakarta juga menggelar pidato kebudayaan di Benteng Vrederburg, bekas markas militer Belanda di Yogyakarta. Yang diagendakan berpidato semestinya Emha Ainun Nadjib, Amien Rais, dan Parni Hadi. Tetapi yang akhirnya benar-benar berpidato hanya Cak Nun alias Emha. Parni Hadi, yang sempat mengeluh karena harga kertas koran naik, hanya membuka acara. Dan Amien, memberikan catatan kaki pada pidato Cak Nun saja, sekaligus menutup acara.

Dengan tajuk "Titik Nadir Demokrasi" (Kesunyian Manusia Dalam Negara), pidato Cak Nun sebenarnya begitu-begitu saja. Seniman budayawan kelahiran Jombang ini tetap rajin membanyol, pandai menyentil-nyentil "kepekaan", serta pintar memperolok-olok kemanusiaan kita melalui bahasa agama.

Tetapi, ya itulah Emha. Ia tetap menggelitik. Budayawan yang awet menduda itu selalu mampu membikin pendengarnya betah. Cak Nun tetap bertabur cerita dan gurauan segar yang kadang peka. Karena itu, pidato Emha bisa menjadi sarana katarsis sekaligus hiburan. Amien Rais bahkan menyebut Emha sebagai Hamka Jilid Kedua. "Suara dan humornya khas. Kelebihan Cak Nun, ya, dalam humor-humor yang menyerempet bahaya itu," tutur Amien.

Cak Nun menyoroti ihwal nilai moral kekuasaan yang kehilangan orientasi, nasib rakyat, roh agama yang sekadar dijadikan jimat-jimat beku, seniman yang terpukau pada khayal subyektif, pers semata mengejar oplah dan meninggalkan fungsinya sebagai pengawal nilai-nilai kebajikan, dan sebagainya.

YUL ADRIANSYAH
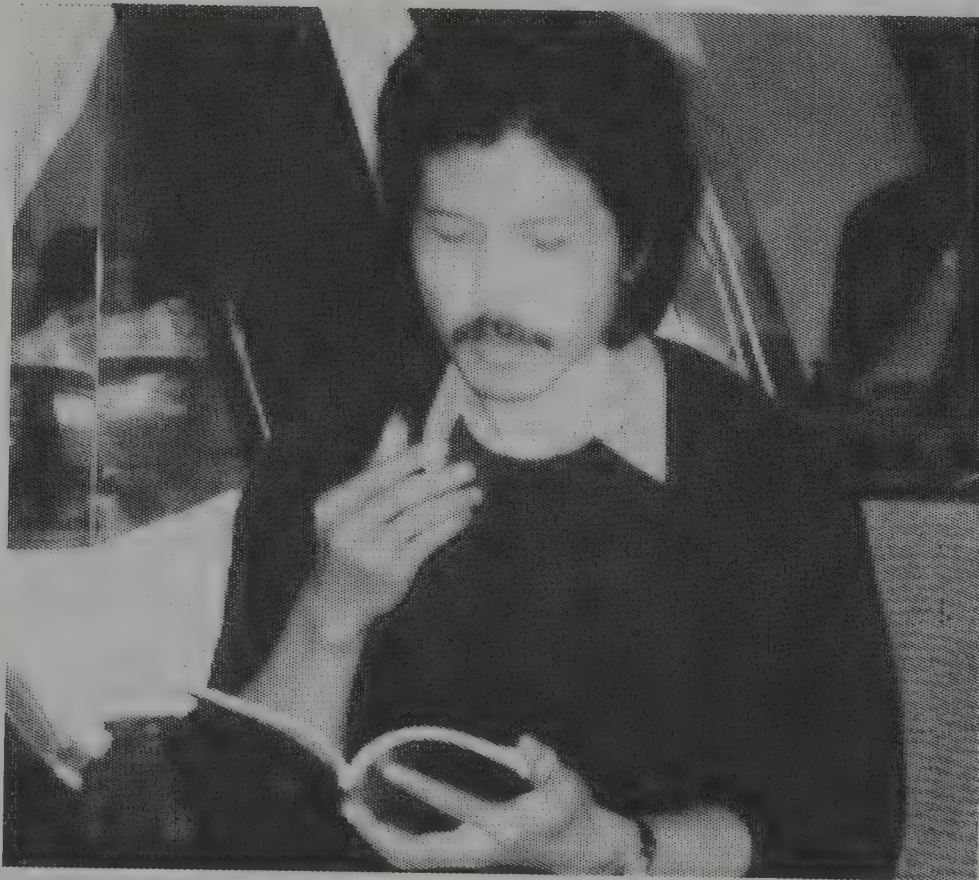
EMHA: Begitu-begitu saja, tetapi tetap menarik.

Di mata Cak Nun, wartawan sudah terjebak dalam logika kapitalisme yang mengakibatkan matanya tidak jernih lagi. Sebab, "Para kuli tinta tidak sempat merenung dan harus berlari cepat dalam keasyikan budaya oplah yang tidak cukup sempat mengontrol diri dengan tradisi kejernihan ilmiah, serta oleh skala prioritas moral dalam politik keredaksian. Para jurnalis tidak punya waktu, stamina mental dan kelapangan jiwa untuk selalu mempersegar kembali standar-standar persepsinya terhadap realitas hidup, terhadap ukuran-ukuran kualitas mahluk manusia, terhadap skala moral dan kebenaran nilai-nilai."

Dengan mencontohkan "kasus" paradoksal antara Nike Ardilla dan K.H. A.R. Fakhrudin saat keduanya meninggal, contoh yang diajukan Cak Nun menjadi relevan. Saat kematian Nike, pers menuliskannya selama dua minggu berturut-turut di halaman satu, menguras berbagai sudut kehidupan artis yang sukses itu. Sementara, ketika Fakhruddin yang adalah mantan ketua PP Muhammadiyah meninggal, sosok bersahaja yang kepemimpinannya pantas diteladani siapa saja itu hanya bertahan dua hari saja. Itu pun dengan peletakan di kolom yang cenderung seadanya.

Perilaku pers seperti itu ditamsilkan Cak Nun, "Orang-orang mem-*blow-up* kilatan emas semu dan mentakhayulkannya habis-habisan dalam pesta hedonisme berminggu-minggu, sambil mereka tinggalkan mutiara sejati hanya karena ia terbungkus oleh kekumuhan dan kebersahajaan."

Seperti biasa, Cak Nun mengajak manusia modern untuk merenungkan fenomena paling santer yang terasa di pengujung abad ini, yaitu orientasi kekayaan (kapital) dan kekuasaan (power). Dua "dewa" baru itu, kata Cak Nun, jika tidak disertai etika, hanya akan menciptakan penjara bagi manusia. Dan mengasingkan manusia satu dengan lainnya berarti mengaburkan sisi gelap dan terang. Yang tercipta, hanyalah dunia penuh bungkus: bungkus kebusukan, bungkus kebodohan, bungkus kejahatan, bungkus kezaliman, dan bungkus kepalsuan. Akibatnya, kebanyakan manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Apakah kita termasuk orang yang terbidik oleh pidato Emha dan termasuk kategori perajin yang pintar membungkus-bungkus itu, wallahualam bissawab.

Heroe Poerwadi

Menata Miniatur Alam Semesta

Karya instalasi tak selamanya buruk rupa. Bisa jadi, seni jenis ini tengah menuju ke pemahamannya.

Karya-karya instalasi di Andi's Gallery menambah semangat Jim Supangkat. Setidaknya, anggota tim kurator internasional pameran seni rupa Gerakan Nonblok itu bisa menunjukkan, tak semua instalasi buruk rupa. Karya-karya Heyi Ma'mun, Hery Dim, dan Mamannoor itu tampil senada dengan lukisan-lukisan mereka. Lukisan maupun instalasi ketiga seniman Bandung ini mendekati pandangan umum tentang keindahan.

Menurut Jim, selama ini instalasi ditafsirkan sebagai anarki, pengaruh asing yang negatif, penjungkirbalikan citra keindahan, penghancuran komunikasi. Pendeknya, seperti seonggok benda asing yang tak hanya membingungkan, tetapi juga mengganggu. Kritikus lainnya, Sudarmaji, bahkan menyebutkan ketidaksukaan beberapa kritikus terhadap instalasi. Pada tahun 1980-an, sebut anggota dewan kurator nasional pameran GNB ini, "Beberapa senior saya menganggap para pencipta instalasi sebetulnya tidak bisa menggambar."

Namun, baik Jim maupun Sudarmaji tampaknya sepakat, instalasi adalah seni rupa. Dia muncul sebagai bagian dari gerakan menentang modernisme pada awal 1970-an. Menurut Jim, gerakan ini seakan menampilkan gejala pembebasan seni rupa dari proses "pemiskinan" masa modernisme pada akhir 1960-an. Bagi Jim, pemiskinan paling utama adalah anggapan tentang seni rupa modern Eropa-Amerika sebagai satu-satunya seni rupa modern dunia.

Sedangkan Sudarmaji, meskipun mengakui bahwa instalasi sulit dimengerti, berpendapat bahwa "seni merakit" itu mudah dipahami bila menggunakan kritik kontekstual. Bagi Sudarmaji, instalasi perlu dilihat konteksnya dengan berbagai kondisi tertentu seperti protes sosial. Itu sebabnya, manifestasi gagasan dalam instalasi pun beragam (multimedia). Instalasi mengombinasikan unsur-unsur patung, grafis, cahaya, suara, gerak, bahkan elektronik.

DOK SINAR

INDAH: Karya Hery Dim bisa dinikmati mata.

Sudarmaji justru mempertanyakan kealpaan para seniman Bandung -- termasuk para partisipan pameran di Andi's Gallery -- yang tidak menyertakan peralatan mutakhir untuk karya instalasi. Padahal, ketiga partisipan adalah lulusan Institut Teknologi Bandung yang tentunya akrab dengan perkakas teknik. Kata kritikus berusia 61 ini, "Saya heran, kenapa para perupa Bandung tidak memanfaatkan teknologi canggih untuk instalasi-instalasi mereka."

HARMONIS: Karya Mamannoor.

AGUNG PUSPITO

Karya-karya instalasi Heyi, Hery, dan Mamannoor memanfaatkan permukaan lantai dan dinding di belakangnya. Penataannya kelihatan memperhatikan unsur-unsur harmoni (salah satu unsur keindahan yang konvensional). Mereka tidak melubangi lantai dan mencipta patung dari tanah merah di dalamnya seperti yang pernah dilakukan Semsar Siahaan di TIM. Apalagi, mereka menyertakan beberapa gambar figuratif yang mudah dikenali sebagai wayang.

Bisa jadi, ini menunjukkan kecenderungan para seniman akan suatu kehidupan kosmos yang seimbang dan tidak *chaos.* Mereka berpihak kepada harmoni; harmoni dengan alam, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan penguasa.

Meskipun bukan barang baru di negeri ini, instalasi masih mengundang lebih banyak pertanyaan ketimbang pemahaman. Misalnya, bagaimana membawa pulang (membeli) sebuah karya instalasi. Sang seniman harus hadir dan merakit sendiri karyanya, tentu saja. Tapi, bagaimana dengan instalasi yang menggunakan benda-benda semacam serbuk gergaji atau pasir yang mudah diterbangkan angin sehingga volumenya bisa menyusut? Ya, biarkan saja, kata Sudarmaji. "Itu bagian dari gerak alam, suatu proses yang dinamis."

Bagian paling sulit dari instalasi (juga dari seni rupa kontemporer pada umumnya) adalah apresiasinya. Tercatatlah beberapa respons spontan para pemirsa Indonesia ketika menyaksikan karya-karya tersebut. Mereka tak seragam, dari "apa maksudnya ini?" hingga "kalau yang begini, saya juga bisa bikin".

Respons yang amat beragam memang. Tapi, meminjam kacamata baca para pengamat pascamodernisme, semangat zaman abad ke-21 memang ditandai dengan keinginan akan kekayaan makna -- bukan kedalaman makna.

Agung Puspito

Antonius Ananto:
MENGHARGAI KARYAWAN KUNCI MERAIH SUKSES

RUDI IRWANTO

PIMPINAN PERUSAHAAN: Memberikan ketenangan kerja.

Optimal-tidaknya kinerja karyawan tergantung dari para pemimpinnya. Prinsip inilah yang dipegang Antonius Ananto dalam memajukan usahanya.

Karyawan adalah ujung tombak perusahaan. Prinsip inilah yang selalu diterapkan Antonius Ananto kepada karyawannya. Sebab, dari tangan para karyawan itulah sebuah usaha akan menjadi maju atau malah ambruk.

Namun, tidak gampang mencetak karyawan yang andal dan dapat bekerja secara optimal. Bahkan, harus melalui proses dan waktu panjang. Menurut Ananto yang juga direktur pelaksana Bank Windu Kentjana ini, untuk mengoptimalkan kinerja karyawan sebagai sumber daya manusia yang andal, ada beberapa hal yang harus dipenuhi para pemimpin atau pemilik perusahaan. Misalnya, setiap karyawan sangat mendambakan ketenangan dalam bekerja.

Ketenangan kerja, kata Ananto, dapat diwujudkan perusahaan dengan membuat peraturan kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban bagi karyawan. Sebagai karyawan tentunya mereka berkewajiban untuk bekerja sebaik mungkin sesuai bidangnya. Semua posisi di sebuah perusahaan adalah penting meskipun dia hanya seorang *office boy* (pesuruh kantor). Semua karyawan juga punya kewajiban untuk bersama-sama memikirkan dan berusaha agar perusahaan tempat mereka bekerja dapat terus maju.

Setiap karyawan memang berkewajiban bekerja semaksimal mungkin. Tapi, pihak perusahaan sendiri tentunya juga wajib memberikan hak yang sesuai kepada setiap karyawannya. Ananto mencontohkan, karyawan akan tenang bekerja bila haknya dipenuhi, seperti memperoleh uang makan dan transpor yang setimpal, uang lembur, asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarganya, termasuk pengobatan jalan dan asuransi kecelakaan kerja, serta uang perjalanan dinas. "Masalah kesehatan karyawan dan keluarganya harus menjadi perhatian utama pihak perusahaan. Bila karyawan sehat tentunya hasil kerjanya juga akan maksimal," ujar mantan Direktur JayaBank ini.

Persoalan jenjang karier yang jelas juga merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan. Sebab, menurut Ananto, jangan sampai seorang pegawai tidak mengetahui posisi dia di perusahaan. "Kan lucu seorang pegawai tidak tahu tugas dan wewenangnya dan juga masa depannya di perusahaan tempat dia bekerja," katanya.

Pendapat Ananto memang benar. Namun,

kenyataannya, tidak sedikit perusahaan yang belum dapat memenuhi hak karyawan secara optimal. Soal jaminan kesehatan karyawan dan keluarganya, misalnya, masih sering dikesampingkan. Padahal, bila keluarga -- anak dan istri -- mereka sehat, karyawan akan merasa tenang, sehingga pekerjaannya pun akan lancar.

Hanya saja, menurut Ananto, untuk menciptakan ketenangan di sebuah institusi bisnis, itu sangat tergantung dari para pemimpinnya. Pemimpin perusahaan, kata Komisaris Bank Umum Majapahit ini lagi, adalah sebagai konsultan. Artinya, dia harus mampu mengajak para karyawannya berjalan bersama untuk memahami dan ikut merasakan perusahaan sebagai miliknya. "*Melu handarbeni* (ikut memiliki, *Red.*)," ujar Ananto.

Ananto tidak sekadar omong. Menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawannya selalu dilakukan di mana pun dia bekerja. Sebab, Ananto merasakan bagaimana pahit getirnya menjalani karier yang dia mulai dari bawah. Ananto diakui anak buahnya sebagai figur kebapakan yang sangat tanggap terhadap aspirasi bawahannya. Bahkan, terkadang Ananto dapat bersikap sebagai seorang teman bagi karyawan yang tengah mempunyai masalah. Sikap kepemimpinan Ananto inilah yang menjadikan karyawannya -- dan juga bekas karyawannya -- memiliki idealisme tinggi untuk memajukan perusahaan.

Karier Ananto memang dirintis melalui sebuah perjalanan panjang. Usai menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1968, dia mulai bekerja sebagai manajer keuangan di PT Sepatu Wimo. Namun, sejak 1970, Ananto pindah ke PT Pembangunan Jaya sebagai internal auditor hingga tahun 1974. Dan keahliannya di bidang keuangan inilah yang membuat Grup Pembangunan Jaya memberi kepercayaan kepada lelaki kelahiran Jakarta 53 tahun lalu ini untuk duduk sebagai direktur JayaBank ketika grup itu mendirikan bank. Puncak kariernya di Grup Jaya adalah ketika dia menjabat sebagai pemimpin tertinggi di JayaBank sejak tahun 1990 hingga maret 1993.

Meski telah menjadi seorang direktur utama sebuah bank, Ananto tidak cepat berpuas diri. Pakar perbankan yang akrab dengan wartawan ini terus berusaha mencari celah untuk terus memacu dirinya. Tak heran bila jabatan direktur utama JayaBank dilepasnya dan dia pindah menangani sebuah bank kecil bernama Bank Windu Kentjana.

Ananto memang piawai dalam dunia per-

bankan. Dan harus diakui, di tangan dingin Ananto inilah, Bank Windu perlahan naik menyejajarkan dirinya dengan bank papan menengah-atas. Meskipun demikian, Ananto berpendapat, kemajuan yang diperoleh Bank Windu Kentjana adalah berkat jasa para pengelolanya, termasuk semua karyawannya, yang telah bekerja optimal dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Sebuah bank bila ingin maju, menurut Ananto, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga harus bertindak sebagai konsultan. Artinya, bank harus membantu nasabah agar benar-benar maju dan bisa mencapai apa yang diinginkannya. Misalnya, dalam berusaha. "Antara bank dan nasabah harus menyatu," kata Ananto mengungkap kiatnya memajukan Bank Windu Kentjana dan juga ketika dirinya bekerja di JayaBank.

Pindah kerja bagi Ananto tidak menjadi masalah, meskipun harus memulai dari nol lagi. Asal saja, kata penasihat keuangan di berbagai perusahaan ini, di tempat baru itu pendapat, pemikiran, dan semua aktivitas kita dapat diterima tanpa paksaan. Dan yang terpenting adalah selalu dianggap sebagai manusia yang dihargai. "Sebagai profesional tentunya kita menginginkan posisi yang independen," ucap Ananto.

Artinya, katanya, sebagai seorang direktur tentunya harus punya wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya dan bukan hanya sebagai tukang cap saja. "Hanya saja, bila telah mendapat kepercayaan, hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk memajukan perusahaan," ujar Ananto.

Bekerja di sektor keuangan, selain berisiko tinggi, juga sering membuat orang terlena. Tidak heran bila banyak orang "tergelincir" karena tidak tahan terhadap godaan lembaran-lembaran rupiah. Tapi, semua godaan itu dapat ditepis Ananto. "Hidup itu harus lurus, tidak usah *neka-neka*," demikian falsafah hidupnya.

Prinsip hidup sederhana dan mensyukuri apa yang telah diperolehnya membuat kehidupan Ananto bersama istri dan keempat anaknya berjalan damai. Menurut dia, hidup itu susah, tinggal bagaimana seseorang menjalaninya dengan baik. "Kalau kita baik, orang akan membalas dengan kebaikan juga terhadap kita. Demikian juga dalam sebuah perusahaan, bila pemilik perusahaan dan juga pemimpinnya dapat bersikap baik, karyawannya pun akan memberikan yang terbaik bagi tempat dia bekerja," kata Ananto menandaskan.

Mencari figur pemimpin yang tanggap terhadap kepentingan bawahan memang tidak gampang. Namun, sosok kepemimpinan Ananto tentunya dapat menjadi salah satu contoh. Kiatnya dalam membina karyawannya agar dapat bekerja secara optimal patut ditiru. Sebab, sampai saat ini, tak sedikit pimpinan perusahaan masih menganggap karyawannya seperti sapi perahan dan menyalahkan karyawan bila perusahaan bangkrut.

Diyan Srikandini

RUDI IRWANTO

BERSAMA PAKAR HUKUM EKONOMI RASJIM WIRAATMADJA: Belajar dari kehidupan.

TIME

SALAM BUAT MAHATHIR: Pengakuan atas sebuah prestasi.

PRESTASI PUN MENJADI SENJATA

Barisan Nasional mencatat kemenangan fantastis. Mahathir memperoleh mandat baru hingga tahun 2000.

Barisan Nasional makin tua makin perkasa. Koalisi 14 partai yang dimotori UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) itu pekan lalu mencatat prestasi paling gemilang sepanjang sejarah pemilu di Malaysia. Buat pertama kalinya, koalisi yang sudah berkuasa sejak 1957 itu merebut lebih dari dua pertiga kursi Dewan Rakyat atau parlemen pusat.

Kegemilangan Barisan Nasional itu berarti juga kemenangan Datuk Seri Mahathir Mohamad. Dalam posisinya sebagai Presiden UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) merangkap ketua koalisi itu, Mahathir memperoleh mandat buat memerintah hingga tahun 2000.

Persis seperti perkiraan kalangan pengamat, Barisan Nasional bakal mempertahankan mayoritas dua pertiga di Dewan Rakyat. Tapi, sama sekali di luar dugaan mereka, koalisi pimpinan Mahathir itu bisa merenggut 163 kursi di Dewan Rakyat. Partai-partai oposisi tampak tidak mampu berbuat banyak. Partai Aksi Rakyat (DAP) hanya kebagian 9 kursi, Partai Islam se-Malaysia (PAS) hanya 9 kursi, Semangat '46 hanya 6 kursi, dan Partai Bersatu Sabah (PBS) hanya 8 kursi.

Selain itu, Barisan Nasional pun tetap menguasai mayoritas kursi Dewan Undangan Negeri (parlemen lokal) di 12 dari 13 negara bagian di negeri semenanjung tersebut. Persis seperti dugaan sebelum pemilu, koalisi 14 partai itu gagal merebut parlemen Kelantan dari tangan PAS yang berkoalisi dengan Semangat '46. Namun, Mahathir pantas bertepuk dada karena Barisan Nasional bisa merebut tujuh kursi di Dewan Undangan Negeri Kelantan.

Apa kira-kira makna kemenangan Barisan Nasional dan Mahathir Mohamad kali ini? Paling tidak, Mahathir memperoleh mandat baru buat melanjutkan pembangunan selama lima tahun lagi. Kemenangan itu merupakan dukungan dari pemegang hak pilih bagi kebijakan pemerintahan Mahathir selama ini. Lepas dari anggapan bahwa semakin lama seorang berkuasa semakin besar pula kemungkinan untuk menjadi diktator, dia rupanya lebih peduli pada kestabilan dan kelanjutan pembangunan. Bagi dia, demokrasi pun bisa menjadi amat berbahaya bila berada di tangan sembarang orang.

Kemenangan Mahathir dan Barisan Nasional memang didukung oleh keberhasilan ekonomi yang dicatat Malaysia selama delapan tahun terakhir. "Kemenangan ini merupakan bukti betapa rakyat Malaysia masih ingin dipimpin Barisan Nasional," kata Anwar Ibrahim, Deputi Presiden UMNO. "Lebih penting lagi, rakyat masih ingin dipimpin Mahathir Mohamad."

Mengapa partai oposisi seperti PAS tidak mampu berjaya di negeri yang sebagian besar warganya menganut agama Islam itu? "PAS menyalahgunakan agama," kata Mahathir seperti dikutip *Reuter*. Sementara Penang, negara bagian yang sebagian besar penduduknya keturunan China, juga tidak memihak DAP. Partai pimpinan Lim Kit Siang itu gagal memanfaatkan perasaan kesukuan buat mencari dukungan. "Politik yang dimainkan DAP terlalu berbau kesukuan. Warga Malaysia keturunan China lebih suka bekerja sama dengan orang Melayu. Mereka tidak mau diadu domba dengan isu rasial," komentar Mahathir. Di Malaysia, warga keturunan China sekarang sekitar 35%, puak Melayu 45%, India 7%, sisanya campuran dari pelbagai suku bangsa.

Sekitar sembilan juta pemegang hak pilih dari 19 juta penduduk Malaysia yang multirasial pekan lalu turun memberikan suara dalam pemilihan 181 anggota Dewan Rakyat dan 385 anggota Dewan Undangan Negeri di 13 negara

bagian. Sebagai penguasa, Barisan Nasional memperoleh tambahan 11 kursi di Dewan Rakyat dan sembilan kursi di Dewan Undangan Negeri tanpa pemilihan.

Setelah merebut 163 kursi Dewan Rakyat dan menguasai 12 dari 13 parlemen di negara bagian dalam pemilu pekan lalu, Barisan Nasional mempertegas dominasi kekuasaannya tanpa putus sejak 1957. Bagi Mahathir, itulah kemenangan ke empat sejak dia naik ke kursi PM pada 1981. Kemenangan Barisan Nasional bersama Mahathir dalam pemilu ke sembilan itu tentu memiliki makna khusus.

Pemilu selalu merangsang interaksi. Di satu pihak, elite politik turun mencari dukungan, menjalin dialog politik, dan mencoba mendengarkan aspirasi pemegang hak pilih. Di pengujung lain, pemegang hak pilih memperlihatkan bentuk partisipasi mereka lewat pemberian suara.

Sejak naik ke kursi PM sejak 1981, Mahathir dan Barisan Nasional dinilai mampu menerjemahkan aspirasi dan kepentingan rakyat ke dalam program-program pembangunan strategis. Program-program itu bervariasi antara yang berjangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mahathir pun memperkenalkan Barisan Nasional sebagai mesin politik nasionalis yang menampung pelbagai unsur dan kekuatan. Kebetulan di dalamnya tertampung 14 partai dengan UMNO, organisasi puak Melayu, sebagai tulang punggung. Dari posisinya sebagai Presiden UMNO, Mahathir otomatis menjadi pemimpin Barisan Nasional.

Corak politik Barisan Nasional yang mencerminkan pluralitas dan menampung pelbagai aspirasi politik rupanya memancing dukungan dari waktu ke waktu. Dukungan itu menguat berkat kewibawaan pribadi dan keberhasilan PM Mahathir memacu laju pertumbuhan pembangunan ekonomi Malaysia. Bagi puak Melayu sendiri, Mahathir dikenal sebagai tokoh yang mengangkat pamor mereka yang tadinya tenggelam di dalam bayang-bayang kesuksesan keturunan China. Bagi negeri-negeri maju, Mahathir dikenal sebagai tokoh vokal yang tidak mau begitu saja didikte.

TIME

KAMPANYE PAS: *Hanya bergaung kecil.*

Mahathir sejak muda memang sudah menunjukkan isyarat sebagai pribadi yang memiliki sikap tegas. Dia pernah dicoret dari UMNO gara-gara dinilai bersikap ekstrem. Lewat *The Malay Dilemma* pada 1970, dia tidak segan memberikan alasan mengapa puak Melayu hidup melarat. Dia tak lupa melontarkan usul mengenai cara mengoreksi keadaan yang menyedihkan tersebut. Ternyata setelah diberi kepercayaan buat memerintah selama 14 tahun, dia mampu mengubah peruntungan puak Melayu lewat *New Economic Policy*. Bagi warga Malaysia dari ras lain, dia diakui sebagai tokoh di balik kesuksesan Malaysia sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Asia Tenggara.

Layaklah, kalau dia kembali berjaya dalam pemilu ke sembilan pekan lalu. Lewat pemilu itu, dia menunjukkan bahwa UMNO merupakan wadah paling representatif bagi puak Melayu. Bukan PAS atau Semangat '46. Kemenangan Barisan Nasional yang dimotori UMNO praktis mengakhiri perdebatan mengenai siapa saja saat ini yang paling layak menyuarakan kepentingan puak Melayu dan masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Mahathir menunjukkan betapa dia layak mewakili siapa pun, termasuk mereka yang terkungkung tradisi adat dan keagamaan. Maklum, PAS kerap menuding UMNO sebagai partai non-islami dan sekuler, suatu cap yang membuat Barisan Nasional belum mampu menguasai Kelantan. Padahal, Mahathir berjanji akan mengalirkan dana segar buat membangun negara bagian yang lambat pertumbuhannya itu. Bagaimanapun, Mahathir berambisi menjadikan Malaysia suatu negeri muslim teladan: sebuah negeri muslim modern dan progresif yang mampu bersaing dengan kawasan maju lainnya kelak.

Ambisi itu dia bungkus dalam bentuk Visi 2020, di mana Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2020. Dengan maksud itu, dia memacu sikap terbuka buat meraih gagasan dan teknologi baru. Dia mengajak rakyat Malaysia untuk memberikan perhatian khusus pada Jepang. "Negeri Sakura" itu oleh Mahathir memang dianggap sebagai model pembangunan paling pas yang pantas ditiru Malaysia. Tatkala bergerak ke arah sana, dia melihat PAS yang menginginkan negara teokratis sebagai penghambat.

Sebelum ambisinya tercapai, Mahathir barangkali ingin tetap berkuasa. Dia sudah mencalonkan beberapa sekutunya menjadi menteri besar. Dengan begitu, posisi dalam sidang UMNO tahun depan bisa aman. Kalaupun, gangguan jantung koroner yang dia derita pada 1989 terulang, di sisi dia sekarang telah hadir Anwar Ibrahim. Anwar yang ikut begadang bersama Mahathir menanti hasil pemilu pekan lalu, dianggap siap meneruskan ambisi Mahathir.

Firmus Madhu Dhengi

PERANCIS

Kejutan Menuju Istana Elysee

Pengganti Presiden Francois Mitterrand makin jelas. Pilihan tinggal dua: Jospin atau Chirac.

Detik-detik akhir pemilihan presiden Perancis babak pertama rupanya menghadirkan kejutan. Lionel Jospin, calon Partai Sosialis, yang tadinya dilecehkan mendadak unggul atas dua kandidat dari kelompok konservatif: Wali Kota Paris Jacques Chirac, dan PM Edouard Balladur.

Jospin meraih 23,24% suara, menggeser Chirac ke posisi kedua dengan 20,64% suara. Balladur yang hanya kebagian 18,54% suara jadinya tidak berhak lagi tampil di babak kedua. Kubu Chirac lantas mengelus para pendukung Balladur untuk mengalihkan suara ke sesama konservatif pada pemilihan babak kedua 7 Mei mendatang. Hasil itulah yang menentukan siapa pengganti Presiden Francois Mitterrand.

Biarpun unggul atas lawannya, Jospin mengakui Chirac secara matematis lebih berpeluang untuk keluar sebagai pemenang dalam pertarungan babak berikut. Buat sementara Jospin memang unggul, tapi kubu sosialis hanya mengantungi 40% suara, sedangkan kelompok kanan meraih 60% suara. Kalangan pengamat dan media massa di Eropa memang berpendapat bahwa kemenangan Jospin antara lain akibat terpilahnya suara kelompok kanan ke sarang Balladur dan kubu Chirac.

Jospin lantas buru-buru melancarkan kampanye yang menyudutkan lawannya. Dia mencap Chirac sebagai tokoh oportunis yang kurang bisa dipercaya. Jospin juga mencoba mencari dukungan Front Nasional yang dipimpin Jean Marie Le Pen. Isyarat dukungan sudah terlihat ketika Le Pen menyebut Jospin sebagai tokoh sosialis terhormat.

Jospin dan Chirac jadinya bisa terlibat dalam pertarungan menjual konsep, terutama soal Uni Eropa dan cara memperluas lapangan kerja. Memilih Chirac, kata Jospin, tak bakal menghasilkan perubahan apa-apa seperti tercermin dari dua tahun masa pemerintahan PM Balladur. Sedangkan memilih Jospin, kata Chirac, sama saja dengan melanjutkan gaya kepemimpinan Mitterrand yang sudah berlangsung 14 tahun.

TIME

JACQUES CHIRAC: Didukung kaum muda.

Balladur sendiri sekarang cenderung mengajak para pendukungnya untuk memihak Chirac. Dia berharap agar niatnya untuk mempertebal komitmen terhadap Uni Eropa, meningkatkan frekuensi dialog antara semua pihak dalam masyarakat, dan meluncurkan kebijakan ekonomi konservatif bisa dijalankan Chirac kelak. Padahal, dia sadar kalau Chirac belum mau mengambil bagian dalam mata uang tunggal Eropa pada 1997. Menurut Chirac, pilihan itu baru bisa dibuat pada 1999.

Melihat perbedaan kebijakan dalam kubu konservatif sendiri, pertarungan antara Chirac dan Jospin bisa seru. Mereka berdua jadinya memiliki peluang untuk keluar sebagai pemenang dalam pemilihan babak kedua pada 7 Mei.

Namun, banyak pengamat menilai, kemenangan Jospin sulit terulang di babak kedua. Peluang dia baru terbuka bila semua suara kaum komunis memihak dia. Bagaimanapun, kemenangan Jospin pada 7 Mei nanti bukan hal yang mustahil. Biarpun, sebagian besar media massa melihat Chirac memiliki peluang lebih besar buat menggantikan Mitterrand.

Chirac yang pernah bertarung melawan Mitterrand tidak ingin gagal lagi kali ini. Dengan slogan "Perancis bagi Semua", dia memang menjadi idola di kalangan kaum muda, kelas pekerja, penduduk pedalaman, kelas menengah dan pengusaha kecil.

Perjalanan politik Chirac memang terbilang panjang. Dia sudah dikenal sejak masa pemerintahan Presiden Charles de Gaulle dan PM Georges Pompidou pada dasawarsa 1960-an. Pada dekade 1970-an, dia sempat duduk di kursi PM setelah memihak Vallery Giscard d'Estaing yang berhasil merebut kursi Presiden Perancis.

Kalau menang, Chirac ditantang segera menyelesaikan masalah perpajakan dan pengangguran. Maklum, jumlah penganggur di Perancis kini sudah mencapai 3,3 juta orang atau 12,3% dari angkatan kerja. Dukungan bagi dia barangkali akan makin besar, soalnya dialah orang pertama yang melihat adanya kerapuhan di tengah masyarakat salah satu negeri industri termaju di dunia itu. Chirac mengaku cukup kuat buat mengobati pelbagai masalah Perancis.

Firmus Madhu Dhengi

ISRAEL-PLO

Meneror Musuh Lewat "Harakiri"

Arafat memerintahkan penangkapan massal. Apa motivasinya?

Terkesan jamak bila suatu peristiwa langsung disusul dengan sebuah tindakan. Begitulah yang terjadi setelah rentetan bom mobil "harakiri" mengguncang Jalur Gaza dan Israel beberapa pekan belakangan. Yasser Arafat sebagai penguasa wilayah otonomi Jalur Gaza memerintahkan penangkapan massal terhadap oknum-oknum yang dicurigai. Apakah kesediaan Arafat meringkus sesama warga Palestina itu isyarat bahwa dia ditekan Israel ataukah sekadar menunjukkan kewibawaannya?

Ledakan-ledakan "bom harakiri" itu belakangan menghentakkan penduduk di Jalur Gaza. Ledakan pertama di Kfar Darom, merenggut tujuh tentara Israel, seorang mahasiswi AS dan satu orang pelakunya. Ledakan kedua di Netzarim, menewaskan seorang warga Israel dan pelakunya.

Yasser Arafat, mendengar hal itu, lantas memerintahkan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai. Sejumlah anggota dan simpatisan Hamas dan Jihad Islam, dua kelompok pejuang muslim yang menentang kesepakatan damai Israel-PLO, diciduk. Semuanya berjumlah sekitar 300 orang, termasuk beberapa wartawan dan guru.

Namun, pihak Hamas dan Jihad Islam sendiri menyangkal adanya pencidukan terhadap anggotanya. Menurut Ziad Abu Amr, pakar ilmu politik di Universitas Bir Zeit, tak ada alasan bagi Arafat untuk menangkapi mereka, apalagi menuduh di antara mereka sengaja melatih orang untuk berjuang dengan cara harakiri. Namun, sebelum perintah itu dilakukan, kabar itu sempat bocor. Sehingga orang-orang yang dianggap sebagai pelaku peledakan itu berhasil lolos.

Betulkah Yasser Arafat ingin menegakkan kembali wibawanya? Ataukah karena dia di bawah tekanan Israel? Konon, setelah terjadinya peledakan itu, sebagian besar warga Israel yang bermukin di Jalur Gaza mengecam habis-habisan pemimpin PLO itu dan menginginkan langkah konkret. Dan, setelah tewasnya beberapa serdadu Israel, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mencoba mencegah munculnya korban baru. Dia menegaskan sikapnya itu dalam kunjungan ke Kfar Darom, tempat melayangnya nyawa tujuh tentara Israel itu.

Buat menenteramkan warga Israel, Arafat mengambil tindakan lebih keras. Dua anggota kelompok pejuang militan itu, Samir Jedi dan Omar Shallah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan menghasut sejumlah warga Palestina untuk menyerang Israel. Seorang lainnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun tanpa alasan yang jelas. Shallah dan Jedi dituduh merekrut Khaled Mohammed Khatib, seorang warga Gaza berusia 24 tahun yang melakukan harakiri itu, dengan mengemudikan sebuah truk penuh bom yang sengaja direm mendadak di depan bus berisi pasukan Israel itu. Tak hanya itu. Pekan ini, Arafat juga memerintahkan pelucutan senjata terhadap dua kelompok pejuang muslim militan tersebut, untuk merebut simpati pemerintah Israel.

Meski demikian, tetap saja tentara Israel balas dendam setelah rekan-rekan mereka tewas ditelan "bom harakiri" itu. Oktober tahun lalu, pasukan Israel sengaja menangkapi 2.700 warga muslim di Tepi Barat setelah terjadi suatu aksi peledakan.

Wajar saja kalau banyak warga Palestina menyambut peledakan bom harakiri belakangan ini dengan sukacita. Karena, bagi mereka, orang-orang Israel itulah yang selama ini menghancurkan ekonomi dan masa depannya setelah merebut dua wilayahnya, Tepi Barat dan Jalur Gaza.

TIME

ARAFAT DITEKAN: Setelah "bom harakiri" mengguncang Gaza.

Padahal, berkurangnya keberingasan serdadu Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat berkaitan erat dengan kesepakatan damai Israel-PLO yang tertuang dalam Deklarasi Prinsip di Washington pada 1993. Agar kesepakatan damai itu dihormati, Presiden Mesir Hosni Mubarak termasuk salah satu pemimpin yang mendukung sikap tegas Arafat terhadap kelompok Palestina garis keras. Mubarak bahkan berjanji akan meminjamkan Arafat agen-agen yang bisa membantu membungkam pemberontak di Jalur Gaza. Bila kelompok garis keras dihadapi dengan kekerasan, mungkinkah perdamaian akan berakar di Jalur Gaza dan Tepi Barat?

Noor Fatachi

RWANDA

Dendam Itu Kian Membara

Suku Hutu dibantai lagi. Kenapa balas dendam itu terus berlangsung?

REUTER

PEMBANTAIAN PENGUNGSI: Pemerintah Rwanda tak berdaya.

Bara api dendam itu sulit dipadamkan. Di Rwanda, nyawa orang-orang Hutu kini sedang tak ada nilainya. Di kamp Kibeho, Sabtu malam dua pekan lalu, sekitar 8.000 orang Hutu diberondong dengan senjata mesin dan mortir oleh tentara Tutsi. Sedikitnya 4.500 orang Hutu tewas, dan 6.000 lainnya cedera. Itulah kekejaman, itulah kekerasan di Rwanda, sebuah negara miskin yang penghasilan per kapitanya sekitar Rp 500.000 per tahun.

Kenapa balas dendam di Rwanda itu terus berlangsung? Ada sejumlah faktor. Organisasi internasional PBB dan organisasi regional OAU (Organsasi Persatuan Afrika) tampaknya cuma bisa berkoar dan tak mampu selesaikan soal. Begitu juga negara adidaya militer satu-satunya, Amerika Serikat (AS).

Pasukan PBB, misalnya, tak punya nyali untuk mengambil sikap, bahkan pada saat pembantaian itu dilakukan di depan pasukan organisasi supranasional itu. Mereka berdalih tak bisa menghentikan kekerasan karena baret biru itu hanya bertugas memelihara perdamaian dan tak cukup senjata untuk ikut membela. "Kami datang memang bukan untuk berperang," kata Shahraryar Khan, utusan khusus PBB untuk Rwanda.

Tak juga OAU. Organisasi regional untuk Afrika itu hanya berseru agar pemerintah Rwanda mau mengambil tindakan terhadap banyak oknum militer yang telah melakukan pembunuhan massal itu.

Sementara itu, AS malah membuat masalah semakin ruwet. AS akan terus memberikan bantuan senjata dan militer kepada Rwanda. Sedikitnya US$ 250 juta diterima Rwanda oleh salah satu negara donor terbesar itu tahun lalu, di luar senjata. Kendati demikian, AS pun pintar berpura-pura dengan mengimbau pemerintah Kigali agar menghukum pasukan militan Tutsi yang kejam itu.

Faktor lainnya yang mengakibatkan suku Tutsi dan Hutu itu saling dendam adalah sejarah. Pertama, akibat politik pecah belah kolonial (Jerman), minoritas Tutsi sengaja dipilih untuk berkuasa di Rwanda pascakolonial. Melalui kekuasaan itu, minoritas Tutsi di pemerintahan termasuk menguasai dan mengisi personel militer Rwanda. Sedangkan mayoritas Hutu hanya rakyat biasa dan kebanyakan tinggal di pedesaan.

Perebutan kepemimpinan juga merupakan faktor tersendiri di Rwanda. Akibat dendam terhadap dominasi kelompok Tutsi yang pernah lama berkuasa itu, maka tatkala Hutu berkuasa, suku itu pun ikut melakukan pembantaian untuk merebut elit kekuasaan, seperti juga yang dilakukan Tutsi. Dan bila berkuasa, ketidakadilan pun dilakukan. Misalnya, Presiden Juvenal Habyarimana -- dari suku Hutu -- pernah melarang warganya dari suku Tutsi yang belajar ke luar negeri untuk tidak kembali ke Rwanda. Perjuangan suku menjadi dominan. Begitulah situasi itu terus berlangsung tanpa henti. Sampai kapan?

Kekerasan di Rwanda yang luasnya sekitar 30.000 kilometer persegi itu kian memarah saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas dalam kudeta militer garis keras Tutsi, April tahun lalu. Kelompok militan Hutu, akibatnya, mengamuk balas dendam. Sekitar 550.000 orang Tutsi dibantainya. Dan Sabtu malam dua pekan lalu itulah, giliran kelompok militan Tutsi yang membantai warga Hutu yang mengakibatkan 8.000 orang Hutu tewas, dan 65.000 lainnya mengungsi.

Itulah sialnya orang-orang Hutu di Rwanda. Bahkan mereka yang masih selamat dari pembantaian di kamp Kibeho, dan banyak di antaranya yang cedera, cuma bisa tertatih-tatih dalam perjuangan hidup mereka. banyak di antaranya akhirnya mengungsi ke Zaire tanpa bekal makanan yang berarti. Sementara itu, sekitar 5.000 orang Hutu lainnya ditampung di stadion olahraga Butare di Kigali selatan, entah mau diapakan lagi. Stadion itu adalah tempat pembunuhan massal oleh kelompok militan Hutu setahun yang lalu.

Noor Fatachi

SEPAK BOLA: *Pemain bisa "dibina" sejak yunior.*

KE PENTAS SUAP DUNIA

Kejuaraan Sepak Bola Dunia Yunior terinfeksi suap. Piala Marah Halim diisukan terkena juga. Bagaimana Liga Indonesia?

Nama Indonesia tiba-tiba saja melambung ke seantero dunia di tengah Kejuaraan Sepak Bola Dunia Yunior yang dilangsungkan di Doha, Qatar, pekan lalu. Hampir semua insan bola dunia, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin senantiasa menyisipkan kata "Indonesia" dalam percakapan mereka mengenai kejuaraan itu. Kesebelasan Indonesia berprestasi bagus?

Sayang, memang. Nama Indonesia mencuat bukan karena kekaguman. Melainkan justru karena sebal. Pasalnya, di tengah kejuaraan akbar itu, seorang WNI bernama Tjong Sui Song -- bersama empat rekannya dari Malaysia dan Thailand -- diduga telah menyuap pemain untuk mengatur hasil pertandingan dalam kejuaraan itu. Kabarnya, sebagaimana disebarkan *Reuter* ke seluruh dunia, ada empat tim -- dari 16 tim yang berlaga -- yang mereka dekati melalui bujukan uang dan perempuan. FIFA memang tidak menyebutkan tim mana saja yang didekati itu. Namun, FIFA juga tidak bereaksi ketika banyak media menulis bahwa pertandingan antara Burundi dan Chili yang berakhir imbang 1-1 masuk kategori "sangat mencurigakan".

Dan yang mengejutkan, dari hasil penyelidikan FIFA, kelima penyuap ini, termasuk yang WNI itu, diyakini merupakan "anggota" dari sindikat penyuap yang banyak bergerak di Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Indonesia. Karena itu boleh jadi kelima orang ini adalah geng yang membuat dunia sepak bola Malaysia dan Singapura gonjang-ganjing oleh suap dalam beberapa bulan terakhir ini. Puluhan pemain -- di antaranya pemain terbaik kedua negara itu -- dan juga ofisial kedapatan telah termakan suap. Hingga kemudian puluhan pemain di *black-out* dari Liga Malaysia. Bahkan beberapa di antaranya diajukan ke pengadilan bersama para penyuap yang berhasil di ciduk.

Peristiwa di Doha dan kenyataan di negara tetangga itu kemudian seperti mengipasi isu adanya suap dalam turnamen Piala Marah Halim di Medan, yang pekan lalu berakhir. Kabarnya ada tim peserta yang diajak berpesta di malam menjelang bertanding oleh ofisial tim peserta lain. Hingga besoknya mereka tampil loyo.

Namun tudingan itu segera dibantah Komda PSSI Sumatra Utara, juga oleh Ketua Panitia Turnamen Marah Halim, Jhony Pardede. Menurut mereka, tudingan itu *ngawur*. "Itu cuma ulah orang sirik!" ujar Amru Daulay sebagaimana dilansir banyak media massa.

Hanya saja, terembusnya isu suap itu tetap saja menjadi bukti bahwa ancaman penyuap pada persepakbolaan nasional tetap ada. Apalagi mengingat penyuap WNI ternyata sudah sanggup *go international*, berkiprah di pentas dunia. Sementara, PSSI sendiri baru sampai tahap merapikan barisan untuk sampai ke sana.

Pandangan ini dibenarkan oleh tokoh persepakbolaan Sumatra Utara, Amran Y.S. dan Sekum PSSI, Suparjo Pontjowinoto. "Ancaman suap tetap ada di sini. Kita enggak bisa tutup mata," kata Amran yang juga pejabat teras PSSI periode kepengurusan Azwar Anas sekarang ini. Soalnya, penyuap bisa menohok dari segala sudut. Mulai dari pemain -- dan ini yang kebanyakan -- hingga tingkat ofisial dan manager.

Penyuap WNI di Doha, misalnya, langsung menghubungi para pemain Burundi di hotelnya. Berakrab-akrab, lantas menjamu mereka. kemudian, membagi-bagikan uang. Bahkan mengumpankan wanita -- karena dua orang di antara mereka itu, Geok Choo Tan

dan Wong Chwee May, ternyata adalah pelacur.

Cara yang paling mengerikan ialah dengan "proyek" jangka panjang dengan "membina" pemain sejak yunior. "Karena itu, dulu pernah saya bilang, sebaiknya penyuap itu ditembak saja!" kata Amran dengan nada tinggi.

Untuk mengantisipasi ini, sambung Amran -- dan juga dibenarkan oleh Suparjo -- perlu dibina kesadaran tinggi di semua jajaran akan makna sportivitas. Para pengurus klub juga perlu tahu modus operandi penyuapan. "Selama ini kan kebanyakan asal teriak, asal tuding. Padahal dia tidak tahu apa-apa," kata tokoh sepak bola yang pernah membongkar kasus suap di tahun 1970-an itu.

Modus suap di lapangan memang sangat rumit. Tanpa pengenalan yang dalam mengenai karakter tim, teori bola, serta situasi permainan yang biasa mereka tampilkan, sulit menangkap gejala "aneh" dalam suatu pertandingan. Misalnya tim yang biasa tampil dingin tiba-tiba rada berangasan dan sering protes pada wasit (untuk akhirnya kalah). Atau, pemain yang cakap dalam menggiring bola terlihat sering melakukan aksi, tapi bola yang dibawanya sering ke arah kerumunan lawan hingga usahanya selalu gagal. Bisa juga pemain yang mencetak gol ternyata malah kelihatan sedih. Dan kalau sudah ada yang terkena, bak epidemi, bisa menjalar ke mana-mana. Apalagi bila yang melakukannya adalah sindikasi -- sebagaimana temuan FIFA pada kasus di Doha itu.

Oleh karena itu Amran dan Suparjo mengharapkan para pengurus klub di Liga Indonesia mencermati perkembangan siasat para penyuap. Peristiwa di Doha -- karena melibatkan penyuap asal Indonesia -- adalah cermin yang bagus untuk dipelajari. "Jangan sampai Liga Indonesia dirusak. Bisa hancur kita," kata Amran. Apakah ini bisa diartikan Liga Indonesia sesungguhnya rentan terhadap susupan suap?

"Mudah-mudahan enggak deh!" kata Suparjo. "Kita akan berusaha mencegahnya. Sebab, sayang sekali bila Liga Indonesia yang sudah meriah, sudah diminati pecandu bola kita, tetapi habis oleh suap."

Ya, mudah-mudahan.

Djahar Muzakir

TINJU

Mundurlah, Pak Tua

George Foreman mestinya bertarung ulang melawan Schulz. Kalau tidak, dia dicampakkan.

Tinju kelas berat dunia adalah kepalan dan uang. Dua-duanya, tampaknya, tidak bisa dipisahkan lagi. Lihatlah "kasus" George Foreman yang dimenangkan oleh juri meskipun ia disikat habis oleh lawannya dari Jerman, Axel Schulz.

"Kesalahan" Schulz adalah ia tidak bisa meng-KO Foreman, gaek yang kini hampir 47 tahun. Repotnya, selama *comeback* setelah istirahat sekitar 15 tahun, Foreman yang berbadan raksasa itu, termasuk petinju yang paling sulit dirobohkan. Padahal jika Schulz mampu meng-KO Pak Tua itu, tentu ketiga juri tak bisa bermain-main angka lagi.

Foreman, kakek satu cucu, kepalannya memang masih laku dijual. Catatan sejarahnya yang menakjubkan -- jadi juara di usia 46 tahun dengan menganvaskan Michael Moorer -- menjadikan kepalan Foreman bernilai dollar tinggi. Melawan Schulz, misalnya, ia dibayar 10 juta dollar AS. Sementara sang penantang, dibayar 500.000 dollar AS.

BOXING

SEBAIKNYA MUNDUR: Foreman.

Tetapi sayang. Publik tinju Amerika, tempat pertandingan digelar, justru marah besar. Keputusan juri memenangkan Foreman dinilai keterlaluan. Penonton di sekitar ring ataupun yang memelototi lewat layar kaca -- termasuk penonton di Indonesia -- bisa menghitung dengan kasat mata betapa Schulz menabung angka lebih banyak ketimbang Pak Tua itu.

Sebelumnya, publik tinju sudah dikecewakan Foreman ketika dia memilih lawan Schulz yang peringkatnya cuma 24. Karena itu, WBA akhirnya mencopot gelar Foreman karena menolak tarung wajib dengan penantang pertama. IBF yang akhirnya membolehkan pertarungan itu.

Kini, setelah situasinya tidak karuan lagi, IBF pun sewot. Badan tinju, yang berdiri awal 1980-an, itu mulai berhitung. Sebuah komite dibentuk untuk menyelidiki pertarungan Foreman-Schulz. Bila ternyata ada ketidakberesan, keduanya harus bertarung ulang.

Foreman agaknya harus menerima tarung ulang itu. Apalagi, Schulz termasuk lawan yang empuk dibanding lawan lainnya yang antre di peringkat atas. Inilah kesempatan bagi Foreman mempertahankan mahkotanya. Kalau tidak, ia pasti akan dicampakkan. IBF bakal marah dan memaksanya melawan peringkat atas (dan Foreman pasti habis karenanya). Tak cukup itu, masyarakat tinju -- Amerika, terutama -- akan mencaci habis.

Di pertinjuan kelas berat, memang tinggal IBF-lah yang paling menyebalkan. Pak Tua yang *ngotot* bertahan dengan segala cara, sungguh, memperburuk penampilan kelas paling gebyar itu. Di badan tinju lainnya, muncul catatan yang kian bagus. Di badan yang paling muda dan sempat dianggap paling tidak bergengsi, WBO, kini duduk Riddick Bowe, mantan juara kelas berat WBA/WBC/IBF. Otomatis, dengan naiknya Bowe yang menganvaskan Herbie Hide di ronde 3, WBO terkatrol gengsinya.

Di WBC, Oliver Mc Call dinilai pantas menyandang juara setelah menjungkalkan idola Inggris, Lennox Lewis, tahun lalu. Memang, dia sempat dicibir gara-gara memilih lawan Larry Holmes yang juga gaek, 45 tahun. Namun, ketika Holmes mempertunjukkan teknik dan tenaga bertinju yang memukau sepanjang 12 ronde, simpati orang menjadi berubah. Holmes dipuji, sementara Mc Call jadi teruji kemampuannya.

Di WBA, Bruce Seldon menjadi juara baru setelah menyungkurkan Tony Tucker. Tucker dan Seldon -- penantang pertama dan kedua -- bertarung memperebutkan juara yang lowong "ditinggalkan" Foreman. Melihat format pertarungan seperti itu, bagaimanapun, Seldon naik secara terhormat.

Tampaknya, pertinjuan kelas berat mulai tertata setelah dicoreng-moreng petinju-petinju tua. Belum rapi betul, memang. Buktinya, para mantan juara dan eks penantang, kini masih menggebu masuk daftar tunggu pertarungan. Evander Holyfield, Frank Bruno, dan Tucker masih geregetan. Holyfield yang digerogoti penyakit jantung, berbunga-bunga menantang Foreman yang pernah dikalahkannya dua tahun lalu. "Sekarang, dia (Foreman) tentu kian lemah pukulannya," ujar Holy yang tak mau tahu lagi dengan penyakitnya.

Dan, peta tinju kelas berat tidak bisa dipisahkan dengan kembalinya si leher besi, Mike Tyson, yang kini berganti menjadi Malik Abdul Aziz. Malah si badak inilah yang mungkin akan memurnikan citra kelas berat nantinya.

Budi Winarno

PIALA EROPA

Dingin Sang Favorit

Pertarungan panas terjadi di lapis "kelas dua". Tim favorit masih basa-basi.

Piala Eropa 1996 masih dingin-dingin saja. Tim dari negara besar masih menahan diri, bahkan nyaris malu-malu. Mereka masih menghitung-hitung pertandingan mana yang pantas "dilepas" dan mana yang harus dimenangkan secara penuh.

Bagi negara favorit, tampaknya ada pendirian, yang penting lolos ke putaran final yang akan digelar di Inggris. Kalau lolos, baru tampil dengan kekuatan sesungguhnya. Pertandingan babak penyisihan akhirnya hanya menjadi ajang "berlatih" untuk membentuk tim matang yang siap tarung di putaran final nanti.

Karena sikap seperti itu, sejumlah kejutan yang sebenarnya tak perlu pun terjadi. Dalam pertandingan Kamis pekan lalu, misalnya, Belanda yang berada di jajaran paling elite sepak bola dunia, takluk 1-3 olek Ceko. Skor kemenangan terbesar yang bisa dipetik Ceko atas Belanda. Di Duesseldorf, tuan rumah Jerman ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Wales.

Sekitar 44.000 penonton yang hadir di stadion tersentak dengan hasil ini. Dan seperti memahami perasaan pendukung warga Jerman, pelatih Berti Vogts menyatakan bahwa Wales memang sudah dia hitung bakal menjadi lawan paling berat di Grup VII. Cara main *kick and rush* ala Inggris yang dimainkan Wales, kata Vogts, tidak mudah dijinakkan. Buktinya, Jerman kebobolan dahulu oleh gol Dean Saunders, bintang klub Aston Villa Inggris. Tiga menit menjelang babak pertama usai, bintang muda Jerman andalan klub Borussia Moenchengladbach, Heiko Herrlich, membalasnya.

SPORT ILLUSTRATED

JERMAN: Sulit menggusur Wales.

Vogts memang hanya berbasa-basi. Karena sebenarnya Wales bukanlah tim yang luar biasa. Dari enam kali bertanding, Wales hanya satu kali menang dan satu seri, ya lawan Jerman itu. Posisinya kini berada di peringkat kelima, di atas Albania yang ada di urutan terbawah, dan di bawah Moldova dan Georgia. Vogts pasti menghitung, keempat tim ini tak mungkin bisa menyingkirkan Jerman. Karena itulah, seperti mengikuti filsafat air, Vogts mengalir saja mengikuti Bulgaria -- yang memimpin grup sekaligus lawan terkuat sesungguhnya.

Tim Azzuri, Italia, juga main seadanya hingga finalis Piala Dunia 1994 ini cukup menang 1-0 atas tuan rumah Lithuania di kota Vinius. Pelatih Arrigo Sacchi masih bereksperimen, misalnya menduetkan Gianfranco Zola dengan striker senior Italia Pierluigi Casiraghi. Ia juga menengok-nengok kemungkinan keharmonisan kerja sama Antonio Benarrivo, Lorenzo Minotti (Parma), Paolo Maldini dan Alessandro Costacurta di lini belakang. Hingga, permainan tim Azzuri ini tidak setajam biasanya.

Karena itu, pertarungan panas dan menarik justru terjadi pada lapis "kelas dua" seperti Slowakia, Turki, Ukraina, Ceko, Finlandia, Georgia, Austria, dan lain-lain. Karena, mereka -- tentu saja -- ingin juga menyodok naik ke jajaran elite bola Eropa.

Djahar Muzakir

ANGIN SENSASI MENERPA JOOP

Konferensi PATA di Selandia Baru heboh. Joop Ave menduga ada kesalahpahaman.

Publik Selandia Baru dihujani berita sensasional. Menjelang pembukaan konferensi Asosiasi Pariwisata Asia Pasifik (PATA) di negara itu, Selasa pekan lalu, merebak berita menghebohkan ihwal ulah utusan Indonesia. Joop Ave, Ketua PATA dan Menteri Parpostel Indonesia, dituduh melakukan tindakan kurang terpuji terhadap seorang pramusaji di Hotel Carlton, Auckland.

Tak pelak, publik Selandia Baru dan peserta konferensi pun geger akibat berita itu. Tentu saja isu itu merebak ke mana-mana dan bahkan menjadi topik tajuk beberapa media di sana. Sehingga terkesan seakan-akan berita yang bersumber dari pengaduan pelayan hotel itu sudah benar adanya.

Jelas saja Joop Ave merasa dirugikan oleh berita itu. *Ndilalah*, Joop Ave pada kesempatan yang sama dikabarkan dipanggil pulang ke Jakarta oleh Presiden untuk suatu keperluan. Sehingga pidato pembukaan Konferensi PATA dan serah terima dengan Ketua PATA yang baru pun akhirnya dibatalkan.

Heboh itu bermula dari pengaduan seorang pelayan hotel tempat delegasi Indonesia menginap. Sang pramusaji, Minggu tengah malam, 23 April lalu, mengadu ke polisi Auckland bahwa dia telah dirayu secara paksa oleh salah seorang tamu hotel.

Awalnya, menurut pelayan itu, dia dipanggil ke kamar. Joop memang ingin memesan makanan. Kemudian, keduanya terlibat pembicaraan yang mengasyikkan tentang Pulau Samoa, tempat kelahiran si pramusaji. Di tengah-tengah pembicaraan itu, kata pelayan keturunan Aborigin tersebut, Joop yang bertubuh tinggi besar itu melakukan tindakan yang tidak disukainya. Keluar dari kamar itu, pelayan tadi lalu mengadukan peristiwa itu ke polisi setempat, setelah sebelumnya melapor ke manajer Hotel Carlton, John Dick.

YUL ADRIANSYAH

JOOP AVE: Sekadar salah paham.

Bak disambar petir, semua delegasi tentu saja terkejut dengan pemberitaan media massa keesokan harinya. Joop Ave sendiri tidak pernah menduga akan ada berita serupa itu. Sebab, pagi-pagi sekali dia langsung menuju Jakarta, setelah mendapat instruksi dari Jakarta.

Agaknya, kepergian Joop secara mendadak ini membuat isu itu semakin berembus kencang. Disebut-sebut, Joop berangkat secara diam-diam dengan pesawat pribadi guna menghindari pengawasan petugas keamanan dan wartawan setempat. Surat kabar *New Zealand Herald* malah melansir bahwa Joop berangkat Senin dinihari itu dengan terburu-buru.

Joop Ave tegas-tegas menolak berita surat kabar itu. "Saya berangkat dengan prosedur resmi," katanya. Kepergian itu memang amat mendadak, tetapi Joop sendiri sudah memberitahukan kepada presiden PATA agar perannya diganti oleh orang lain. "Mereka juga maklum, saya berangkat karena alasan kesehatan," ujar Joop. Kepada KBRI di Wellington, dia juga menginformasi instruksi dari Jakarta itu.

Selain itu, Joop Ave tidak menduga sama sekali tuduhan seperti itu bakal dilancarkan ke arah dirinya. Diakuinya, Minggu malam itu, sekitar pukul 18.30 waktu setempat, dia bersama tiga stafnya sedang mengadakan diskusi di kamarnya. Joop Ave kemudian memanggil salah seorang pelayan ke kamarnya untuk memesan makanan. Sebelum memesan, si pelayan dan Joop Aye terlibat pembicaraan hangat. Joop bercerita tentang Indonesia, sedangkan si pelayan bercerita tentang Samoa dan olahraga favoritnya, rugbi.

Layaknya pembicaraan yang akrab, kadang kala keduanya saling bersentuhan lutut, pegang-pegangan tangan, dan dorong-dorongan. Kemudian, kata Joop, si pelayan tadi meninggalkan kamar. "Pelayan itu keluar kamar dengan sikap ramah, sama seperti ketika dia datang," ucap Joop lagi. Entah apa dasarnya, tiba-tiba saja si pelayan lalu meng-

adu kepada polisi setempat, bahwa dia telah dirayu secara paksa oleh Joop.

Joop Ave sendiri mengaku mengetahui soal pengaduan itu setelah General Manager Hotel Carlton, John Dick, datang memberitahukan keberatan pelayannya. Dari John Dick pulalah, Joop Ave tahu bahwa si pelayan sudah melapor kepada polisi.

"Kalau memang dengan sentuhan tangan tanda keakraban itu dia tersinggung, saya minta maaf," kata Joop Ave dengan bijak. Namun, tindakannya mengadukan persoalan itu kepada polisi sungguh di luar dugaan. "Ini pasti kesalahpahaman," katanya.

Menteri Pos dan Pariwisata ini memang dikenal sosok yang cukup hangat. Supel dalam bergaul dan mudah akrab dengan siapa saja. Agaknya, sikapnya inilah yang tidak cocok dengan si pelayan tadi.

Karena itulah, Menteri Luar Negeri Ali Alatas tidak mempercayai isi pengaduan pelayan tersebut. "Kita harus hati-hati dengan berita itu. Kita tunggu saja dulu perkembangannya," katanya.

Belakangan ini, menurut Ali Alatas, cukup banyak pihak yang ingin merongrong kewibawaan Indonesia di luar negeri. "Banyak berita-berita luar negeri, seperti isu tentang pelecehan itu, yang harus kita saring," ujarnya.

Pemerintah Selandia Baru sendiri tampak cukup serius menanggapi kasus ini. James Bolger, Perdana Menteri Selandia Baru merencanakan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Sedang pihak Hotel Carlton yang dihubungi *SINAR*, memilih tutup mulut. "Pihak hotel diperintahkan untuk tidak mengeluarkan komentar apa pun tentang kasus ini kepada pihak luar," kata Scott Jarilly, Manajer Pelaksana Harian Hotel Carlton.

Ahmady Meuraxa/Agung Puspito, Nurhanafiansyah, Totok Suryanto.

DEMO REMBANG

Kiprah Kartini Dikoreksi

Ratusan mahasiswa berdemo di tempat kelahiran R.A. Kartini. Aksi itu dipandang salah alamat.

Agaknya, kini tiada hari besar tanpa demonstrasi. Tak terkecuali Hari Kartini. Terlebih lagi, para pendemo yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa Yogyakarta itu menggelar unjuk rasa di tanah kelahiran tokoh emansipasi wanita Indonesia, R.A. Kartini, Rembang.

Ratusan mahasiswa, di halaman Kabupaten Rembang, tak jauh dari Museum Kartini, sempat selama tiga jam mengumbar unek-unek mereka di depan para petinggi daerah setempat. Mulai bupati, wakil kepala polres, kepala kantor sospol, dan para pegawai pemda lengkap dengan istri mereka, yang tergabung dalam Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, menyaksikan ulah para pendemo. Kebetulan para pejabat itu sedang merayakan Hari Kartini.

YUL ADRIANSYAH

DARMA WANITA: Tetap perlu.

Mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Solidaritas Pembebasan Perempuan Indonesia itu, dalam mimbar bebasnya, juga menggelar poster-poster yang antara lain bertulisan, "Bubarkan Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK", "Hapuskan Pelacuran Anak-anak", "Stop Pelecehan Seksual". Mereka juga membacakan puisi Rendra yang ditutup dengan pembacaan doa bagi Kartini. Para pendemo memang bermaksud menggugat konsep kaum perempuan yang sudah disalahartikan. "Kebijakan yang digariskan untuk perempuan Indonesia selalu dikaitkan dengan domestifikasi perempuan seperti merangkai bunga, lomba memasak, *ngadi salira*, dan *ngadi busana*," kata Cicik, mahasiswi yang ikut demo.

Mereka juga menuntut pemerintah membubarkan Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (UPW) yang dinilai gagal mengangkat derajat kaum perempuan seperti yang dicita-citakan Kartini. Pemerintah pun dinilainya tak bereaksi di saat terjadi kasus yang menimpa kaum perempuan, misalnya, perlakuan diskriminatif di sejumlah perusahaan swasta atau perlakuan terhadap TKW di luar negeri.

Sementara, Ketua Kowani Bidang Hukum dan Luar Negeri, Ny. Kuraisin Sumhadi, membantah bahwa Dharma Wanita tak ada gunanya. "*Wong*, tujuannya semula hanya untuk meningkatkan kesejahteraan istri pegawai negeri," ujar Ketua Kongres Wanita ini di ruang kerjanya.

Brigjen Polisi (Purn.) Roekmini Koesoema Astoeti, anggota Komnas HAM, yang juga dimintai pendapatnya, menyesali tindakan para demonstran itu. "Saya kurang setuju kalau mereka berdemonstrasi di makam Kartini," katanya. Dia juga menilai, tuntutan para demonstran terlalu mengada-ada. "Bagaimana harus dihapus? PKK itu berguna untuk desa-desa, sedangkan Dharma Wanita adalah salah satu organisasi wanita," katanya.

Namun, Roekmini mengakui bahwa pergerakan wanita memiliki banyak kelemahan. "Kaum wanita sekarang harus belajar sosialisasi politik. Belajar mengeluarkan pendapat yang dapat mengubah kebijakan pemerintah, seperti yang dilakukan Kartini di bidang pendidikan melalui surat-suratnya," katanya.

Irvan Sjafari

PESERTA KONFERENSI: *Lebih luwes.*

ADANG GUMILAR

HUT KONFERENSI ASIA-AFRIKA

Mendobrak PBB Setengah Hati

Pesta memperingati ulang tahun Konferensi Asia-Afrika berlangsung meriah. Bagaimana hasilnya?

Negara-negara berkembang yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB), dan khususnya Indonesia, kembali menjadi perhatian dunia. Pangkalnya, mulai tanggal 24 hingga 27 April pekan lalu, mereka menggelar hajatan besar dan menjadi sangat meriah di Bandung bertepatan dengan ulang tahun ke-40 Konferensi Asia-Afrika, cikal bakal GNB. Selain itu, tahun ini juga bertepatan dengan ulang tahun ke-50 PBB.

Lebih khusus lagi, bagi Indonesia, tahun ini bertepatan dengan tahun emas: ulang tahun ke-50 kemerdekaan RI. Karena itu, sangat beralasan Sekretaris Jenderal PBB, Boutros-Boutros Ghali beserta istri, usai tatap muka dengan Presiden Soeharto di Jakarta, juga menyempatkan diri datang ke Bandung.

Setelah satu hari acara seremonial yang melelahkan tapi mengesankan, termasuk kunjungan ke IPTN, Kamis pekan silam, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok pun digelar di Hotel Horison, Bandung. Lalu, namanya diubah menjadi KTM Luar Biasa.

Ada empat topik penting mencuat di situ: Deklarasi 50 Tahun PBB, Agenda Pembangunan, Restrukturisasi PBB, dan Perjanjian Anti-Penyebaran Senjata Nuklir. KTM yang ditutup Kamis malam pekan lalu itu menghasilkan 110 paragraf komunike mengenai masalah politik dan ekonomi.

Pembahasan sejumlah besar materi berlangsung lancar-lancar saja. Soalnya, materi tadi pada dasarnya masih dalam kerangka intern GNB sendiri. Namun, begitu menginjak pada materi yang menyangkut soal eksternal, barulah terasa alot. Di sinilah kelihatan bagaimana GNB, yang konon bukan merupakan suatu blok dan kini memiliki pendekatan yang lebih luwes, menemukan lawan klasiknya, PBB, yang selama ini dipakai untuk melegalisasi kepentingan negara-negara maju.

Lihat saja dalam materi restrukturisasi PBB, misalnya, khususnya hak veto yang dimiliki Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia, masih belum tentu bisa diubah. Pasalnya, seperti dijelaskan oleh Boutros Ghali kepada pers di Bandung 24 April lalu, hak veto bisa saja dihapus dengan terlebih dulu mengubah Piagam PBB. "Namun, untuk mengubah Piagam PBB itu kita harus berhadapan dengan kelima negara tersebut," ujar Boutros Ghali.

Boutros Ghali juga mengingatkan, sudah hampir empat tahun terakhir ini belum ada resolusi yang terkena veto. Hal ini akibat langsung peranan dan kepaduan anggota GNB yang jumlahnya mayoritas dalam badan dunia itu.

Hal kedua yang disoroti KTM ini adalah soal Perjanjian Antipenyebaran Senjata Nuklir, *Nonproliferation Treaty*, yang memang cukup alot. Sebab, masih mustahil menghancurkan secara serempak dan untuk selama-lamanya seluruh timbunan senjata pemusnah massal itu. Mereka hanya menekankan, perpanjangan nuklir perlu dilaksanakan sesuai dengan Artikel 2, Pasal 10, tentang tiga pilihan memperpanjang perjanjian itu, yaitu perpanjangan tanpa batas, untuk satu periode, dan perpanjangan untuk beberapa periode terbatas.

Lebih khusus lagi GNB mengusulkan peninjauan setiap lima tahun sekali. Namun, ketiga pilih ini pun masih belum tegas diambil oleh negara-negara nuklir dan non-nuklir, sehingga anggota sepakat untuk membawa pembahasan ini ke pejabat tinggi GNB di New York.

Indonesia dan sebagian negara nonnuklir GNB tetap berpegang teguh pada pilihan ketiga, yaitu perpanjangan untuk beberapa periode terbatas. Sedangkan negara-negara nuklir seperti Afrika Selatan, berkeras pada prinsip perpanjangan tanpa batas. "GNB sepakat hanya menyebut tiga pilihan Perjanjian Antipenyebaran Senjata Nuklir yang berlaku sejak 1970," ujar Menlu Ali Alatas pada malam terakhir.

Sikap tidak tegas ini segera dibantah Kepala Badan Pelaksana Ketua GNB, Nana Sutresna. GNB, katanya, memang kesulitan kalau harus memutuskan pilihan tegas. Sebab, negara-negara maju di saat yang sama melakukan negosiasi yang menjurus kepada konsensus. "Kita mengambil sikap luwes," katanya.

Walau demikian, Nana optimistis, GNB masih tetap punya posisi tawar-menawar. Malah, katanya, posisi GNB akan semakin kuat. Sebab, negara-negara maju sendiri tidak yakin bisa menang dalam pemungutan suara. "Daripada menang sedikit atau bahkan kalah, lebih baik menempuh konsensus. Ini baik juga bagi GNB," ujar Nana.

Adang Gumilar (Bandung)

WAWANCARA MENLU KOLOMBIA

Kami Siap Menjadi Tuan Rumah

Mulai Oktober 1995, giliran Kolombia menjadi ketua Gerakan Non Blok untuk periode 1995-1998. Republik yang beribu kota Bogota itu -- dengan luas daerah sekitar 1,1 juta km² -- saat ini berpenduduk sekitar 21 juta jiwa. Meski penduduk aslinya keturunan Indian, karena lama dijajah Spanyol dari tahun 1525 sampai 1928, budaya Spanyol menjadi sangat menonjol. Ini bisa dilihat dari bahasa Spanyol yang digunakan sebagai bahasa resmi, begitu pula agama resmi Katolik Roma, dan mata uangnya, peso.

Berikut wawancara khusus antara Adang Gumilar dengan Menlu Columbia, Rodrigo Pardo Garcia-Pena, pada saat Sidang Biro Koordinasi Tingkat Menteri Gerakan Non Blok di Hotel Horison Bandung, pekan lalu.

Bisakah sedikit cerita mengenai kondisi Kolombia?

Kolombia adalah negara demokratis. Presiden kami saat ini seorang yang berdedikasi penuh terhadap negaranya. Ia pelopor pembangunan sosial, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Kebijakan ekonominya berhasil mengatasi berbagai kendala pembangunan hingga Kolombia berhasil menjadi negara yang memiliki perekonomian yang stabil. Negara kami memiliki hubungan baik dengan semua negara tetangga. Kami sangat mencintai perdamaian, dan untuk itu kami selalu ikut dalam setiap penyelesaian konflik internasional, menghargai hukum internasional, dan tidak pernah ikut campur atau intervensi urusan negara lain. Inilah salah satu modal kami untuk menjadi ketua GNB.

Apakah Kolombia yang berada di benua Amerika itu merasa menjadi bagian yang sama dengan perjuangan negara di Asia-Afrika?

Kami pikir sama, sebab faktanya kami adalah sama-sama negara berkembang yang memiliki kesamaan permasalahan seperti juga Indonesia. Bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat dan berupaya terus membangun perekonomian dan sosial. Kami percaya, sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara berkembang lainnya.

Bagaimana peluang bisnis dan investasi di Kolombia?

ADANG GUMILAR
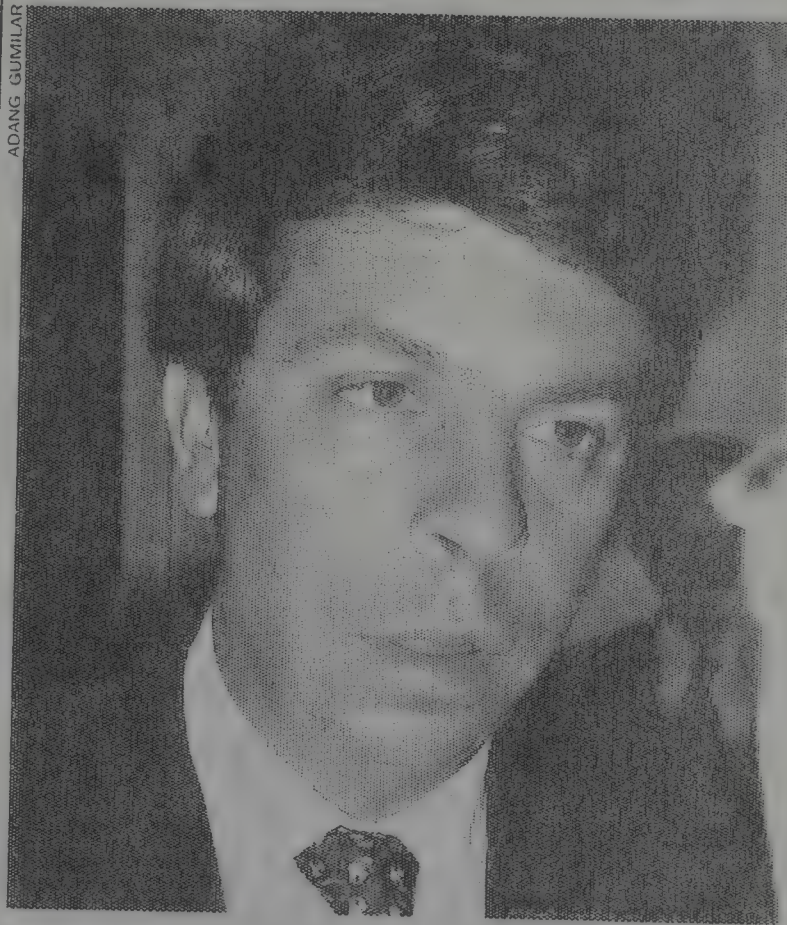
Rodrigo Pardo Garcia-Pena

Saya kira banyak sekali peluang besar untuk melakukan bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Kolombia. Kolombia bukan saja berada di kawasan Samudera Pasifik, juga Atlantik. Sebelumnya, kami selalu berhubungan dengan Utara seperti AS, Kanada, Eropa, dan negara-negara Karibia. Karena sebentar lagi akan menjadi Ketua GNB, Presiden Kolombia sudah membuat kebijakan agar para pengusaha negara kami segera membuat diversifikasi relasi dengan negara-negara dari Asia dan Afrika. Khususnya dengan negara-negara di Asia Pasifik. Sementara ini, kami masih bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan. Kami bangga menjadi satu-satunya negara Amerika Latin yang tingkat kemajuan ekonominya pesat selama 20 tahun terakhir ini.

Bagaimana dengan kebijakan di bidang pariwisata?

Terus terang kami punya masalah dengan transportasi, karena negara kami kondisinya bergunung-gunung. Tapi masih ada tempat-tempat yang baik untuk bisa dikunjungi. Seperti juga dengan Cartagena, kota wisata yang nanti akan dijadikan sebagai tempat berlangsungnya KTT Non Blok Oktober 1995. Di kota ini banyak sekali gedung-gedung dan rumah-rumah peninggalan kolonial Spanyol yang dibangun sekitar 400 tahun yang lalu. Ini kota yang khusus dan unik.

Bagaimana dengan sindikat obat bius seperti Kartel Medellin?

Ini masalah terbesar yang dihadapi Kolombia. Dan kami melakukan apa saja untuk menghadapi masalah ini, di antaranya mengajak negara-negara lain seperti AS untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi, bagaimanapun upaya pemberantasan ini tidak akan berhasil sepanjang masih banyak ada permintaan. Ironisnya, permintaan terbesar justru dari AS sendiri sebagai konsumen terbesar di dunia untuk barang seperti kokain. Kami menghendaki dunia ini bebas dari penyalahgunaan obat bius.

Bagaimana dengan kesiapan Kolombia dalam KTT Non Blok Oktober 1995?

Kami telah siap menjadi tuan rumah yang baik. Semua persiapan untuk *event* besar itu sudah rampung. Dan soal keamanan pun nampaknya tidak terlalu masalah, sebab kami sudah berpengalaman menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional. ■

TAHLILAN NIKE

Idola yang Semakin Dikenang

Tahlilan 40 hari meninggalnya Nike Ardilla dihadiri ribuan orang. Agaknya, Nike bakal terus dikenang.

Satu bukti, Nike Ardilla memang dicintai publiknya. Apalagi penggemar beratnya -- Nikemania -- memang sulit luntur, meski sorotan negatif sempat menimpa sang idola. Andai Neng Keke masih hidup, andai ia tahu, betapa banyak orang yang merasa kehilangan. Agaknya, dalam hal ini almarhumah Nike Ardilla bisa dibilang sudah menyamai idolanya, Marilyn Monroe. Paling tidak, sampai peringatan 40 hari meninggalnya penyanyi pop kelahiran Bandung 19 tahun lalu ini, penggemarnya tak pernah surut.

Malah pengunjung saat acara tahlilan di kediaman Keke, di Jalan Parakan Saat I/37, Bandung itu, Kamis malam (27/4), mencapai ribuan orang. Bahkan, di pemakaman Imbanagara, Ciamis, pada siang harinya lebih membeludak lagi. Diperkirakan puluhan ribu penggemar Nike mengepung pemakaman itu. Ada yang terpaksa memanjat pohon dan berdiri di sepanjang jalan ke pemakaman sambil mendengar dan mengikuti acara lewat pengeras suara yang dipasang di sekitar pemakaman.

Seperti juga Marilyn Monroe yang meninggal tahun 1962, para pemujanya tidak mau peduli apa yang diperbuat atau apa yang dikatakan oleh orang tentang artis idolanya. Mereka merasa sangat kehilangan dan merasakan duka yang mendalam.

Gambaran itu terasa jelas saat doa dibacakan mengawali tahlilan. tetesan air mata para penggemarnya tak bisa ditahan lagi. Mereka tak mampu menahan tangis dan kepedihan mengenang betapa cepatnya artis cantik ini meninggalkan mereka. Tak cuma para remaja atau lebih sering dijuluki ABG, beberapa ibu muda terpaksa harus terus-menerus menghapus air mata.

GALA

DOA BERSAMA: *Menyamai idolanya.*

Suasana keharuan yang mencekam itu berlangsung sampai acara bubar sekitar pukul 22.00. Itu pun sebagian besar hadirin tak juga beranjak pulang hingga tengah malam. Tak cuma para penggemar berat Keke yang tergabung dalam Nike Ardilla Fans Club yang malam itu ikut hanyut, tapi juga ribuan lainnya yang berdatangan sejak pukul 17.00 sore dari berbagai kota di luar Kota Bandung, bahkan dari luar Pulau Jawa.

Adjie Esaputra, mewakili keluarga Nike yang juga guru olah vokal Nike sewaktu kecil, kepada *SINAR* menyatakan, membeludaknya peserta tahlilan dari undangan 1.000 menjadi sekitar 3.000 orang itu dan sekitar 20.000 orang di pusara Nike di pemakaman Imbanagara, Ciamis, menandakan Nike sudah milik masyarakat. "Sekalipun banyak suara-suara janggal, masih banyak orang yang melihatnya dari sisi yang baik. Suara-suara itu tidak menggoyahkan citra almarhum sebagai *public figure,*" ujar Adjie.

Pendapat ini ditimpali Yenni salah seorang penggemar berat Nike dari Cirebon. "Saya jauh-jauh datang karena cinta Nike. Meski koran-koran menulis jelek tentang Nike, tidak melunturkan cinta saya kepada Nike. Teman-teman saya malah ada yang rombongan datang ke sini dengan mobil sewaan," ujarnya kepada *SINAR.*

Acara tahlilan di kediaman yang dihadiri beberapa artis itu dipandu dari atas sebuah panggung berukuran 4 kali 6 meter. Tampak antara lain, Paramitha Rusadi, Ozzie Saputra, Niki Astria, Silvana Herman, Lilis Suryani, Lucy Dahlia, Tetty Kadi, dan Aom Kusman. Acaranya sendiri hanya berupa pembukaan, doa, sambutan dari para pemuka daerah setempat, tahlilan, ceramah, ditutup pemutaran video klip lagu terakhir Nike yaitu, "Sandiwara Cinta".

Agaknya, tahlilan ini bukan pertemuan terakhir bagi para penggemar berat Nike Ardilla, paling tidak berbagai acara bakal bergulir dan digelar. Sebuah acara mengenang penyanyi yang juga memiliki SLB Wawasan Nusantara ini rencananya digelar di Taman Impian Jaya Ancol, 10 Juni mendatang. Menurut Denny Sabri seperti dikutip *Merdeka,* acara itu sekaligus menjadi ajang peluncuran perdana buku biografi Nike Ardilla yang ditulisnya. Belum lagi rekaman terbaru Nike yang dipaketkan dengan buku biografinya. Seperti idolanya, Marilyn Monroe, tampaknya, Nike bakal terus dikenang penggemarnya.

Khairil Muksim/Yudi Faisal, Adang Gumilar (Bandung)

PDI

Langkah Kiri Mega di Kediri

Lagi-lagi Mega dilarang tampil di wilayah Jawa Timur. Ada yang mengganjal?

Ternyata, bagi Megawati Sukarnoputri, jalan-jalan di Jawa Timur masih saja belum mulus. Kali ini, dia tersandung di Kediri. Kejadiannya Selasa pekan lalu, saat Ketua Umum PDI itu akan memberi sambutan pada peringatan Hari Kartini, yang diselenggarakan pengurus PDI Kabupaten Kediri. Atas inisiatif aparat keamanan setempat, dia diminta membatalkan rencana itu. Sebelum itu, Mega juga gagal menggelar temu kader ala "Partai Banteng" di Probolinggo.

Larangan tampilnya Mega di Gedung Wisma Nugraha, Kediri, itu, bermula dari pemanggilan Ketua PDI Kediri, Wiyono, oleh Kepala Polres, Letkol Sesprayer Siregar. Menurut Wiyono, Sesprayer melarang Mega semata-mata untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan atas petunjuk atasannya.

Lebih dari itu, menurut Sesprayer seperti dikutip Wiyono, kehadiran Mega di Kota Tahu itu pada siang harinya saja sudah bisa membangkitkan semangat warga PDI. Jadi, rasanya sudah cukup. "Lantas, untuk apa lagi tampil pada malam harinya?" ujar Wiyono menirukan ucapan Sesprayer.

Bagi warga PDI Kediri, peristiwa ini mengundang sejumlah pertanyaan. Sebab, sebagaimana jadwal yang sudah diedarkan panitia, Mega memang sudah dipastikan akan memberi sambutan. Untunglah, antusiasme sekitar 10.000 massa PDI yang memenuhi gedung berkapasitas 2.000-an orang itu tak juga surut. Dan, sebagian besar yang hadir terpaksa hanya bisa mengikuti acara lewat layar televisi dan hanya menyaksikan Mega menyerahkan Piala Megawati tanpa komentar apa pun.

Wiyono selaku penanggung jawab acara tentu tak mau melihat hadirin resah. Maka, dengan suara yang lantang, dia pun meminta agar semua tenang. Sebab, pertemuan itu sifatnya sah dan legal. Tapi, Mega yang dinantikan hanya bisa tampil sebatas menyerahkan piala.

Wiyono mengakui, penggelaran acara seperti ini memang sempat mengundang tanda tanya. Ada yang mengatakan, *tumben* PDI mengadakan peringatan Hari Kartini. Apalagi sampai dihadiri Megawati dan piala segala. "Lho, apa memang tidak boleh," ujar Wiyono menanggapi.

Acara itu memang akhirnya berlangsung hingga usai. Tapi, masih tersisa sekelumit pertanyaan di benak Mega. Dia heran, mengapa dirinya begitu sulit masuk Jawa Timur. Padahal, logikanya, kata Mega, hal seperti itu jelas tak boleh terjadi. Sebab, katanya, Jawa Timur adalah bagian dari Indonesia. Sedangkan PDI itu milik bangsa Indonesia.

Rasa heran di benak Mega memang bisa dimaklumi. Sebab, sejak dia menjadi ketua umum PDI, hampir semua provinsi bisa didatanginya dengan leluasa. "Seharusnya, Jawa Timur juga bisa menerima saya," ujarnya.

Kesulitan demi kesulitan yang dialami putri mendiang Bung Karno itu di Jawa Timur memang patut dipertanyakan. Ada yang menyebut, kasus itu sangat erat kaitannya dengan persoalan kepemimpinan PDI di sana. Jadi, meski status Mega pimpinan tertinggi partai, kehadirannya belum tentu bisa diterima semua warga PDI di daerah itu.

Tampaknya, dualisme kepemimpinan PDI Jawa Timur akan tetap membawa pengaruh bagi perjalanan Mega di provinsi itu. Sebab, kenyataannya, baik Soetjipto yang didukung DPP PDI, maupun Latief Pudjosakti yang konon didukung sebagian besar DPC, sama-sama punya massa. Tak heran jika aparat keamanan sampai kelewat hati-hati. Misalnya, ya, seperti dilakukan Kepala Polres Kediri itu.

JUARKAZA

MEGAWATI: *Cuma dicekal di Jawa Timur.*

Sayang, peristiwa ini belum dilaporkan ke atas. Menko Polkam Soesilo Soedarman mengaku tidak tahu soal itu. Katanya, "Saya belum terima laporan."

Bagaimanapun, kasus seperti ini bisa menjadi preseden buruk bagi pembinaan politik dalam negeri jika tidak segera dituntaskan. Apalagi, larangan bagi Mega bukan hanya kali ini. Peristiwa Surabaya dan Probolinggo adalah dua kasus yang sudah dialaminya sebelum di Kediri.

Totok Suryanto

NKK/BKK

Manuver Kampus Cara Buya

Buya khawatir terjadi krisis kepemimpinan. Mahasiswa harus kembali ke khitahnya. Upaya menarik simpati?

Ketua Umum PPP, Ismail Hasan Metareum, membuat kejutan. Dia mengangkat masalah Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III PPP di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa pekan lalu.

Buya agaknya ingin melonggarkan kembali kehidupan kampus setelah lesu pada pasca-NKK/BKK. Sejak 1980-an, NKK/BKK berjalan mulus di kampus berdasarkan SK Menteri PdanK (ketika itu Daoed Joesoef, *Red.*) tanggal 19 April 1978.

Di depan utusan lima cabang, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) yang ada, Buya menyatakan kini sudah saatnya menghentikan kebijakan yang menjauhkan kampus dari sentuhan politik praktis. Sebab, menurut Buya, berpolitik berarti berbicara tentang masalah bangsa dan negara. "Dari mana kita mengharapkan insan pimpinan bangsa kalau tidak dari kampus. Karena itu, sentuhan politik harus diberikan kepada mereka secara dini. Sehingga begitu mereka tampil, mereka sudah siap pakai," kata Buya yang juga Wakil Ketua DPR/MPR itu.

Pernyataan Buya Ismail ini disambut baik oleh Menteri PdanK, Wardiman Djojonegoro. Wardiman menjelaskan, mahasiswa boleh saja belajar politik untuk memahami politik. Tetapi, untuk mempraktikkan hasil belajarnya itu harus pada tempatnya, bukan di kampus.

"Kalau kita latihan berenang, tentunya kan bukan di atas meja, tetapi di kolam renang," ujar Wardiman. Karena itu, Wardiman dan Menko Polkam Soesilo Soedarman sepakat, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk belajar politik.

Selain itu, Wardiman juga mengingatkan, untuk praktik politik jangan di dalam kampus. Mahasiswa diharapkan dapat membedakan mana yang baik dan buruk atau yang salah dan benar. Dan menurut Wardiman, belajar politik tidak sama dengan melakukan politik praktis.
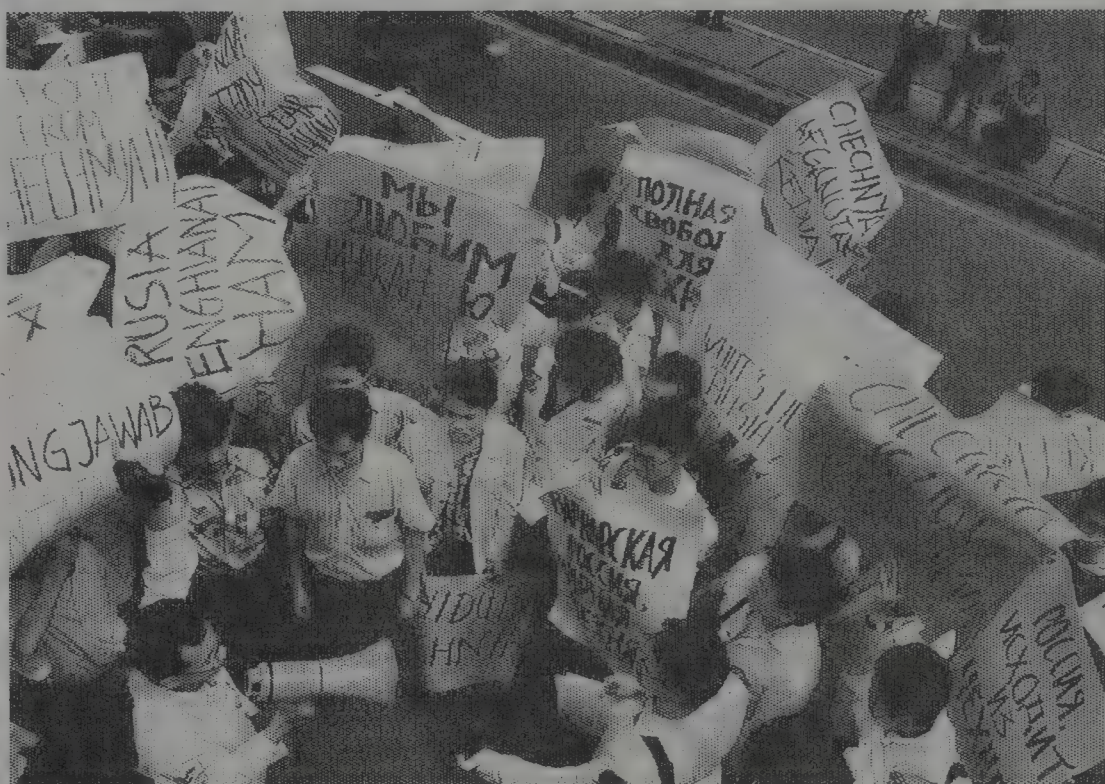
Namun, bagi Buya, akibat samping penerapan NKK/BKK justru lebih berbahaya. Kini, yang naik ke panggung politik justru para aktivis kampus yang gerakannya tidak pernah dibatasi. Dulu, dengan adanya Dewan Mahasiswa, kehidupan kampus justru lebih semarak. Lembaga kemahasiswaan yang otonom ini merupakan puncak piramid pemimpin-pemimpin kegiatan intra dan ekstra universitas.

Ini, kata Buya, terbukti dengan lahirnya tokoh-tokoh kampus era 66, seperti Cosmas Batubara, Abdul Gafur, yang disusul kemudian oleh Ginandjar Kartasasmita, Sarwono Kusumaatmadja, dan Akbar Tandjung. Lantas, mana produk pasca-NKK/BKK? Siapa tokoh yang dapat dijadikan panutan setelah NKK/BKK diterapkan? Bagaimana suasana kehidupan kampus?

Mahasiswa tidak bebas bergerak, masih menurut Buya, karena organisasi di dalam kampus berada di bawah kendali pemimpin perguruan tinggi. Mereka tidak otonom dan kreativitas mereka mandek. Bila itu dibiarkan terus berlangsung, Buya khawatir, bangsa ini akan mengalami kesukaran mencari kader-kader pemimpin yang tangguh, sehingga terpaksa mempertahankan kader-kader produk pra-NKK/BKK.

Di sisi lain, Wardiman menolak adanya latihan kepemimpinan yang bernuansa politik di kampus. Menurut dia, mahasiswa manajemen, ya, tetap saja mempelajari perusahaan dengan membentuk PT. Ini karena mekanisme dan peraturan tentang PT ada di luar kampus. Begitu pula dengan permasalahan politik. Artinya, mahasiswa harus lurus-lurus saja sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Tidak boleh keluar rel, dengan mempelajari ilmu politik atau berpolitik praktis.

ERWIN HADI

AKSI MAHASISWA: Dampak NKK/BKK

Isnanu Halid, Sekjen Fosko 66 tidak sependapat dengan Buya. "Kalau dikatakan produk pasca-NKK/BKK tidak terlihat, itu salah," katanya. Sebab, menurut Isnanu, banyak doktor muda dalam dan luar negeri lahir sejak pemberlakuan NKK/BKK. Soalnya, apakah gelar doktor itu merupakan jaminan seorang pemimpin yang tangguh?

Nurhanafiansyah

PELECEHAN AGAMA

Giliran Sitok dan Linus

Dua penyair dianggap melecehkan agama. Untungnya segera bisa diredam. Perlu sikap tabayun?

Belum lagi tuntas soal Sitok Srengenge, penyair dari Bengkel Teater Depok Jakarta yang dianggap telah melecehkan ayat Alquran, dengan memelesetkan kalimat *taawudz*, kini giliran penyair Yogyakarta, Linus Suryadi A.G. didemo. Ini buntut tulisannya di harian *Bernas* soal *cokekan*, yang menyebutkan khitanan sebagai tradisi Yahudi.

Kasus Sitok Srengenge diungkap harian *Kedaulatan Rakyat*, satu-satunya harian yang getol menulis kalimat Sitok ketika menghadiri pertemuan seniman di Studio Mendut, Magelang dan Purworejo. Sedangkan tulisan Linus Suryadi A.G., penyair yang terkenal dengan karya fenomenalnya *Pengakuan Pariyem* ini, diprotes empat orang awak Teater Kanigoro Yogyakarta.

HEROE POERWADI

Emha Ainun Nadjib

Insiden Sitok Srengenge terjadi pada bulan Maret 1995 lalu, saat Pesta Pidato Kebudayaan Seniman Indonesia di Studio Mendut Magelang. Sitok, penyair kondang yang tinggal di Jakarta itu, membuka pembacaan puisinya dengan memelesetkan kalimat *taawudz* menjadi *audzubillah himinas seniman nirrojjim*. Menurut laporan *Kedaulatan Rakyat*, Sitok sempat minta maaf setelah mengucapkan kalimat tersebut.
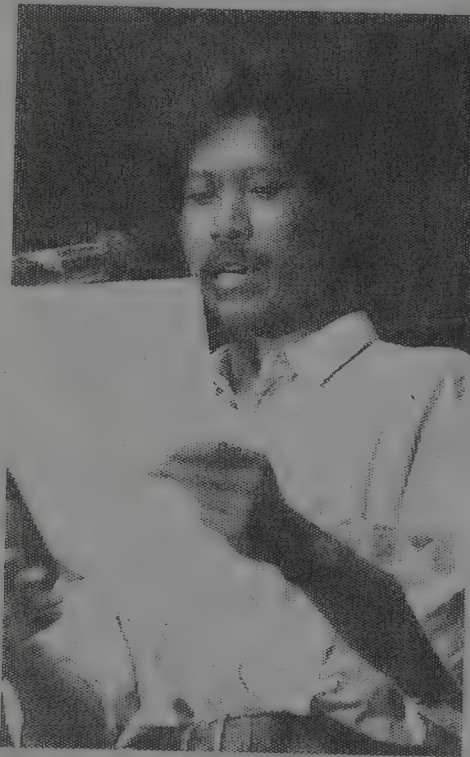
Sayangnya pertengahan April, saat ia menjadi moderator dalam pentas baca puisi prakarsa Bengkel Seni Purworejo, di aula Gedung, Purworejo Jawa Tengah, kalimat itu diulangi lagi.

Sedangkan Linus pada tulisannya di *Bernas* ketika mengupas tentang perkembangan *cokekan* atau lebih dikenal dengan *siteran* pada bagian khitanan (sunatan atau supitan) menyatakan sunatan sebagai ritus dari tradisi Yahudi. Lalu Linus menyimpulkan ritus khitanan dengan menanggap *cokekan* pada waktu itu sebagai proses sintesa peradaban Yahudi dan Jawa atau proses Yahudinisasi dan Jawanisasi.

Tentu saja pendapat ini mengundang kecaman, karena selama ini orang lebih mengenal khitanan sebagai tradisi dari agama Islam. "Itu kan sudah kacau. Padahal khitanan itu juga dilakukan umat Islam yang di Jawa diajarkan oleh para Wali dan Sunan," ujar Djoko dan Aris T., awak Teater Kanigoro Jumat pekan lalu.

Untungnya, Harian *Bernas* sehari setelah pemuatan, Rabu pekan silam, segera mencabut tulisan itu dan menyatakan tak pernah ada. Begitu pula Linus meminta maaf atas keteledoran penulisan esai itu. Sementara Emha Ainun Nadjib mengirim siaran pers ke berbagai media cetak yang menyebutkan, Sitok Srengenge tak bermaksud melecehkan agama. "Untuk mengatakan seseorang memelesetkan agama atau tidak, harus dilihat dari berbagai sisi.

Sepanjang ucapan itu bukan untuk mengubah Alquran, ia tak bisa disebut melecehkan," tulisnya. "Kalau mau mengacau Islam, saya kira ia tidak cukup bodoh melakukannya dengan cara itu," ujarnya lagi. Untuk itu Cak Nun mengajak umat Islam bersikap *tabbayun*, mencari kejelasan dulu sebelum menghujat. Agaknya, seniman juga harus lebih berhati-hati.

Heroe Poerwadi (Yogyakarta)

KABAR

Brigjen TNI Tengku Rizal Nurdin menggantikan Brigjen TNI H.S. Mokoginta sebagai komandan Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat. KSAD, Jenderal TNI R. Hartono, bertindak sebagai komandan upacara di Markas Secapa, Bandung, Jumat pekan lalu.

Brigjen TNI Rizal Nurdin sebelumnya menjabat Paban III Aspers di Mabes TNI AD, sedangkan Brigjen TNI Rachmat H.S. Mokoginta lulusan Akademi Militer tahun 1965 selanjutnya menjabat Kepala Staf Kodam III Siliwangi. Rizal Nurdin, kelahiran Bukit Tinggi 21 Februari 1948, pernah mengenyam pendidikan di Suslapa Ford Benning, Amerika Serikat tahun 1980. Ia juga mengikuti pendidikan Ranger dan Airbond di sana. Ia sebelumnya menjabat kepala perwakilan UNTAG di Kamboja.

REPRO: PEMBARUAN
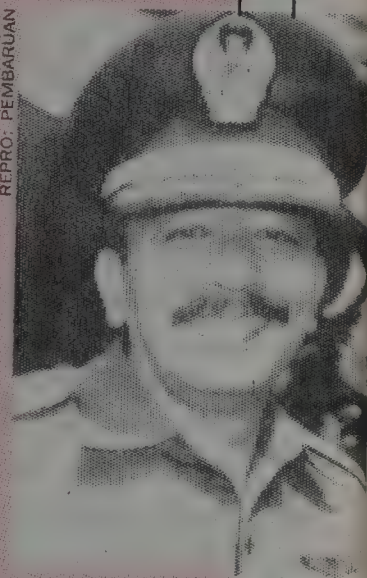
Tengku Rizal Nurdin

Mohammad Said, (89 tahun), tokoh pers nasional, meninggal dunia Rabu pekan lalu pukul 10.30 di RS Permata Bunda, Medan, setelah dirawat selama sepekan. Muhammad Said bersama istrinya, Hajjah Ani Idroes, mendirikan harian *Waspada* Medan 11 Januari 1947. Namun Said sejak sepuluh tahun terakhir sudah tidak aktif lagi memimpin surat kabarnya. Salah satu dari 12 putranya adalah Tribuana Said MDS, Ketua Hubungan Luar Negeri PWI Pusat.

Mohammad Said adalah satu-satunya wartawan Republikein yang pada Agustus tahun 1949 ditunjuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia (NRI) dari Yogya untuk turut ke Nederland meninjau Konferensi Meja Bundar. Dan pada awal 1950 ia memimpin Kongres Rakyat se-Sumatera Timur menuntut pembubaran negara boneka Belanda, Negara Soematera Timoer (NST). ■

YUL ADRIANSYAH

PALAPA C: Segmen pasarnya jelas.

MENANGGUK UNTUNG DI JASA SATELIT

Bisnis satelit menjadi incaran pengusaha Indonesia. Prospeknya dianggap cerah karena segmen pasarnya jelas.

Entah dari mana ilham itu datang, tiba-tiba satelit sudah menjadi komoditi bisnis menggiurkan. Tak pelak, para pengusahapun seolah berebut lahan yang tergolong baru di Indonesia itu. Dimulai dari PT Satelindo yang mengambil alih pengelolaan Palapa C dari PT Telkom, disusul kelompok Bimantara dan kawan-kawan yang berniat meluncurkan satelit Indostar.

Kini dua pengusaha -- Ibrahim Risjad dan Siti Hediati Prabowo -- tengah bersiap masuk ke bisnis satelit ini. Ibrahim tengah berunding untuk mengambil bagian dalam kepemilikan satelit Globalstar yang berada pada posisi *low earth orbit* (LEO). Sedangkan Titiek -- begitu Siti Hediati biasa dipanggil -- lewat PT Maharani pun tengah mengambil ancang-ancang serupa. Kabarnya, kedua pengusaha itu bakal meluncurkan satelitnya pada tahun 1998.

Merebaknya bisnis satelit ini memunculkan pro dan kontra. Yang setuju melihat bahwa fenomena semacam itu tak bisa dielakkan. Pasalnya, negara lain pun melakukan hal serupa. Bahkan, seperti kata Pieter F. Gontha beberapa waktu lalu, "Kalau tidak dimulai sekarang, kita hanya akan jadi penerima saja, dan yang beroleh keuntungan adalah negara lain."

Kekhawatiran Pieter memang wajar. Pasalnya, beberapa negara di kawasan Asia amat gencar menggarap bisnis satelit. Hong Kong, misalnya, terus merambah bisnis satelit ini, khususnya yang digunakan bagi jasa radio dan televisi, yang wilayah cakupannya mencapai Indonesia. Bahkan, pada dua tahun terakhir, Singapura pun menjalin kerja sama dengan Hong Kong. Maklum, Singapura adalah sebuah negara kecil sehingga tidak efisien bila mereka memiliki satelit sendiri.

Sebaliknya, yang kontra melihat, geger bisnis satelit ini lebih merupakan mode saja. Ini berkaitan dengan ketiadaan kemampuan di dalam negeri yang bisa mengoperasikan bisnis ini. Dengan demikian, pihak yang paling banyak diuntungkan oleh bisnis ini tetap saja negara luar, yang notabene menjadi penguasa teknologi.

Sepintas, asumsi demikian ada benarnya. Sebab, pengusaha yang ramai-ramai menggarap satelit ini pada akhirnya akan kian menggelembungkan perusahaan peluncuran, semacam Arianne asal Perancis. Tapi, bila ditelaah, bisnis ini pun memungkinkan terjadinya alih pengetahuan. Buktinya? Masuknya Deutsche Telecom jadi pemegang saham Satelindo. Salah satu raksasa telekomunikasi dunia asal Jerman itu membawa angin segar, sehingga pengusaha Indonesia bisa belajar, baik dalam pengembangan jaringan usaha maupun pengelolaan satelitnya.

Selain itu, beberapa industri pendukung pun kian bergairah. Ambil misal proyek Indostar yang pada tahap berikutnya akan memunculkan televisi generasi baru -- yang bisa menangkap siaran luar tanpa parabola -- seperti yang akan diproduksi oleh Amcol, pemegang lisensi Sony.

Sebenarnya, bila ditelaah, geger di bisnis satelit ini bermula dari kebijakan pemerintah yang membuka lahan telekomunikasi bagi swasta. Yakni, digulirkannya UU Nomor 3 Tahun 1979 yang kemudian ditegaskan dalam PP Nomor 8 Tahun 1993 -- yang merupakan revisi atas PP Nomor 24 Tahun 1991 -- yang mengatur ihwal penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Yang jelas, kebijakan itu memungkinkan lahirnya kerja sama antara pemerintah dengan swasta. Kerja sama tersebut bisa dilakukan lewat tiga cara: patungan, kerja sama operasi, dan kerja sama manajemen. Hanya saja, tak ada penjelasan terperinci ihwal persentase kepemilikan pemerintah dalam setiap kerja sama tersebut.

Sungguhpun demikian, bila dipilah, semua satelit yang hendak dijamah para pengusaha Indonesia itu penggunaannya lebih banyak di tiga lahan: televisi, telefon, dan faksimili. Wajar memang karena ketiga sektor itu bertalian erat dengan dunia usaha. Jadi, segmen pasarnya jelas. Selain itu, persaingan pun relatif kecil, karena setiap perusahaan biasanya mengambil mitra kerja dari luar negeri.

Sulaeman Sakib/Leny Amril

JERMAN-INDONESIA

Makin Meriah Setelah Demo

Ada kekhawatiran, gara-gara demo, hubungan ekonomi Indonesia-Jerman bakal terganggu.

AFP/IWAN SULWAN

PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA-JERMAN (1990-MEI 1994)

1.509.216 · 1.761.895 · 1.994.013 · 1.897.067 · 817.199
917.174 · 1.191.134 · 1.394.091 · 1.609.531 · 725.851
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · Mei 1994
IMPOR DARI JERMAN
EKSPOR KE JERMAN
dalam dollar AS

Bagaimana masa depan perdagangan Jerman-Indonesia? Pertanyaan itu terlontar menyusul demo di Dresden beberapa waktu lalu. Ringkasnya, ada kekhawatiran, ulah LSM itu akan mengimbas pada tatanan ekonomi, seperti kemungkinan menyusutnya arus investasi atau perdagangan antarkedua negara.

Namun, dugaan semacam itu ditampik Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Sanyoto Sastrowardoyo. "Sama sekali tak ada pengaruh antara demo dan arus investasi Jerman ke Indonesia," ujarnya. Memang, pada pekan raya di Hannover, misalnya, 12 kontrak kerja sama berhasil dilakukan antara pengusaha kedua negara, dari proyek pembangunan semen hingga industri tekstil.

Hal senada juga dilontarkan Dubes Jerman di Indonesia, Heimrich Seeman. Katanya, saat ini, "Ada 50 pengusaha asal Jerman berniat menanamkan modalnya sekitar 2 miliar mark Jerman (DM) ke Indonesia." Ini menunjukkan makin besarnya minat dunia usaha Jerman untuk menjalin kerja sama dengan kawasan Asia. Meskipun demikian, baik Sanyoto maupun Seeman mengakui, angka investasi Jerman ke Indonesia masih tergolong kecil ketimbang negara di kawasan Eropa lainnya.

Pada tahun 1990, total ekspor Indonesia ke Jerman hanya mencapai US$ 917,2 juta, Tahun berikutnya, naik jadi US$ 1,2 miliar. Kemudian, naik lagi jadi US$ 1,3 miliar. Puncaknya, pada 1993, mencapai US$ 1,6 miliar. Sedangkan pada tahun lalu menurun menjadi sekitar US$ 1,5 miliar.

Sementara itu, pada periode yang sama, arus impor dari Jerman pun mencatat pertumbuhan. Pada tahun 1990, total nilai impor Jerman baru mencapai US$ 1,5 miliar. Tahun berikutnya, naik menjadi US$ 1,8 miliar. Tahun 1992, naik lagi menjadi US$ 2 miliar. Tapi, setahun kemudian agak turun menjadi US$ 1,9 miliar. Dan, pada tahun lalu, anjlok menjadi US$ 817 juta.

Data itu menunjukkan, betapa Indonesia makin tidak populer bagi produk-produk Jerman. Begitu juga sebaliknya, pengusaha Indonesia lebih memilih pasar negara lain ketimbang Jerman.

Tapi, sebenarnya, kelesuan yang me-
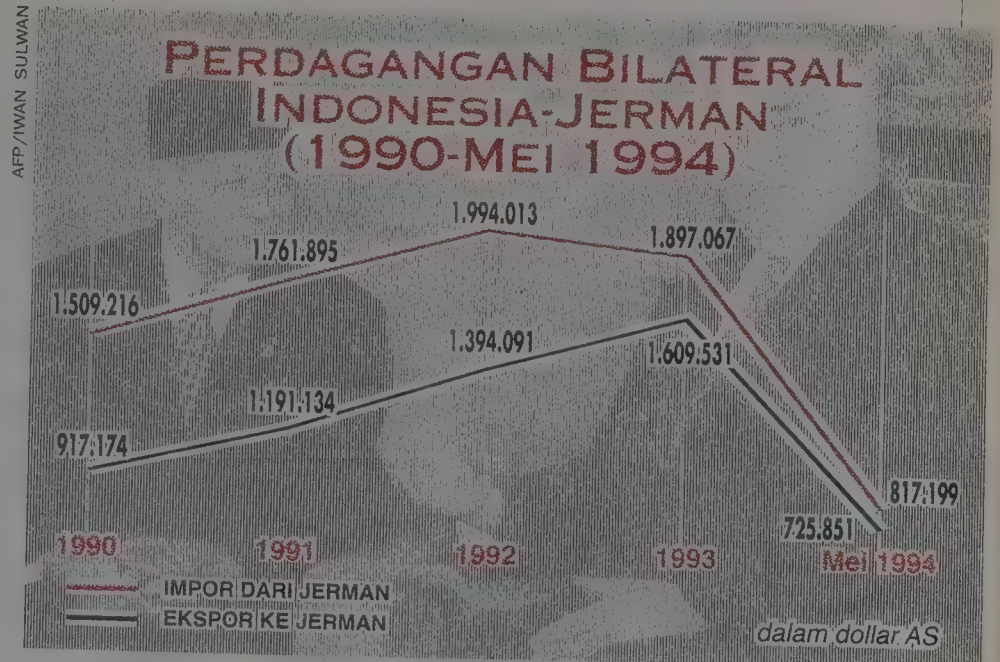
Kami Sudah Saling Memahami

BERIKUT penuturan Dubes Jerman di Indonesia, Heimrich Seeman, kepada Diyan Srikandini, mulai dari soal demo hingga arus investasi Jerman ke Indonesia.

Apakah demo di Jerman akan mempengaruhi arus investasi ke Indonesia?

Saya kira, tidak.

Alasannya?

Hubungan Indonesia-Jerman sudah sangat erat, dan telah terjalin selama 50 tahun sehingga kami sudah saling mengerti dan memahami. Perlu diketahui, banyak juga surat kabar Jerman yang meyakini, demo di Dresden tidak akan mempengaruhi sikap para politikus ataupun pengusaha Jerman kepada Indonesia.

Strategi investasi Jerman ke kawasan Asia?

Kanselir Helmut Kohl telah membuat kebijakan Jerman di Asia pada abad ke-21 ini. Intinya, Asia akan menjadi pemimpin politik dan ekonomi dunia, dan Indonesia akan menjadi salah satu pemain
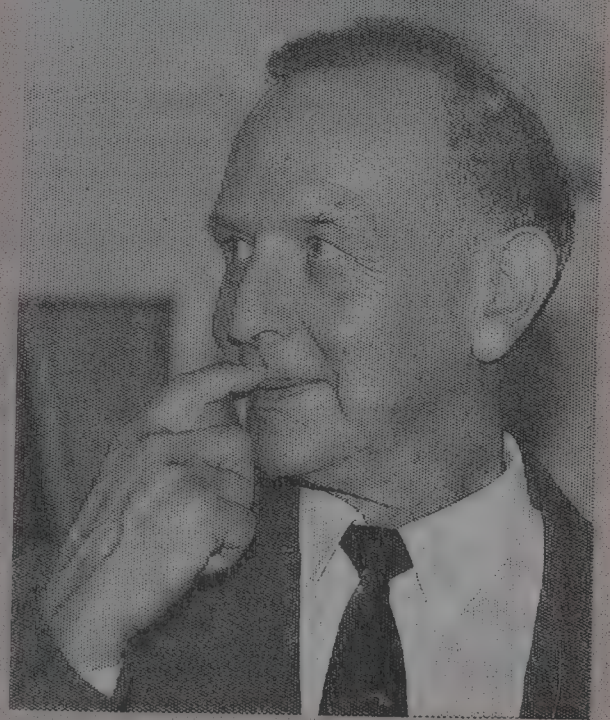
Heimrich Seeman

warnai perdagangan kedua negara pada tiga tahun terakhir lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Jerman, misalnya, ketika itu masih berkutat dengan resesi ekonomi yang melilitnya. Belum lagi persoalan pengangguran yang terus menanjak setelah eks Jerman Timur bergabung. Pada saat yang sama, Indonesia pun masih diguncang oleh persoalan iklim usaha yang masih kurang menguntungkan. Misalnya, dua paket kebijakan "Gebrakan Sumarlin" membuat dunia usaha melempem.

Ada dua alasannya. Pertama, alokasi investasi Jerman selama ini lebih banyak ke Jepang dan AS. Tapi, dengan tampilnya kawasan Asia Pasifik sebagai salah satu lokomotif ekonomi dunia, mau tak mau, Jerman pun harus berpaling ke kawasan ini, dan salah satunya Indonesia.

Selain itu, kecilnya investasi Jerman ke Asia pun disebabkan faktor internal. Yakni, masih sibuknya pemerintah Jerman membangun kawasan timur (eks Jerman Timur) yang dulu menjadi seterunya. "Sejak 1990, setiap tahunnya kami mengalokasi dana 130 miliar DM untuk membangun Jerman Timur. Sedangkan investasinya pun kebanyakan ke negeri perbatasan Jerman Timur, yang kini sudah bergabung ke uni-Eropa," kata Seeman.

Sulaeman Sakib/Diyan Srikandini

utama di wilayah itu. Karenanya, Jerman memutuskan untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya.

Tahun-tahun stagnasi sudah berlalu. Kini, sekitar 50 investor Jerman berniat membenamkan dana sebesar 2 miliar DM ke Indonesia. Bahkan, angka itu bakal meningkat lagi.

Bidang yang paling diminati investor asal Jerman?

Yang paling diminati adalah sektor kimia dan farmasi, mesin, serta baja. Selain itu, telekomunikasi, pertambangan, pembangunan jalan, transportasi, dan listrik pun mulai menunjukkan kenaikan. Kemudian, kami pun berharap, industri kecil dan menengah antarkedua negara bisa bekerja sama. ■

PASAR MODAL

Pedagang dari Seberang

Ada 25 perusahaan Indonesia yang layak masuk bursa saham AS. Apa untungnya?

Persaingan antarbursa bukan hanya terjadi di dalam negeri. Pun antarnegara. Tepatnya, mereka berebut menjaring perusahaan yang berniat mencatatkan sebagian sahamnya di bursa mancanegara. Dan, Asia Pasifik menjadi kawasan yang banyak dilirik. "Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sangat mengesankan," ujar President & Executive Vice Chairman New York Stock Exchange (NYSE), Richard A Grasso, sesaat setelah mengunjungi Bursa Efek Jakarta.

Iklim usaha Indonesia pun dinilainya amat kondusif. Itu tampak dari pelbagai deregulasi yang digulirkan. Di mata Grasso, tak kurang dari 25 perusahaan yang layak mencatatkan sahamnya di NYSE. Bahkan, chairman US Securities & Exchange Commission, Arthur Levitt, berniat membantu kelancaran perusahaan Indonesia yang berniat menyusul PT Indosat. "Bila ada perusahaan Indonesia yang kesulitan masuk ke NYSE, ataupun sesudah *listing*, kami bersedia membantu," ujarnya.

Selain Indonesia, kedua pejabat tinggi *Wall Street* itu juga mengunjungi tiga negara Asia Tenggara lain: Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tujuannya, ya itu tadi, menjaring perusahaan potensial untuk masuk NYSE. Ringkasnya, Grasso dan Levitt berkeliling menjajakan "dagangannya". "Kami bertekad untuk mempertahankan NYSE sebagai bursa nomor satu di dunia," kata Grasso.

Tekad Grasso dan Levitt, memang wajar. Pasalnya, selain Wall Street, ada dua bursa yang juga menjadi incaran para pemodal, yakni Tokyo dan London. "Benar, kedua bursa itu tengah menanjak. Karenanya, bagi pengusaha, akan lebih baik untuk mencatatkan sahamnya di beberapa bursa," ujar Grasso.

Pencatatan saham di NYSE, punya dua keuntungan. Pertama, perusahaan niscaya dapat menjual sahamnya dalam jumlah besar sekalipun. Pasalnya, pemodal lebih berminat untuk memainkan dananya di bursa yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Kedua, pamor serta jaringan perusahaan pun akan kian meningkat, seiring dengan pengenalan publik.

Sepanjang tahun lalu, 52 perusahaan dari luar AS -- berasal dari enam negara -- sudah masuk ke NYSE, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 204 perusahaan. Pencatatan saham tahun lalu, pertama kali dilakukan Banco Ganadera dari Kolombia, Nokia Corp. dari Finlandia, Indosat dari Indonesia, Pohang Iron & Steel dari dan Korea Electric Power dari Korea Selatan, Banco Wiese dari Peru, serta China Yuchai Internationa dari Singapura.

ERWIN HADI

GRASSO DAN LEVITT: Menjaring perusahaan Asia.

Di sisi lain, Grasso dan Levitt pun memuji arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan pasar modal. "Kami tahu, pemerintah Indonesia tengah menggodok UU Pasar Modal. Kami juga sudah melihat ihwal perangkat teknologi yang bakal digunakan di lantai bursa yang baru. Dan, semua itu berada pada rel yang tepat," paparnya.

Sulaeman Sakib

PROFIL USAHA

Dari Perum ke Persero

Pegadaian kian tumbuh dengan subur. Bagaimana dengan kinerjanya?

DOK. SINAR

LABA BERSIH PERUM PEGADAIAN 1991-1993
(dalam juta rupiah)

Tahun	Laba bersih
1991	11.004,96
1992	4.085,92
1993	2.967,21
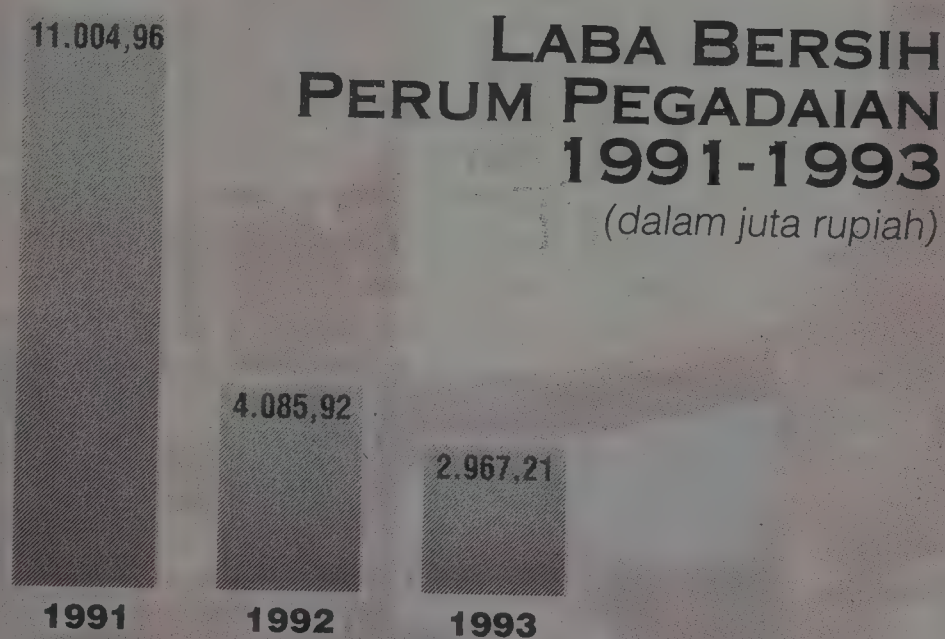
Sejak berdirinya tanggal 1 April 1901 di Kota Sukabumi hingga berusia 94 tahun, pegadaian telah mengukir prestasi yang gemilang. Melangkah dari sebuah jawatan, berubah menjadi perusahaan negara (1961), lalu menjadi perusahaan jawatan (1969), terakhir menjadi perusahaan umum melalui PP Nomor 10 Tahun 1990. Tugas perusahaan itu sangat mulia, yakni menjembatani kebutuhan masyarakat kecil akan dana dengan memberi kredit melalui hukum gadai. Tujuannya, agar masyarakat tidak terjerat dalam praktik riba, lintah darat, ijon, dan pelepasan uang lainnya.

Namun, yang mencuat kemudian adalah perubahan statusnya tersebut. Bahkan, perusahaan itu akan dijadikan persero. "Masalah penggantian status dari perusahaan umum (perum) ke persero ini sebenarnya sudah lama kami pikirkan. Ini merupakan suatu langkah estafet yang sama dengan BUMN lainnya," kata Direktur Utama Perum Pegadaian, Sjamsir Kadir. Semua mengacu pada kebijakan pemerintah dengan maksud agar perusahaan-perusahaan negara mudah dikelola. Lebih mandiri, begitu. Di samping itu, perubahan status itu memperingan masalah pembiayaan. Dengan status perum, misalnya, dana yang tadinya bersumber dari pemerintah, kini bisa didapatkan dari bank dan lembaga keuangan lain.

Dengan status perum ini, kredit yang sudah tersalurkan kepada masyarakat terus meningkat. Pada tahun 1994 saja, sudah tersalurkan lebih dari Rp 1 triliun. Padahal, lima tahun lalu hanya sekitar Rp 500 miliar. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan, pengembangan, dan pendanaannnya sudah lebih baik lagi.

"Karena itulah, saya beranggapan sudah waktunya Perum Pegadaian ini diubah menjadi persero," tutur Sjamsir, lulusan UGM Yogyakarta tahun 1968. Menurut dia, Perum Pegadaian setidaknya siap untuk memperoleh status persero. Alasannya, dengan status perum seperti saat sekarang ini, ada beberapa kendala esensial yang terkandung dalam UU Nomor 19 Tahun 1960 dan dimuat dalam PP 10 Tahun 1990.

Di dalam UU dinyatakan bahwa laba perusahaan sudah ditentukan, yakni 50% dalam bentuk deviden (DPS) di setor ke negara. Sebanyak 20% untuk dana sosial, jasa produksi, dan dana pensiun buat pegawai. Walhasil, dalam perusahaan hanya tinggal 25%. Itu namanya cadangan umum dan cadangan tujuan. Dengan demikian, karena dana cadangan sangat kecil, laba tidak dapat ditahan lebih banyak lagi. Padahal, dana intern sedang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan ini dalam bentuk ekuiti pemerintah, yaitu berupa laba ditahan.

Kalau bentuk persero, semua itu dapat diatur dalam rapat pemegang saham. Karena itulah, tujuan utama peralihan status menjadi persero adalah karena keterbatasan dalam pembagian laba. "Ini semua memang sifatnya hanya usulan. Tetapi, saya berharap, izin perubahan status itu segera keluar," kata Sjamsir yakin. Sebab, pengalihan status secara mikro akan menjadikan perusahaan cepat berkembang.

Perkembangan usaha sejak awal peralihan dari perusahaan jawatan ke perum dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup berarti, karena di samping kecepatan cara memperoleh kredit, juga bunganya jauh lebih murah. Kredit yang disalurkan umumnya merupakan kredit skala kecil dengan jangka waktu pendek, minimum kredit Rp 5.000 dan maksimum Rp 20 juta untuk setiap barang jaminan.

Sedangkan rata-rata omzet pinjaman mencapai sebesar 19,30%. Dari rata-rata kenaikan omzet itu, yang dilunasi sekitar 95,48%, dengan persentase lelang secara nasional sebesar 1,26%.

Keuntungan yang diperoleh tahun 1994 sebelum pajak adalah Rp 17 miliar, padahal tahun 1993 hanya Rp 6,3 miliar. Dan diproyeksikan tahun 1995 ini bisa meraih laba Rp 20 miliar. Dari sisi bisnis dan syarat administrasi, mestinya tahun 1996 nanti, setelah menjadi persero, Pegadaian akan melangkah ke lantai bursa.

Nurhanafiansyah/Hendy Susanto

IMPOR KERTAS

Tarik Ulur Bea Impor

Penetapan bea impor kertas masih belum pasti. Bahkan, ada yang mengusulkan bebas bea.

Giliran Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) protes. Ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menurunkan bea masuk impor kertas hingga di bawah sepuluh persen. Di mata asosiasi, bila kebijakan itu digulirkan, niscaya industri kertas domestik bakal rontok. Untuk itu, kata Direktur Eksekutif APKI, Kahar Haryopuspito, "Bea masuk yang wajar 10%-15%."

Protes ini, dari satu sisi, agak mengherankan. Sebab, industri kertas nasional sudah mendapat proteksi pemerintah selama 25 tahun. Apalagi, harga kertas impor pun relatif sudah setara dengan produk nasional. Jadi, mengapa masih takut bersaing.

Namun, ihwal masih perlunya pengenaan bea impor terhadap kertas impor pun disuarakan oleh produsen kertas dalam negeri. Mereka mengakui, harga kertas impor sudah sama dengan produk lokal. Hanya saja, bea masuk masih dibutuhkan demi menjaga terjadinya *dumping*. Apalagi, sebagian bahan baku kertas masih sangat bergantung pada impor.

Dan, akibat kenaikan bahan baku itulah yang menyebabkan kenaikan harga kertas koran. Ringkasnya, kenaikan harga kertas lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi, bukan karena ulah produsen, seperti yang ditudingkan oleh sebagian kalangan.

Untuk mengurangi ketergantungan itu, serta meningkatkan daya saing kertas lokal, asosiasi menjalin kerja sama dengan pihak Inhutani, yakni dalam hal pengembangan tanaman pinus. Soalnya, negara di belahan Skandinavia, kabarnya, menggunakan pinus sebagai bahan baku kertas, sehingga harganya bisa ditekan.

Seperti diketahui, sejak 1 April 1995, harga kertas koran menjadi Rp 1.700 per kilogram, atau terjadi kenaikan sebesar 18,3%. Akibatnya, muncul kekhawatiran, beberapa media cetak kelas bawah akan kelimpungan karena kenaikan itu diperkirakan akan menurunkan tiras. Selain itu, buku pelajaran dan bahan bacaan lainnya juga diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Menanggapi kondisi demikian, tak heran bila Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) malah mengusulkan agar bea impor kertas dihapuskan sama sekali. Pasalnya, kertas tergolong komoditas strategis karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi, dengan dibebaskannya keran impor, maka akan terjadi persaingan di pasar, yang pada akhirnya masyarakat yang akan diuntungkan.

PRODUKSI, IMPOR DAN KONSUMSI KERTAS
(dalam ton)

	1990	1991	1992	1993	1994
PRODUKSI	1.438.100	1.749.000	2.262.800	2.572.100	3.023.500
IMPOR	123.600	114.900	144.600	111.400	171.300
EKSPOR	190.300	384.800	533.000	591.800	826.200
KONSUMSI	1.371.400	1.479.100	1.844.400	2.091.700	2.368.600

SUMBER: APKI, 25 APRIL 1995

INDUSTRI PERCETAKAN: Yang kecil terancam bangkrut.

Pihak GINSI tidak yakin industri kertas domestik bakal gulung tikar bila bea impor dihapuskan. Alasannya, biaya produksi di Indonesia lebih murah ketimbang di negara pengimpor. "Tanah di sini lebih murah, begitu juga listrik dan upah buruh," ujar ketua umum GINSI, Amirudin Saud.

Entah putusan apa yang bakal diambil pemerintah: meniadakan bea masuk atau tetap memberi perlindungan kepada industri kertas lokal. Yang jelas, setiap kebijakan akan mempengaruhi masyarakat.

Sulaeman Sakib

KANINDOTEX

Tinggal Soal Bunga

Jalan Bambang Trihatmodjo dan kawan-kawan mengambil alih PT Kanindotex kian lempeng.

Pengambialihan Kanindotex mulai memasuki babak akhir. Dan konsorsium pengusaha yang tergabung dalam Asia Pacific Century Corp. bakal tampil sebagai pemenang. Ini berkaitan dengan persetujuan kedua bank kreditor -- BBD dan Bapindo -- ihwal pelunasan kredit investasi sebesar Rp 420 miliar: Rp 273 miliar dari BBD dan Rp 147 miliar dari Bapindo. Dana pelunasan itu diperoleh konsorsium dari sumber keuangan di luar negeri. Tepatnya, sebesar US$ 200 juta.

YUL ADRIANSYAH

Kabarnya, dengan adanya kesepakatan itu, penyelesaian kasus yang melilit perusahaan yang dulunya milik Robby Tjahjadi itu sudah mencapai titik terang. Para pejabat pemerintah terkait, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, juga sudah memberikan lampu hijau. Bahkan, penandatangan perjanjian antara kedua belah pihak, kedua bank dengan konsorsium, akan dilangsungkan pekan ini.

Kesepakatan itu merupakan kemajuan yang sangat berarti, memang. Sebab, mulanya, pihak perbankan menginginkan, dana yang telah dikeluarkan oleh Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) dimasukkan ke dalam pos kredit modal kerja. Tentu saja, usulan itu ditampik oleh pihak konsorsium, yang menghendaki pinjaman itu dianggap sebagai kredit investasi karena bunga-

nya relatif rendah.

Yang masih menjadi ganjalan, kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan ihwal beban bunga atas sisa utang, sebesar Rp 930 miliar, yang harus dilunasi pada kurun delapan tahun setelah persetujuan. Kedua bank pemerintah itu menghendaki, beban bunga yang dipakai rata-rata 12% setiap tahun. Sedangkan konsorsium mengusulkan, untuk empat tahun pertama beban bunganya 2%, dan empat tahun berikutnya sebesar 4%.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, tim konsorsium yang dipimpin Johannes Kotjo aktif berunding. "Hingga saat ini, kedua belah pihak masih terus berunding, karena masih belum mencapai titik temu. Tapi, insya Allah, dalam waktu dekat persoalan itu akan segera selesai," kata anggota konsorsium, yang juga ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Bambang Riyadi Soegomo.

Bila negosiasi itu usai, konsorsium akan menguasai 90% saham perusahaan. Sedangkan 10% sisanya akan diserahkan kepada koperasi, yang pembayarannya akan diambil lewat dividen. Bagaimana dengan GKBI? Pihak konsorsium mensyaratkan, bila GKBI hendak masuk, maka ia harus menyetor dana tunai, selain melepas hak pengelolaannya.

Sikap *ngotot* konsorsium untuk mengambil alih Kanindotex memang wajar. Pasalnya, perusahaan itu memiliki kapasitas produksi terbesar di Asia. Ringkasnya, rontoknya perusahaan milik Robby Tjahjadi ini hanya akibat salah urus. Seperti kata anggota DPR F-PDI, Aberson Marle Sihaloho, "Siapa pun yang mengambil alih Kanindotex harus membawa uang tunai. Kegagalan yang lalu akibat terlampau beratnya pinjaman, alias melanggar *debt equity ratio.*"

Sulaeman Sakib

LISTRIK

Paiton Jadi Juga

Setelah terkatung-katung selama satu tahun, proyek Paiton I beroleh suntikan dana US$ 2,5 miliar.

Setelah menunggu satu tahun, akhirnya, proyek Paiton I mendapat dukungan finansial sebesar US$ 2,5 miliar dari konsorsium lembaga keuangan internasional. "Ini merupakan bukti kepercayaan masyarakat keuangan dunia, baik terhadap perekonomian nasional maupun swastanisasi infrastruktur," kata Presiden Komisaris PT Paiton I Energy Company, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim layak lega. Pasalnya, sejak penandatanganan kontrak jangka panjang antara Paiton dan PLN pada Februari tahun lalu, proyek ini sempat terkatung-katung dalam hal pendanaannya. Bahkan, hingga peletakan batu pertama pada September 1994, persoalan itu masih belum menemukan penyelesaian. Padahal, pihak perusahaan sudah mengeluarkan dana sebesar US$ 55 juta, untuk pengembangan sarana pendukung. Andai saja Paiton gagal, pemerintah Indonesia yang sudah mencanangkan swastanisasi energi listri sejak lima tahun silam agaknya akan terpukul.

DIYAN SRIKANDINI

PAITON: Bukti kepercayaan dunia.

Betapa tidak, Paiton boleh dibilang salah satu pembangkit-listrik swasta terbesar di dunia. Dengan kekuatan 1,230 megawatt, hasil Paiton sama dengan sepuluh persen dari total energi listrik yang dihasilkan PLN saat ini.

Akhirnya, kerja keras Paiton meyakinkan lembaga keuangan internasional membawa hasil jua. Bank Ekspor Impor Jepang menjamin pinjaman US$ 900 juta, Bank Exim Amerika Serikat menjamin US$ 540 juta, Overseas Private Investment Corp, (Opic) memberi pinjaman langsung sebesar US$ 200 juta unuk konstruksi. Sedangkan delapan bank komersial lain -- Chase Manhattan Bank, Industrial Bank of Japan, Bank of America, Barclays Bank, Credit Lyonnais, Fuji Bank, Sakura Bank, dan Union Bank of Switzerland -- menjamin pinjaman US$ 180 juta. Dengan demikian, total pinjaman yang diperoleh mencapai US$ 1,82 juta, sedangkan sisanya, sebesar US$ 680 juta, berasal dari Paiton Energy yang termasuk ke dalam ekuiti.

Kabarnya, sumber dana yang diincar Paiton adalah Asian Development Bank dan International Finance Corp. Sayangnya, kedua lembaga keuangan itu menolak proposal Paiton karena keduanya lebih tertarik membiayai proyek listrik yang lain, yang melibatkan developer Hong Kong, Gung Wu.

Dalam kunjungannya ke Jakarta, akhir April lalu, Presiden Mission Energy, Ed Muler mengatakan, "Kami yakin, proyek ini akan jadi standar pengembangan industri energi swasta." Akan halnya komposisi pemilikan saham proyek yang tergolong raksasa ini: 15% dimiliki PT Batu Hitam Perkasa. Afiliasi Mitsui & Co. Ltd. punya 32,5%, konglomerat asal Jepang-General Electric Capital Corporation memegang 20%, dan sisanya sebesar 32,5% dipegang Mission Energy.

Dengan pinjaman itu, tampaknya, jadwal operasi Paiton tak bakal berubah: unit pertama diharapkan mulai beroperasi pada 1998 dan yang kedua pada tahun berikutnya. Sedangkan seluruh pengoperasiannya akan dipegang Mission Energy.

Sulaeman Sakib

Rumah Idaman Bernuansa Wisata

Royal Green Garden menawarkan rumah masa depan yang berwawasan lingkungan. Akankah diminati konsumen?

Persaingan para developer dalam menawarkan rumah untuk kalangan menengah-atas kian sengit. Mereka berlomba membangun rumah semegah mungkin dengan menyediakan fasilitas pendukung yang lengkap. Bahkan, untuk menarik minat konsumen, developer juga berani memberikan fasilitas kredit seringan mungkin.

Menarik minat konsumen kelas menengah-atas memang tidak mudah. Kini, tinggal bagaimana developer berupaya memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya. Seperti halnya yang dilakukan Grup Indo Graha, sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung di sektor properti. Kepada konsumen, developer ini menawarkan konsep perumahan masa depan era tahun 2000 yang diberi nama kawasan Royal Green Garden. Kawasan perumahan yang dibangun di wilayah Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Jawa Barat, ini telah disesuaikan dengan tata kota Kodya Tangerang, sehingga relatif kecil terjadi perubahan.

Grup Indo Graha memang ingin menyajikan Royal Green Garden secara eksklusif, sehingga para penghuninya dapat tinggal nyaman. Bahkan, dalam pemilihan arealnya pun dipikirkan dengan matang dan disesuaikan dengan pengembangan di wilayah tersebut. Dan, perhitungan Indo Graha memang tepat. Wilayah Cipondoh tak lama lagi akan dijadikan kawasan wisata. Di daerah itu, memang, terdapat Danau Cipondoh yang memiliki pemandangan elok. "Ini kelebihan yang ditawarkan Royal Green Garden kepada konsumen," ujar staf Indo Graha, Nurdin Paryaman.

Failitas dan sarana rekreasi dan olah raga di Royal Green Garden memang lengkap. Jalur transportasinya pun juga lancar, sehingga bila ingin bepergian ke Pusat Kota Jakarta juga tidak sulit. Sebab, dengan letak kawasan tak jauh dari jalan Tol Jakarta-Serang, para penghuni dapat secara cepat mencapai tujuan. Kemudahan transportasi ini membuat Royal Green Garden punya keunggulan dibanding perumahan yang lain. Tak heran bila sekitar 500 unit rumah berbagai tipe di kawasan itu terjual habis.

Besarnya minat pembeli rumah di Royal Green Garden tidak disia-siakan developernya. Grup Indo Graha melalui anak perusahaannya, PT Cahaya Baru Raya Realty, akan segera membangun lagi 3.000 unit rumah dengan berbagai tipe. Namun, dari tujuh tipe yang dibangun, baru empat tipe yang siap dipasarkan, antara lain tipe rumah yang paling luas yaitu Garavella dengan luas bangunan 264 meter persegi dan luas tanah 317 meter persegi. Sedangkan tipe bangunan terkecil yakni tipe Fair Lady dengan ukuran tanah 96 meter persegi dan luas bangunan 72 meter persegi. Tipe Fair Lady inilah yang banyak diminati konsumen.

Kawasan perumahan yang dibangun masih di wilayah Cipondoh itu akan ditawarkan dengan harga antara Rp 89 juta hingga Rp 362 juta per unit. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%, biaya akta jual beli dan biaya pemecahan sertifikat.

Bagi kalangan menengah-atas, harga yang ditawarkan Indo Graha tentunya tidak menjadi masalah. Bahkan, bila terjadi kenaikan harga lagi -- akibat kenaikan harga semen, tanah maupun bahan bangunan -- para konsumen akan memakluminya. Pendapat ini dibenarkan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI), Enggartiasto Lukita. "Untuk rumah menengah-atas yang dibeli adalah fasilitas dan kedekatannya dengan tempat mereka kerja," ucap Enggar.

DOK. SINAR

TIPE FAIR LADY: Diminati konsumen.

Pendapat Enggar juga dibenarkan oleh para developer. Menurut Harun Hajadi, Direktur PT Citra Development, konsumen rumah menengah-atas membeli rumah untuk ditempati, bukan untuk investasi. Karena itu, kata Harun, meskipun saat ini kenaikan harga rumah menengah-atas dinaikkan tidak akan mempengaruhi minat beli konsumen. Demikian juga dengan perumahan di Royal Green Garden, walaupun harganya nantinya akan naik, minat pembeli diperkirakan tidak akan berkurang. Hanya saja, Indo Graha sebagai developer kelihatannya belum merencanakan untuk menaikkan harga jual rumah di Royal Green Garden itu. Kita tunggu saja.

M. Nuryadi/Hendy Susanto

Lamborghini Ala Jawa

Setiawan Djodi akan membangun pabrik mobil berteknologi Lamborghini di Solo. Hanya untuk kelas atas.

Impian bos kelompok Setdco, Setiawan Djodi, untuk memproduksi mobil Lamborghini *made in Indonesia* tampaknya bakal kesampaian. Djodi --demikian dia biasa dipanggil -- merealisasikan mimpinya itu dengan mendirikan pabrik mobil di Gondangrejo, Solo, Jawa Tengah, bersama bos Humpuss, Tommy Soeharto. Industri otomotif itu nantinya akan memproduksi mobil berteknologi Lamborghini.

Pabrik mobil di bawah payung usaha PT Setdco itu, menurut rencana, mulai dibangun tahun 1997 dengan nilai investasi sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 660 miliar. Diharapkan, pada 1998, pabrik itu akan berproduksi. Menurut Djodi kepada pers dan telah dilansir berbagai media cetak, mobil produksinya akan menggunakan sistem *lane made*, dan akan memanfaatkan potensi kerajinan (*craft*) yang ada di daerah sekitar pabrik. "Dengan *lane made*, mobil produksi PT Setdco punya keunggulan dibanding mobil produksi Amerika ataupun Jepang," ujar keponakan pelukis Basoeki Abdullah itu.

Nama Djodi, dalam dunia otomotif nasional, memang telah lama diidentikan dengan Lamborghini. Ini wajar saja. Sebab, pada 2 November 1993, Djodi bersama Tommy telah membeli Lamborghini SpA (Italia) dengan harga sekitar 100 juta dollar AS dari Chrysler Corp. Melalui Megatech (mayoritas saham dipegang PT Setdco milik Djodi), kedua pengusaha muda kondang itu berhasil menguasai tiga divisi Lamborghini: *Lamborghini Automobili* (pabrik mobil balap mewah di Sant Agata, Italia), *Lamborghini Engineering* (produsen mobil balap Formula I dan kapal, bermarkas di Modena, Italia), dan *Lamborghini USA* (perusahaan yang bergerak di bidang purna jual, dengan kantor pusat di Florida, AS).

Perusahaan Lamborghini berdiri sejak 1963. Tapi, dengan berbagai pertimbangan, pada 1987-1988, perusahaan itu dijual kepada Chrysler secara penuh. Alasan pihak Chrysler kala itu, perusahaan mobil Amerika tengah berusaha mendapatkan rancang bangun otomotif untuk mobil buatan Eropa dalam menghadapi serbuan mobil buatan Jepang. Sejak tahun 1992, produksi Lamborghini kian menyusut. Tahun itu, Hanay diproduksi sebanyak 250 unit. Kini, produksi tak lebih dari jumlah itu. Di Amerika, harga mobil itu sekitar 200.000 dollar AS atau sekitar Rp 440 juta.

Saat membeli industri otomotif Lamborghini, baik Djodi maupun Tommy bersepakat pabriknya tetap di Italia yang akan diserap ke Indonesia adalah teknologi mobil canggih itu. "Kekuatan yang akan dimanfaatkan dari Lamborghini terutama adalah *image*-nya sebagai produsen mobil berkelas," ujar Djodi.

Sampai saat ini, Djodi memang belum mengungkap mobil apa yang akan diproduksinya. Namun, menurut pengusaha yang juga seniman ini, pabriknya akan memproduksi mobil kelas elite seperti Grand Cherokee. Alasannya, kata Djodi, kalau membuat mobil dengan harga murah tidak akan memberikan citra positif bagi Indonesia di mata internasional. Sedangkan merek mobilnya, Djodi belum menentukannya. "Mungkin pakai merek *Java Motor*," ujarnya.

KRUS HARYANTO

Tunky Ariwibowo

YUL ADRIANSYAH

Setiawan Djodi

Meski baru tahap perencanaan, niat Djodi dan Tommy untuk mendirikan pabrik di Solo itu mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, seperti Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) dan pemerintah. "Apa yang direncanakan Setiawan Djodi akan kita dukung," kata Menteri Perindustrian, Tunky Ariwibowo, kepada *SINAR*. Sedangkan masalah perizinan, menurut Tunky, tidak akan menjadi masalah. "Kita akan kasih izinnya," kata Tunky.

Lampu hijau dari pemerintah itu tentunya akan mendorong Djodi dan Tommy untuk mempercepat realisasi pendirian pabriknya. Tapi, bila melihat niat Djodi hanya akan meproduksi mobil kelas menengah atas, impian sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mencoba mobil berteknologi Lamborghini jelas masih taraf impian. Untuk itu, tak ada salahnya bila Djodi dan Tommy juga memproduksi mobil kelas rakyat, sehingga impian masyarakat untuk dapat menikmati kecanggihan mesin Lamborghini dapat kesampaian.

M. Nuryadi/Diyan Srikandini

YANG TERLUPAKAN

Andai ditanya, barang apa yang paling dibenci? Jawabannya pasti *sampah.*

Andai ditanya, pekerjaan apa yang paling teracuhkan tapi berjasa. Jawabannya pasti *tukang sampah.*

Tukang... sampah... tukang... sampah... tukang sampah. Bersatu.

Mereka terlupakan di antara barang-barang terbuang, tidak terjamah aturan-aturan perburuhan.

Menyatu dalam bebauan, tetapi apa peduli?

Tetap mereka tegar memilah untuk merenda kehidupan.

Sadarkah bahwa mereka telah ikut menciutkan masalah pencemaran lingkungan?

Sadarkah bahwa mereka yang memungkinkan daur ulang barang terjadi?

Sadarkah bahwa mereka........?

Jelas, mereka bukan sampah masyarakat.

Tetapi....

Pantaskah kata pahlawan disandangkan kepada mereka?

Tak peduli, tukang pun melenggang untuk mengisi hari-hari.

Foto dan Naskah: Yul Adriansyah

Menikmati Kaiseki Ryori di Restoran Jepang KYO

Masakan Jepang di mana-mana ada. Namun, yang satu ini tak bakal Anda temui di manapun, kecuali di KYO.

Inilah Kaiseki Ryori, adiboga yang di masa lalu dikemas khusus hanya untuk Kaisar dan para bangsawan.

Kelebihannya, ia dikemas dalam satu paket, mulai dari makanan pembuka hingga penutup atau cuci mulut. Keunikannya, ia mencerminkan musim yang ada, yaitu menggunakan sayur-sayuran segar dan buah-buahan yang lagi musim.

Hidangan yang penyiapannya bisa memakan waktu setengah hari ini disajikan dalam potongan dan dekorasi serasi dengan peralatan makan. Warna dan penataan yang cantik menggambarkan musim yang sedang terjadi, seperti musim dingin, musim bunga.

Yang jelas, adiboga tradisi sejak dua puluh abad lalu itu bahan-bahannya didatangkan dari Jepang, diramu dan dimasak koki Jepang, serta diperuntukkan kalangan kelas tinggi, namun dengan harga yang wajar untuk para eksekutif. Kaiseki Ryori memang hanya ada di Restoran KYO.

Garden Plaza, The Landmark Centre
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Jakarta
Telp. 5710171 (Direct), 5710800 ext. 2016, Fax. 710296

京
K Y O
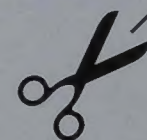
DENGAN MEMBAWA POTONGAN KUPON INI ANDA DAPAT DISCOUNT 20%
Berlaku mulai
10 April 1995–10 Oktober 1995
DINNER ONLY